



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
2023

PENDIDIKAN PANCASILA

**Ida Rohayani
Hatim Gazali
Dwi Astuti Setiawan**

SMA/MA/SMK/MAK KELAS XII

Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
Dilindungi Undang-Undang.

Penafian: Buku ini disiapkan oleh Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku pendidikan yang bermutu, murah, dan merata sesuai dengan amanat dalam UU No. 3 Tahun 2017. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis atau melalui alamat surel buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII

Penulis

Ida Rahayani
Hatim Gazali
Dwi Astuti Setiawan

Penelaah

Kokom Komalasari
Sunarto

Penyelia/Penyelaras

Supriyatno
Agus Moh. Najib
Lenny Puspita Ekawaty
Maharani Prananingrum
Nening Daryati

Kontributor

Nadiroh
Rina Merliana Octora Manik
Sopian

Ilustrator

Nana Maulana

Editor

Christina Tulalessy

Editor Visual

M Rizal Abdi

Desainer

Sona Purwana

Penerbit

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dikeluarkan oleh

Pusat Perbukuan
Kompleks Kemdikbudristek Jalan RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
<https://buku.kemdikbud.go.id>

Cetakan Pertama, 2022

Cetakan Kedua Edisi Revisi, 2023

ISBN 978-623-194-621-8 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-623-194-624-9 (jil.3 PDF)

Isi buku ini menggunakan huruf Noto Serif 10/16 pt, Steve Matteson.
xviii, 238 hlm.: 17,6 x 25 cm.

Kata Pengantar

Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara harus diinternalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui gerakan Merdeka Belajar telah berkomitmen untuk terus mengedepankan Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari penguatan profil Pelajar Pancasila.

Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pembelajaran Pendidikan Pancasila di satuan pendidikan diaplikasikan melalui praktik belajar kewarganegaraan yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, telah disusun buku teks utama Pendidikan Pancasila yang terdiri dari Buku Siswa dan Buku Panduan Guru. Keduanya merupakan salah satu sumber belajar utama untuk digunakan oleh satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka. Buku yang dikembangkan saat ini mengacu pada Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka yang memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan potensi dan minat peserta didik sesuai karakteristiknya masing-masing. Buku teks utama Pendidikan Pancasila disajikan dalam bentuk berbagai aktivitas pembelajaran untuk mencapai kompetensi dalam Capaian Pembelajaran.

Dalam pengembangan buku teks utama Pendidikan Pancasila, Kemendikbudristek berkoordinasi dan bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila. BPIP memiliki kewenangan dalam memastikan muatan pembelajaran Pancasila dalam buku, mencerminkan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan ideologi negara. Kerja sama antara Kemendikbudristek dan BPIP dalam pengembangan buku teks utama Pendidikan Pancasila memungkinkan pengintegrasian pemahaman yang mendalam tentang Pancasila serta praktiknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan bekerja sama dalam proses penyusunan buku teks utama Pendidikan Pancasila. Besar harapan kami agar buku ini dimanfaatkan sebagai pedoman semua satuan pendidikan di seluruh Indonesia dalam upaya melahirkan Pelajar Pancasila. Mari terus menguatkan Pendidikan Pancasila dengan semangat Merdeka Belajar untuk membentuk generasi penerus yang berintegritas, beretika, dan memiliki semangat kebangsaan.

Jakarta, Juli 2023

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim

Kata Pengantar

Salam Pancasila!

Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya merupakan falsafah dasar, pandangan hidup bangsa, dasar negara, ideologi, kekuatan pemersatu bangsa, dan sumber segala hukum negara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan “meja statis” yang menyatukan berbagai keragaman yang ada, sekaligus sebagai “bintang penuntun” (*leitstar*) yang dinamis dengan gerak evolusioner pemikiran manusia. Untuk itu, sudah selayaknya kita, bangsa Indonesia, mengaktualisasikan Pancasila dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Buku *Pendidikan Pancasila* ini merupakan buku teks utama yang digunakan dalam pembelajaran di seluruh satuan pendidikan jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK dan bentuk pendidikan sederajat lainnya. Buku ini hadir dalam rangka memperkaya pemahaman ideologi Pancasila. Penyusunan buku teks utama *Pendidikan Pancasila* ini mengacu pada Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka yang telah diselaraskan dengan Capaian Kompetensi BPIP. Dalam penyusunannya, digunakan buku bahan ajar *Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila* (PPIP) sebagai salah satu sumber rujukan (referensi). Hadirnya buku bahan ajar tersebut berawal dari arahan Presiden RI, Joko Widodo, yang saat itu didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara RI dalam pertemuan terbatas di Istana Negara pada 22 Februari 2021 dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pada kesempatan itu juga, Presiden Joko Widodo berpesan kembali tentang pentingnya menanamkan nilai Pancasila dengan metode yang menyenangkan bagi peserta didik.

Dalam upaya memenuhi harapan Presiden, BPIP bersama Kemendikbudristek melakukan penyusunan bersama buku teks utama *Pendidikan Pancasila* dengan melibatkan tim penulis yang terdiri atas guru, pakar, serta praktisi bidang pendidikan dan ideologi Pancasila. Tim penulis ini yang mendapatkan peran aktif dari Dewan Pengarah BPIP, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah, Dewan Pakar BPIP, dan unsur pimpinan lainnya. Buku ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 untuk menerapkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional.

Penulisan buku teks utama ini didasarkan pada fakta dan sejarah yang autentik. Buku ini diharapkan menjadi penuntun bagaimana memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual sehingga mengembalikan pemahaman yang benar tentang Pancasila. Oleh karena itu, digunakanlah metode pembelajaran Pancasila yang berorientasi pada peserta didik (*student-centered learning*). Metode ini dapat membuat peserta didik lebih aktif terlibat dalam praktik dan pengalaman ber-Pancasila secara nyata yang selaras dengan Kurikulum Merdeka. Penyampaian materi yang ada di dalam buku ini, mendorong agar para peserta didik dapat mengeksplorasi rasa ingin tahu, kreativitas, serta sikap gotong royong dalam meneladani Pancasila.

Buku teks utama *Pendidikan Pancasila* ini menggunakan konsep “Tri Pusat Pendidikan” yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menyentuh seluruh warga sekolah, anggota keluarga di rumah, dan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait di lingkungan masyarakat agar terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Buku ini mengandung pesan bahwa pembinaan ideologi Pancasila, khususnya bagi generasi penerus, sejatinya merupakan tanggung jawab yang harus dipikul bersama, secara bergotong royong, demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pengaktualisasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari memang diyakini mampu mewujudkan negara Indonesia yang lebih baik.

Kepada semua pihak, baik dari BPIP, Kemendikbudristek, dan pihak lainnya yang telah bergotong royong dengan tekun sedari awal menyusun buku teks utama *Pendidikan Pancasila* untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/ MAK dan bentuk pendidikan sederajat lainnya, saya haturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rida dan rahmat-Nya kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, Juni 2023

Kepala,



Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

Prakata

Buku *Pendidikan Pancasila* Kelas XII ini mengajak kamu untuk memaknai Pancasila sebagai kata benda, kata kerja, dan kata sifat sekaligus. Sebagai kata benda, Pancasila telah ditetapkan sebagai ideologi, pandangan hidup, dan dasar negara di mana setiap warga negara berkewajiban untuk meyakini dan mematuhiinya. Sebagai kata kerja, Pancasila dipraktikkan dalam keseharian setiap warga negara. Istilah “ber-Pancasila” dalam buku ini sebagai kata sifat, mewujudkan Pancasila menjadi karakter, sifat, dan watak bangsa Indonesia.

Buku ini tidak hanya berisi materi pembelajaran berupa teks, video, dan gambar, tetapi juga meminta kesanggupan kamu untuk mengikuti beragam aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran akan memandu kamu untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Sistematika penulisan tiap bab dalam buku ini dimulai apersepsi dan asesmen awal, aktivitas pembelajaran yang diakhiri dengan penjelasan konsep materi pembelajaran. Terdapat asesmen formatif di sepanjang proses pembelajaran sebagai ciri dari Merdeka Belajar, dan asesmen sumatif yang berupa uji kompetensi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Tiap bab memiliki keunikan sesuai karakteristik 4 elemen mata pelajaran Pendidikan Pancasila dimana tiap elemen dituliskan sebagai berikut: elemen Pancasila terdapat dalam Bab I dan II, elemen UUD NRI Tahun 1945 pada Bab III dan IV, elemen Bhinneka Tunggal Ika pada Bab V, dan elemen Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Bab VI dan VII. Adapun penggunaannya tidak harus berurutan seperti yang tertulis dalam buku ini, tetapi dapat disesuaikan dengan alur yang telah dituliskan oleh guru.

Buku *Pendidikan Pancasila* Kelas XII ini menyajikan berbagai pengetahuan sederhana, tetapi mendalam. Buku ini berisi konsep-konsep, sejarah, pengetahuan, dan wawasan tentang Pancasila. Buku ini juga mengajakmu untuk secara dialektis mempraktikkan Pancasila dalam keseharian, baik dalam keluarga, masyarakat, berbangsa dan bahkan dalam kehidupan global melalui aktivitas portofolio, investigasi, permainan, serta proyek belajar kewarganegaraan.

Dengan memahami isi buku ini, diharapkan kamu menjadi pribadi yang baik dan sukses di masa kini dan mendatang, yang pada akhirnya berdampak pada kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Hal itu karena nilai Pancasila yang dijiwai oleh warga negara Indonesia merupakan bintang penuntun bagi setiap pribadi bangsa Indonesia menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Jakarta, Mei 2023

Tim Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Kata Pengantar	v
Prakata	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiii
Petunjuk Penggunaan Buku.....	xvii

Bab 1 Ber-Pancasila dalam Keseharian di Masyarakat.....



A. Saya dan Pancasila	3
B. Saya Ber-Pancasila.....	15
C. Laporan Rancangan Portofolio	25
Uji Kompetensi	31

Bab 2 Ber-Pancasila dalam Kehidupan Global



A. Kekuatan dan Peluang Bangsa dan Negara Indonesia.....	36
B. Kelemahan dan Tantangan Bangsa dan Negara Indonesia	47
C. Pancasila sebagai Pemandu.....	62
Uji Kompetensi	65



Bab 3 Kesadaran Warga Negara dalam Menghadapi Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban 69

A. Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara yang Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945	71
B. Menginisiasi Proyek Kampanye Antipelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara .	82
C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban serta Upaya Warga Negara dalam Mencegahnya di Lingkungan Sekitar.....	89
Uji Kompetensi	101



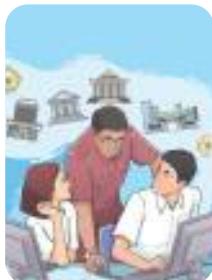
Bab 4 Generasi Solutif Mengatasi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban 109

A. Merancang Gagasan Solutif atas Permasalahan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban	111
B. Warga Negara Muda Merancang Model Rancang, Bangun, dan Menerapkan (Ranumkan).....	123
Uji Kompetensi	133



Bab 5 Praktik Gotong Royong dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia.. 139

A. Kerja Sama dalam Bergotong Royong.....	141
B. Nilai Gotong Royong dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia.....	150
C. Praktik Kegiatan Gotong Royong	155
Uji Kompetensi	160



Bab 6 Menelusur Lembaga Negara 163

- A. Pengertian Lembaga Negara 166
- B. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara 168
- C. Peran Lembaga Negara dalam Berbagai Bidang... 173

Uji Kompetensi 185



Bab 7 Menjadi Pelopor Pemilih Pemula dalam Demokrasi Indonesia 191

- A. Demokrasi 194
- B. Pemilihan Umum..... 199
- C. Pemilih Pemula dalam Demokrasi 205

Uji Kompetensi 211

Glosarium 217

Daftar Pustaka..... 220

Daftar Sumber Gambar..... 225

Indeks..... 229

Profil Pelaku Perbukuan 231

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Nilai-Nilai yang terkandung dalam Sila-Sila Pancasila	8
Tabel 1.2 Aktivitas yang Mencerminkan Nilai-Nilai Pancasila.....	14
Tabel 2.1 Pancasila vs Komunisme dan Kapitalisme	41
Tabel 3.1 Rambu-Rambu Penilaian Tanggapan Teman	72
Tabel 3.2 Eksplorasi Pasal UUD NRI Tahun 1945 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara	76
Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Asesmen Formatif.....	79
Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Karya Kampanye Antipelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban.....	83
Tabel 3.5 Ketentuan Penilaian Produk dan Kinerja.....	88
Tabel 3.6 Pedoman Penskoran Diskusi	91
Tabel 3.7 Kriteria Asesmen Analisis.....	91
Tabel 4.1 Rambu-Rambu Asesmen Karya.....	112
Tabel 4.2 Identifikasi Pelanggaran Hak Warga Negara.....	116
Tabel 4.3 Identifikasi Pengingkaran Kewajiban Warga Negara.....	119
Tabel 4.4 Refleksi Pemahaman Diri dan Situasi yang Dihadapi	122
Tabel 4.5 Rubrik Penilaian Karya Gagasan Antiperundungan.....	126
Tabel 4.6 Rubrik Penilaian Kinerja dan Performa.....	126
Tabel 4.7 Instrumen Penilaian Performa dan Sikap.....	130
Tabel 4.8 Refleksi Pemahaman Diri dan Situasi yang Dihadapi	132
Tabel 5.1 Rambu-Rambu Penilaian Aktivitas 5.1	146
Tabel 5.2 Penilaian Antarteman.....	147
Tabel 5.3 Bentuk Kegiatan Gotong Royong	151
Tabel 5.4 Rambu-Rambu Penilaian Aktivitas Presentasi	152
Tabel 5.5 Rambu-Rambu Penilaian Aktivitas 5.5	156
Tabel 5.6 Rambu-Rambu Penilaian Aktivitas Praktik.....	159
Tabel 6.1 Rambu-Rambu Penilaian Aktivitas Presentasi	167
Tabel 6.3 Rambu-Rambu Penilaian Aktivitas 6.4	174
Tabel 7.1 Rambu-Rambu Penilaian Aktivitas	198
Tabel 7.2 Rambu-Rambu Penilaian Aktivitas Presentasi	202
Tabel 7.3 Validasi Diri	203

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Kegiatan Upacara oleh Siswa	3
Gambar 1.2	Gotong Royong di Sidogede, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.....	5
Gambar 1.3	Jajak Pendapat Pengamalan Pancasila oleh Litbang Kompas	7
Gambar 1.4	Siswa Melakukan Upacara	15
Gambar 1.5	Ikut kegiatan keagamaan bagian dari pengamalan sila ke-1.	16
Gambar 1.6	Siswa SMA peduli lingkungan sebagai pengamalan Pancasila.	17
Gambar 1.7	Siswa SMA al-Hikmah Bumiayu melakukan bersih-bersih lingkungan.....	18
Gambar 1.8	Siswa SMAN1 Sumberpucung melakukan musyawarah, salah satu bentuk pengamalan Pancasila.....	19
Gambar 1.9	Siswa SMAN 1 Ambarawa berbagi takjil. Berbagi kepada sesama wujud pengalaman Pancasila.	20
Gambar 1.10	Contoh Rancangan Portofolio 'Saya Ber-Pancasila'	24
Gambar 1.11	Pelajar lintas agama membatik bersama saat haul Gus Dur	27
Gambar 1.12	Menolong Orang Lain Mendatangkan Kebahagiaan.	27
Gambar 1.13	Siswa SMK Nawa Bhakti Kebumen Melakukan Bakti Sosial ..	28
Gambar 1.14	Stop hoaks, bagian dari pengamalan Pancasila.	28
Gambar 2.1	Analisis SWOT	38
Gambar 2.2	Analisis SWOT: Kekuatan dan Peluang.....	38
Gambar 2.3	Batas Wilayah Laut Indonesia	42
Gambar 2.4	Bonus Demografi Indonesia.....	43
Gambar 2.5	Cermin Kemajemukan Indonesia.....	44
Gambar 2.6	Biodiversitas Terbesar Dunia ada di Indonesia.....	44
Gambar 2.7	Kekuatan Militer Indonesia.....	45
Gambar 2.8	Pertumbuhan Pariwisata Indonesia	46
Gambar 2.9	Analisis SWOT, Kelemahan dan Ancaman.....	48
Gambar 2.9	Indeks Modal Manusia tahun 2020	50
Gambar 2.10	Kondisi Tenaga Kerja Indonesia	50
Gambar 2.11	Data Pembangunan yang Tidak Merata	51

Gambar 2.12	Kerugian Negara Akibat Korupsi.....	53
Gambar 2.13	Data Instansi terlapor terkait Pungutan Liar.....	54
Gambar 2.14	Deretan Gempa Bumi Terdahsyat di Indonesia	55
Gambar 2.15	Bencana di Indonesia Sepanjang Tahun 2022	56
Gambar 2.16	Ilustrasi Individualism	59
Gambar 2.18	Ilustrasi Kapitalisme.....	60
Gambar 2.17	Ilustrasi Kosmopolitanisme	60
Gambar 3.1	Manusia terlahir memiliki akal budi dan rasa kemanusiaan.	74
Gambar 3.2	Identitas Domisili Penduduk	75
Gambar 3.3	Persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya.	77
Gambar 3.4	Siswa SMA berkontribusi menaikkan daya saing melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.	82
Gambar 3.5	Melaksanakan kewajiban dalam menjaga infrastruktur merupakan salah satu bukti mengapresiasi karya bangsa...	84
Gambar 3.6	Amanat Presiden RI-1 Ir. Sukarno untuk melanjutkan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan.	86
Gambar 3.7	Menghormati hak dengan melaksanakan pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya.	87
Gambar 3.8	Alur Pembelajaran ASIK.....	92
Gambar 3.9	Siswa SMA ialah perantara perubahan untuk hak dan kewajiban warga negara.	93
Gambar 3.10	<i>Cyber bullying</i> menyakiti orang lain berulang-ulang secara sengaja untuk melukai.	95
Gambar 3.11	Prinsip kesetaraan dan antidiskriminasi merupakan ciri khas HAM.	97
Gambar 3.12	Hentikan intoleransi di Indonesia.....	99
Gambar 3.13	Ilustrasi Tindakan Persekusi	100
Gambar 4.1	Solidaritas, salah satu cara untuk menghormati hak asasi manusia.....	111
Gambar 4.2	Eksklusi sosial merupakan salah satu tantangan di era kekinian.	114

Gambar 4.3	Presiden Sukarno berpidato saat memberi kursus Pancasila pada 5 Juli 1958.	115
Gambar 4.4	Simbol Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	118
Gambar 4.5	Ilustrasi perjuangan fisik rakyat Indonesia untuk lepas dari penjajahan.	121
Gambar 4.6	Prakata Buku <i>Uraian Pancasila</i> cetakan 2 (1984).....	123
Gambar 4.7	Sidang Terakhir Panitia Lima di Kediaman Muhammad Hatta (1975)	124
Gambar 4.8	Tiap warga negara berhak dan wajib mengupayakan masa depan yang gemilang.....	127
Gambar 4.9	Pelajar SMA dan SMK praktik menyatakan pendapat dengan santun.	128
Gambar 4.10	Prinsip HAM	131
Gambar 4.11	Bangsa Indonesia yang Rukun dan Toleran	132
Gambar 5.1	Ir Sukarno Sedang Berpidato	140
Gambar 5.2	Operasional TPA Terganggu	143
Gambar 5.3	Diagram Penghasil Sampah	144
Gambar 5.4	Infografis Trayek Tol Laut.....	149
Gambar 5.5	Rilis Model dan Properti Bertanda Tangan	153
Gambar 5.6	Mappalete Bola, Sebuah Tradisi Suku Bugis dalam Memindahkan Rumah Panggung	155
Gambar 5.7	Ilustrasi Gotong Royong.....	157
Gambar 5.8	Tangkapan layar dari laman youtube kemebdikbud RI.	161
Gambar 6.1	Istana Bogor	164
Gambar 6.2	Struktur Kelembagaan Republik Indonesia	169
Gambar 6.3	Ilustrasi Sekumpulan Individu Menjalankan Perannya dalam Pembangunan Rumah.....	173
Gambar 6.4	Gedung DPR/MPR	175
Gambar 6.5	Gambar Gedung Bank Indonesia.....	176
Gambar 6.6	Pelayanan BPJS Kesehatan.....	179
Gambar 6.7	Kartu Indonesia Pintar Kuliah.....	179
Gambar 6.8	Gedung BNSP	182
Gambar 6.9	Latihan Komando Pasukan Kopassus TNI	182

Gambar 6.10	Kantor Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	183
Gambar 6.11	Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.....	184
Gambar 6.12	Keterangan Pers Presiden Joko Widodo tentang Perpindahan Ibu Kota.....	190
Gambar 7.1	Gambar Seorang perwira memasukkan surat suaranya di TPS Khusus untuk anggota Angkatan Perang di Balai Prajurit Nusantara.....	193
Gambar 7.2	Lambang Sila ke-4 Pancasila.....	194
Gambar 7.3	Gedung MPR/DPR/DPD RI.....	195
Gambar 7.4	Poster Gunakan Hak Pilihmu.....	198
Gambar 7.5	Poster Ayo Memilih	198
Gambar 7.6	Gedung Komisi Pemilihan Umum.....	199
Gambar 7.7	Menggunakan Hak Suara secara Luber	201
Gambar 7.8	Tingkat Partisipasi Pemilih di 6 Pemilihan Terakhir (2014-2020)	205
Gambar 7.9	Grafik Pemilih pada Tahun 2014-2020.....	206
Gambar 7.10	Tata Cara Memilih di TPS	209



Petunjuk Penggunaan Buku

Ketika mempelajari buku ini, kamu dapat mencermati beragam penyajiannya. Untuk memudahkanmu, cermatilah beberapa bagian dalam buku agar Capaian Pembelajaran tercapai secara optimal. Sekarang, bacalah secara cermat petunjuk penggunaan buku ini.



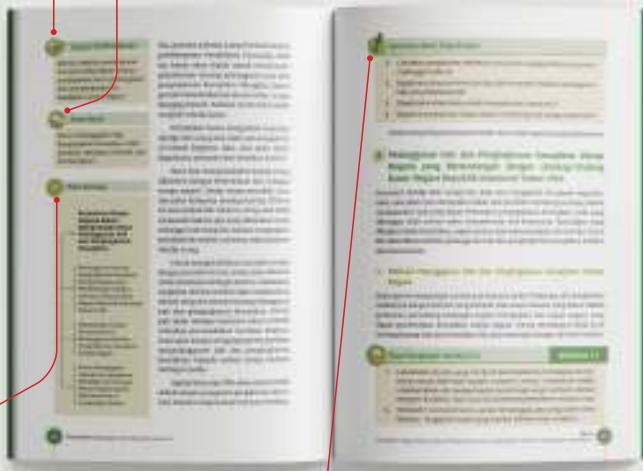
Tujuan Pembelajaran

Terdapat pada awal bab yang menjadi arahan tercapainya kompetensi setelah mempelajari satu bab. Tujuan pembelajaran ini dapat membantu kamu menjadi *guide* perkembangan proses belajar yang akan dihubungkan dengan refleksi pada akhir bab.



Kata Kunci

Kata atau konsep yang merupakan kunci yang dapat dikaitkan dengan konsep lain. Pemahaman terhadap kata atau konsep kunci dapat menolong kamu dalam mengaitkan konsep yang satu dan lainnya selama pembelajaran dalam satu bab.



Peta Konsep

Peta konsep yang terdapat pada awal bab merupakan sebuah gambaran pola alur pembelajaran yang akan kamu pelajari. Peta konsep ini berupa diagram hubungan materi yang terdapat dalam satu bab. Kamu dapat mencermati diagram atau bagan yang ditampilkan untuk mendapatkan gambaran yang luas tentang cakupan materi isi bab.



Asesmen Awal, Siap Belajar

Merupakan rubrik untuk kamu sebagai penilaian awal pembelajaran. Berisikan pertanyaan untuk mengukur pengetahuan kamu tentang cakupan kompetensi dalam satu bab.



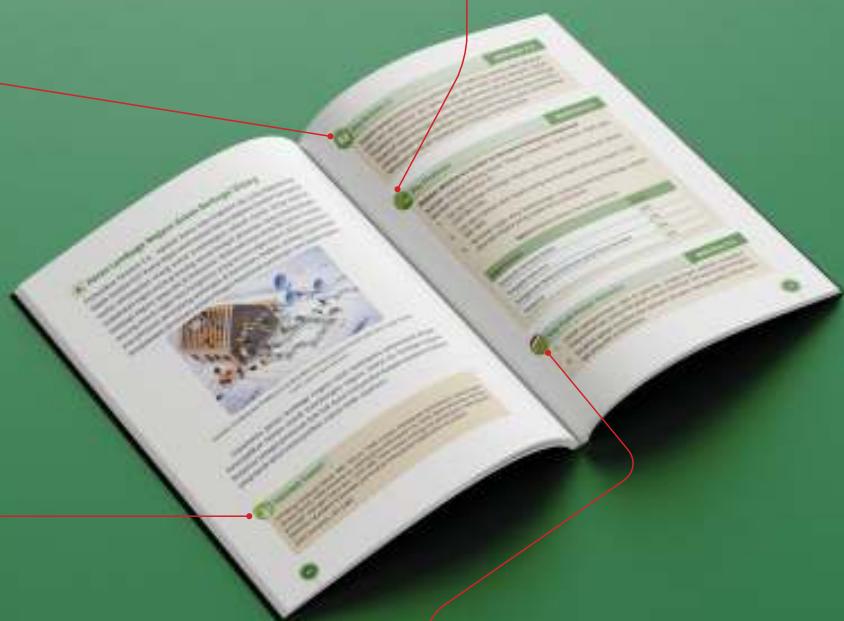
Siap Berlatih

Kamu dapat melakukan uji pemahaman menggunakan rubrik ini sebagai penilaian dalam pembelajaran. Dalam rubrik ini, kamu dapat mengukur sejauh mana pemahaman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan isi materi dalam satu bab.



Siap Mengeksplorasi

Rubrik ini merupakan sebuah kegiatan yang akan kamu lakukan sebagai aktivitas pembelajaran dalam satu bab untuk menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan materi. Bentuk aktivitas pembelajaran dalam rubrik ini seperti berdiskusi, melakukan observasi, memecahkan sebuah isu permasalahan dan melakukan kegiatan mandiri atau secara kelompok.



Tahukah Kamu

Kamu akan mendapatkan berbagai informasi tambahan yang berkaitan dengan hal-hal sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Rubrik ini dapat dijadikan pengayaan sesuai dengan instruksi di dalamnya.



Siap Profil Pelajar Pancasila

Pada rubrik ini, kamu akan diarahkan terkait aktivitas pembelajaran yang mengarah pada penguatan Profil Pelajar Pancasila. Aktivitas yang ada di dalam rubrik ini disesuaikan dengan dimensi dan elemen Profil Pelajar Pancasila sesuai dengan materi yang sedang dipelajari dalam satu bab.



Siap Berkinerja

Rubrik ini berkaitan dengan pembelajaran khusus untuk peserta didik SMK/Kejuruan sebagai sebuah informasi tambahan untuk memperkaya pengetahuan, keterampilan atau sikap.



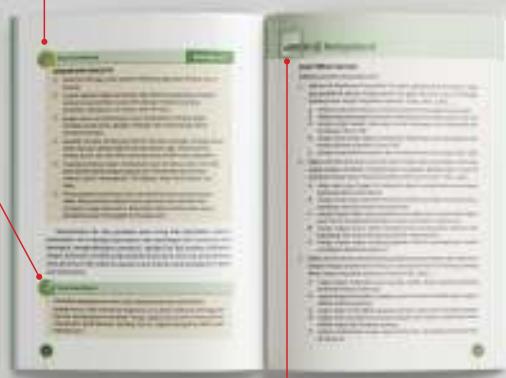
Siap Berefleksi

Pada akhir bab atau subbab, kamu akan diajak memikirkan kembali apa yang sudah dipelajari dan seberapa dalam/tepat pemahaman yang telah dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam satu bab.



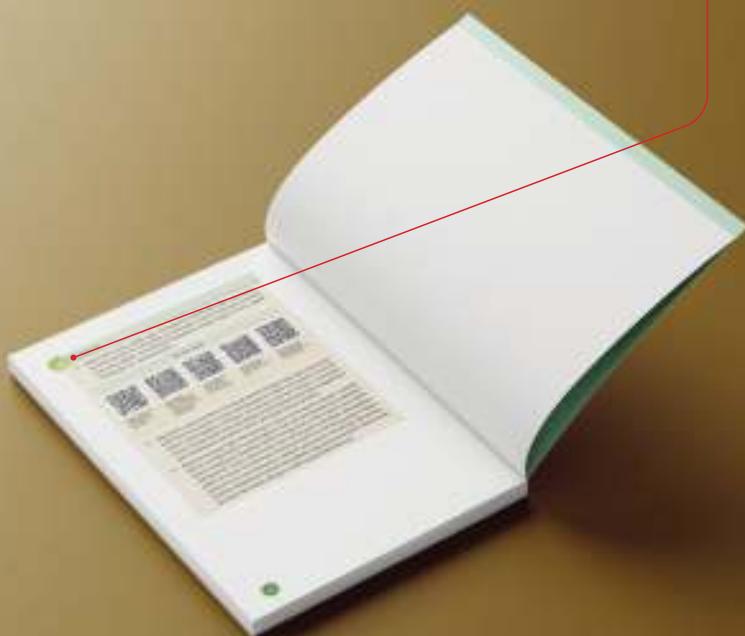
Uji Kompetensi

Merupakan komponen yang terdapat di akhir bab sebagai sarana untuk mengukur apakah kamu telah mencapai tujuan pembelajaran.



Pengayaan

Kegiatan yang dapat dipergunakan untuk memperluas atau memperdalam wawasan, pengetahuan, informasi atau konsep sesuai dengan topik pembahasan yang ada dalam satu bab



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2023

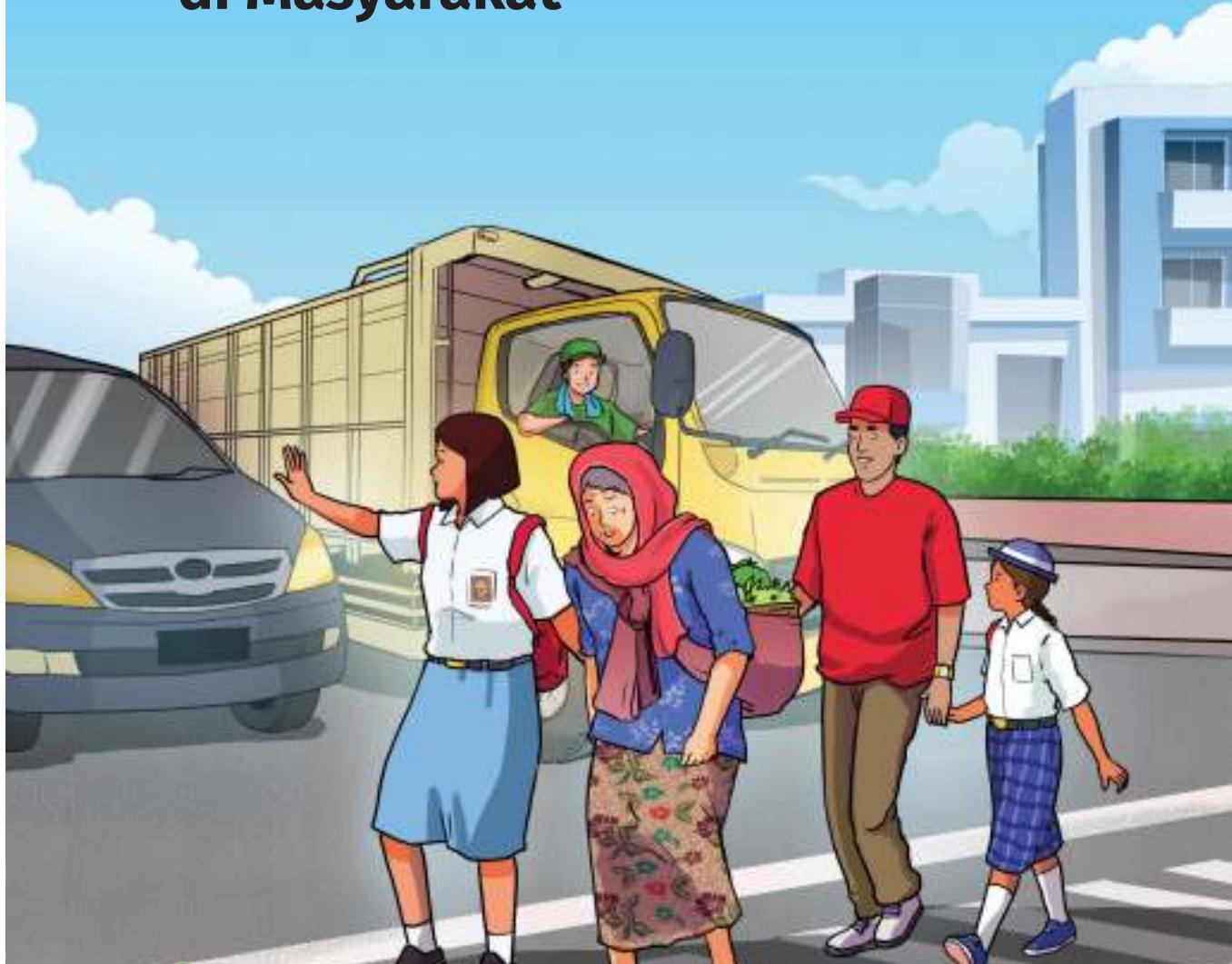
Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII

Penulis: Ida Rohayani, Hatim Gazali, Dwi Astuti Setiawan

ISBN 978-623-194-624-9 (jil.3 PDF)

Bab 1

Ber-Pancasila dalam Keseharian di Masyarakat



Hal baik apakah yang telah kamu lakukan pada pagi ini di rumah/asrama/kos sebelum berangkat ke sekolah/madrasah?



Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini, kamu diharapkan mampu membiasakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai identitas nasional dalam kehidupan bermasyarakat melalui penyusunan portofolio "Saya Ber-Pancasila".



Kata Kunci

Nilai-nilai Pancasila, Praktik Sila ke-1, 2, 3, 4, 5



Peta Konsep



Pancasila bukan sekadar dihafal dan dipahami, tetapi juga harus diperlakukan dalam kehidupan keseharian kamu. Beragam persoalan dan krisis, seperti kekerasan, tawuran, narkoba, intoleransi, *bullying*, dan lain sebagainya terjadi karena minimnya pengamalan nilai-nilai dan ajaran Pancasila dalam kehidupan ber-Pancasila. Pancasila merupakan *Weltanschauung* atau pandangan dunia. Artinya, Pancasila merupakan tata nilai yang berfungsi seperti halnya budaya atau norma yang telah hidup turun-temurun di tengah-tengah masyarakat. Pancasila menjadi pedoman hidup segenap bangsa Indonesia dalam kehidupan keseharian, termasuk kamu. Untuk itu, Pancasila tidak cukup hanya dihafal dan dipahami, melainkan harus diperlakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun dalam konteks yang lebih luas. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari lebih jauh tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian.



Asesmen Awal, Siap Belajar

1. Perilaku dan tindakan baik apa yang telah dilakukan oleh kamu di rumah, perjalanan ke sekolah, dan ketika di sekolah?
2. Perilaku, tindakan, ucapan baik apa yang pernah kamu dapatkan atau terima dari orang lain? Apa yang dirasakan olehmu ketika mendapatkan perilaku, tindakan atau perkataan baik dari orang lain?
3. Mengapa setiap manusia perlu melakukan kebaikan kepada orang lain?



Gambar 1.1 Kegiatan Upacara oleh Siswa

Sumber: Sindonews.com



Siap Mengingat kembali

Pada kelas sebelumnya, kamu telah belajar tentang rumusan dan keterkaitan sila-sila Pancasila serta Pancasila sebagai ideologi terbuka. Di kelas X, kamu juga telah belajar tentang bagaimana ide-ide pendiri bangsa tentang dasar negara dan kedudukan Pancasila, serta memberikan gagasan solutif mengatasi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Coba kamu ingat, bagaimana proses lahirnya Pancasila, bagaimana proses Sukarno menggali 5 nilai/dasar yang kemudian diberi nama Pancasila. Nah, sekarang ini, kita akan memfokuskan pembahasan kita pada bagaimana mempraktikkan nilai-nilai Pancasila sebagai identitas nasional, falsafah, dan sebagai pandangan hidup bangsa.

A. Saya dan Pancasila

Bagian ini membahas tentang “saya” dan “Pancasila” sebagai dua subjek yang berdiri sendiri. Melalui bab ini, kamu akan belajar bahwa nilai-nilai dalam Pancasila berasal dari sifat-sifat budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu terus menjaga Pancasila melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian.

1. Sudahkah Kita Ber-Pancasila?

Untuk mengawali bab ini, baca dan resapilah pernyataan Bapak Proklamator kita, Ir. Sukarno, sebagaimana yang tertulis dalam biografi yang diceritakan Sukarno kepada Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, berikut ini.

"Aku tidak mengatakan, bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan lima butir mutiara yang indah."

(Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia)

Apa yang kamu pikirkan ketika membaca pernyataan Presiden Pertama, Ir. Sukarno di atas? Pernyataan Sukarno ini menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah dipraktikkan oleh nenek moyang kita, telah menjadi tradisi yang turun-temurun. Kemudian, Sukarno dan para pendiri bangsa mengkaji tradisi-tradisi bangsa Indonesia, merumuskannya menjadi lima sila yang disebutnya sebagai Pancasila. Lalu, perilaku dan tradisi seperti apa yang ditemukan oleh mereka?

Sukarno menemukan bahwa bangsa kita, sejak dulu, sudah terbiasa bergotong royong. Untuk berco-cok tanam, misalnya, mereka saling membantu dan bergantian menggarap tanah, mencangkul, menanam benih, mengatur saluran air, memberikan pupuk, memanen. Demikian juga ketika hendak membangun rumah, bangsa kita sejak dulu sudah terbiasa bergotong royong.

Bahkan, kegiatan bergotong royong itu sampai sekarang masih terawat dalam beberapa tradisi. Di Jawa, ada *sinoman* yang lazim dilakukan pada acara pernikahan di mana ibu-ibu dan bapak-bapak sekitar penyelenggara akan ikut membantu, mulai dari memasak, mendirikan tenda, menerima tamu, dan lain-lain. Di Bangka, ada tradisi *nganggung* yang dilakukan dengan membawa dulang berisi makanan

Di dalam gotong royong, selain ada kerja sama dan kolaborasi antarindividu, juga harus disertai kepedulian satu sama lain. Dengan demikian, gotong royong tidak berdasarkan kepentingan individu, melainkan kepentingan kolektif.

Dan biarpun saya tiada beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah jalan, saya akan mati dengan rasa berbahagia karena jalannya sudah terbuka dan saya ada turut membantu mengadakan jalan yang menuju ke tempat perempuan Bumiputra merdeka dan berdiri sendiri. --R.A. Kartini

ke masjid saat menyambut hari besar keagamaan dan kedatangan tamu besar. Demikian juga di tempat lain seperti *marsialapari* di Mandailing, *Rambu Solo'* di Toraja, *ngayah* di Bali, dan lain sebagainya.



Gambar 1.2 Gotong Royong di Sidogede, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah

Sumber: kebumenkab.go.id (2021)

Perhatikanlah lingkunganmu. Tradisi dan praktik apa yang menggambarkan gotong royong? Apakah tradisi tersebut masih tetap berjalan atau sudah mulai punah? Galilah lebih mendalam, bagaimana tradisi yang menggambarkan gotong royong di lingkungan kamu. Di dalam gotong royong, selain ada kerja sama dan kolaborasi antarindividu, juga harus disertai kepedulian satu sama lain. Dengan demikian, gotong royong tidak berasaskan kepentingan individu, melainkan kepentingan kolektif.

Para pendiri bangsa juga menemukan tradisi musyawarah untuk memutuskan segala suatu. Coba kamu ingat, apakah ada tradisi musyawarah dalam keluarga dan lingkungan sekitarmu? Biasanya, kapan dilakukan? Siapa yang menginisiasi dan terlibat dalam musyawarah tersebut? Apakah kamu pernah terlibat dalam musyawarah?

Dalam musyawarah, setiap orang memiliki kedudukan yang setara, sama-sama memiliki hak menyampaikan pendapat, tidak boleh memaksakan kehendak atau pendapatnya. Ketika musyawarah menghasilkan sebuah keputusan, setiap orang harus mematuhiinya. Dengan demikian, prinsip utama dalam musyawarah ialah kesetaraan, respek, patuh terhadap keputusan musyawarah.

Para pendiri bangsa juga menemukan bahwa bangsa kita juga sejak dulu memiliki solidaritas dan empati yang tinggi terhadap orang lain sehingga mereka rela membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Ketika ada yang kesulitan, orang lain memberikan bantuan dan pertolongan secara tulus. Bantuan apa yang pernah kamu berikan kepada orang lain yang membutuhkan? Bantuan apa yang pernah kamu dapatkan dari orang lain?

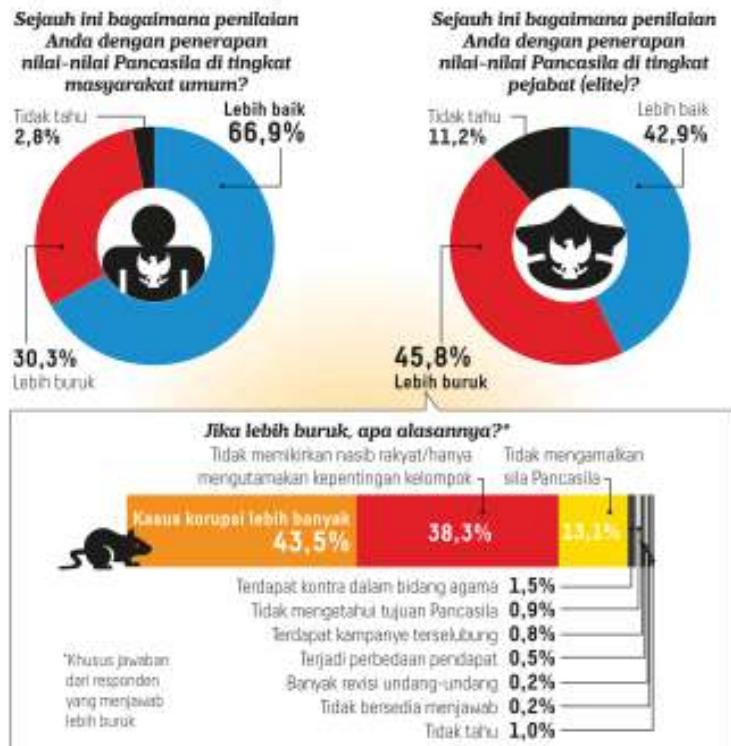
Sukarno dan para pendiri bangsa juga menemukan bahwa bangsa kita sejak dulu selalu memercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan bangsa Indonesia kepada Tuhan ini sampai sekarang masih dapat kita jumpai. Kamu tentunya percaya kepada Tuhan. Demikian juga masyarakat di lingkunganmu. Selain kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam kehidupan sehari-hari, kamu pikirkanlah apa saja yang telah kamu lakukan untuk menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Tradisi dan budaya luhur di atas disarikan oleh Sukarno dan para pendiri bangsa menjadi Pancasila, kemudian diambil saripatinya menjadi 5 sila (Pancasila). Jadi, Pancasila yang menjadi dasar negara kita ini memang bersumber dari tradisi-budaya bangsa Indonesia. Sebagai saripati dari nilai-nilai tradisi-budaya bangsa Indonesia, Pancasila akan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian saat ini juga terus dipraktikkan oleh bangsa Indonesia. Kamu masih dapat menjumpai sejumlah praktik ber-Pancasila pada kehidupan masyarakat di sekitarmu. Hasil jajak pendapat *Kompas* tahun 2022 menunjukkan bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dinilai lebih baik sebanyak 66,9%, dinilai lebih buruk sebanyak 30,3%, dan 2,8% menjawab tidak tahu. Sementara, di kalangan pejabat (elite), pengamalan nilai-nilai Pancasila dinilai lebih baik sebanyak 42,9%, dinilai lebih buruk sebanyak 45,8%, dan 11,2% menjawab tidak tahu. Penyebab utama mengapa pengamalan Pancasila di kalangan pejabat lebih buruk ialah tidak lepas dari banyaknya kasus korupsi dan dinilai tidak memikirkan nasib rakyat.

Dalam musyawarah, setiap orang yang memiliki kedudukan yang setara, sama-sama memiliki hak menyampaikan pendapat, tidak boleh memaksakan kehendak atau pendapatnya. Ketika musyawarah menghasilkan sebuah keputusan, setiap orang harus mematuhiinya.

Jajak Pendapat Pengamalan Pancasila



Metode Penelitian

Pengumpulan pendapat melalui telpon ini dilakukan oleh Litbang Kompas pada 26-29 Mei 2022. Sebanyak 1.004 responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi berhasil diwawancara. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas minus proporsi jumlah penduduk di setiap provinsi. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nilai percantikan penelitian = 3,09% dalam kondisi persyaratan sampel acak sistematis. Hasilnya dituliskan, kesalahan di luar penyebarluasan sampai dimungkinkan terjadi.

Sumber: Litbang Kompas/RPC/IDH/WNI

INFOGRAFIK GUNAWAN

Gambar 1.3 Jajak Pendapat Pengamalan Pancasila oleh Litbang Kompas

Sumber: Gunawan/kompas.id (2022)

Pengamalan nilai-nilai Pancasila perlu terus ditingkatkan sehingga berbagai persoalan yang melilit bangsa dan negara Indonesia dapat teratas. Jika semua elemen bangsa mengamalkan Pancasila dengan baik, Indonesia akan lebih cepat maju, hidup rukun, damai, dan tidak banyak terjadi kekerasan. Pengamalan Pancasila harus dimulai dari diri sendiri. Dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila, kamu bukan hanya akan menjadi lebih baik dan sukses, tetapi juga dapat berkontribusi untuk turut serta memajukan bangsa Indonesia.

Pertanyaannya, apakah perilakumu sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Perilaku seperti apa yang kamu lakukan, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat?

Untuk mengecek atau menilai dirimu sendiri apakah perilakumu sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, ada jabaran nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila di bawah ini yang dijadikan rujukanmu (Peraturan BPIP No. 2 Tahun 2022 Tentang Materi Dasar).

Tabel 1.1 Nilai-Nilai yang terkandung dalam Sila-Sila Pancasila

Ketuhanan Yang Maha Esa

1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan dan menolak paham anti-Tuhan (ateisme).
2. Bangsa Indonesia mengamalkan ajaran agamanya secara berkeadaban, saling menghormati satu sama lain.
3. Bangsa Indonesia wajib untuk menyembah Tuhannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing secara leluasa, berkeadaban, dan berkeadilan.
4. Bangsa Indonesia melaksanakan perintah agama dan kepercayaannya masing-masing dengan tetap mengedepankan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Bangsa Indonesia tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

1. Indonesia adalah negara bangsa (*nation state*) yang merdeka, bersatu dan berdaulat tetapi bukan *chauvinistik*. Indonesia tetap bagian dari, dan bekerjasama dengan masyarakat bangsa-bangsa di dunia.
2. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghendaki pergaulan bangsa-bangsa di dunia dengan prinsip saling menghormati nilai-nilai nasionalisme, bahkan kearifan lokal setiap bangsa yang tumbuh subur dalam taman sarinya bangsa-bangsa di dunia.
3. Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengembangkan persaudaraan berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keadaban.
4. Bangsa Indonesia mengakui dan memperlakukan kesederajatan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
5. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa tepa salira dan memahami bahwa perbedaan suku, ras, agama, dan kepercayaan adalah keniscayaan yang tidak boleh menimbulkan pertentangan.

Persatuan Indonesia

1. Negara Kebangsaan Indonesia bukan sekadar timbul karena persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib, tetapi lebih dari itu, karena juga adanya persatuan antara orang dengan tanah air yang didiaminya.

2. Persatuan Indonesia bernapaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib dan sepenanggungan dalam bingkai NKRI. Persatuan Indonesia adalah sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan dan keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia.
3. Bangsa Indonesia mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
4. Segenap warga negara Indonesia mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa serta bersedia berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
5. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

1. Negara Indonesia bukan sebuah negara yang didirikan untuk satu golongan tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia. Oleh karena itu penyelenggaraan negara didasarkan pada permusyawaratan perwakilan.
2. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dengan mengutamakan prinsip permusyawaratan dalam lembaga perwakilan rakyat.
3. Demokrasi yang dibangun di Indonesia bukanlah demokrasi Barat, tetapi demokrasi berlandaskan permusyawaratan yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial.
4. Bangsa Indonesia wajib menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah dan dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
5. Bahwa bangsa Indonesia tidak mengenal sistem diktator mayoritas dan tirani minoritas.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

1. Negara Indonesia didirikan untuk bersungguh-sungguh memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun batin.
2. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dengan mengutamakan prinsip permusyawaratan dalam lembaga perwakilan rakyat.
3. Negara Indonesia wajib menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak, bermartabat dan berkeadilan.
4. Bangsa Indonesia dalam mengambil keputusan senantiasa dipimpin oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dalam semangat hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mewujudkan keadilan.
5. Tiap warga bangsa Indonesia tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemberoran dan gaya hidup mewah.



Siap Berlatih

Aktivitas 1.1

Berdasarkan pemahamanmu, tuliskan masing-masing 1 contoh perilaku yang menggambarkan sila-sila Pancasila berdasarkan butir-butir Pancasila di atas.

Sila ke-1 :

Sila ke-2 :

Sila ke-3 :

Sila ke-4 :

Sila ke-5 :



Siap Mengeksplorasi

Aktivitas 1.2

Setelah membaca bahan di atas, sekarang saatnya, kamu menganalisis beberapa contoh kasus berikut dengan mendiskusikan di dalam kelompokmu masing-masing. Diskusikan dan analisis contoh-contoh kasus dalam berita ini menggambarkan praktik ber-Pancasila sila ke berapa. Mengapa?

Untuk menganalisis kasus-kasus ini, kalian dapat menggunakan tabel analisis di bawah ini atau kalian dapat mengembangkan model analisis yang disarankan oleh guru kalian.

<i>Contoh Kasus</i>	<i>Ceritakan kembali secara singkat salah satu kasus</i>
<i>Pengamalan sila ke-</i>	<i>:</i>
<i>Alasan</i>	<i>Sampaikan argumen kalian, termasuk butir-butir Pancasila yang relevan dengan kasus ini.</i>
<i>Rencana tindak meneladani perilaku ber-Pancasila</i>	<i>Tuliskan nilai baik yang kalian dapatkan dari contoh kasus.</i>

STUDI KASUS 1

Empati kepada Teman Sebaya, Siswa TK Kumpulkan Koin untuk Korban Bencana Alam

UNGARAN, KOMPAS.com - Solidaritas untuk membantu korban bencana alam yang terjadi di Indonesia terus dilakukan. Seperti yang dilakukan siswa TK Pamardi Yoga yang berada di Dusun Setro, Desa Gondoriyo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang.

Setelah kegiatan bersama di halaman sekolah, sebanyak 47 siswa diajak untuk berdoa agar korban bencana akibat gempa bumi Cianjur dan erupsi Gunung Semeru, lekas bangkit dan semangat menjalani kehidupan.

Selain itu, mereka juga mengumpulkan 'Koin Bencana' untuk membantu korban bencana. Koin tersebut berasal dari uang saku para siswa.

Wakil Kepala Sekolah TK Pamardi Yoga, Lia Puji Lestari mengatakan kegiatan yang dilakukan siswanya ini sebagai wujud kepedulian dan empati terhadap korban bencana alam.

"Hasil pengumpulan koin nantinya akan kami serahkan kepada IGTK Kecamatan Bergas yang kemudian disalurkan ke kabupaten," ungkapnya.

Dia berharap dengan kegiatan pengumpulan koin ini juga bisa melatih anak untuk beramal dan berbagi. "Sehingga diharapkan akan menumbuhkan rasa sayang dan cinta anak kepada mereka yang membutuhkan," kata Lia.

Siswi TK Pamardi Yoga, Nadine Nagita mengungkapkan melihat adanya bencana dari berita di televisi. "Banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah lagi. Tidak ada apa-apa uang jajan buat disumbangkan," ujarnya.

Sumber: Dian Ade Permana/kompas.com (2022)

STUDI KASUS 2

Tiko Cerita Awal Mula Rawat Ibu Eny 12 Tahun di Rumah Mewah Tanpa Listrik

Tiko, putra semata wayang Ibu Eny, menceritakan awal mula merawat ibundanya seorang diri di rumah mewah yang sudah terbengkalai selama 12 tahun. Dia menuturkan mulai merawat sang ibunda sejak ditinggal ayahnya pada 2010.

"Awalnya Papah pergi, Ibu tinggal sendiri dan kondisi Ibu kan seperti itulah ya, kejiwaannya depresi atau seperti apa. Setelah itu aku ngurus Ibu, berdua saja, maksudnya aku tinggal sama Ibu berdua," kata Tiko kepada wartawan, Kamis (5/1/2023).

Tiko tidak mengetahui pasti ibunya bisa sampai depresi. Dia menduga kondisi kejiwaan ibundanya terguncang lantaran kondisi ekonomi dan ditinggal suami.

"Mungkin karena kepergian Papah dan kondisi yang begitu mendadak kolaps usahanya," tuturnya.

Tiko, yang saat ini bekerja sebagai sekuriti perumahan di kawasan tempat tinggalnya, menceritakan ibunda dan ayahnya merupakan rekanan dari Departemen Keuangan. Sebelum kondisi ibundanya memburuk, Tiko keliling jualan gorengan.

Dia mengatakan merawat ibunya sendirian tanpa pengobatan dari rumah sakit. Namun makin kelamaan kondisi ibundanya memburuk.

"Karena awalnya niatanku dari awal ngerawat Ibu saja. Kondisinya seperti itu pun rawat jalan aja, tanpa diobati di rumah sakit. Semakin kemari Mama kondisinya semakin buruk, jadi aku ditawari lingkungan Pak RT untuk jadi sekuriti setempat di sini," paparnya.

Soal aliran listrik di rumahnya, Tiko mengatakan sudah terputus sejak satu tahun sepeninggalan ayahnya. Sementara itu, untuk air bersih, Tiko memanfaatkan pompa air di dekat rumah.

"Nggak nyampe setahun sih karena ditinggalkan juga kan, air-listrik diputus. Jadi air ngambil dari sebelah, ngambil seember, seember gitu. Kalau untuk listrik nggak ada, penerangan pakai lilin," katanya.

Sumber: Ilham Oktafian/detik.com (2023)

STUDI KASUS 3

Anak Tukang Becak Miskin Tidak Dilarang Sukses

TEMPO.CO, Jakarta - Raeni, anak tukang becak yang menjadi wisudawan terbaik dengan IPK 3,96 di Universitas Negeri Semarang, tidak pernah merasa kondisi ekonomi keluarganya menjadi penghalang. Malah, gadis kelahiran 13 Januari 1993 ini merasa risih jika keberhasilannya dikaitkan dengan keterbatasan ekonomi keluarganya. "Memangnya orang miskin tak boleh berprestasi?" ujarnya.

Meski demikian, Raeni berharap pengalamannya bisa menginspirasi orang lain. "Orang miskin tidak dilarang sukses, kok," ujarnya. Pada saat upacara wisuda, Raeni, yang datang dengan naik becak yang dikayuh ayahnya, memberikan pidato mewakili para wisudawan.

Untuk menambah uang saku yang terbatas, Raeni menjadi asisten di laboratorium ekonomi kampusnya. Dia juga memberi kursus privat akuntansi kepada siswa SMA dengan honor sukarela. Tiap Sabtu dan Ahad ia memilih pulang ke Kendal dan mengajar anak-anak mengaji di taman pendidikan Al-Quran di kampungnya.

Sumber: Clara Maria Tjandra Dewi H./tempo.co (2014)

STUDI KASUS 4

Pecalang Ikut Amankan Shalat Id di Denpasar

DENPASAR, KOMPAS.com - Sejumlah "Pecalang" (petugas keamanan adat) dan pemuda-pemudi dari Banjar Lumintang, Desa Dauh Puri Kaja, ikut mengamankan pelaksanaan shalat Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriah, di Lapangan Niti Praja Lumintang, Denpasar, Bali, Rabu (6/7/2016).

"Dalam pengamanan ini, bertujuan sebagai wujud rasa solidaritas antara umat beragama di Pulau Dewata sebagai wujud rasa tenggang rasa dan saling menghargai umat beragama lain melaksanakan ibadah," kata Wakil Koordinator Pecalang Banjar Lumintang, Kadek Sutarka, di Denpasar, seperti dikutip Antara.

Untuk jumlah petugas pecalang yang dikerahkan dalam pengamanan shalat Idul Fitri itu, jelas dia, kurang lebih sebanyak sepuluh orang dan sepuluh orang pemuda-pemudi. Ia mengatakan, untuk tugas pecalang yang dikerahkan dalam shalat Idul Fitri itu hanya melakukan pemantauan wilayah, pengamanan parkir dan kelancaran berlalu lintas.

"Upaya ini sebagai bentuk kepedulian kami yang ingin membantu kelancaran umat Muslim melaksanakan ibadah shalat Idul Fitri di Lapangan Lumintang agar pelaksanaan berjalan lancar," ujarnya.

Pihaknya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada masyarakat Muslim yang merayakan hari kemenangannya. "Saya mengharapkan, toleransi antarumat beragama ini dapat terus terjalin dengan baik di Pulau Dewata," katanya

Sumber: Sandro Gatra/kompas.com (2016)



Tahukah Kamu?

Selain kasus-kasus di atas, kamu dapat menganalisis beberapa contoh kasus lain, seperti yang terdapat pada artikel barcode berikut.

Pindai Aku!



Polisi Berhati Mulia,
Kapolsek Wonomerto
Menolong Pemulung
yang Tersesat
<https://buku.kemdikbud.go.id/s/upflvu>

Pindai Aku!



Kisah Kesederhanaan
Bung Hatta: Tak Mampu
Bayar Listrik, Sepatu Bally
Tidak Terbeli hingga Akhir
Hayat
<https://buku.kemdikbud.go.id/s/euqwwz>

Pindai Aku!



Amankan Mudik, Pramuka
Rela Lebaran di Jalan
<https://buku.kemdikbud.go.id/s/0x0n3v>

Pindai Aku!



Kisah Refa Nurtantiawati,
Sulung yang Pintar dan
Taat Beribadah
<https://buku.kemdikbud.go.id/s/fu1t0y>



Sekarang, kamu bersama dengan rekan dalam kelompok perlu membuat daftar aktivitas, perilaku, kegiatan yang pernah kamu lakukan yang menurut kamu menggambarkan nilai-nilai Pancasila. Meskipun ini pekerjaan kelompok, kamu perlu mengerjakan secara individual. Kamu dapat menggunakan tabel berikut.

Ceritakan secara jujur 3 perilaku/aktivitas yang pernah kamu lakukan yang menurutmu mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Berikan alasan mengapa dimasukkan ke dalam sila ke-1 / 2 / 3 / 4 / 5?

Tabel 1.2 Aktivitas yang Mencerminkan Nilai-Nilai Pancasila

Sila ke-	Perilaku/Aktivitas Saya yang Menggambarkan Nilai Pancasila	Alasan
01		
02		
03		

Terima kasih kamu telah menuliskan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harimu. Tidak usah berkecil hati, bahwa kamu belum sepenuhnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kamu. Yang terpenting, kamu terus berupaya mempraktikkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Ingat, pengamalan nilai-nilai Pancasila ini pastinya akan berdampak pada diri kamu masing-masing. Makin kamu konsisten dan rutin mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupanmu, pribadimu akan makin baik sehingga akan membawa kesuksesan pada dirimu masing-masing. Kamu masih memiliki waktu yang cukup untuk terus mempraktikkan nilai-nilai Pancasila, teruslah berusaha dan berupaya.

Sekarang, diskusikan bersama rekanmu. Kemudian, pilih 3 perilaku/aktivitas dari semua perilaku/aktivitas kalian yang menurut kalian paling menarik untuk dipresentasikan. Dalam presentasi, ceritakanlah contoh perilaku yang telah dilakukan secara konkret dan detail. Jelaskan kepada kelas, perilaku tersebut menggambarkan sila ke berapa dari Pancasila. Berikan alasannya.



Siap Berefleksi

Tuliskan refleksimu pada pembelajaran ini.

Tanggal:

1. *Dari proses pembelajaran hari ini, hal yang saya dapatkan ialah:*
2. *Dari proses pembelajaran hari ini, hal yang perlu saya tindak lanjuti ialah:*

B. Saya Ber-Pancasila



Gambar 1.4 Siswa Melakukan Upacara

Sumber: Syahrul Alamsyah Wahid/Unsplash.com (2022)



Siap Mengingat kembali

Pada subbab 1, kamu telah belajar tentang contoh-contoh pengamalan Pancasila, baik dalam kehidupan sehari-harimu maupun melalui studi kasus yang kamu pelajari. Pada subbab 2 ini, kamu akan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harimu. Agar praktik ber-Pancasila kamu terus terekam dan konsisten dilakukan, mulai sekarang, kamu akan diminta untuk menuliskan praktik pengamalan nilai-nilai Pancasila kamu dalam bentuk portofolio.

Sebelum kamu memulai membuat portofolio, perlu kiranya memahami bagaimana bentuk-bentuk praktik pengamalan nilai-nilai Pancasila, sebagai inspirasi bagi kamu dalam pengamalan Pancasila. Tentu saja, praktik-praktik tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi dan konteks kamu masing-masing. Bacalah bahan bacaan berikut untuk mendapatkan inspirasi praktik apa saja yang menggambarkan nilai-nilai Pancasila.

BELAJAR DAN MENDAPATKAN INSPIRASI

Sila ke-1: Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada subbab 1, telah disebutkan butir-butir Pancasila sila pertama. Kamu baca dan pelajari kembali butir-butir Pancasila tersebut, kemudian bayangkan bagaimana bentuk praktik keseharian dari butir-butir sila tersebut. Setiap bangsa Indonesia memercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini kiranya dapat menjadi pedoman dan pemandu bagi setiap bangsa Indonesia untuk menjalankan ajaran agama/kepercayaannya. Menjadi pribadi yang taat beragama pasti juga menjadi warga negara yang baik karena nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Berikut ini beberapa contoh praktik pengamalan Pancasila sila pertama yang dapat kamu lakukan dalam keseharianmu. Tentunya, kamu perlu menyesuaikan dengan konteks dan kondisi masing-masing.

1. Memeluk dan memercayai sepenuhnya salah satu agama/kepercayaan, serta mengamalkan ajaran-ajaran agama/kepercayaannya sebaik-baiknya dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama/kepercayaan.
2. Menghargai pemeluk agama/kepercayaan lain dengan cara tidak melakukan penistaan agama/kepercayaan seperti melakukan pembakaran rumah ibadah, merendahkan dan melecehkan Tuhan agama/kepercayaan lain, menghalangi-halangi pemeluk agama/kepercayaan lain melaksanakan ibadah.
3. Mau bekerja sama dengan rekan pemeluk agama/kepercayaan lain tanpa membeda-bedakan orang lain berdasarkan agama/kepercayaannya.
4. Tidak memaksa pemeluk agama lain untuk memercayai agama/kepercayaan dirinya.
5. Tidak membuat kegaduhan atau mengganggu ketika pemeluk agama/kepercayaan lain melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan.



Gambar 1.5 Ikut kegiatan keagamaan bagian dari pengamalan sila ke-1.

Sumber: Elvis Sendouw/Satuharapan.com (2013)

Selain itu, ada banyak contoh praktik lain yang dapat kamu lakukan sebagai wujud praktik pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Setiap manusia lahir dengan harkat dan martabat yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita harus mengakui bahwa setiap manusia memiliki persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Kamu baca dan pelajari kembali butir-butir Pancasila pada topik sebelumnya.

Berikut ini beberapa contoh praktik pengamalan Pancasila sila kedua yang dapat kamu lakukan dalam keseharianmu. Tentunya, kamu perlu menyesuaikan dengan konteks dan kondisi masing-masing.

1. Menentang keras berbagai bentuk perdagangan manusia (*human trafficking*) yang masih sering terjadi di lingkungan sekitar kita.
2. Berbaur dan bergaul dengan setiap orang tanpa membeda-bedakan, menghargai perbedaan latar belakang.
3. Tidak melakukan *bullying* dan kekerasan baik fisik maupun nonfisik kepada sesama, baik di sekolah maupun di luar sekolah.
4. Terlibat pada kegiatan-kegiatan sosial seperti membantu donasi kepada panti asuhan, korban bencana alam, korban kekerasan dan terorisme, dan lain sebagainya.
5. Mencegah terjadinya kejahatan dan kekerasan kepada orang lain, apa pun latar belakang agama/kepercayaan, status sosial, etnis-suku, dan latar belakang lainnya.
6. Terlibat dalam upaya dan program pemeliharaan lingkungan sebagai tempat hunian yang layak dan berkelanjutan untuk seluruh manusia dan generasi berikutnya.
7. Ikut berpartisipasi pada kegiatan atau program internasional baik melalui jalur pendidikan, olahraga, ataupun kegiatan perdamaian dunia.
8. Melakukan kolaborasi lintas negara untuk menciptakan persaudaraan global, misalnya dengan siswa dari negara lain.
9. Tidak melakukan fitnah dan ujaran kebencian serta memproduksi dan menyebarluaskan hoaks.



Gambar 1.6 Siswa SMA peduli lingkungan sebagai pengamalan Pancasila.

Sumber: smanegeri1nogosari.sch.id (2023)

Selain itu, ada banyak contoh praktik lain yang dapat kamu lakukan sebagai wujud praktik pengamalan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Sila ke-3: Persatuan Indonesia

Jika sila kedua mengembangkan kemanusiaan universal yang berlaku untuk segenap manusia, sila ketiga fokus pada persatuan Indonesia. Ada polarisasi dan konflik di tengah-tengah masyarakat, baik antarwarga, maupun sampai pada gerakan separatisme. Ada juga kelompok yang hendak mengusung ideologi lain untuk menggantikan Pancasila sehingga ia berpotensi memecah belah bangsa. Lalu, bagaimana contoh praktik pengamalan sila ketiga?

Berikut ini beberapa contoh praktik pengamalan Pancasila sila ketiga yang dapat kamu lakukan dalam keseharian kamu. Tentunya, kamu perlu menyesuaikan dengan konteks dan kondisi masing-masing.

1. Mempertahankan status warga negara
Indonesia dengan tidak berpindah menjadi warga negara lain sekalipun ada banyak masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia. Sebaliknya, masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia ini dijadikan peluang untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara.
2. Mempertahankan dan menjaga tradisi lokal, seperti pakaian tradisional batik, serta tradisi-tradisi yang sudah turun-temurun berlangsung di lingkungannya.
3. Turut serta menjaga lingkungan Indonesia dari berbagai upaya pengrusakan melalui berbagai upaya dan cara seperti menjaga kebersihan, tidak melakukan pembalakan liar.
4. Menempatkan kepentingan nasional dan kelompok di atas kepentingan pribadi, seperti menolong teman yang sedang kesusahan.
5. Turut serta memajukan perekonomian lokal dengan pemberdayaan UMKM, membeli dan menggunakan produk-produk lokal-nasional ketimbang produk impor.
6. Menghindari konflik kepada sesama dengan cara tidak mengejek, mengadu domba, dan mem-bully warga negara lain yang berbeda latar belakangnya.



Gambar 1.7 Siswa SMA al-Hikmah Bumiayu melakukan bersih-bersih lingkungan.

Sumber: smaalhikmah2.sch.id (2022)

7. Turut serta dalam upaya untuk menghentikan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.
8. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di sekolah dan masyarakat sebagai konsekuensi kamu menjadi warga sekolah dan masyarakat.

Selain itu, ada banyak contoh praktik lain yang dapat kamu lakukan sebagai wujud praktik pengamalan sila Persatuan Indonesia.

Sila ke-4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Setiap manusia memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Adanya perbedaan-perbedaan itu dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya kesalahpahaman, prasangka negatif, dan bahkan konflik. Sila keempat ini memberikan panduan bahwa kamu harus mengedepankan hikmat dan kebijaksanaan dalam musyawarah. Artinya, dalam melaksanakan musyawarah, kamu tidak boleh memaksakan pendapat dan kehendakmu, tetapi harus dengan bijaksana dapat menerima perbedaan-perbedaan tersebut. Hikmat bermakna kelembutan hati dan kejernihan berpikir, sementara kebijaksanaan berkaitan dengan penggunaan akal pikiran dan akal budi. Dalam konteks kehidupan berbangsa, Indonesia harus dipimpin oleh pemimpin yang memiliki hikmat kebijaksanaan melalui musyawarah atau demokrasi. Pemimpin di sini tidak hanya presiden, tetapi juga semua jenjang pemimpin mulai dari RT/RW, lurah, walikota, bupati, gubernur serta pemimpin-pemimpin di berbagai sektor lainnya.

Berikut ini beberapa contoh praktik pengamalan sila keempat yang dapat kamu lakukan dalam keseharian kamu. Tentunya, kamu perlu menyesuaikan dengan konteks dan kondisi masing-masing.

1. Tidak memaksakan kehendak atau pendapatmu kepada orang lain, misalnya dengan cara melakukan suap agar orang lain mengikuti pendapatmu.
2. Selalu melakukan musyawarah dalam memutuskan suatu hal yang menyangkut kepentingan orang banyak, serta mematuhi segala keputusan musyawarah sekalipun kamu memiliki pendapat yang berbeda.
3. Ikut serta menyuarakan aspirasi, gagasan, dan solusi kepada pemimpin (baik di tingkat RT/RW, kelurahan maupun sampai dengan tingkat



Gambar 1.8 Siswa SMAN1 Sumberpucung melakukan musyawarah, salah satu bentuk pengamalan Pancasila.

Sumber: Lokapers/sman1sumberpucung.sch.id (2022)

- nasional) terkait dengan upaya-upaya menyelesaikan masalah yang dihadapi.
4. Menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam bersikap, bertindak, dan berpikir di lingkungan masyarakat sehingga sebelum kamu bertindak, bersikap, berpendapat, kamu harus memikirkan secara logis dan menggunakan hati nurani. Kamu dapat berefleksi tentang apakah tindakan, sikap, dan perkataan kamu sudah benar. Jika sudah benar, apakah tepat dan memiliki manfaat.
 5. Terlibat dalam upaya-upaya penyelesaian konflik, mendamaikan yang sedang bertikai dengan cara-cara demokratis.

Selain itu, ada banyak contoh praktik lain yang dapat kamu lakukan sebagai wujud praktik pengamalan sila keempat ini, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

"Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan" demikian kata Pramoedya Ananta Toer dalam novel *Bumi Manusia*. Keadilan merupakan nilai universal yang harus dijunjung tinggi oleh setiap manusia yang memiliki harkat, martabat, hak, dan kewajiban yang sama.

Keadilan harus diperjuangkan karena ia tidak otomatis hadir di tengah-tengah kita. Sementara itu, di sekeliling kita, ada banyak ketidakadilan yang terjadi. Keadilan di sini tidak hanya pada bidang hukum, tetapi di segala bidang kehidupan.

Sukarno mengatakan "Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan ... semuanya berbahagia, cukup sandang, cukup papan, *gemah ripah loh jinawai, tata tentrem kertaraha*".

Berikut ini beberapa contoh praktik pengamalan Pancasila sila kelima yang dapat kamu lakukan dalam keseharianmu. Tentunya, kamu perlu menyesuaikan dengan konteks dan kondisi masing-masing.

1. Tidak melakukan pemerasan dan penipuan, baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat.



Gambar 1.9 Siswa SMAN 1 Ambarawa berbagi takjil. Berbagi kepada sesama wujud pengalaman Pancasila.

Sumber: sman1ambarawa.sch.id (2022)

2. Ketika kamu menjadi pemimpin, seperti OSIS atau ketua pemuda di lingkunganmu, berlaku dan bersikap adil kepada semua anggotanya, tidak berdasarkan suka-tidak suka.
3. Tidak bersikap boros dan hidup mewah serta pamer kekayaan di tengah-tengah masyarakat.
4. Menolong orang lain yang kesulitan, kesusahan, korban bencana alam, korban kekerasan, dan terorisme.
5. Menjaga diri dan orang lain untuk mendapatkan keseimbangan hidup jasmani dan rohani, kesehatan fisik, dan mental.
6. Menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam di lingkungan masyarakat untuk seluruh kepentingan masyarakat.
7. Menghargai hasil karya/kerja temanmu dengan tidak melakukan plagiasi.
8. Berani menyampaikan kebenaran demi tegakkan keadilan, seperti bersedia menjadi saksi atas suatu kejadian/peristiwa jika kamu benar-benar mengetahui kejadian/peristiwa tersebut.
9. Ikut membantu tenaga dan materi dalam gerakan sosial untuk membantu orang lain.

Selain itu, ada banyak contoh praktik lain yang dapat kamu lakukan sebagai wujud praktik pengamalan sila kelima ini, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.



Siap Mengeksplorasi

Aktivitas 1.4

Setelah membaca bahan bacaan di atas, sekarang saatnya, kamu menilai diri kamu sendiri terkait dengan "sejauh mana kamu telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupanmu?" Jika menggunakan skala 1-10, dalam penilaianmu sendiri, berapa nilai dirimu terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kamu? Lingkari atau beri tanda *check list* pada angka yang kamu berikan kepada dirimu sendiri.

- 1**
- 2**
- 3**
- 4**
- 5**
- 6**
- 7**
- 8**
- 9**
- 10**

Berikan alasan mengapa kamu menilai dirimu layak mendapatkan nilai tersebut. Dari sila-sila Pancasila, sila ke berapa yang paling kuat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari?

Kemudian, setelah kamu memberikan penilaian terhadap dirimu, kira-kira, apa yang akan kamu lakukan/rencanakan/targetkan agar penilaian kamu terus mengalami peningkatan?. Jelaskan apa yang perlu kamu lakukan/rencanakan/targetkan untuk meningkatkan angka penerapan Pancasila.



Siap Profil Pelajar Pancasila

Aktivitas 1.5

Sekarang, tuliskan sekurang-kurangnya 3 contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat yang telah kamu lakukan dalam satu minggu ini. Tentu ada banyak perilaku yang telah kamu lakukan. Oleh karena itu, kamu harus memilih yang paling menarik dan paling menggambarkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai pedoman, kamu dapat menggunakan tabel di bawah ini, atau memodifikasinya sesuai dengan selera kamu masing-masing. Contoh-contoh yang kamu berikan sekurang-kurangnya memuat informasi tentang hal-hal berikut.

1. Deskripsi perilaku kamu yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Menggambarkan sila ke berapa.
3. Alasan mengapa kamu memasukkan ke sila tersebut.
4. Refleksi dari perilaku yang kamu lakukan.

Perilaku Saya:(Nama)

Sila ke-:

Alasan & Refleksi:

Kamu dapat menggunakan kertas khusus atau menggunakan Lembar Kerja Peserta Didik.



Siap Belajar Lebih Lanjut

Aktivitas 1.6

Setelah kamu menuliskan sekurang-kurangnya 3 contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, sekarang saatnya, kamu menceritakan dan mendiskusikan kepada rekanmu. Kemudian, presentasikan di kelas. Persiapkan diri kalian untuk melakukan presentasi di kelas dengan cara kuasai hal-hal pokok apa yang perlu kalian presentasikan. Dalam melakukan presentasi, sebaiknya kamu tidak membaca, tetapi perlu kontak mata dengan semua rekan di kelasmu.



Siap Berkinerja

Aktivitas 1.7

Sekarang saatnya, kamu menyusun portofolio. Portofolio ini merupakan catatan harian yang merekam pemikiran dan perilakumu dalam keseharian kehidupan bermasyarakat terkait dengan praktik nilai-nilai Pancasila. Ada beberapa prinsip penting dalam menyusun portofolio ini.

1. Kejujuran merupakan prinsip pertama dan utama yang harus kamu pegang. Ingat, portofolio ini bersifat pribadi, tidak perlu rekanmu ikut membacanya. Oleh karenanya, kamu dapat menceritakan apa pun secara jujur dan apa adanya terkait dengan perilakumu dalam mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Kamu tidak perlu mengada-ada ataupun mengarang cerita agar terkesan seolah-olah kamu sepenuhnya telah mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Ingat, bahwa kejujuran itu ialah bagian dari nilai Pancasila yang harus dipraktikkan.
2. Lakukan secara rutin mencatat perilaku-perilaku kamu dalam kehidupan bermasyarakat yang menurutmu menggambarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam menuliskan perilakumu, kamu perlu mendeskripsikan secara lebih detail perilaku apa yang telah kamu lakukan. Misalnya, kamu tidak cukup hanya menulis "saya membantu tetangga", tetapi menceritakan secara detail apa yang telah kamu lakukan kepada tetanggamu serta kapan (waktu) kamu melakukan hal tersebut. Kamu dapat menyertakan bukti-bukti perilaku kamu, baik berupa foto, video, ataupun bukti lain seperti tanda tangan dari ketua RT/RW atau orang tua.
3. Tuliskan refleksimu tentang perilaku yang telah kamu lakukan. Dalam menuliskan refleksi, kamu dapat menjawab beberapa pertanyaan reflektif berikut.
 - a. Perilaku yang kamu lakukan paling mendekati sila ke berapa dan mengapa? Cek kembali butir-butir Pancasila.

- b. Apa yang kamu rasakan setelah melakukan perilaku tersebut?
- c. Lakukan penilaian dirimu, dari angka 1-10. Berapa nilai yang pantas atas perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila yang kamu lakukan? Mengapa?
- 4. Desain dan *layout*. Sebagai portofolio pribadi, kamu dapat mendesain dan me-*layout* portofoliomu sesuai dengan seleramu. Kamu dapat membuatnya di buku khusus atau memanfaatkan teknologi seperti website/blog, atau menggunakan ms. word/ms. powerpoint/ms. excel, dan lain sebagainya.



Gambar 1.10 Contoh Rancangan Portofolio 'Saya Ber-Pancasila'

Portofolio Saya Ber-Pancasila yang kamu buat ini akan terus digunakan sepanjang satu atau dua semester ke depan. Mengapa? Karena melalui portofolio ini, kamu akan mencatat dan merefleksikan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, mata pelajaran Pendidikan Pancasila bukan hanya diajarkan di kelas, tetapi juga harus dipraktikkan dalam kehidupan keseharianmu.

Sekarang, kamu menyusun portofolio "Saya Ber-Pancasila", yang berisi perilaku kamu yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai identitas nasional dalam kehidupan bermasyarakat. Kamu dapat menyusunnya dengan menggunakan buku khusus atau menggunakan bantuan komputer atau teknologi. Dalam portofolio "Saya Ber-Pancasila" sertakan beberapa informasi berikut.

- 1. Identitasmu (nama, kelas, no. induk). Kamu dapat menambahkan fotomu.
- 2. Deskripsi perilaku kamu yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kamu dapat kembali mengecek butir-butir Pancasila pada pembelajaran sebelumnya. Kamu juga menjelaskan perilaku yang kamu lakukan paling cocok menggambarkan sila ke berapa.
- 3. Menurut penilaianmu, perilakumu pantasnya mendapatkan nilai berapa dari 1-10, dan jelaskan alasannya.
- 4. Bagaimana perasaanmu setelah menerapkan perilaku yang sesuai dengan Pancasila? Apa kira-kira manfaat yang didapatkan oleh orang lain/masyarakat dari perilakumu?

5. Kamu dapat menyertakan bukti perilaku, dapat berupa foto atau tanda tangan dari orang yang berwenang seperti ketua RT/RW, ketua pemuda, tokoh agama/kepercayaan, atau orang tua kamu masing-masing.

Ingat! Hal yang perlu kamu ingat dalam menyusun portofolio seperti berikut.

- Rutin dan konsisten mengisinya.
- Lengkapi komponen portofolio: deskripsi, nilai diri sendiri, refleksi, bukti, rencana tindak lanjut.
- Desain dan *layout* portofolio sesuai dengan selera dan kesukaan kamu masing-masing.

C. Laporan Rancangan Portofolio



Siap Mengingat kembali

Aktivitas 1.8

Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah menyusun rancangan portofolio "Saya Ber-Pancasila". Apakah kamu telah menyelesaikan rancangan portofoliomu? Jika belum, segera selesaikan rancangannya. Sebagai rancangan, kamu hanya perlu menuliskan sekurang-kurangnya 3 perilakumu yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat yang kamu tunjukkan/lakukan dalam satu minggu terakhir.

Periksa kembali apakah portofoliomu sudah ada informasi-informasi penting seperti identitas kamu, refleksi, dan penilaian diri. Perlu diingat bahwa desain dan *layout* portofoliomu tidak harus sama persis satu sama lain, atau mencontoh punya temanmu. Kamu justru dapat berkreasi dan mempercantik portofoliomu sesuai dengan selera dan bakat masing-masing.



Siap Mengeksplorasi

Aktivitas 1.9

Sekarang, kamu akan mempresentasikan rancangan portofoliomu, baik kepada rekanmu maupun kepada guru. Hal penting yang perlu diperhatikan saat melakukan presentasi.

1. Mempersiapkan diri dengan baik: artinya, rancangan portofoliomu sudah siap dipresentasikan.
2. Berikan pembuka yang apik: artinya, kamu bisa memulai misalnya dengan pertanyaan atau kutipan dari salah satu tokoh penting.
3. Komunikasi non-verbal. Dalam presentasi, seluruh tubuhmu perlu digunakan untuk membantu melakukan presentasi, mulai dari kontak mata, gerakan tubuh termasuk tangan, dan lain sebagainya.

4. Teruslah berlatih untuk meningkatkan kualitas presentasimu.

Secara lebih teknis, ada beberapa tips presentasi yang dapat kamu pelajari. Kamu dapat menggunakan kata kunci “tips/teknik presentasi di depan kelas” pada mesin pencarian ataupun di media sosial seperti Youtube. Berikut beberapa contohnya, kamu tentu saja dapat mencari contoh lain yang menurutmu relevan.



Tahukah Kamu?

Untuk melakukan presentasi yang baik, kamu dapat mempelajari teknik presentasi melalui video berikut.

Pindai Aku!



5 Menit Video Tutorial. - Teknik Presentasi yang Baik dan Benar dari akun Multimedia DKV Usakti

<https://buku.kemdikbud.go.id/s/v99ltc>



Siap Menerima Umpan Balik

Aktivitas 1.10

Setelah kamu mempresentasikan portofoliomu kepada rekan dan/atau guru, jangan lupa untuk meminta umpan balik dari mereka, tentang hal apa yang telah baik dan perlu diperbaiki di portofolio ini. Umpan balik dari rekan/guru ini penting untuk mendapatkan portofolio yang berkualitas. Kebersediaan untuk menerima umpan balik ini sebenarnya bagian dari pengamalan Pancasila, terutama sila keempat. Demikian juga dengan memberikan umpan balik ke karya rekanmu juga salah satu bentuk dari pengamalan Pancasila.



Siap Belajar Lebih Lanjut

Aktivitas 1.11

Sebagaimana telah dijelaskan pada topik sebelumnya, portofolio tidak cuma berisi kumpulan informasi serangkaian aktivitas yang telah kamu lakukan, hasil kerjamu, dan capaian prestasi kamu. Portofolio juga menjadi bukti kompetensi yang di dalamnya memuat pengetahuan, keterampilan, dan tindakan kamu pada mata pelajaran tertentu atau dari capaian pembelajaran tertentu, dalam hal ini mata pelajaran Pendidikan Pancasila.

Untuk itu, portofolio "Saya Ber-Pancasila" ini akan kamu kerjakan sepanjang satu/dua semester ke depan. Artinya, kamu secara rutin dan konsisten mencatatkan perilaku-perilaku ber-Pancasila yang kamu lakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya, ada banyak perilaku yang kamu lakukan. Namun demikian, dalam setiap minggu, kamu cukup sekurang-kurangnya 3 perilaku ber-Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat yang menurut kamu paling menarik dan paling sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

1. Contoh-Contoh Perilaku Ber-Pancasila

Beberapa contoh perilaku ber-Pancasila sebagai berikut.

a. Menghargai Agama/Kepercayaan Orang Lain

Kebinekaan pada bidang agama/kepercayaan merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Untuk menghadapi kebinekaan ini, setiap bangsa Indonesia, termasuk kamu, harus saling menghargai, saling memahami dan membangun toleransi antarsesama pemeluk agama/kepercayaan. Ada banyak perilaku yang dapat kamu lakukan, seperti tidak memaksakan agama/keyakinan kamu diikuti oleh orang lain, memastikan orang yang berbeda agama/keyakinan dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan agama/keyakinannya secara aman dan nyaman, melindungi tetangga yang berbeda agama/keyakinan dari berbagai macam ancaman dan kekerasan, dan lain sebagainya.



Gambar 1.11 Pelajar lintas agama membatik bersama saat haul Gus Dur

Sumber: Faiz/beritabangsa.id (2023)

b. Menolong Orang Lain

Menolong orang lain secara tulus dan tanpa membedakan latar belakang apa pun merupakan sikap mulia yang harus kamu lakukan. Ketika kamu membantu orang lain, sejatinya, kamu sedang menolong diri kamu sendiri. Percayalah, Tuhan akan membala-



Gambar 1.12 Menolong Orang Lain Mendatangkan Kebahagiaan.

Sumber: www.brilio.net

kebaikanmu dengan hal yang lebih indah. Tidak ada satu pun manusia yang tak membutuhkan pertolongan orang lain. Demikian juga kamu. Karena itu, berikan pertolongan semampu kamu kepada orang lain.

c. Turut serta dalam Kegiatan Kemasyarakatan

Di lingkunganmu, ada banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan, baik itu kegiatan keagamaan, keamanan, maupun kemasyarakatan. Pada kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, misalnya, kamu dapat berpartisipasi menjadi panitia, memberikan usulan/pendapat kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Kamu dapat belajar kepada masyarakat tentang bagaimana menyelenggarakan kegiatan.



Gambar 1.13 Siswa SMK Nawa Bhakti Kebumen Melakukan Bakti Sosial

Sumber: nawabhakti.sch.id (2022)

d. Menghentikan Hoaks

Salah satu tantangan saat ini ialah menyebarluasnya berita bohong atau yang sering disebut hoaks. Hoaks ini sering kali memicu terjadinya perselisihan, perpecahan, dan permusuhan di kalangan masyarakat. Salah satu pemicu terjadinya banyak hoaks ialah rendahnya literasi. Untuk itu, kamu dapat membantu masyarakat sekitar untuk meningkatkan literasi, menolak hoaks yang berkembang dengan cara menghentikan penyebaran hoaks, meluruskan hoaks, dan lain sebagainya.



Gambar 1.14 Stop hoaks, bagian dari pengamalan Pancasila.

Sumber: Bintang Adita Putri/djkn.kemenkeu.go.id (2020)

Selain keempat contoh di atas, ada banyak contoh lain yang dapat kamu temukan baik yang dilakukan oleh kamu sendiri maupun yang dilakukan oleh teman kamu dan orang di sekitarmu. Perilaku-perilaku kamu yang terekam dalam portofolio “Saya Ber-Pancasila” ini merupakan tugas yang nanti akan dinilai. Oleh karena itu, kamu perlu menuliskan secara jujur semua perilaku

ber-Pancasila yang kamu lakukan di masyarakat. Selain itu, kamu secara rutin dan konsisten menulis perilakumu. Mengingat portofolio ini berisi narasi atau deskripsi tentang perilaku yang kamu lakukan, kamu perlu segera mencatat atau menuliskannya ketika satu perilaku penting yang kamu lakukan, tidak usah ditunda.

2. Refleksi Itu Sangat Penting

Ada banyak tindakan dan perilaku yang telah kita lakukan menjadi rutinitas keseharian yang terlewatkan dan terlupakan begitu saja. Alih-alih merefleksikan, karena sudah menjadi rutinitas, kita sering kali tidak menyadari apa yang telah dilakukan kemarin. Misalnya, ketika kamu berjalan dari rumah menuju sekolah, kamu melewati jalan yang selalu sama, kamu sering kali mengabaikan ada apa saja yang telah kamu lalui sepanjang jalan tersebut. Demikian juga dengan kehidupan, kita sering kali melewati berbagai peristiwa begitu saja tanpa merefleksikannya.

Salah satu dampak dari tidak melakukan refleksi ialah kita sering kali terjebak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Kita bisa saja melewati pengalaman yang sama, tetapi hasil yang kita peroleh dari pengalaman tersebut mungkin saja berbeda. Oleh karena itu, kesuksesan seseorang berkaitan dengan kemampuan dia melakukan refleksi diri. Biarlah pengalaman masa lalu menjadi tonggak petunjuk, bukan tonggak yang membelenggu kita. Karena itu, pengalaman yang kita lewati sejatinya menjadi petunjuk agar kita tidak mengulang kesalahan masa lalu dan untuk memperbaiki masa depan.

Untuk itulah, dalam menyusun portofolio ini, kamu perlu melakukan refleksi agar kamu dapat mengambil pelajaran berharga dari setiap pengalaman mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi seperti proses bercermin, melihat diri kita sendiri, bagaimana wujud dan penampilan kita, apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Melalui refleksi, kita dapat melihat kembali pengalaman yang kita lewati dengan tujuan agar di masa mendatang, kita menjadi lebih baik.

3. Jangan Lupa Bukti

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa portofolio ini merupakan rekaman pengamalan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh setiap kamu. Oleh karena itulah, kamu perlu menyertakan bukti. Bukti-bukti yang dapat kamu kumpulkan bisa bermacam-macam, mulai dari video, foto, tanda tangan dari pihak yang berwenang seperti RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua pemuda, salah satu/kedua orang tua, dan lain sebagainya. Bertanyalah kepada guru terkait dengan bukti-bukti lain yang dapat dilampirkan dalam portofolio ini.



Uji Kompetensi

Untuk mengetahui ketuntasan Tujuan Pembelajaran di atas, diperlukan uji kompetensi berupa penilaian portofolio. Berikan tanda *checklist* pada daftar berikut.

- Dalam portofolio yang saya buat, tidak ada/ada beberapa*) kesalahan ketik.
- Saya setiap hari/sering/kadang-kadang*) menuliskan aktivitas perilaku ber-Pancasila saya di portofolio.
- Saya selalu/sering kali/kadang-kadang*) menuliskan refleksi atas perilaku saya.
- Saya selalu/sering kali/kadang-kadang*) menuliskan perilaku ber-Pancasila secara detail.
- Desain dan *layout* portofolio saya kurang/sangat kurang*) rapi.
- Saya berkomitmen untuk melengkapi portofolio “Saya Ber-Pancasila” pada hari-hari yang akan datang.



Rubrik Penilaian Portofolio

Berikut ini rubrik penilaian portofolio yang akan digunakan untuk menilai portofolio “Saya Ber-Pancasila”. Gurumu dapat memberikan komponen penting lain sebagai unsur penilaian. Sepakatilah bersama gurumu tentang rubrik penilaian ini. Rubrik penilaian ini dapat menjadi acuan bagi kamu dalam menyusun portofolio yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Komponen	Kurang (<70)	Cukup (70-80)	Sedang (80-90)	Bagus (90-100)
Penulisan	Ada banyak kesalahan penulisan struktur kalimat, ejaan, dan kesalahan ketik.	Sedikit kesalahan penulisan struktur kalimat, ejaan, dan tidak lebih dari 5 kesalahan ketik.	Sedikit kesalahan penulisan struktur kalimat, ejaan, dan tidak lebih dari 3 kesalahan ketik.	Tidak ada kesalahan penulisan, struktur kalimat, ejaan, dan kesalahan ketik.

Kelengkapan Isi	Lebih dari 7 aktivitas keseharian yang tidak dituliskan dan beberapa tidak ada refleksi.	Lebih dari 5 aktivitas keseharian yang tidak dituliskan dan beberapa tidak ada refleksi.	Ada kurang dari 5 aktivitas keseharian yang tidak dituliskan dan beberapa tidak ada refleksi.	Aktivitas setiap harinya ditulis beserta beberapa refleksi.
Refleksi	Ada beberapa bagian yang tidak disertai dengan refleksi.	Sebagian besar refleksi yang dituliskan kurang mendalam, hanya diberikan ala kadarnya saja.	Beberapa refleksi yang dituliskan kurang mendalam, ala kadarnya, dan sebagian besar dituliskan cukup mendalam.	Isi semua refleksi ditulis secara mendalam.
Kualitas Isi (nilai digandakan)	Sebagian besar perilaku ber-Pancasila tidak dijelaskan secara detail.	Beberapa perilaku ber-Pancasila tidak dijelaskan secara detail.	Semua perilaku ber-Pancasila dijelaskan kurang detail.	Semua perilaku ber-Pancasila dijelaskan sangat detail.
	Sebagian besar komponen portofolio tidak terisi dengan lengkap.	Beberapa komponen portofolio tidak lengkap.	Sebagian kecil komponen portofolio tidak lengkap.	Portofolio lengkap, memuat komponen pokok portofolio, dan disertai dengan beberapa bukti.
Desain, Layout, dan Kerapian	Struktur dan <i>layout</i> portofolio kurang rapi dan susah dibaca.	Sebagian besar struktur dan <i>layout</i> portofolio kurang rapi.	Beberapa struktur dan <i>layout</i> portofolio kurang rapi.	Struktur dan <i>layout</i> portofolio sangat rapi dan mudah dibaca.



Pengayaan

- A. Untuk memperkaya dan memperdalam pemahaman kamu tentang praktik pengalaman nilai-nilai Pancasila, kamu dapat membaca menindaklanjuti pembelajaran kamu melalui sumber belajar berikut.
1. Film “Aku Penggerak Mimpi” yang menceritakan tentang Lisa yang harus memendam mimpiannya demi memenuhi keinginan orang tuanya. Dari film ini, kita belajar bahwa mimpi harus tetap diwujudkan meski kita hidup dalam keterbatasan. Seri 1 dapat diakses melalui tautan berikut: <https://buku.kemdikbud.go.id/s/3uqjxv>. Lanjutan film tersebut dapat diakses melalui tautan berikut: <https://buku.kemdikbud.go.id/s/y3ohvs>, atau pindai QR code berikut.
 2. Dwi Yanto, Pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari, Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan Volume 14 No.25 April 2016, klik tautan berikut: <https://buku.kemdikbud.go.id/s/svjqae>, atau pindai QR Code berikut.
- B. Untuk memperkaya dan memperdalam pemahaman dan wawasan kamu tentang portofolio, ada beberapa sumber belajar yang dapat kamu akses. Kamu dapat mencari melalui berbagai sumber, terutama dengan menggunakan internet, dengan menggunakan kata kunci “portofolio siswa”. Berikut ini contoh yang dapat kamu akses.

Pindai Aku!



Seri 1

Pindai Aku!



Seri 2

Pindai Aku!



Seri 2

Pindai Aku!



Penilaian Portofolio Kerja,
<https://buku.kemdikbud.go.id/s/ocbnkh>



Siap Berefleksi

Tuliskan refleksimu pada pembelajaran ini.

Tanggal:

1. *Dari proses pembelajaran hari ini, hal yang saya dapatkan ialah:*
2. *Dari proses pembelajaran hari ini, hal yang perlu saya tindak lanjuti ialah:*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2023

Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII

Penulis: Ida Rohayani, Hatim Gazali, Dwi Astuti Setiawan

ISBN 978-623-194-624-9 (jil.3 PDF)

Bab 2

Ber-Pancasila dalam Kehidupan Global



Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan dunia, seperti individualisme, radikalisme, intoleransi, peperangan, krisis lingkungan hidup, kesehatan, perubahan iklim. Bagaimana Pancasila menjawab tantangan-tantangan tersebut?



Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini, kamu diharapkan mampu menelaah peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Oleh karena itu, kamu akan mengkaji sejumlah tantangan, baik konteks nasional maupun global yang dihadapi oleh Indonesia. Kemudian, kamu mengkaji bagaimana Pancasila menjawab tantangan-tantangan tersebut. Dengan cara ini, nilai-nilai Pancasila dapat kamu diterapkan dalam skala nasional dan global.



Kata Kunci

Individualisme,
Kosmopolitanisme, Radikalisme,
Intoleransi, Bonus Demografi,
Human Capital Index



Peta Konsep



Pancasila telah ditetapkan sebagai ideologi, dasar negara, dan pandangan hidup bangsa dan negara. Nilai-nilai Pancasila disarikan dari nilai, budaya, dan tradisi bangsa Indonesia. Karena itu, tantangannya sekarang ialah bagaimana mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan global, seperti peperangan, krisis lingkungan hidup, kesehatan, individualisme, dan perubahan iklim. Karena itu, bab ini akan mengulas tentang peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global melalui analisis SWOT.



Asesmen Awal, Siap Belajar

1. Ceritakan bagaimana solusi yang kamu berikan terhadap perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Salah satu kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah kebinekaan. Ceritakan bagaimana pengalaman kamu berinteraksi dengan orang yang berbeda latar belakang suku/agama-ras/antargolongan. Pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari pengalaman tersebut?.

A. Kekuatan dan Peluang Bangsa dan Negara Indonesia

Melalui subbab ini, kamu akan belajar tentang peluang dan kekuatan Indonesia dalam pentas global yang dapat menjadi modal dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Kamu dapat menambah sejumlah peluang dan kekuatan Indonesia, selain yang tertuliskan di sini.



Siap Berlatih

Pada kelas sebelumnya (kelas X), kamu telah belajar tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara. Masih ingatkah kamu apa maksud Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara? Pernahkah kamu membayangkan betapa Pancasila telah menjadi kekuatan besar bangsa dan negara Indonesia sehingga mengantarkan Indonesia sampai ke kondisi sekarang ini? Jika mengingat kembali pelajaran Pendidikan Pancasila pada kelas-kelas sebelumnya, tak ada kekuatan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam ini selain Pancasila. Kamu juga telah belajar memberikan gagasan-gagasan solutif mengatasi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingatkah solusi-solusi apa saja yang telah kamu berikan untuk mengatasi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Apakah solusi-solusi yang kamu tawarkan sudah mulai berjalan? Atau, kamu punya solusi baru apa atas perilaku yang bertentangan dengan Pancasila?

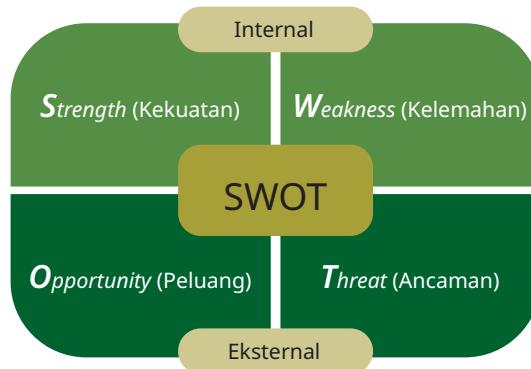
Pada bagian sebelumnya, kamu juga telah belajar tentang bagaimana perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, di mana kamu sedang mengerjakan portofolio "Saya Ber-Pancasila". Perlu diingat, bahwa portofolio "Saya Ber-Pancasila" kamu tetap harus dikerjakan.



Siap Belajar

Pada subbab ini, kamu akan belajar tentang peluang dan kekuatan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Dengan mengkaji peluang dan kekuatan, berarti kamu akan belajar tentang apa saja yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia dalam pergaulan global. Sebagai bangsa dan negara Indonesia, kita menghadapi tantangan yang makin kompleks, baik dalam konteks nasional maupun global. Jika kita mencermati berbagai isu/informasi dan peristiwa yang berkembang, baik di sekitar kita maupun melalui dunia internet, akan kita temukan berbagai tantangan. Bahkan, jika kita hanya fokus pada tantangan tersebut, kita sering kali pesimis akan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Betapa tidak, korupsi terus terjadi, kemiskinan masih tinggi, ketidakadilan masih bertengger, kekerasan kerap terjadi, dan lain sebagainya. Belum lagi tantangan di skala global, mulai dari peperangan, krisis lingkungan, dan lain sebagainya. Namun, sebagai bangsa yang memiliki dan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita tidak bisa hanya memfokuskan diri pada tantangan tersebut. Pasalnya, bangsa dan negara kita memiliki kekuatan yang besar untuk menjawab tantangan tersebut. Hanya saja, kekuatan-kekuatan yang kita miliki tersebut tidak selalu kita kaji dan kembangkan, malah justru sering kali diabaikan dan dilupakan. Misalnya, bangsa Indonesia sejak dulu sampai sekarang memiliki kepedulian yang tinggi kepada sesama melalui gotong royong. Bangsa kita sejak dulu sampai sekarang memiliki agama/kepercayaan yang dapat menjadi modal kekuatan untuk menjawab tantangan tersebut.

Untuk memudahkan memetakan dan mempresentasikan peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global, kita perlu menggunakan model analisis sederhana, yaitu analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*). *Strengths* (kekuatan) adalah hal-hal yang dimiliki secara internal oleh bangsa dan negara. *Weaknesses* (kelemahan) adalah kelemahan internal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. *Opportunities* dan *Threats* adalah faktor-faktor eksternal, yakni di luar diri bangsa dan negara Indonesia. *Opportunities* berarti peluang yang mendukung, sementara *Threats* berarti tantangan yang sekiranya menghambat. Analisis SWOT ini sering kali digunakan untuk menganalisis bisnis atau perusahaan sebagai upaya untuk memajukan bisnis dengan cara meningkatkan kekuatan diri dan peluang serta mengurangi kelemahan dan ancaman.



Gambar 2.1 Analisis SWOT

Pada bagian ini, kamu akan memfokuskan pada kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*). Sementara untuk kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*), akan diulas pada bagian berikutnya.

S (<i>Strengths</i>) - Kekuatan	W (<i>Weaknesses</i>) - Kelemahan
Kekuatan-kekuatan apa yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia untuk penerapan Pancasila dalam kehidupan global?	Kelemahan-kelemahan apa yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia untuk penerapan Pancasila dalam kehidupan global?
O (<i>Opportunities</i>) - Peluang	T (<i>Threats</i>) - Ancaman / Tantangan
Peluang apa saja yang mendukung penerapan Pancasila dalam kehidupan global?	Tantangan apa saja yang menghambat penerapan Pancasila dalam kehidupan global?

Gambar 2.2 Analisis SWOT: Kekuatan dan Peluang

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa kekuatan (*strengths*) terkait dengan faktor internal sehingga yang dikaji ialah kekuatan-kekuatan

yang kita miliki. Dalam konteks perusahaan, misalnya, pertanyaan yang perlu dijawab untuk menggali kekuatan (*strengths*) ini seperti berikut.

1. Apa kelebihan yang dimiliki oleh perusahaanmu?
2. Apa yang bisa membuat perusahaanmu agar lebih baik dari perusahaan lainnya?
3. Hal apa yang menyebabkan perusahaanmu memperoleh penjualan?
4. Apa kelebihan perusahaan yang dilihat maupun dirasakan oleh konsumennya?
5. Keunikan apa yang dimiliki oleh perusahaanmu?

Dalam konteks pembelajaran Pendidikan Pancasila, sekurang-kurangnya pertanyaan kunci yang perlu kamu kaji seperti berikut. 1) Apa yang kamu syukuri sebagai kekuatan positif bangsa dan negara Indonesia dalam berhubungan dengan bangsa dan negara lain? 2) Apa yang membuat bangsa dan negara Indonesia disegani bangsa dan negara lain dalam hubungan internasional, dengan memperhatikan peran Indonesia, misalnya sebagai ketua G20 Tahun 2022 dan sebagai ketua ASEAN Tahun 2023? Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu tentunya perlu mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik melalui pencarian literatur (melalui buku atau internet), ataupun melalui diskusi dengan sejumlah pakar/ahli.

Sementara itu, peluang (*opportunities*) berkaitan dengan faktor eksternal. Dalam konteks bisnis, misalnya, pertanyaan yang perlu dijawab untuk menggali peluang tersebut ialah sekurang-kurangnya seperti berikut. 1) Kesempatan apa yang bisa kamu lihat? 2) Tren apa yang saat ini sedang berlangsung yang sesuai dengan bisnismu? Dalam konteks pembelajaran ini, kamu perlu menjawab sekurang-kurangnya pertanyaan berikut. 1) Kesempatan apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh bangsa dan negara Indonesia untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan global? 2) Apa yang menjadi tren global yang memungkinkan Pancasila dapat menjawabnya atau menjadi solusi?



Siap Berkinerja

Aktivitas 2.1

Dengan menggunakan tabel analisis SWOT di atas, tuliskan beberapa kekuatan dan peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Pertanyaan kunci yang perlu kamu jawab ialah apa yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia dan bagaimana peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan global?

Untuk menemukan kekuatan dan peluang tersebut, kamu perlu melakukan hal-hal berikut.

1. Mencari literatur, baik melalui buku ataupun internet, tentang apa saja yang menjadi kekuatan bangsa dan negara Indonesia, serta bagaimana peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan global.
2. Berdiskusi dengan ahli atau rekanmu untuk menggali informasi sebanyak-banyak tentang kekuatan bangsa dan negara Indonesia, dan peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan global.

Berdasarkan hasil pencarian informasi tersebut, tuliskan 3 kekuatan terbesar yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia dan 3 peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan global.

Bahan bacaan berikut ini merupakan panduan awal yang dapat kamu kembangkan dengan cara mencari informasi yang lebih lengkap dan detail.

Mari, kita kaji bagaimana kekuatan dan peluang bangsa dan negara Indonesia. Apa saja yang dimiliki oleh bangsa dan negara sebagai kekuatan? Bagaimana menjadikan kekuatan tersebut sebagai peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan global? Bagian ini hanya mengulas gambaran-gambaran umum kekuatan dan peluang berdasarkan fakta dan data yang dimiliki oleh Indonesia.

1. Kekuatan Bangsa dan Negara Indonesia

Kita adalah bangsa dan negara yang besar, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Bangsa dan negara Indonesia memiliki banyak kekuatan, di mana kamu dapat menggali lebih dalam. Berikut ini beberapa kekuatan bangsa dan negara Indonesia. Tentunya, kamu dapat menambah daftar lain yang merupakan kekuatan bangsa dan negara Indonesia.

a. Pancasila

Pancasila sebagai falsafah dasar, pandangan hidup bangsa, dasar negara, ideologi negara, kekuatan pemersatu bangsa, sumber segala sumber hukum negara merupakan seperangkat pemikiran yang melandasi langkah untuk mewujudkan tata masyarakat adil dan makmur, yang merupakan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pancasila dicirikan sebagai berikut.

1. Negara Indonesia ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

2. Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara persatuan yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia. Jadi, negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan.
3. Negara Indonesia ialah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan/perwakilan.
4. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sementara itu, ideologi dunia lain yang berkembang ialah komunisme dan kapitalisme. Komunisme dapat dicirikan dengan: 1) tidak meyakini keberadaan Tuhan, 2) kepemilikan barang menjadi milik bersama, 3) mengajarkan teori perjuangan kelas, 4) revolusi dilakukan secara terus-menerus, 5) mengutamakan kepentingan negara atau kelompok daripada kepentingan individu. Sementara, kapitalisme dapat dicirikan dengan: 1) mementingkan diri sendiri (*self interest*), 2) penjaminan atas hak milik perseorangan, 3) kebebasan penuh kepada individu dalam melakukan aktivitas ekonomi, 4) adanya persaingan bebas (*free competition*), 5) harga sebagai penentu mekanisme pasar (*price system*).



Siap Mengeksplorasi

Aktivitas 2.2

Bandingkan ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme dan kapitalisme dalam bidang politik dan hukum, ekonomi, agama, dan sosial. Isilah tabel berikut untuk menggambarkan perbedaan Pancasila dengan ideologi komunisme dan kapitalisme.

Tabel 2.1 Pancasila vs Komunisme dan Kapitalisme

Bidang Politik dan Hukum	
Komunisme	
Pancasila	
Kapitalisme	

	Bidang Ekonomi
Komunisme	
Pancasila	
Kapitalisme	
	Bidang Agama
Komunisme	
Pancasila	
Kapitalisme	
	Bidang Sosial
Komunisme	
Pancasila	
Kapitalisme	

b. Geografis Indonesia: Negara Besar

Indonesia mempunyai wilayah negara yang luas, daratan dan lautan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri atas 17.000 pulau. Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia dengan perairan seluas 93 ribu km² dan panjang pantai sekitar 81 ribu km² atau hampir 25% panjang pantai di dunia.

Secara geografis, Indonesia diapit oleh dua benua: Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia juga diapit oleh dua samudra: Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dari sini, terlihat bahwa Indonesia memiliki letak geografis silang atau strategis di dunia karena diapit oleh dua benua dan dua samudra. Keuntungan dari letak geografis ini seperti berikut.

1. Ekonomi: Posisi Indonesia dilalui oleh berbagai negara, di mana Indonesia menjadi tempat transit atau hubungan perdagangan negara-negara Asia



Gambar 2.3 Batas Wilayah Laut Indonesia

Timur, seperti China, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan. Posisi Indonesia ini juga membawa keuntungan karena rute dari transportasi perdagangan negara-negara lain tersebut menuju Asia Tengah, Afrika, hingga Eropa.

2. Letak Indonesia ini memungkinkan masyarakat yang ada di Indonesia berinteraksi dengan bangsa-bangsa dari negara lain.
3. Masyarakat Indonesia sejak zaman purbakala menerima berbagai aliran kebudayaan dari Timur maupun Barat. Masyarakat Indonesia mampu memilih apa yang baik dan membuang jauh apa yang buruk baginya. Berkat kemampuan itu, bangsa Indonesia memiliki sifat-sifat yang unik dalam pergaulan dunia, dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. Sifat toleransi, ramah-tamah, suka menolong, suka damai dan mendamaikan pertentangan kepentingan dan perbedaan bahkan bentrokan pendapat dari bangsa Indonesia mengesankan kepada bangsa lain bahwa bangsa Indonesia adalah "*a smiling nation*", bangsa yang suka tersenyum. Namun, di samping itu, rakyat Indonesia gigih mempertahankan diri terhadap serangan agresif dari luar yang membahayakan hidupnya dan kemerdekaannya sebagai bangsa.

c. Bonus Demografi

Indonesia memiliki warga negara (penduduk) yang cukup besar (270 juta lebih) nomor 4 di dunia setelah China, India, Amerika Serikat. Penurunan tingkat kematian yang diikuti dengan penurunan fertilitas menyebabkan jumlah penduduk usia 15-64 tahun yang merupakan usia produktif meningkat, baik dibandingkan dengan penduduk usia anak (0-18 tahun) maupun penduduk usia tua (65+ tahun) hingga menjelang tahun 2040. Periode ini disebut dengan *demographic dividend* atau bonus demografi. Selain itu, penduduk yang berpendapatan menengah terus mengalami peningkatan dari 20% pada tahun 2020 dan diproyeksikan pada tahun 2030 meningkat menjadi 49%. Bank Dunia tahun 2019 mencatat ada sekitar 44,5% orang yang sedang menuju ke kelas berpendapatan menengah.



Gambar 2. 4 Bonus Demografi Indonesia

Sumber: M. Ishaq/indonesiabaik.id (2021)

d. Keragaman Bangsa Indonesia

Kekuatan lain yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ialah kebinekaan bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa yang terbanyak di dunia. Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa, 719 bahasa adat, dan 200 produk hukum adat yang berlaku saat ini. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kompetensi-kompetensi multikulturalisme, hidup damai berdampingan dalam keragaman sehingga bangsa Indonesia memiliki kapasitas untuk bergaul dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Selain itu, keragaman bangsa Indonesia menjadi kekuatan penting karena setiap suku bangsa memiliki keunggulan masing-masing sehingga dimungkinkan dapat bekerja sama satu sama lain.

e. Sumber Daya Alam

Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Indonesia ialah pengekspor terbesar kayu lapis (*plywood*), yaitu sekitar 80% di pasar dunia. Indonesia mempunyai cadangan sumber energi minyak yang berlimpah. Indonesia mempunyai cadangan sumber energi batu bara terbesar di dunia. Indonesia mempunyai hutan tropis terbesar di dunia. Hutan tropis ini memiliki luas 39.549.447 hektar, dengan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah terlengkap di dunia. Letaknya di pulau Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Hutan tropis Indonesia berkontribusi menjaga keseimbangan



Gambar 2.5 Cermin Kemajemukan Indonesia

Sumber: katadata.co.id (2021)



Gambar 2.6 Biodiversitas Terbesar Dunia ada di Indonesia

Sumber: Ananda Syaifulah/indonesiabaik.id (2021)

iklim dunia di samping hutan hujan Amazon di Amerika Selatan. Indonesia juga mempunyai cadangan emas, tembaga, aspal, bijih besi, dan bahan tambang lain yang luar biasa banyaknya.

Selain data-data di atas, ada banyak kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Kamu dapat mencarinya melalui mesin pencari seperti Google dengan bermacam-macam kata kunci, seperti “hutan Indonesia”, “potensi besar energi terbarukan Indonesia”, dan lain sebagainya.

f. Kekuatan Militer Indonesia

Indonesia memiliki kekuatan militer yang cukup disegani dunia. Berdasarkan data Global Fire Power 2017, peringkat militer Indonesia, yaitu 0,3347 (Power Index), menempati posisi: No. 1 di ASEAN dan No. 14 di dunia dari 133 negara. Power Index Indonesia diperoleh berdasarkan 50 faktor dari 8 indikator utama, yaitu indikator potensi lokasi negara, sumber daya manusia, sumber daya logistik, sumber daya keuangan, kekuatan angkatan laut, sumber daya alam, kekuatan udara, dan kekuatan tentara. Indonesia mencapai peringkat dunia lima terbesar untuk indikator potensi lokasi negara (peringkat 2), sumber daya manusia (peringkat 3), dan sumber daya logistik (peringkat 4).



Gambar 2.7 Kekuatan Militer Indonesia

Sumber: Gemawan Dwi Putra/indonesiabaik.id (2018)

2. Peluang Bangsa dan Negara Indonesia

Indonesia memiliki berbagai peluang dalam kehidupan global. Di antara berbagai peluang itu hal-hal berikut.

- Dalam laporan berjudul "The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential" (2012), McKinsey menegaskan bahwa Indonesia berpotensi untuk menjadi kekuatan ekonomi ke-7 di dunia pada tahun 2030. Tentu saja hal tersebut dapat tercapai dengan beberapa syarat, seperti: peningkatan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan penyelesaian masalah terkait dengan infrastruktur.

- b. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi, akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, yaitu terbukanya wawasan masyarakat Indonesia terhadap ilmu pengetahuan dan keterampilan penting sehingga dapat bersaing di kancah global.
- c. Sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki Indonesia menjadi daya tarik bagi masuknya berbagai investasi ke Indonesia. Hal tersebut akan membantu tumbuhnya perekonomian Indonesia.
- d. Keberagaman budaya dan kekayaan tempat wisata yang dimiliki Indonesia akan menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Hal tersebut akan turut membantu perekonomian Indonesia. Sektor pariwisata ini masuk kategori salah satu penyumbang pendapatan terbesar bagi negara. Berdasarkan catatan Penanaman Modal Asing (PMA), sepanjang periode Januari–Desember 2018, setidaknya Indonesia mendapat investasi pariwisata untuk hotel bintang senilai US\$525,18 juta. Jumlah investasi pariwisata ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Tercatat di tahun 2013 ada sekitar 8,8 juta wisatawan mancanegara, sementara di penghujung tahun 2018 jumlahnya meningkat hampir 50% menembus angka 15,8 juta orang.
- e. Pusat industri halal dunia, mengingat Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Saat ini, halal telah menjadi tren gaya hidup (*life style*) dunia. Produk-produk halal tak lagi hanya dikonsumsi oleh umat Muslim sebagai salah satu pemenuhan standar hukum syariah. Industri halal global terus mengalami perkembangan yang pesat. Tercatat dalam *State of The Global Economy Report 2018/2019* bahwasanya pendapatan pada industri produk halal telah diproyeksikan akan mencapai \$ 3,007 triliun pada tahun 2023. Industri produk halal ini terdiri atas beberapa kategori produk dan layanan, yaitu makanan halal, keuangan Islami, pariwisata halal, busana sederhana, media dan rekreasi halal, obat-obatan dan kosmetik halal reguler.



Gambar 2.8 Pertumbuhan Pariwisata Indonesia
Sumber: katadata.co.id (2019)



Siap Berkinerja

Aktivitas 2.3

Setelah kamu membaca bahan bacaan di atas serta mencari sumber-sumber lain yang mendukung, sekarang, kamu diminta untuk berdiskusi dengan rekanmu. Dari berbagai kekuatan dan potensi yang dimiliki Indonesia, menurut kamu, apa 3 kekuatan dan 3 peluang terbesar Indonesia. Kemudian, kajilah lebih mendalam 3 kekuatan dan 3 peluang terbesar tersebut. Untuk memandu diskusi dengan rekanmu, berikut pertanyaan penting yang perlu didiskusikan.

1. Masalah-masalah apa saja yang terjadi pada 3 kekuatan terbesar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia?
2. Bagaimana strategi yang perlu dilakukan Indonesia untuk meningkatkan peluang?

Tuliskan hasil diskusi, dan siapkan bahan paparan untuk dipresentasikan di kelas. Dalam membuat bahan paparan di kelas, kamu dapat menggunakan laptop dengan memanfaatkan berbagai aplikasi seperti power point atau kamu membuat bahan paparan melalui kertas/buku yang tersedia. Untuk mengetahui video Tutorial Cara Membuat Presentasi PowerPoint yang Menarik, kamu dapat mencari dari sumber lain melalui mesin pencarian dengan kata kunci "Cara Kunci Membuat Bahan Presentasi".

B. Kelemahan dan Tantangan Bangsa dan Negara Indonesia



Siap Mengingat Kembali

Pada materi sebelumnya, kamu telah belajar dan mendiskusikan di kelas tentang kekuatan dan peluang penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan global. Sebagaimana yang telah disinggung pada materi sebelumnya, kekuatan (*strengths*) itu merujuk kepada apa yang dimiliki di internal Indonesia, sementara peluang (*opportunities*) berarti kesempatan dari eksternal.

Perhatikan kembali tabel SWOT yang telah kamu kerjakan pada bagian sebelumnya, untuk dapat dilengkapi pada bagian sekarang ini. Sekarang ini, berfokus pada kelemahan dan tantangan. Kelemahan (*weaknesses*) di sini merujuk kepada kelemahan internal Indonesia, sementara tantangan berarti hal-hal yang menantang atau penghambat dari pihak luar kepada Indonesia.



Siap Belajar

Pada subbab ini, kamu akan belajar tentang kelemahan dan tantangan Indonesia dalam menerapkan Pancasila dalam kehidupan global. Dengan mengkaji kelemahan bangsa dan negara Indonesia, berarti kita secara jujur mengkaji titik lemah internal bangsa dan negara Indonesia. Sementara itu, dengan mengkaji tantangan berarti mengkaji tantangan dan ancaman apa saja yang sedang dan akan dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia. Mengkaji kelemahan dan tantangan bisa saja membuat kamu jadi pesimis akan masa depan bangsa dan negara Indonesia, seakan-akan betapa lemahnya bangsa dan negara Indonesia.

Mengkaji kelemahan dan tantangan ini sebenarnya bukan untuk membuat kamu pesimis. Sebaliknya, mengetahui kelemahan dan tantangan ini justru akan membuat kamu menyadari bahwa ada banyak hal yang dapat kamu lakukan untuk mengurangi kelemahan dan mengatasi tantangan ini. Tidak ada bangsa dan negara yang tidak memiliki kelemahan dan tantangan, bahkan negara adidaya sekalipun.

Jika diterapkan pada dirimu, kelemahan ini akan menjawab beberapa pertanyaan seperti: 1) Apa sifat dan kebiasaan negatifmu? 2) Apa yang menyebabkan kamu terpuruk? 3) Bagaimana orang lain melihat kelemahanmu? 4) Apa yang paling kamu takuti dan hindari?, dan lain sebagainya. Sementara, tantangan di sini untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti 1) Apa kelemahan kamu yang bisa menghalangi perkembangan kamu? 2) Adakah dan siapa pesaing? 3) Apa bahaya dari luar yang dapat menghambat atau mengganggu perkembanganmu?

Nah, pada subbab ini, kamu akan melanjutkan melakukan analisis SWOT dengan fokus pada kelemahan dan tantangan sehingga bagian dari analisis SWOT ini dapat terisi semua.

S (Strengths) - Kekuatan	W (Weaknesses) - Kelemahan
Kekuatan-kekuatan apa yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia untuk penerapan Pancasila dalam kehidupan global?	Kelemahan-kelemahan apa yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia untuk penerapan Pancasila dalam kehidupan global?
O (Opportunities) - Peluang	T (Threats) - Ancaman / Tantangan
Peluang apa saja yang mendukung penerapan Pancasila dalam kehidupan global?	Tantangan apa saja yang menghambat penerapan Pancasila dalam kehidupan global?

Gambar 2.9 Analisis SWOT, Kelemahan dan Ancaman



Jika menggunakan tabel analisis SWOT di atas, tuliskan beberapa kelemahan dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Pertanyaan kunci yang perlu kamu jawab ialah apa yang menjadi kelemahan Indonesia, serta apa dan bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Indonesia?

Untuk menemukan kelemahan dan tantangan tersebut, kamu perlu melakukan hal-hal berikut.

1. Mencari literatur, baik melalui buku ataupun internet, tentang apa saja yang menjadi kelemahan bangsa dan negara Indonesia, serta bagaimana tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global.
2. Berdiskusi dengan ahli atau rekan kamu untuk menggali informasi sebanyak-banyak tentang kelemahan bangsa dan negara Indonesia, dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global.

Berdasarkan hasil pencarian informasi tersebut, kemudian kamu tuliskan 3 kelemahan terbesar yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia dan 3 tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global.

Bahan bacaan berikut ini merupakan panduan awal yang dapat kamu kembangkan dengan cara mencari informasi yang lebih lengkap dan detail.

Pada tanggal 17 Agustus 2023, kita merayakan kemerdekaan Indonesia ke-78. Pada usia tersebut, kemajuan dan pembangunan telah banyak dicapai oleh Indonesia. Hidup rukun, damai, penuh toleransi antarsesama bangsa juga terus mewarnai kehidupan berbangsa. Kita perlu bersyukur atas capaian dan kondisi Indonesia yang terus menuju ke arah yang lebih baik.

1. Kelemahan Indonesia

Dalam rangka mewujudkan impian Indonesia maju, kita harus bergotong royong dan berkolaborasi dalam mengatasi berbagai kelemahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Beberapa kelemahan Indonesia ialah sebagai berikut.

a. Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia Rendah

Indeks Modal Manusia atau *Human Capital Index* (HCI) Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Tak hanya dibandingkan dengan negara maju, Indonesia bahkan tertinggal jauh dari negara-negara ASEAN, seperti Vietnam dan Malaysia. Indeks Modal Manusia Indonesia sebesar 0,54.

Berdasarkan capaian pendidikan dan status kesehatan saat ini, anak-anak Indonesia yang lahir saat ini, pada 18 tahun kemudian, diperkirakan hanya dapat mencapai 53% dari potensi produktivitas maksimumnya. Selain itu, pasar kerja tahun 2018 masih didominasi pekerja berkeahlian rendah.



Gambar 2.10 Indeks Modal Manusia tahun 2020

Sumber: mediaindonesia.com (2020)

Hal penting yang perlu kamu kaji ialah apakah kebijakan dan strategi pemerintah saat ini sedang menuju pada upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia? Bagaimana kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia sehingga dapat bersaing di kancah global?

b. Pembangunan Tidak Merata

Pembangunan Indonesia masih belum merata, terutama disebabkan selama puluhan tahun, pembangunan Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Perhatikan



Gambar 2.11 Kondisi Tenaga Kerja Indonesia

Sumber: theprakarsa.org

dan pelajari infografis di Gambar 2.11 yang menunjukkan bahwa Jawa masih menjadi pusat perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 58,48 persen dari total perekonomian nasional. Dalam konteks ini, hal penting yang perlu kamu kaji ialah apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, agar tidak melulu berpusat di Jawa.



Gambar 2.12 Data Pembangunan yang Tidak Merata

Sumber: Very Anggar/katadata.co.id (2019)

c. Kesenjangan Ekonomi

Pendapatan rakyat Indonesia juga belum merata, dibuktikan dengan kesenjangan ekonomi yang tinggi. Segelintir orang memiliki kekayaan yang sangat melimpah, sementara jumlah orang dengan pendapatan rendah sangat tinggi. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melaporkan, hampir separuh aset nasional dimiliki oleh 1 persen masyarakat saja. Hal ini tercermin dalam Indeks Gini, yakni indeks untuk mengukur ketimpangan dalam sebuah negara

dari 0 (kesetaraan sempurna) sampai 100 (ketidaksetaraan sempurna). Data yang dikeluarkan Bank Dunia tahun 2018 mengungkapkan, Indeks Gini Indonesia meningkat dari 30,0 pada dekade 1990-an menjadi 39,0 pada 2017.

d. Pengelolaan SDA Belum Maksimal

Di dalam sumber daya alam (SDA), terdapat beberapa komponen penting, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik terdiri atas berbagai jenis tanah, air, logam, gas alam, dan minyak bumi. Komponen biotik terdiri atas tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sumber daya alam laut Indonesia, misalnya, diperkirakan memiliki potensi kurang lebih Rp17 ribu triliun setiap tahun jika itu dikelola dengan maksimal. Belum lagi sumber daya alam lainnya yang juga sangat melimpah. Kamu bisa mencari secara spesifik tentang kekayaan sumber daya alam Indonesia tersebut.

e. Korupsi Masih Merajalela

Pada 2019, ICW (*Indonesia Corruption Watch*) mencatat ada 271 kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan jumlah tersangka 580 orang, kerugian negara Rp8,4 triliun, jumlah suap Rp200 miliar, pungutan liar Rp3,7 miliar, dan jumlah pencucian uang Rp108 miliar. KPK mencatat total kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp168 triliun. Kerugian ini merupakan akumulasi penanganan kasus korupsi selama 2004-2019. Pelajarilah infografik berikut yang menggambarkan tentang kerugian negara akibat korupsi yang terus mengalami peningkatan. Pada topik ini, kamu dapat mempelajari bagaimana kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi tindakan korupsi di tanah air.

BERDASARKAN DATA DARI ICW

Dalam konteks keterbukaan informasi penanganan kasus, **ICW menilai Kepolisian dan Kejaksaan cenderung tertutup, sedangkan KPK sangat informatif.**

Temuan ICW

TREN KERUGIAN NEGARA DARI KORUPSI MENINGKAT

*Tren Penindakan Kasus dan Potensi Kerugian Negara akibat Korupsi (2017-2021)



- Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada **533 penindakan kasus korupsi** yang dilakukan aparat penegak hukum (APH) sepanjang 2021.

- Dari seluruh kasus tersebut, total potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai **Rp29,4 triliun**.

- Jumlah kasus korupsi yang berhasil ditindak APH pada 2021 lebih banyak dari tahun sebelumnya, dan **cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir**.

- Tren nilai potensi kerugian negara cenderung terus meningkat** selama periode 2017-2021, seperti terlihat pada grafik.

- Adapun kinerja tiap APH pada tahun 2021 hanya mencapai **24%** dari target sehingga ICW memberikan nilai 'D' atau "buruk".

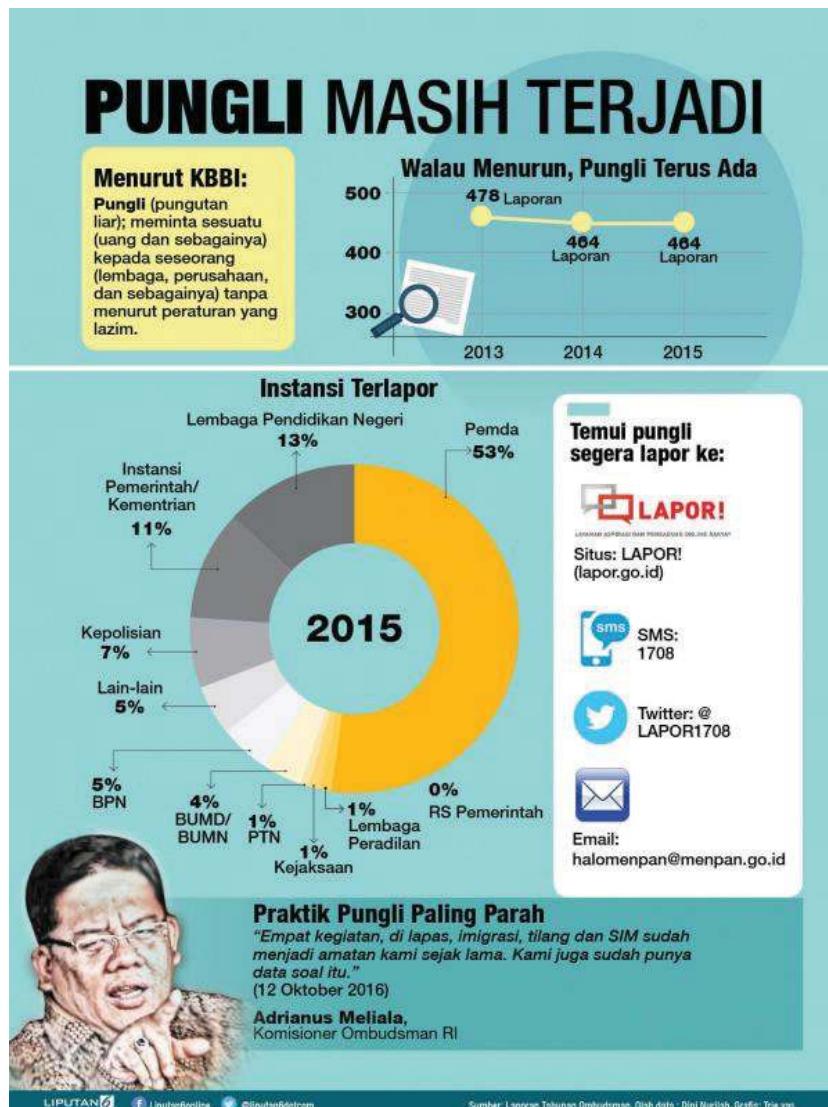
Sumber: Indonesia Corruption Watch (18 April 2022)

Gambar 2.13 Kerugian Negara Akibat Korupsi

Sumber: Mabrus/ajnn.net (2022)

f. Pungutan Liar Merajalela

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) berhasil melakukan 8.424 operasi tangkap tangan (OTT) sejak periode 2016 hingga Oktober 2018. Dari data infografik berikut, kamu dapat mempelajari lebih dalam tentang instansi mana saja yang paling banyak melakukan pungutan liar dan mengapa. Apa kebijakan dan strategi nasional yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi pungutan liar tersebut?



Gambar 2.14 Data Instansi terlapor terkait Pungutan Liar

Sumber: Tria/liputan6.com (2016)

g. Bencana Alam

Sejumlah bencana alam seperti gempa bumi dan banjir terjadi di Indonesia yang merugikan bangsa dan negara Indonesia. Kerugian bangsa dan negara tidak hanya material berupa bangunan yang rusak, tetapi juga menghambat laju perekonomian Indonesia. Tak hanya itu, bencana alam ini juga menyebabkan korban jiwa yang tidak sedikit. Konsekuensi Indonesia dikelilingi oleh banyak gunung berapi (*ring of fire*), bencana alam berupa letusan gunung berapi terus menghantui Indonesia. Perhatikan dua infografik terkait dengan deretan gempa bumi dan bencana di Indonesia. Terkait dengan hal itu, apa yang dapat dilakukan oleh bangsa dan negara Indonesia?



Gambar 2.15 Deretan Gempa Bumi Terdahsyat di Indonesia

Sumber: Sopan A. Inggrah/kalteng.inews.id (2022)



Gambar 2.16 Bencana di Indonesia Sepanjang Tahun 2022

Sumber: bnpb.go.id (2023)

Tentu masih ada banyak kelemahan lain. Kamu dapat mencari sejumlah sumber lain untuk mengkaji lebih mendalam, baik dilakukan secara individual maupun berkelompok. Misalnya, kamu dapat secara spesifik mengkaji kelemahan Indonesia dari sudut pandang ekonomi, budaya, sosial, pertahanan, keamanan, geografis, dan lain sebagainya.

2. Tantangan Indonesia

Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan yang besar dalam kehidupan global ini, beberapa di antaranya seperti berikut.

- Dengan masifnya teknologi informasi, berbagai ideologi luar (konsumerisme, radikalisme, dan terorisme internasional) masuk dan memengaruhi bangsa Indonesia yang berefek pada pola pikir eksklusif, pandangan intoleran, hingga perilaku destruktif. Bangsa Indonesia dengan ideologi Pancasila wajib mempertahankan sifat maupun sikap cinta damai, toleransi dalam meminimalkan dampak negatif ideologi luar dimaksud.
- Kemajuan teknologi informasi membawa dampak negatif terhadap ancaman atas kedaulatan data pribadi warga negara Indonesia di media sosial. Data pribadi (seperti Nomor Induk Kependudukan, identitas diri, pilihan pribadi, lokasi pribadi) dimaksud dieksplorasi untuk kepentingan tertentu dengan tidak bertanggung jawab. Negara wajib meningkatkan keamanan siber

dalam mempertahankan kedaulatan data pribadi warga negaranya. Di samping itu, warga negara hendaklah makin meningkatkan literasi digital dalam menggunakan media sosial secara etis.

- c. Salah satu dampak dari globalisasi ialah penyeragaman budaya. Masyarakat Indonesia yang memiliki kekayaan dan kekuatan budaya akan ditantang oleh budaya-budaya dunia. Budaya Hollywood dan K-pop, misalnya, banyak digandrungi oleh generasi muda, pada satu sisi, dan kebanggaan terhadap budaya sendiri makin berkurang, pada sisi yang lain. Begitu juga dengan bahasa yang digunakan. Beberapa generasi muda lebih bangga menggunakan bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia.
- d. Citra Indonesia dalam kehidupan global tak sepenuhnya positif. Pandangan stereotip atau stigma bahwa bangsa Indonesia terbelakang, negara Indonesia miskin tidak menggentarkan kita sebagai satu bangsa. Justru kita terus memperbaiki diri, berkarya, berprestasi dalam berbagai bidang dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Dengan demikian, kita berkontribusi positif dalam menciptakan negara yang stabil (minim pergesekan politik, perekonomian tumbuh, kohesi sosial dirawat baik oleh segenap masyarakat).

Tentu saja, masih ada banyak peluang dan tantangan lain yang dihadapi oleh Indonesia. Oleh karena itu, kamu perlu menggali dan mengkaji melalui sumber-sumber lain.



Siap Berkinerja

Aktivitas 2.5

Setelah kamu membaca bahan bacaan di atas serta mencari sumber-sumber lain yang mendukung, sekarang, kamu diminta untuk berdiskusi dengan rekanmu. Dari berbagai kelemahan dan tantangan yang dimiliki Indonesia, menurut kalian, apa 3 kelemahan dan 3 tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia? Kemudian, kajilah lebih mendalam 3 kelemahan dan 3 tantangan terbesar tersebut. Untuk memandu diskusi dengan rekan kamu, berikut pertanyaan penting yang perlu didiskusikan.

1. Masalah-masalah apa saja yang terjadi pada 3 kelemahan terbesar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Kamu dapat memperdalam dari setiap kelemahan tersebut.
2. Bagaimana kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan Indonesia untuk menjawab tantangan tersebut?

Tuliskan hasil diskusi, dan siapkan bahan paparan untuk dipresentasikan di kelas. Dalam membuat bahan paparan di kelas, kamu dapat menggunakan laptop dengan memanfaatkan berbagai aplikasi seperti power point atau kamu membuat bahan paparan melalui kertas/buku yang tersedia.



Siap Mengingat Kembali

Kamu telah belajar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi Indonesia pada bagian sebelumnya. Ingatlah dan ceklah kembali apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi Indonesia melalui analisis SWOT yang telah kamu lakukan.

Pada materi kali ini, kamu akan mengkaji secara lebih mendalam dengan menjadikan Pancasila sebagai pemandu untuk menghadapi tantangan-tantangan di era global ini. Sebagaimana yang berulang kali disebutkan bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup bagi setiap bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi pedoman, jawaban, dan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, mari, kita kaji beberapa tantangan yang terjadi di era global ini, kemudian kamu mendiskusikannya secara lebih mendalam serta bagaimana seharusnya kita merespons tantangan tersebut dengan berlandaskan pada Pancasila.

3. Tantangan di Era Global

Kita berada di dunia yang saling terhubung satu dan yang lain. Satu individu di suatu negara dapat berinteraksi dengan individu lain dari negara lain. Inilah era yang disebut globalisasi. Selo Soemardjan mendefinisikan “globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama”.

Salah satu akibat dari globalisasi ini ialah terkikis dan bergesernya nilai-nilai dan norma agama, sosial, dan budaya pada suatu masyarakat. Berapa banyak nilai, norma, dan tradisi lokal yang mulai bergeser akibat pengaruh globalisasi ini. Dampak lain globalisasi ialah negara kurang dirasakan masyarakat sebagai aktor yang cukup penting. Karena globalisasi ini, ada banyak aktor non-negara seperti perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, komunitas yang tampil seperti halnya negara yang berperan memenuhi kepentingan masyarakat.

Namun, di sisi lain, globalisasi ini membawa berbagai peluang bagi Indonesia untuk menguatkan peran dan pengaruhnya di seluruh dunia, seperti peluang

untuk melanjutkan studi di negara lain, turut serta merasakan kemajuan negara lain, peluang untuk mengembangkan usaha dan ekonomi masyarakat, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, globalisasi ini harus dikelola pengaruhnya agar benar-benar membawa berkah bagi Indonesia. Caranya ialah menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam pergaulan global serta menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam merespons tantangan yang dihadapi oleh Indonesia.

Berikut ini beberapa tantangan yang muncul di era globalisasi.

a. Menguatnya Individualisme

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, individualisme diartikan dengan empat makna, yaitu: 1) paham yang menganggap manusia secara pribadi perlu diperhatikan, 2) paham yang menghendaki kebebasan berbuat dan menganut kepercayaan bagi setiap orang, 3) paham yang mementingkan hak perseorangan dengan mengesampingkan kepentingan masyarakat atau negara, dan 4) paham yang menganggap diri sendiri (kepribadian) lebih penting daripada orang lain.

Individualisme ini sering kali menjadi agenda terselubung bagi isu Hak Asasi Manusia (HAM). Nilai-nilai HAM yang datang dari negara-negara Barat berasal dari pemikiran yang menempatkan manusia sebagai subjek individu yang bebas (individualisme). Pemikiran tersebut belum tentu cocok jika diterapkan di Indonesia. Pasalnya, budaya dan norma Indonesia lebih mengutamakan kepentingan bersama ketimbang kepentingan individu, seperti yang tercermin dalam budaya gotong royong.

Dengan menguatnya individu, hal-hal yang menjadi kepentingan umum sering kali terganggu. Tidak sedikit orang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang mengganggu kepentingan umum dengan mengatasnamakan HAM. Di saat bersamaan, negara tampak terlihat melemah. Negara sering kali tampak tidak berani menindak perbuatan-perbuatan individu yang mengganggu ketertiban umum karena khawatir mendapatkan protes dan tudingan sebagai pelanggaran HAM, baik di dalam maupun luar negeri.



Gambar 2.17 Ilustrasi Individualism

Sumber: canva.com

b. Kosmopolitanisme

Kosmopolitan berasal dari kata Yunani, *kosmopolites* yang berarti ‘warga dunia’ (*citizen of the world*). Kosmopolitanisme ini merupakan satu paham yang menganggap seluruh manusia adalah anggota dari satu komunitas (warga dunia/global). Paham ini mendorong adanya tatanan kehidupan manusia yang seragam yang didasari oleh nilai-nilai universal yang berlaku di seluruh dunia. Paham ini cenderung mengecilkan keberadaan nasionalisme, cinta tanah air, serta nilai-nilai lokal dan nasional yang berlaku di suatu daerah dan negara.



Gambar 2.18 Ilustrasi Kosmopolitanisme

Sumber: [canva.com](#)

Akibat dari menguatnya kosmopolitanisme ini ialah pelemahan dan identitas kebangsaan. Nilai, norma, dan aturan suatu negara dipaksa harus tunduk pada nilai universal tersebut. Akibatnya, rasa kebangsaan dan cinta tanah air akan terkikis. Padahal, dalam pidato lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, Sukarno mengatakan “*Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinya internasionalisme.*”

c. Fundamentalisme Pasar



Gambar 2.19 Ilustrasi Kapitalisme

Sumber: [canva.com](#)

Fundamentalisme adalah suatu paham yang cenderung memperjuangkan sesuatu secara mendasar tanpa kompromi. Sementara, kata *pasar* dalam pengertian fundamentalisme pasar lebih cocok diarahkan pada satu gagasan

atau pemahaman tentang mekanisme tukar-menukar (jual/beli). Harry B. Priyono mendefinisikan fundamentalisme pasar sebagai “satu gagasan/paham yang menganggap mekanisme pasar (transaksi jual/beli) bukan hanya sebagai prinsip pengatur alokasi pemenuhan barang/jasa kebutuhan, tetapi sebagai satu-satunya prinsip/dasar pengatur seluruh bidang kehidupan dalam tatanan bermasyarakat”.

Fundamentalisme pasar menekankan kepentingan ekonomi individu harus diutamakan di atas kepentingan ekonomi bersama. Tak hanya itu, fundamentalisme pasar juga menghendaki agar peran negara dalam pengaturan ekonomi harus sesedikit mungkin. Jika pun negara harus mengatur, aturan yang dikeluarkan harus memfasilitasi dan mendorong terciptanya kebebasan individu untuk dapat bertransaksi secara leluasa dalam pasar. Negara, misalnya, tidak punya kewenangan untuk menentukan harga bahan-bahan pokok yang menjadi kebutuhan warga negara, semuanya harus diserahkan kepada mekanisme pasar.

d. Radikalisme

Kata *radikalisme* berasal dari bahasa Latin "radix" yang berarti akar. Secara harfiah, radikalisme bermakna satu paham atau aliran (-isme) yang hendak mengubah tatanan kehidupan masyarakat secara mendasar atau mengakar dengan cara kekerasan. Pada dasarnya, kata *radikalisme* tidak selalu bermakna negatif karena peristiwa Revolusi 1945 dapat dikatakan sebagai gerakan radikal karena hendak mengubah tatanan masyarakat secara radikal dari penjajahan menuju kemerdekaan.

Untuk mempermudah, mari, kita simak pemaknaan radikalisme dari beberapa ahli sebagaimana yang dikutip dalam buku *Pancasila Dialektika dan Masa Depan Bangsa* (2019) berikut ini.

Kata radikalisme ini seringkali dikaitkan dengan sikap keberagamaan menjadi radikalisme beragama. 1) Ajaran yang sangat mengutamakan ketaatan mutlak pada agamanya dan menganggap salah keyakinan yang lain sehingga harus dimusnahkan; 2) Bahwa ajaran-ajaran agama diterima dirinya secara paksa, eksklusif, dan bukan sebagai bentuk pilihan yang bebas; 3) Ada sifat militansi (ketangguhan membela) yang berlebihan sehingga menutup ruang dialog dengan penganut agama lain dalam menjalani kehidupan sosial; 4) Sangat menyangkal keberadaan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas di luar agama yang dianut. Dalam konsep ini, semua tindakan bisa dibenarkan (termasuk mengorbankan manusia) demi tegaknya penafsiran sepihak atas nilai-nilai dalam agama.

e. Intoleransi

Kata *intoleransi* berasal dari kata toleransi yang mendapatkan imbuhan “in-” yang bermakna tidak sehingga kata *intoleransi* berarti tidak toleran. Kata *toleransi* sendiri berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Karena itu, intoleransi dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang atau sekelompok masyarakat selalu memaksakan keyakinannya untuk dituruti pihak lain, padahal sesungguhnya pihak lain pun mempunyai hak yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks Indonesia, praktik intoleransi terjadi di lingkungan sekitar kita, termasuk di sekolah. Penyebab maraknya intoleransi cukup beragam, beberapa di antaranya:

1. sikap memungkiri kemajemukan (keberagaman) sebagai keniscayaan,
2. adanya kepentingan politik pihak tertentu yang menggunakan agama untuk membangkitkan solidaritas berlebihan yang saling berlawanan,
3. kemiskinan yang berpengaruh pada rendahnya tingkat pendidikan dan wawasan serta kemasabodohan,
4. kurang adanya komunikasi (dialog) cerdas yang mendukung keberagaman dan kebangsaan sehingga memunculkan prasangka-prasangka yang berpotensi memicu kebencian.

C. Pancasila sebagai Pemandu

Pancasila merupakan ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga ia dapat menjadi bintang penuntun atau *leitstar* negara dan bangsa Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan. Pancasila bukan petunjuk teknis, melainkan di dalam sila-sila Pancasila, terangkum nilai-nilai luhur bangsa. Dengan demikian, ia memiliki keluwesan dan daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Tantangannya ialah apakah kita mau memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Sila pertama Pancasila, misalnya, dapat menuntun kita untuk menjadi bangsa yang berketuhanan melalui penguatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di sini bukan saja berkaitan dengan ibadah dan upacara keagamaan/kepercayaan, melainkan juga akan membentuk

pribadi yang luhur. Pribadi luhur tersebut dibuktikan dengan pengamalan ajaran dan nilai agama/kepercayaan seperti mengasihi dan membantu orang lain, bersikap adil, toleran, menjaga perdamaian, melestarikan lingkungan, dan lain sebagainya. Demikian juga, jika setiap diri kita mengamalkan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima dari Pancasila.

Memahami dan mengamalkan Pancasila bukan saja harus dilakukan oleh aparat negara ataupun satu kelompok tertentu. Lebih dari itu, semua komponen bangsa, baik aparat negara ataupun seluruh bangsa Indonesia harus memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kapasitasnya masing-masing. Penegak keadilan seperti hakim dan kepolisian harus mengamalkan sila-sila Pancasila dalam menjalankan tugasnya. Demikian juga bagi legislatif (DPR, DPD, DPRD tingkat I dan II), pemerintah (mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, kepala desa, lurah, RT/RW) juga harus mengamalkan sila-sila Pancasila dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Seluruh rakyat Indonesia juga harus mengamalkan sila-sila Pancasila.

Berbagai kelemahan bangsa dan negara Indonesia serta tantangan dan ancaman yang sedang dan akan dihadapi bangsa dan negara Indonesia dapat diatasi dengan pengamalan sila-sila Pancasila secara sungguh-sungguh. Dalam konteks individualisme, misalnya, Pancasila tidak menghilangkan kepentingan individu setiap warga negara melainkan menyeimbangkannya dengan kepentingan bersama. Karena itu, kepentingan individu harus diseimbangkan dengan kepentingan nasional. Demikian juga dengan tantangan fundamentalisme pasar yang menganggap manusia semata-mata sebagai makhluk ekonomi yang memiliki motivasi mengejar keuntungan sehingga berpotensi menciptakan kesenjangan dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Pancasila dapat menjadi jawaban atas tantangan tersebut, di mana di dalam ekonomi Pancasila, pasar harus dikelola dan diatur sedemikian rupa oleh negara sehingga tercipta lingkungan ekonomi yang adil di dalamnya.



Siap Berkinerja

Aktivitas 2.6

Setelah membaca bahan bacaan di atas, serta dua materi sebelumnya melalui analisis SWOT, sekarang saatnya mendiskusikan secara lebih mendalam. Kamu diminta untuk menentukan masing-masing 3 kelemahan, kekuatan, peluang, dan tantangan sebagaimana yang diulas dalam materi-materi sebelumnya. Kemudian, carilah dan tentukan salah satu contoh kasus

yang spesifik yang terjadi baik di sekitar kamu maupun melalui pencarian informasi di internet. Berdasarkan isu/tantangan dan kasus yang kamu pilih, sekarang diskusikan dengan rekanmu untuk menjawab pertanyaan: *bagaimana Pancasila menjawab tantangan tersebut?* Pancasila merupakan pandangan hidup yang selalu dapat digunakan bangsa Indonesia untuk menghadapi tantangan-tantangan yang muncul pada era globalisasi. Berikut ini beberapa pertanyaan yang perlu didiskusikan oleh kalian.

1. Bagaimana kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat kekuatan yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia? Siapa saja yang harus melakukan kebijakan dan strategi tersebut?
2. Bagaimana kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kelemahan bangsa dan negara Indonesia? Siapa saja yang harus melakukan kebijakan dan strategi tersebut?
3. Bagaimana kebijakan dan strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan peluang pengamalan Pancasila dalam kehidupan global? Peran-peran apa saja yang dapat dilakukan oleh Indonesia?
4. Bagaimana kebijakan dan strategi yang harus dilakukan untuk menjawab tantangan global yang sedang dan akan dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia?

Siapkan bahan paparan, baik melalui kertas maupun elektronik, untuk dipresentasikan di kelas.



Uji Kompetensi

Pilihlah jawaban yang paling tepat.

1. Pancasila dapat disebut sebagai kekuatan yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia karena dengan Pancasila,
 - A. revolusi harus dilakukan secara terus-menerus
 - B. kebebasan dan hak individu harus didahulukan di atas hak negara
 - C. seluruh kekayaan alam dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat umum
 - D. mendapatkan kesempatan untuk bersaing secara bebas
 - E. semua rakyat harus memasang lambang burung garuda di rumah masing-masing
2. Bonus demografi adalah
 - A. kompensasi tambahan yang didapatkan warga negara
 - B. usia produktif penduduk lebih tinggi daripada usia tidak produktif
 - C. usia produktif lebih rendah daripada usia tidak produktif
 - D. hadiah umur panjang yang dimiliki setiap warga negara
 - E. hadiah yang diberikan oleh rakyat kepada negara
3. Keragaman bangsa Indonesia merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia karena
 - A. keberagaman akan menyebabkan konflik sosial
 - B. setiap suku dapat menikah dengan suku yang berbeda
 - C. hubungan antarpemeluk agama dapat hidup rukun
 - D. dapat meningkatkan kompetensi multikulturalisme
 - E. dapat menjadi rujukan dunia tentang bentuk multikulturalisme
4. Sumber daya alam (SDA) Indonesia dapat menjadi kekuatan dan kelemahan sekaligus. Pilih mana pernyataan yang salah.
 - A. Indonesia adalah negara pengekspor terbesar kayu lapis di dunia.
 - B. SDA Indonesia merupakan kelemahan karena tidak dikelola dengan baik.
 - C. Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia.
 - D. Pengelolaan SDA masuk kategori tantangan dalam analisis SWOT.
 - E. Sumber Daya Alam memiliki komponen biotik dan abiotik

5. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pancasila adalah individualisme. Individualisme adalah
- paham yang mendahulukan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat atau negara
 - paham yang menjadikan kepentingan individu harus dikelola oleh negara
 - paham yang memaksa setiap warga negara untuk memeluk agama
 - paham yang digunakan untuk oleh kelompok komunis
 - paham yang menolak adanya Hak Asasi Manusia

Esai

- Pancasila disebut sebagai kekuatan yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia dibandingkan dengan ideologi-ideologi lain. Berikan penjelasan apa yang membedakan Pancasila, komunisme, dan kapitalisme. Sebutkan keunggulan Pancasila dibandingkan dengan ideologi komunisme dan kapitalisme.
- Pilih salah satu dari peluang dan tantangan yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Kemudian, analisis apakah kekuatan yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia dapat menjawab tantangan tersebut.



Pengayaan

- A. Untuk memperkaya dan memperdalam informasi tentang kekuatan dan peluang Indonesia, kamu dapat membaca menindaklanjuti materi kamu melalui mencari di internet dengan frasa kunci sebagai berikut.
 1. 44 Fakta tentang Indonesia.
 2. Apa saja yang menjadi keunggulan Indonesia.
 3. Making Indonesia 4.0.
- B. Untuk memperkaya dan memperdalam informasi tentang kelemahan dan tantangan Indonesia, kamu dapat membaca menindaklanjuti materi kamu melalui mencari di internet dengan frasa kunci sebagai berikut.
 1. 10 Kelemahan Indonesia.
 2. Merawat Ideologi Pancasila dan Tantangan di Masa Depan.
 3. Alasan Tersembunyi Kenapa Kita Susah Maju.
- C. Untuk memperkaya dan memperdalam informasi tentang Pancasila sebagai Pemandu, kamu dapat mencari di internet dengan frasa kunci sebagai berikut.

Mohammad Mona Adha & Erwin Susanto, Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Bangsa. Klik tautan berikut: <https://buku.kemdikbud.go.id/s/7idkj2> atau pindai QR Code berikut.

Pindai Aku!



Indonesia Jauh Lebih Besar dari yang Kita Kira.

“2050, Andai Kita Tidak Melakukan Apa-Apa.

Film, “Langit Tak Selamanya Abu-Abu”. Klik tautan berikut: <https://buku.kemdikbud.go.id/s/hfwgot>, atau pindai QR Code berikut.

Pindai Aku!



Siap Berefleksi

Tuliskan refleksimu pada pembelajaran ini.

Tanggal:

1. *Dari proses pembelajaran hari ini, hal yang saya dapatkan ialah:*

2. *Dari proses pembelajaran hari ini, hal yang perlu saya tindak lanjuti ialah:*

"Nilai-nilai Pancasila disarikan dari nilai, budaya, dan tradisi bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan global, seperti peperangan, krisis lingkungan hidup, kesehatan, individualisme, dan perubahan iklim. Tantangannya saat ini adalah bagaimana mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global."

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2023

Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII

Penulis: Ida Rohayani, Hatim Gazali, Dwi Astuti Setiawan

ISBN 978-623-194-624-9 (jil.3 PDF)

Bab 3

Kesadaran Warga Negara dalam Menghadapi Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban



Apa yang akan kamu lakukan jika terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara?



Tujuan Pembelajaran

Setelah melalui pembelajaran ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.



Kata Kunci

Kasus, Pelanggaran Hak, Pengingkaran Kewajiban, ASIK (Analisis, Sesuaikan, Inisiatif, dan Kembangkan)



Peta Konsep

Kesadaran Warga Negara dalam Menghadapi Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara yang Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menginisiasi Proyek Kampanye Antipelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban serta Upaya Warga Negara dalam Mencegahnya di Lingkungan Sekitar

Hai, jumpa kembali dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila. Kali ini, kamu akan diajak untuk menelusuri pemahaman tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Mungkin, kamu pernah menemukannya secara sadar, tetapi dianggap lumrah. Padahal, hal tersebut dapat menjadi sebuah kasus.

Pernahkan kamu mengalami kejadian disalip orang lain saat di antrean? Bagaimana perasaan dan tindakan kamu?

Mari, kita renungi kejadian disalip orang dikaitkan dengan keberadaan kita sebagai warga negara. Setiap orang memiliki cara dan jalan hidupnya masing-masing. Pilihan itu merupakan hak. Namun, sering, kita tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan telah melanggar hak orang lain, bahkan mengingkari kewajiban kita sendiri, contohnya ialah peristiwa disalip orang.

Untuk mengidentifikasi masalah serupa dengan peristiwa di atas, kamu akan diminta untuk melakukan berbagai aktivitas. Melakukan rangkaian aktivitas tersebut akan menghasilkan sebuah simpulan konsep tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kamu pun akan mampu mencari solusi terbaik terhadap permasalahan tersebut. Bahkan, kamu akan mampu mengampanyekan perilaku antipelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban kepada semua orang melalui berbagai media.

Apakah kamu siap? Kita akan mulai terlebih dahulu dengan penggalian pengalaman sehari-hari melalui menjawab pertanyaan berikut.



Asesmen Awal, Siap Belajar

1. Ceritakan pengalaman sederhana yang kamu anggap bahwa temanmu melanggar hakmu!
2. Bagaimana sikap temanmu saat dia tidak menyadari tindakan pelanggaran hak yang dilakukannya?
3. Bagaimana sikap kamu untuk menyadarkan temanmu?
4. Bagaimana peraturan negara dalam melindungi hak warga negaranya?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita mulai kegiatan pembelajarannya.

A. Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara yang Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945

Peristiwa disalip oleh orang lain dalam antrean merupakan salah satu perilaku sewenang-wenang yang dapat terkategori pengingkaran kewajiban. Hak yang dilanggar ialah urutan antre, kenyamanan, dan keamanan. Kewajiban yang diingkari ialah ketertiban, sopan santun, dan mementingkan diri sendiri. Mari, kita identifikasi definisi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban melalui aktivitas berikut.

1. Definisi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Kamu pernah mempelajari arti hak asasi manusia, bukan? Beberapa ahli menjelaskan maknanya dengan definisi yang berbeda. Hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan negara merupakan hak warga negara yang memunculkan kewajiban bagi siapa saja untuk memenuhinya. Untuk memahami lebih jauh tentang konsep hak dan kewajiban, kita akan memulai dengan aktivitas berikut.

1. Lakukanlah sesuatu yang membuat penampilanmu di hadapan teman-teman terasa lebih baik, seperti: menyisir rambut, membasuh wajah, membersihkan dan mengeringkannya sehingga segar kembali, pakaian seragam dirapikan, buku atau barang-barang sekolahmu disusun rapi.
2. Mintalah 5 orang temanmu untuk menanggapi apa yang telah kamu lakukan. Tunggu lah reaksi yang mereka lakukan atau ucapkan.
3. Setelah itu, ucapkan terima kasih untuk apa pun yang telah mereka tanggapi atas perubahannya.
4. Rasakan apa yang terjadi dalam hati dan pikiranmu atas tanggapan tersebut.

Kamu diperkenankan untuk memberikan penilaian terhadap tanggapan teman-temanmu melalui rambu-rambu penilaian berikut. Jadikan ini sebagai jurnal harianmu.

Tabel 3.1 Rambu-Rambu Penilaian Tanggapan Teman

Perubahan yang Saya Lakukan	Tanggapan Teman (Tuliskan Nama dan Bentuk Tanggapannya)	Predikat yang Saya Berikan pada Teman*

*Dapat Berupa Bintang, Bunga, Angka, atau Apa pun yang Dapat Mewakili Skor 1 s.d. 5

Silakan diskusikan untuk mengetahui lebih jauh sehingga maksud dan tujuan aktivitas yang kamu lakukan akan menjadi pembelajaran dalam memaknai hak dan kewajiban. Adapun dalam buku teks ini, kamu akan mempelajari definisi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

Tahukah kamu, bahwa perasaan yang muncul saat mendapatkan tanggapan merupakan sebuah fitrah (alamiah) seorang manusia untuk mendapatkan perhatian dan perilaku timbal balik dari orang lain? Kita merasa dihargai jika tanggapannya baik. Begitu pula ketika tanggapan itu tidak sesuai dengan

harapan, akan terasa sedih atau kecewa. Perasaan ingin dihargai dimiliki oleh tiap manusia. Maka, kita harus memiliki empati, yakni menempatkan diri pada posisi tersebut untuk menghargai.

Perasaan ingin dihargai ialah hak. Memupuk empati ialah kewajibannya. Itulah sebabnya, hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan dan mesti selalu berjalan beriringan. Jika keadaan keduanya tidak seimbang, pasti akan menimbulkan konflik. Dalam kasus tadi, misalnya. Bayangkan jika semua orang hanya ingin menuntut haknya untuk mendapatkan penghargaan, tetapi tidak ada satu pun yang mau melaksanakan kewajibannya dalam menghargai orang lain. Pasti yang terjadi ialah konflik, bukan? Oleh karena itu, perwujudan keseimbangan antara hak dan kewajiban sebenarnya diperlukan untuk menciptakan kehidupan manusia yang harmonis. Apalagi di dalam kehidupan bernegara yang meliputi keberadaan banyak orang. Keberadaan hak dan kewajiban tersebut tentunya perlu ditempatkan dalam berbagai peraturan yang dapat dipatuhi oleh setiap orang demi menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan diri mereka serta keharmonisan lingkungannya. Lalu, bagaimana kita memaknai hak dan kewajiban warga negara tersebut?

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, misalnya, negara menempatkan keberadaan hak dan kewajiban dalam posisi yang setara. Pada undang-undang tersebut, hak - sebagai sesuatu yang mendasar (hak asasi) - dimaknai sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sementara itu, kewajiban - dalam artian yang mendasar pula - dapat kita maknai sebagai segala sesuatu yang perlu dilakukan demi menjamin tegaknya hak (asasi) tersebut.

Bagaimana kita memaknainya? Definisi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut mengandung dua makna, yaitu sebagai berikut.

- a. Hak warga negara merupakan hak dasar yang melekat dalam diri setiap anggota masyarakat suatu negara sejak dia dilahirkan ke dunia dan disahkan berdasarkan undang-undang sebagai warga negara. Sementara itu, hak dasar adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperikemanusiaan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Jika hal itu terjadi, seorang warga negara akan kehilangan nilai kemanusiaan

sebagai jati diri dan negara akan melindunginya untuk menuntut hak tersebut sesuai aturan yang berlaku.

- b. Kewajiban warga negara merupakan konsekuensi langsung yang muncul dari keberadaan hak yang dimilikinya sebagai warga negara dalam rangka memuliakan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan menjaga keharmonisan hidup di dalam lingkungan bernegara. Tanpa kewajiban, manusia tidak akan hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan dan anggota suatu masyarakat yang dihormati. Oleh karena itu, seperti halnya hak, kewajiban perlu dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan agar dapat menciptakan kondisi memaksa bagi setiap orang, pemerintah, lembaga-lembaga lain untuk melaksanakannya.

Hak warga negara ialah hak asasi manusia Indonesia, sekitar dengan keberadaan kita sebagai anggota dari negara ini. Kewajiban warga negara muncul sebagai konsekuensi dari hak yang didapat sebagai warga negara. Keduanya bersifat timbal balik. Jika hak terpenuhi, kewajiban harus dilaksanakan. Sebaliknya, jika kewajiban sudah dilaksanakan, hak harus dipenuhi. Maka, dalam pelaksanaannya, harus tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika demikian, arti pelanggaran hak adalah tidak terpenuhinya hak asasi manusia sebagai anggota dari masyarakat Indonesia, baik oleh negara maupun anggota masyarakat lainnya. Adapun pengingkaran kewajiban adalah terjadinya pelanggaran atas konsekuensi dari hak yang telah dipenuhi atau keharusan menjalankan perintah yang merupakan aturan negara.



Gambar 3.1 Manusia terlahir memiliki akal budi dan rasa kemanusiaan.

Sumber: Futri Fuji W/Kemdikbudristek (2023)

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945

Pada aktivitas kali ini, kamu akan diminta untuk membaca konsep tentang warga negara. Setelah kamu membaca secara saksama, lanjutkan dengan aktivitas mengeksplorasi. Berikut ini penjelasan tentang warga negara.

Siapakah warga negara Indonesia? Dalam Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945 tentang ketentuan kewarganegaraan, dijelaskan bahwa:

Ayat (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Ayat (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Bunyi pasal di atas sudah sangat jelas menerangkan siapa warga negara dan penduduk. Apakah kamu penduduk yang juga warga negara Indonesia? Atau, kamu penduduk yang ternyata bukan warga negara Indonesia? Untuk mengetahui lebih jauh tentang status kewargaan suatu negara, mari, kita telusuri hal berikut.

Salah satu ciri secara administratif yang dapat kita pelajari di antaranya kartu tanda penduduk (KTP). Di sana, terdapat keterangan tentang status kewarganegaraan seseorang. Namun, KTP hanya sekadar menerangkan kedudukan atau tempat tinggal/domisili seseorang. Surat izin mengemudi (SIM) juga menyebutkan status kewargaan seseorang. Namun, lebih tepatnya, hanya untuk izin seseorang mengendarai kendaraan bermotor. Kartu keluarga (KK) dan akta kelahiran dapat dijadikan dasar yang menjelaskan bahwa seseorang adalah warga negara Indonesia. Begitu pula dengan paspor yang juga merupakan kartu identitas kewarganegaraan seseorang.

Hal yang paling penting dalam pembuktian kewarganegaraan bukan sekadar kartu identitas, tetapi pengakuan dalam peraturan



Gambar 3.2 Identitas Domisili Penduduk

Sumber: fokus.co.id

perundang-undangan yang menyertakan keberadaan hak dan kewajiban yang dimiliki. Oleh sebab itu, seorang warga negara diikat oleh negara melalui produk hukum. Salah satunya ialah UUD NRI Tahun 1945. Di dalamnya, terdapat pasal-pasal yang khusus membahas tentang hak dan kewajiban warga negara.

Untuk mengetahui lebih jauh apakah negara melindungi hak warganya dan menerbitkan kewajiban berdasarkan nilai-nilai martabat kemanusiaan, mari, kita eksplorasi melalui aktivitas berikut.



Siap Mengeksplorasi

Aktivitas 3.2

1. Baca pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Sumbernya boleh dari internet, perpustakaan, atau melalui sumber lainnya.
2. Pastikan bahwa UUD NRI Tahun 1945 yang dibaca merupakan hasil amandemen (perubahan) keempat.
3. Ambil salah satu pasal atau ayat dari Pasal 26 sampai dengan Pasal 34.
4. Buatlah catatan hasil bacaan seperti contoh berikut.

Tabel 3.2 Eksplorasi Pasal UUD NRI Tahun 1945
tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal yang Dibaca	Isi Pasal dan Ayat	Hasil Pemahaman Saya	Cara Melaksanakan Hak dan Kewajiban Warga Negara

5. Diskusikan bersama temanmu di kelas. Gunakan bahasa yang baik, sikap yang santun.
6. Jawabanmu akan dikonfirmasi oleh guru apakah sesuai atau masih perlu diperbaiki.

Berdasarkan hasil diskusimu di kelas, alangkah baiknya jika kamu salin hasil eksplorasi temanmu untuk dibaca ulang dan dipahami. Tujuannya agar kamu dapat melakukan analisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal tersebut.

UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur secara spesifik tentang hak dan kewajiban warga negara. Menerjemahkan amanat Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yakni produk hukum harus mengandung asas nilai sila kedua, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan asas perikemanusiaan universal untuk mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan. Konsekuensi juga mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya.



Tahukah Kamu?



[https://buku.kemdikbud.go.id/s/
UUD_NRI_1945](https://buku.kemdikbud.go.id/s/UUD_NRI_1945)



Gambar 3.3 Persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya.

Pembukaan beserta pasal-pasal dalam UUD NRI tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan dari asas peri kemanusiaan dalam hukum positif Indonesia. Disarikan dari berbagai kehidupan sehari-hari menjadi aturan yang berlaku.

Lebih jauh, Parasong (2021) mengungkapkan Pancasila, terutama sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab membawa implikasi bahwa negara memperlakukan setiap warga negara atas dasar pengakuan dan harkat martabat manusia dan nilai kemanusiaan yang mengalir kepada martabatnya. Itulah sebabnya, walaupun pasal UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai HAM hanya 10 pasal, tetapi pada dasarnya, semua produk hukum yang dibentuk di Indonesia mengagungkan nilai martabat kemanusiaan.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mendasari peraturan perundangan-undangan yang ada di Indonesia. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan amanat secara khusus kepada peraturan perundangan di Indonesia untuk memberlakukan warga negara Indonesia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Sila itu juga mengamanatkan melindungi setiap hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara Indonesia. Mari, kita lakukan kegiatan berikut ini.



Siap Berlatih

Aktivitas 3.3

Keterampilan Mengklarifikasi Nilai melalui Pengamatan Kasus

Wagub DKI Sayangkan Perusakan Fasilitas Umum Saat Aksi Tolak UU Cipta Kerja

Penulis Ryana Aryadita Umasugi | Editor Irfan Maullana

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta menyayangkan aksi anarkis dan perusakan terhadap fasilitas umum saat demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis (8/10/2020). Sejumlah perusakan terjadi pada halte bus, pos polisi, hingga lampu lalu lintas. "Yang pertama, kami menyayangkan ada aksi anarkis dari masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang telah melakukan perusakan tempat umum, fasilitas umum," kata Ariza dalam rekaman yang diterima, Jumat (9/10/2020). Menurutnya, hingga saat ini terdata 25 halte bus yang rusak dengan kerugian mencapai Rp65 miliar. "Karena tempat-tempat tersebut adalah fasilitas umum yang digunakan untuk masyarakat umum, seperti halte kurang lebih ada 25 halte. Kerugian yang dihitung sementara Rp65 miliar," ucapnya.

Sumber: Ryana Aryadita Umasugi/kompas.com (2020)

Berdasarkan kasus tersebut, analisis hal-hal berikut ini berdasarkan nilai dalam UUD NRI Tahun 1945.

1. Jelaskan berikut alasannya, apakah kasus perusakan fasilitas umum merupakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

2. Apa saja hak dan kewajiban warga negara yang membiayai pembangunan fasilitas umum melalui iuran pajak?
3. Kasus tersebut disayangkan oleh salah satu pemimpin daerah. Apa sebabnya jika dikaitkan dengan cara memperoleh dana pembangunan daerah? Hak negara mana yang terlanggar pelaku?
4. Pasal berapa dalam nilai UUD NRI Tahun 1945 yang paling dilanggar dan diingkari?

Tiap jawaban yang kamu berikan akan dinilai berdasarkan kriteria berikut.

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Asesmen Formatif

Skor 5	Jika jawaban terdiri atas: menceritakan kembali kasus, terdapat peraturan perundang-undangan yang dibahas dengan lengkap, solusi yang diberikan bersifat memperbaiki, dan memunculkan nilai pembelajaran bagi diri untuk tidak melakukan pelanggaran.
Skor 4	Jika jawaban terdiri atas: menceritakan kembali kasus, terdapat peraturan perundang-undangan yang dibahas, solusi yang diberikan bersifat memperbaiki.
Skor 3	Jika jawaban terdiri atas: menceritakan kembali kasus, terdapat peraturan perundang-undangan yang dibahas.
Skor 2	Jika jawaban terdiri atas: menceritakan kembali kasus, terdapat peraturan perundang-undangan, tetapi kurang tepat.
Skor 1	Hanya menceritakan kembali kasus pelanggaran tersebut.

Jika jawabanmu semua benar, skormu = 4 x 5 = 20

Nilai akhir yang diperoleh dapat dihitung melalui formula berikut:

$$NA = \frac{Skor\ yang\ Diperoleh}{Skor\ Maksimal} \times 100$$

Untuk melengkapi pengetahuanmu tentang hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam perundang-undangan atau peraturan lainnya, kita bahas pengertian dari dasar hukum hak dan kewajiban warga negara. Mari, kita simak penjelasan berikut.

Pengertian dasar hukum hak dan kewajiban warga negara merupakan aturan yang mengikat warga negara dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dalam tata tertib suatu masyarakat. Definisi ini merupakan paduan

dari pengertian dasar itu sendiri sebagai pangkal ajaran, aturan. Pengertian hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat. Maka, jelas bahwa warga negara wajib patuh pada perintah dan larangan hukum agar kehidupan lebih tertib dan nyaman.

Dasar hukum yang menjadi rujukan warga negara mengenai hak dan kewajiban antara lain:

1. UUD NRI Tahun 1945,
2. Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang HAM,
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM,
4. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT),
7. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras, dan Etnis.

Berikut ini tautan yang dapat kamu baca untuk pengetahuan lebih lanjut tentang peraturan-peraturan tadi.

Tahukah Kamu?


[https://buku.
kemdikbud.go.id/s/
tap_mpr_xvii_1998](https://buku.kemdikbud.go.id/s/tap_mpr_xvii_1998)


[https://buku.
kemdikbud.go.id/s/
uu_39_1999](https://buku.kemdikbud.go.id/s/uu_39_1999)


[https://buku.
kemdikbud.go.id/s/
uu_26_2000](https://buku.kemdikbud.go.id/s/uu_26_2000)


[https://buku.
kemdikbud.go.id/s/
uu_23_2002](https://buku.kemdikbud.go.id/s/uu_23_2002)


[https://buku.
kemdikbud.go.id/s/
uu_23_2004](https://buku.kemdikbud.go.id/s/uu_23_2004)

Adapun peraturan-peraturan hasil ratifikasi (peraturan yang muncul dari kesepakatan internasional yang dijadikan atau diadaptasi menjadi peraturan di Indonesia), yaitu seperti berikut.

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

3. Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Politik Perempuan.
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.
6. Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.
7. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak.
8. Keputusan Presiden No. 48 Tahun 1993 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Antiapartheid dalam Olahraga.

Kewajiban warga negara terbit bersamaan dengan hak warga negara. Salah satu ialah bela negara yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menyebutkan, "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara." Selain itu, segala hak yang didapat meminta kewajiban yang harus dipenuhi.

Membela negara merupakan hak warga negara sebab kita yang mendiami negara berharap hidup dengan aman dan nyaman. Jika ada yang melanggar, kita berhak untuk membela keamanan dan kenyamanan kita. Adapun wujud kewajiban membela negara ialah siap sedia ketika negara dalam keadaan genting membutuhkan tenaga, pikiran, bahkan angkat senjata. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 mengisyaratkan perilaku demikian.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaannya, harus terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap ada hak yang dituntut, akan menerbitkan kewajiban yang harus dipenuhi.



Siap Berefleksi

Bagaimana hasil latihanmu? Jika masih merasa belum memahami pembahasan tentang hal ini, kamu dapat bertanya lebih jauh kepada guru atau temanmu yang dianggap lebih memahami.



Gambar 3.4 Siswa SMA berkontribusi menaikkan daya saing melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.

B. Menginisiasi Proyek Kampanye Antipelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Apakah kamu pernah mengusulkan sebuah gagasan agar situasi berjalan lebih baik melalui sebuah ajakan? Semoga kamu termasuk orang yang pernah melakukannya, ya!

Pada aktivitas kali ini, kamu diminta untuk melakukan kegiatan yang mendorong orang lain melakukan seperti yang kamu harapkan. Tentunya, perbuatan baik untuk mengajak warga negara Indonesia melakukannya. Ini aktivitas yang akan dilakukan sesuai elemen Berkolaborasi dari dimensi Profil Pelajar Pancasila, yakni Bergotong Royong.



1. Carilah pengumuman, baik di sekolah, lingkungan sekitar, maupun masyarakat luas, yang mengajak untuk berbuat sesuatu bagi bangsa.
2. Simaklah ajakan tersebut dan pahami dengan menganalisis informasi apa yang ada di dalamnya.
3. Jelaskan gagasan apa yang mengundang emosi kamu merasa prihatin atau bergerak untuk melakukannya.
4. Buatlah cara kampanye sederhana dengan menggunakan berbagai simbol dan media secara efektif, serta strategi komunikasi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak guna mencapai berbagai tujuan bersama.
5. Kamu dapat menyajikan sesuai kegemaran/profilnya masing-masing seperti berikut.
 - a. Proyek produksi (poster, video, *podcast*, *jingle*, infografik, buletin laporan tertulis, esai, foto, surat-surat, buku panduan, brosur, program radio, atau jadwal perjalanan).
 - b. Proyek kinerja (pementasan, presentasi lisan, pertunjukan teater).
 - c. Proyek organisasi (pembentukan kelompok diskusi atau program mitra percakapan).
6. Sajikan sesuai dengan minat kamu dalam membuat produk sederhana tersebut, secara berkelompok dan gotong royong.

Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Karya Kampanye Antipelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

Aspek	Kriteria
Gagasan	Orisinal maupun pengembangan yang sudah ada.
Simbol dan media efektif yang dipilih	Sesuai tujuan dan menarik.
Strategi komunikasi yang digunakan	Bahasa Indonesia atau serapan dari bahasa asing yang baik dan santun.
Solusi masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban	Dapat mengajak dan memperbaiki perilaku.

Hal yang perlu kamu perhatikan dalam melakukan aktivitas ini ialah amati dirimu, perubahan apa yang terjadi saat kamu membuat alat kampanye tersebut. Diskusikan apa yang dirasakan dan buatlah sebuah simpulan tentang bagaimana memperbaiki atau bahkan mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Untuk mengetahui lebih jauh alasan aktivitas yang kamu lakukan, mari kita telusuri sebuah nilai tentang penghargaan terhadap jerih payah seseorang atau masyarakat berikut!

1. Implementasi Penghormatan terhadap Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pada dasarnya, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan seseorang atau kelompok saat mereka tidak menghargai jerih payah bangsanya dalam mengisi pembangunan. Memelihara bahkan mengembangkan fasilitas umum harus menjadi bagian dari tujuan warga negara, dan hak kita sebagai warga negara adalah mendapatkan fasilitas umum yang baik.

Cara memelihara fasilitas umum ialah melalui kepatuhan membayar pajak. Dengan pajak, pembangunan infrastruktur akan berjalan lancar. Fasilitas umum akan terbangun dengan baik seperti sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, dan jembatan, serta bidang lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan iuran wajib masyarakat yang dipaksakan melalui undang-undang. Penerimaan hasil pajak tersebut kemudian akan digunakan oleh Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan secara nasional.



Gambar 3.5 Melaksanakan kewajiban dalam menjaga infrastruktur merupakan salah satu bukti mengapresiasi karya bangsa.

Siapakah yang mengelola dan mengumpulkan dana masyarakat tersebut? Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam tengat waktu tertentu mengelola dan menyalurkan dana pajak untuk pembangunan Indonesia. Dengan demikian, kita dapat menikmati fasilitas umum yang baik seperti jalan-jalan yang dikelola dan dirawat dengan baik, sekolah dan fasilitas kesehatan yang modern, dan lain sebagainya.

Fasilitas tersebut dibuat untuk melayani masyarakat. Jika fasilitas umum tersebut rusak, pihak yang dirugikan bukan pemerintah saja. Apakah kita tidak merasa dirugikan sebagai orang yang ikut membiayai pembangunan fasilitas umum? Apalagi, telah banyak orang yang bekerja hingga berkeringat kelelahan, mengerahkan seluruh kemampuan untuk membangun agar menjadi sebuah karya yang layak dan laik (sesuai standar). Saatnya jiwa kita terpanggil untuk menghormati jerih payah sendiri maupun orang lain. Setidaknya, berempati jika kita merasa tidak terlibat dalam membangun. Mental menghargai hasil karya orang lain sebagai amanat dari nilai Pancasila terutama sila ke-2 dan ke-5, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus dipupuk dan dikembangkan.

Begitu pula hak dan kewajiban dalam pendidikan. Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan ‘Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan’. Pada Pasal 31 ayat (2), ‘Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya’. Pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi sarana dan prasarana belajar yang memadai karena mendapatkan pendidikan merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Sebagai hak warga negara dalam meningkatkan kualitas hidupnya, warga negara berhak mencapai pendidikan yang lebih tinggi.

Bahkan, dalam hal kesejahteraan warga negara, negara wajib melaksanakan Pasal 34 ayat (2), yakni ‘Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan’. Dilanjutkan Pasal 34 ayat (3) bahwa ‘Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak’.

Pesan Ir. Sukarno saat kursus Pancasila (1958) dalam pidatonya memberikan amanat yang begitu berharga untuk keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia. Berikut penggalan akhir dari pidatonya.

.... Jangan mengira bahwa dengan berdirinya Negara Indonesia Merdeka itu perjuangan kita telah berakhir. Tidak! Bahkan, saya berkata: Di dalam Indonesia Merdeka itu, perjuangan kita harus berjalan terus, hanya lain sifatnya dengan perjuangan sekarang, lain coraknya. Nanti, kita bersama-sama, sebagai bangsa yang bersatu padu, berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Pancasila Jikalau bangsa Indonesia tidak bersatu dan tidak mentekad mati-matian untuk mencapai merdeka, tidaklah kemerdekaan itu akan menjadi milik bangsa Indonesia buat selama-lamanya sampai akhir zaman. Kemerdekaan hanyalah diperdapat dan dimiliki oleh bangsa, yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad "Merdeka, -merdeka atau mati!".



Gambar 3.6 Amanat Presiden RI-1 Ir. Sukarno untuk melanjutkan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan.

Sumber: n.v. wirantono/wikimedia commons/domain publik (1959)

Hal ini mengisyaratkan kepada kita sebagai penerus bangsa untuk terus berjuang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan zaman. Saling bahu-membahu bagi Indonesia lebih baik. Aktivitas gotong royong yang kamu lakukan merupakan salah satu cara bagaimana kamu dapat menghargai hasil karya sendiri dan teman. Itulah dasar dari empati agar menghormati hak dan kewajiban.

2. Nilai Kemanusian yang Adil dan Beradab untuk Mendukung Pembangunan

Pada aktivitas sebelumnya, kamu diajak untuk menyadari lingkungan sekitarmu dengan menghargai hasil karya orang lain. Kali ini, kamu akan diajak untuk menelusuri nilai konsensus apa yang harus dimiliki warga negara. Motivasi apa yang membuat kamu memiliki harga diri?

Prinsip yang kedua dari nilai Pancasila menjadi dasar dalam menentukan produk hukum maupun kebijakan negara. Pergeseran nilai maupun istilah yang digunakan mempertimbangkan harkat dan martabat manusia.

Implementasi menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam kehidupan bernegara dapat terlihat, di antaranya pada perubahan istilah kewajiban menyetor pajak. Sejak 1984, wajib pajak diberi kepercayaan oleh

negara untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang wajib dia bayarkan. Iuran sekolah pun istilahnya berubah menjadi *sumbangan* atau uang kuliah tunggal (UKT) bagi perguruan tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk memperhalus makna perintah menjadi sebuah ajakan dalam mengisi pembangunan yang merupakan kewajiban warga negara sebagai wujud dari amanat nilai Pancasila, yakni *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*.



Gambar 3.7 Menghormati hak dengan melaksanakan pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya.

Prinsip yang kelima dari Pancasila dijadikan dasar pembangunan dan pemerataan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga negara Indonesia merasakan peran Kementerian, Lembaga Negara, dan Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan dana untuk membangun kesejahteraan. Pengalokasian tersebut dibuat dalam kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yakni menggunakan dana pajak yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kamu telah mengetahui bahwa mengisi pembangunan ini menjadi bagian dari nilai penghormatan pada hak dan kewajiban warga negara. Pada aktivitas kali ini, kamu diminta untuk menunjukkan kinerja dengan etos dan budaya kerja industri sebagai bagian dari keterampilan vokasi (kerja).

**KEMAMPUAN MENCIPITA**

- ◎ Pada hari Minggu, jalan-jalanlah keliling lingkungan tempat kamu berada.
- ◎ Carilah sebuah objek pariwisata tiga dimensi yang kerap menjadi tempat orang berlibur atau berkunjung (misalnya: patung, jembatan, bangunan, air terjun, dan lain-lain).
- ◎ Jangan lupa cari keterangan yang menjelaskan tentang objek tersebut untuk kamu pelajari sebagai nilai menjunjung harkat martabat bangsa.
- ◎ Buatlah miniatur benda tiga dimensi tersebut dengan menggunakan tanah liat atau bahan-bahan lainnya seperti gips, kertas karton, kaleng, karet, dan lain-lain tentunya yang mudah kamu dapatkan.
- ◎ Tunjukkan bahwa dalam melakukan karya tersebut, kamu memiliki etika profesi (bertanggung jawab dan komitmen) dan budaya industri, yakni menerapkan 5 R: Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin.
- ◎ Presentasikan hasil karya kamu tersebut bersama-sama dengan rekan lainnya dalam sebuah acara pameran seni sekolah atau di depan ruang kelas kamu. Reklamlah dalam bentuk video yang selanjutnya akan diunggah ke Youtube.com.

Aktivitas kali ini akan dinilai dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel 3.5 Ketentuan Penilaian Produk dan Kinerja

Kriteria Produk	Kriteria Penilaian Kinerja
1. Ide/gagasan yang kreatif untuk berkomunikasi melalui karya sebagai hasil anak bangsa untuk menjunjung martabat manusia Indonesia.	Penilaian Kelompok: Secara berkelompok, dapat mengerjakan karya secara: <ol style="list-style-type: none">1. bertanggung jawab dan komitmen pada aturan produk;2. ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas;3. menampilkan budaya industri, yakni menerapkan 5 R: Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin.

2. Tidak ada unsur yang dapat disinyalir merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).	<p>Penilaian Individu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menampilkan keterampilan dalam mengusulkan ide/gagasan. 2. Menunjukkan jiwa legawa dalam bekerja sama. 3. Berkomitmen dengan kelompoknya sebagai bukti tanggung jawab.
3. Produk tidak boleh bermuatan politik, pornografi, kekerasan, dan bentuk lainnya yang dapat menimbulkan efek negatif atau hal-hal yang dapat merugikan kelompok tertentu.	<p>Penyajian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai tema. 2. Menjaga orisinalitas (hasil karya kelompok/bukan milik yang lain).



Siap Berefleksi

Ceritakan pengalaman kamu saat membuat sebuah produk secara berkelompok! Pembelajaran apa yang didapat sebagai makhluk sosial dan upaya apa yang kamu lakukan ketika terjadi salah paham?

Apakah kamu sudah memahami bagaimana cara mengajak orang lain untuk menghormati hak warga negara? Jika masih merasa belum memahami pembahasan tentang hal ini, dapat ditanyakan lebih jauh kepada guru.

C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban serta Upaya Warga Negara dalam Mencegahnya di Lingkungan Sekitar

Kamu telah sampai pada pembahasan tentang bagaimana mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia, lebih khusus saat menjalaninya di lingkungan sekitar. Kamu sudah mendapatkan penjelasan tentang hak dan kewajiban warga negara. Sekarang, kita akan mengeksplorasi pengetahuanmu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

1. Mengenali Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara melalui Analisis Peraturan Perundang-undangan

Bagaimana cara kamu mengetahui bahwa kamu pernah melanggar hak atau mengingkari kewajiban sebagai warga negara? Pernahkah membaca papan

pengumuman tentang perintah atau larangan di sekitarmu? Apakah kamu melakukan sesuai perintah atau tidak melakukan karena ada larangannya? Ceritakan pengalaman tersebut pada teman sebelah kamu.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, mari, kita menganalisis beberapa peraturan yang ada di Indonesia. Peraturan itu dijadikan sebagai rujukan analisis bentuk pelanggaran atau pengingkaran hak dan kewajiban yang sering terjadi.



Siap Mengeksplorasi

Aktivitas 3.6

1. Dalam aktivitas kali ini, kamu akan dibagi menjadi 3 kelompok yang diberi tugas berbeda seperti berikut.
Kelompok I menganalisis isi UUD NRI Tahun 1945.
Kelompok II membandingkan secara mendalam isi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Kelompok III membahas isi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Setiap kelompok akan menjawab satu buah pertanyaan kunci, yang diajukan oleh guru.
3. Pertanyaan kunci dapat berupa: Hak dan kewajiban apa saja yang diatur dalam peraturan tersebut? Pelanggaran dan pengingkaran seperti apa yang pernah terjadi di masyarakat sesuai peraturan yang dijelaskan tadi? Materi tentang peraturan tadi dapat dipindai melalui tautan berikut.

Tahukah Kamu?



[https://buku.kemdikbud.go.id/s/
UUD_NRI_1945](https://buku.kemdikbud.go.id/s/UUD_NRI_1945)



[https://buku.kemdikbud.go.id/s/
uu_35_2014](https://buku.kemdikbud.go.id/s/uu_35_2014)



[https://buku.kemdikbud.go.id/s/
tap_mpr_xvii_1998](https://buku.kemdikbud.go.id/s/tap_mpr_xvii_1998)

4. Tiap kelompok menuliskan jawaban atas pertanyaan kunci di kertas *flipchart* atau papan tulis, bisa juga kamu tulis di laptop jika ada.

5. Tiap kelompok menunjuk juru bicara untuk mempresentasikan hasil diskusinya secara singkat dan padat dalam pleno. Tiap kelompok mendapat kesempatan waktu untuk presentasi selama 5 menit, dan untuk menjawab pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain selama 5 menit. Kelompok lain wajib menyampaikan minimal satu buah tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok yang sedang presentasi.
6. Tiap kelompok harus menyimak dengan serius saat kelompok lain melakukan presentasi.

Pada asesmen diskusi ini, berikan penilaianmu pada 4 rekan yang berdiskusi. Adapun kriterianya sebagai berikut.

Tabel 3.6 Pedoman Penskoran Diskusi

No	Nama Peserta Didik	Skor 1 – 4	Nilai = Skor x 25

Skala skor 1-4 dengan ketentuan:

- 1 jika peserta didik cukup bertanya saja
- 2 jika peserta didik mampu bertanya dan menjawab
- 3 jika peserta didik mampu bertanya dan menjawab dengan kritis
- 4 jika peserta didik bertanya dan menjawab kritis serta memberikan solusi

Perhatikanlah kriteria asesmen analisis berikut ini. Berikan tanda cek (✓) pada kriteria yang sesuai untuk menilai 4 orang temanmu yang berdiskusi dan menganalisis, melalui kriteria berikut.

Tabel 3.7 Kriteria Asesmen Analisis

No	Nama Siswa	Menceritakan Kembali	Membandingkan Kenyataan dengan yang Seharusnya	Menyebutkan Landasan Hukum	Terdapat Solusi	Nilai = Jumlah (✓) x 25

2. Warga Negara yang ASIK Mencegah terjadinya Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban di Lingkungan dengan Demokratis dan Santun

Pada pembelajaran kita kali ini, kamu akan menelusuri dan mengidentifikasi diri, apakah kamu termasuk warga negara yang siap dan sigap dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkunganmu dengan demokratis dan santun. Dimensi Profil Pelajar Pancasila yang harus kamu capai ialah Bergotong Royong dengan kompetensi tanggap terhadap lingkungan sosial sebagai salah satu elemen dari kepedulian. Aktivitas yang akan kita lakukan mengikuti alur ASIK, yakni Analisis, Sesuaikan, Inisiatif, dan Kembangkan. Alur ini merupakan salah satu cara yang dapat kamu ikuti ketika menghadapi permasalahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di lingkungan kamu.



Gambar 3.8 Alur Pembelajaran ASIK

Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

Pada tahap ini, kamu diminta untuk tidak terjebak dengan sebuah peristiwa yang dianggap atau diembuskan seolah-olah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Caranya ialah dengan menyelidiki kasus tersebut untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Setelah kamu menemukan keadaan yang sebenarnya, lakukan klarifikasi dengan cara menganalisis kesesuaian peristiwa berdasarkan peraturan yang berlaku tentang hak dan kewajiban warga negara. Setelah itu, hal yang paling penting ialah membuat inisiatif.

Inisiatif ialah prakarsa untuk melakukan perbuatan agar suatu peristiwa tidak terjadi. Dalam hal ini, kamu diminta untuk memprakarsai sebuah tindakan dalam mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terkadang dianggap lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

Inisiatif harus kamu kembangkan dari hal yang paling mudah dilakukan sampai dengan sanggup mencegahnya sesuai dengan peran yang kamu miliki di masyarakat. Misalnya, kamu hanya mampu mengingatkan keluargamu, kemudian teman-teman sepermainan, di sekolah, ke masyarakat, dan terus sampai dapat mencegah ke lingkungan yang lebih luas lagi.

Kamu akan menjadi agen perubahan, perantara perubahan atas keadaan lingkungan yang tidak menghargai harkat dan martabat manusia. Mulai dari hal sepele sampai dengan sebuah kasus, dari hal yang sederhana sampai yang paling kompleks, dari diri sendiri sampai orang lain. Namun, harus disesuaikan dengan peran kamu. Artinya, jangan sampai melebihi kapasitas kemampuan dan kewenangan kamu. Misalnya, sebagai seorang anak, selesaikan layaknya seorang anak, tidak harus memaksakan diri bagai orang dewasa. Kita mulai dengan mengikuti aktivitas pembelajaran berikut.



Gambar 3.9 Siswa SMA ialah perantara perubahan untuk hak dan kewajiban warga negara.

**STUDI KASUS**

1. Kamu akan dibagi dalam 4 kelompok untuk melaksanakan alur ASIK.
2. Tiap kelompok diberi nama sesuai tema yang akan diinvestigasi, yakni: *cyber bullying*, diskriminasi, intoleransi beragama, dan persekusi.
3. Untuk bahan analisis, kamu dapat menggunakan tautan jurnal dan artikel berikut yang dapat diakses:
cyber bullying
<https://buku.kemdikbud.go.id/s/iiuqjb>
diskriminasi
<https://buku.kemdikbud.go.id/s/w38s9p>
intoleransi beragama
<https://buku.kemdikbud.go.id/s/okyddh>
persekusi
<https://buku.kemdikbud.go.id/s/vsntce>
4. Cari kasus sesuai tema yang didapat dari berbagai media. Ikuti langkah-langkah sesuai dengan alur ASIK.
5. Temukan solusi terbaik. Buatlah komitmen untuk menerapkannya dalam kehidupan agar kasus tersebut tidak menimpa kamu baik sebagai pelaku maupun korban.
6. Untuk menilai aktivitas ini, kamu dapat menggunakan Tabel 3.7 Asesmen Analisis.

Tahukah Kamu?

<https://buku.kemdikbud.go.id/s/iiuqjb>



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/w38s9p>



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/okyddh>



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/vsntce>

Untuk memberikan pemahaman tentang kasus yang kamu analisis, berikut uraian tentang tema-tema tadi.

a. *Cyber Bullying*

Cyber bullying (perundungan dengan menggunakan teknologi digital) merupakan sebuah perilaku agresif yang dilakukan suatu kelompok atau individu, menggunakan media elektronik, secara berulang-ulang dari waktu ke waktu. Perilaku *cyber bullying* dapat terjadi di media sosial, platform *chatting*, platform bermain *game*, dan ponsel. Berikut ini contoh tindakan *cyber bulling*.

1. Menyebarluaskan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial.
2. Mengirim pesan atau ancaman yang menyakiti melalui platform *chatting*, menuliskan kata-kata menyakiti pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan/menyakiti.
3. *Trolling* - pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial, ruang obrolan, atau *game online*.
4. Mengucilkan, mengecualikan anak-anak dari *game online*, aktivitas, atau grup pertemuan.

Dalam hukum Indonesia, *cyber bullying* dimasukkan ke dalam definisi pencemaran nama baik atau penghinaan. Definisi itu kurang memadai jika dilihat bentuk-bentuk *cyber bullying* yang lebih dari sekadar pencemaran nama baik.

Tindak *cyber bullying* diatur dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Ketentuan pidana mengenai tindak kejahatan perundungan dunia maya (*cyber bullying*) diatur dalam BAB XI Pasal 45 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 45A ayat (2) dan Pasal 45B Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, perilaku *cyber bullying* merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat dikenakan hukuman.



Gambar 3.10 *Cyber bullying* menyakiti orang lain berulang-ulang secara sengaja untuk melukai.

Kata *cyber* ialah sebuah media elektronik yang terhubung ke dalam jaringan komputer di seluruh dunia, berfungsi sebagai ajang komunikasi satu arah maupun timbal-balik dalam jaringan (daring). *Cyber* ialah sebuah dimensi terkomputerisasi dimana kita dapat dengan bebas memindahkan informasi dan mengakses data yang berupa audio dan visual.

Bullying atau dalam bahasa Indonesia berarti perundungan. Perundungan adalah kecenderungan seseorang atau kelompok dalam melakukan tindakan menyakiti orang lain dengan berulang-ulang secara sengaja untuk melukai, membuat korbannya merasa tidak nyaman dan takut, secara fisik, verbal, dan mental dan dilakukan dengan perasaan senang. Berdasarkan kedua unsur di atas, *cyber bullying* adalah tindakan agresif yang dilakukan oleh kelompok maupun individu dalam menyakiti orang lain berulang dengan sengaja untuk melukai dan membuat korbannya merasa tidak nyaman dan takut secara verbal ataupun non-verbal yang dilakukan melalui media sosial. Hal ini sangat jelas merupakan penghinaan serta penindasan terhadap seseorang sehingga merugikan orang lain. Hal ini sangat tidak selaras dengan Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

b. Diskriminasi

Di negara dengan etnis, agama, ras, dan kebangsaan yang begitu beragam, dapat terjadi diskriminasi. Hal ini disebabkan stereotip (pemahaman tertentu terhadap kelompok yang sulit diubah) dan prasangka buruk terhadap perbedaan tersebut. Indonesia memiliki penduduk yang terdiri atas banyak suku, ras, budaya, dan agama yang memiliki ciri khas masing-masing dan hal tersebut dilindungi dan dihormati oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, keberagaman di Indonesia dilindungi dan dihormati.

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28I ayat (3) bahwa 'Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu'. Selain itu, Indonesia telah bersepakat untuk mengesahkan ICERD (*International Convention of the Elimination of all Forms of Racial Discrimination*) pada tanggal 25 Mei 1999. Indonesia meratifikasi melalui Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan ICERD 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).



Gambar 3.11 Prinsip kesetaraan dan antidiskriminasi merupakan ciri khas HAM.

Dalam ketentuan Pasal 1 UDHR (Universal Declaration of Human Rights) bahwa kesetaraan dan antidiskriminasi merupakan ciri khas HAM, bahkan dijadikan prinsip HAM. Kita dapat memahami bahwa kebebasan, persamaan, dan persahabatan menjadi inti dari penghormatan terhadap HAM. Setiap orang memiliki keleluasaan, merasa sama, dan berhak memiliki teman sehingga dapat bermasyarakat.

Pada zaman penjajahan kolonial Belanda, Indonesia merasakan pengalaman dibedakan berdasarkan kebangsaan seperti berikut.

1) Golongan Eropa

Bangsa yang tergolong golongan Eropa terdiri atas semua warga negara Belanda, Eropa, Jepang, orang-orang dari negara lain yang memiliki hukum kekeluargaan persis dengan hukum Belanda, beserta keturunan-keturunannya. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 163 ayat (2) Indische Staatsregeling (I.S).

2) Golongan Pribumi

Pribumi, istilah ini dikenal sebagai orang asli. Dalam penggolongan bangsa saat kolonial Belanda, yang termasuk pribumi terdiri atas orang-orang Indonesia asli dan orang-orang yang masuk golongan lain, tetapi menyatakan diri untuk masuk menjadi orang Indonesia asli. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (3) Indische Staatsregeling (I.S).

3) Golongan Timur Asing

Penduduk yang masuk golongan Timur Asing ialah mereka yang tak masuk penduduk golongan Eropa ataupun penduduk Indonesia asli, yaitu golongan Timur Asing Tionghoa (Cina), dan Timur Asing bukan Tionghoa. Hal ini diatur dengan ketentuan Pasal 163 ayat (4) Indische Staatsregeling (I.S).

Sampai saat ini, ternyata masih terbawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek* tanpa disadari menjadi bagian kebijakan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, perlu adanya komitmen tentang penegakan hak yang sama dalam status dan kedudukan warga negara sehingga perlu dibuat regulasi oleh Legislatif dan Eksekutif untuk menangani permasalahan ini. Setidaknya, regulasi itu dapat ditemukan pada Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hingga dibahas secara khusus dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

c. Intoleransi dalam Hidup Beragama

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Bangsa Indonesia mengakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati. Sebagaimana tertulis dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28I ayat (1) dan ditegaskan kembali pada Pasal 29 yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agama masing-masing merupakan hak yang dimiliki oleh seorang. Mengapa terjadi intoleransi? Pada umumnya, konflik-konflik beragama timbul karena adanya perselisihan antara umat beragama yang mengedepankan ego masing-masing sehingga terjadi gesekan yang lama-kelamaan membesar dan terjadilah pertikaian. Padahal, ancaman dan kekerasan terhadap umat beragama lain merupakan tindakan biadab yang bertentangan dengan nilai kebinedekaan, Pancasila, Konstitusi, dan kemanusiaan universal.



Gambar 3.12 Hentikan intoleransi di Indonesia.

Konflik agama dapat berdampak pada aspek lain karena masyarakat dalam melaksanakan kegiatan akan terkotak-kotak dalam kelompok besar sesuai dengan agama yang dianut. Oleh karena itu, proses terjadinya konflik antaragama perlu diteliti secara cermat dan dipahami sehingga dapat dicegah.

Praktik intoleransi dan konflik antaragama merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap Pancasila dan Konstitusi. Indonesia telah menyatakan diri secara tegas sebagai negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, termaktub dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Sudah dipastikan kehidupan bernegara pun dilandasi dengan nilai kebebasan untuk beragama dan jaminan kemerdekaan bagi para pemeluk-pemeluknya. Oleh sebab itu, pengejawantahannya terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Tujuannya untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

d. Persekusi

Persekusi merupakan salah satu jenis kejahatan kemanusiaan sebagaimana dijelaskan dalam Statuta Roma, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf g. Statuta itu menyatakan bahwa *persecution* berarti perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender.

Persekusi dapat diidentifikasi melalui tindakan apabila seseorang atau sejumlah warga yang disakiti, dipersulit, atau ditumpas dengan sengaja, diburu secara sewenang-wenang. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) menjelaskan,

apabila kata *persekusi* dijadikan sebagai kata kerja, yaitu “memersekusi”, memiliki arti menyiksa atau menganiaya sehingga ada unsur penyiksaan.

Persekusi diperjelas definisinya oleh Hilman (2021) sebagai berikut: "apabila seseorang melakukan tindakan tanpa dasar undang-undang sehingga mengancam seseorang dalam berdemokrasi dan mengekspresikan suatu pendapat, terkategori persekusi". Hal ini selain mengancam individu, juga dapat meresahkan publik karena telah terjadi penentangan terhadap undang-undang.



Gambar 3.13 Ilustrasi Tindakan Persekusi

Memaksakan ide dan pendapat pada orang lain disebabkan adanya kefanatikan ide terhadap kepercayaan dari pandangan diri seseorang atau kelompok, mengindikasikan persekusi. Apalagi jika hal tersebut dilakukan dengan kekerasan. Konflik yang terjadi di masyarakat salah satu penyebabnya ialah persekusi. Oleh sebab itu, patuhi aturan hukum untuk menjaga ketertiban dan keteraturan.



Siap Berefleksi

Ceritakan pengalaman kamu saat menjadi perantara perubahan.

Apakah kamu sudah memahami bagaimana cara tidak melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Jika masih merasa belum memahami pembahasan tentang hal ini, dapat ditanyakan lebih jauh kepada guru.



Uji Kompetensi

Soal Pilihan Banyak

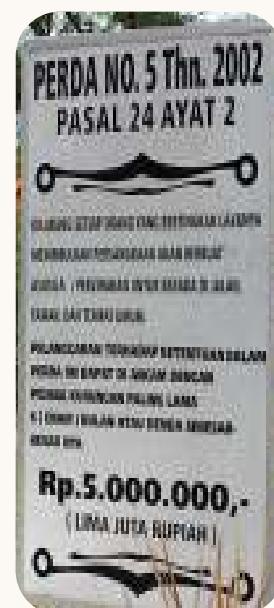
Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pelaksanaan keyakinan bagi tiap penduduk sebagai implementasi hak pada Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yakni
 - A. setiap orang yang hidup di Indonesia boleh berkeyakinan apa saja
 - B. setiap orang yang tinggal di Indonesia dilindungi dalam berkeyakinan apa saja
 - C. setiap warga negara dilindungi untuk beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan YME
 - D. setiap orang yang tinggal di Indonesia dilindungi untuk beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan YME
 - E. setiap orang boleh beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan YME
2. Makna sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam perlakuan terhadap warga negara di dalam mengeluarkan pendapat berdasarkan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, yakni
 - A. siapa saja yang tinggal di Indonesia dapat mengeluarkan pendapat sesuai prosedur yang benar
 - B. setiap orang yang memiliki domisili di Indonesia dapat mengeluarkan pendapat sesuai prosedur yang berlaku
 - C. warga negara dapat menyampaikan pendapatnya di mana dan kapan pun untuk mengubah kebijakan dengan prosedur yang benar
 - D. warga negara hanya boleh mengeluarkan pendapatnya di mana dan kapan pun jika sesuai dengan prosedur musyawarah
 - E. warga negara dapat mengungkapkan seluruh pendapatnya sesuai paradigma ilmiah berpikirnya
3. Makna sila Persatuan Indonesia dalam pelaksanaan pertahanan dan keamanan bangsa sebagai implementasi Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, yakni
 - A. negara dapat melakukan apa saja jika negara dalam keadaan genting terhadap bangsa indonesia
 - B. negara dapat melakukan tindakan represif untuk ketertiban jika negara dalam keadaan genting
 - C. negara dapat menertibkan siapa pun dengan alasan dan keadaan apa pun
 - D. negara akan menjalin kerja sama dengan luar negeri untuk keamanan dalam negeri jika keadaan genting
 - E. negara melindungi warga negara Indonesia sepanjang masih berada di tanah air

4. Makna sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di ruang publik sebagai implementasi HAM di Indonesia, yakni
 - A. setiap usulan untuk legitimasi keinginan rakyat harus dikabulkan
 - B. segala keputusan untuk kebijakan publik mengacu pada kepentingan kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat
 - C. segala kebijakan merupakan hasil kajian sosiologis, politis, dan hukum yang terjadi di masyarakat
 - D. kebijakan diambil untuk terpenuhinya segala keinginan rakyat
 - E. seluruh usulan kebijakan publik harus berdasarkan referendum rakyat
5. Makna sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam pelaksanaan standar hidup layak sebagai implementasi HAM di Indonesia, yakni
 - A. setiap warga negara Indonesia berhak atas hidup layak berdasarkan standar kemampuan negara dan masyarakatnya
 - B. setiap warga negara berhak untuk mendapatkan berbagai kemudahan dan hidup mapan sesuai janji pemerintah ketika kampanye
 - C. setiap warga negara akan diberikan fasilitas dan kemudahan tertentu jika menjadi warga yang baik
 - D. negara akan melakukan operasi pasar apabila terjadi kecurangan oleh pedagang
 - E. kelayakan ditentukan dengan standar pertumbuhan ekonomi hasil perbandingan dengan negara Asia Tenggara

Untuk soal nomor 6 s.d. 11, analisislah gambar di samping.

6. Perda yang dilansir dalam gambar tersebut menurut kamu merupakan tindakan yang bertujuan untuk
 - A. meninggikan derajat manusia dari makhluk lainnya
 - B. manusia Indonesia berpendidikan
 - C. manusia Indonesia beragama
 - D. manusia Indonesia memiliki lembaga perkawinan
 - E. manusia Indonesia dilarang mengumbar hawa nafsunya



Sumber: ppt Materi Hukum
PLPG 2013

7. Dari klausul hukum yang disampaikan perda tersebut, kita dianggap melakukan pelanggaran HAM jika melakukan hal berikut ini, *kecuali*
 - A. berpelukan di tempat umum yang mengundang prasangka buruk
 - B. melakukan tindak amoral di taman
 - C. melakukan tindakan pelecehan seksual baik sengaja maupun tidak
 - D. melakukan tindakan yang dianggap oleh masyarakat amoral walaupun tidak ada yang terusik
 - E. mengingatkan orang lain untuk tidak melakukan sesuai dengan klausul perda tersebut
8. Menurut gambar, maksud dari klausul perda tersebut dengan kata “menimbulkan persangkaan....” mengindikasikan bahwa
 - A. setiap orang boleh saling curiga jika terjadi penyimpangan
 - B. setiap orang harus waspada terhadap segala bentuk penyimpangan
 - C. setiap orang boleh berburuk sangka apabila ada masyarakat yang pergi ke taman, jalan, dan tempat umum
 - D. masyarakat memiliki standar nilai asusila berdasarkan persepsi masing-masing
 - E. perilaku yang menimbulkan kecurigaan atas standar nilai kesusilaan di masyarakat tidak boleh dilakukan
9. Pernyataan berikut ini dapat dikategorikan asumsi terhadap isi perda pada gambar sebagai warga negara yang baik, yakni
 - A. masyarakat Indonesia kini mengindikasikan berperilaku tidak bermoral
 - B. banyaknya tindakan yang tidak terpuji di tempat-tempat umum
 - C. langkah preventif untuk kepentingan perlindungan HAM
 - D. agar tempat umum bersih dari perbuatan yang menyimpang
 - E. memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia bermoral baik
10. Manakah asumsi pemerintah yang paling tepat ketika menetapkan perda pada gambar dalam upaya meningkatkan nilai martabat kemanusiaan ...
 - A. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan Ketuhanan YME menjadi tanggung jawab negara
 - B. memperkenalkan kepada seluruh dunia tentang ajaran hak asasi manusia versi Indonesia
 - C. negara hendak mengatur urusan pribadi seluruh bangsa Indonesia
 - D. kekhawatiran terjadinya kejadian seksual di tempat-tempat umum
 - E. banyak terjadi kejadian seksual yang terjadi di tempat-tempat umum

11. Berikut ini merupakan argumentasi kamu untuk mendukung perda tersebut sebagai warga negara Indonesia yang berideologi Pancasila, yakni
 - A. memahami dan melaksanakan isi perda karena itu kebijakan negara
 - B. selama isi perda tersebut tidak mengganggu nilai-nilai pribadi saya, akan saya patuhi
 - C. negara Indonesia berketuhanan YME, nilai kemanusiaan dipertanggung-jawabkan pada Tuhan dan masyarakat
 - D. pengambil kebijakan terlalu berlebihan dalam melindungi hak pribadi tiap orang
 - E. Perda tersebut wajar dibuat agar seluruh masyarakat belajar bagaimana berperilaku yang sebenarnya
12. Pelanggaran HAM berat di antaranya ialah kejadian terhadap kemanusiaan. Berikut ini salah satu contohnya
 - A. pembunuhan massal terhadap sekelompok ras
 - B. pembantaian kaum mayoritas terhadap kaum minoritas untuk menghilangkan turunan
 - C. kebencian Nazi kepada kaum Yahudi
 - D. menjegal seseorang yang berprestasi untuk tidak berkembang karier
 - E. memberi label pada seseorang yang menyebabkan dia secara mental dan fisik tidak mampu melanjutkan kehidupan normalnya

Untuk soal nomor 13-20, analisislah berita berikut ini.

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan ada empat pelanggaran HAM dalam kerusuhan yang pecah di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua pada 17 Juli 2015 lalu. Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution mengatakan, empat pelanggaran HAM yang terjadi adalah intoleransi, pelanggaran hak hidup, pelanggaran rasa aman, dan pelanggaran properti.

Intoleransi terjadi karena ada penyerangan terhadap warga yang tengah menggelar ibadah. Saat itu, massa menyerang umat muslim yang sedang salat Idulfitri di lapangan Koramil. Sementara untuk pelanggaran hak hidup terjadi karena ada warga yang tewas tertembak. "Kami mendorong cari tahu siapa pelakunya," kata Maneger kepada *CNN Indonesia*, Senin (10/8). Saat kejadian, petugas keamanan melepas tembakan karena massa mengabaikan imbauan petugas. Saat itu dinyatakan ada 12 orang terluka. Belakangan disebutkan ada satu warga tewas karena luka tembak.

Sumber: Suryianto/CNN Indonesia (2015)

13. Berdasarkan berita di atas, kasus pelanggaran HAM intoleransi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, terutama Pasal

A. 28A C. 28E ayat (1) E. 28E ayat (3)

B. 28D ayat (1) D. 28E ayat (2)

14. Berdasarkan berita tersebut, kasus pelanggaran hak hidup, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, terutama Pasal

A. 28G ayat (1) C. 28H ayat (1) E. 28H ayat (3)

B. 28G ayat (2) D. 28H ayat (2)

15. Berdasarkan berita di atas, kasus pelanggaran properti tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang bertentangan dengan Pancasila, terutama Pasal...

A. 28G ayat (2) C. 28H ayat (2) E. 28H ayat (4)

B. 28H ayat (1) D. 28H ayat (3)

16. Apabila dilansir dari berita, kaum muslim melakukan salat di lapangan Koramil. Menurut kamu sebagai warga yang mencintai kedamaian di Indonesia, hal tersebut dilakukan dengan maksud

A. meminta perlindungan dari militer agar tidak dizalimi massa

B. tidak ada prasangka buruk karena lapangan koramil dapat menampung umat yang akan salat

C. massa pasti akan menyerang kaum muslim

D. adanya ketidakpercayaan bahwa pelaksanaan salat Idulfitri akan berlangsung aman

E. tempat militer ialah tempat yang paling disegani untuk didatangi oleh siapa pun

17. Pemberitaan tersebut apabila dipahami sebagai sebuah pembelajaran, hal positif yang dapat diambil sebagai negara multikultural ialah

A. saling menghormati antarkeyakinan yang berbeda

B. saling menghormati bahwa Tuhan menciptakan manusia berkaum-kaum

C. saling menghormati bahwa keberagaman merupakan kekayaan hati untuk menerima perbedaan

D. saling menghormati antara pendiri negara yang menetapkan ideologi dan umat beragama

E. saling menghormati bahwa segala perilaku harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Tuhan YME

18. Pemberitaan di atas apabila dipahami sebagai sebuah pembelajaran, hal positif yang dapat diambil sebagai negara berdasarkan Pancasila ialah
 - A. saling menghormati antarkeyakinan yang berbeda
 - B. saling menghormati bahwa Tuhan menciptakan manusia berkaum-kaum
 - C. saling menghormati bahwa keberagaman merupakan kekayaan hati untuk menerima perbedaan
 - D. saling menghormati antarpendiri negara yang menetapkan ideologi dan dijadikan pandangan hidup bangsa
 - E. saling menghormati bahwa segala perilaku harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Tuhan YME
19. Pemberitaan di atas apabila dipahami sebagai sebuah pembelajaran, hal positif yang dapat diambil sebagai negara yang melindungi hak warganya ialah
 - A. saling menghormati antarmasyarakat dengan keyakinan yang berbeda
 - B. saling menghormati bahwa Tuhan menciptakan manusia berkaum-kaum
 - C. saling menghormati bahwa keberagaman merupakan kekayaan hati untuk menerima perbedaan
 - D. saling menghormati antara pendiri negara yang menetapkan ideologi dan umat beragama
 - E. menghormati karena segala perilaku harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Tuhan YME
20. Berikut ini perilaku yang akan dilakukan pelajar sebagai warga negara yang cerdas ketika membaca pemberitaan di atas
 - A. menganggap konflik tersebut wajar terjadi di daerah yang mayoritas salah satu agama
 - B. mengonfirmasi berita agar tidak terpapar hoaks dan kebencian
 - C. meyakinkan teman lain untuk mendukung salah satu pihak yang dianggap benar
 - D. membiarkan saja karena peristiwa tersebut tidak terjadi di wilayah sendiri
 - E. menyalahkan pemerintah yang lamban menangani

Esai

1. Tuliskan salah satu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang kamu ketahui dengan analisis peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
2. Jelaskan hal yang akan kamu lakukan sebagai warga negara yang baik saat terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban!



Pengayaan

- Bagi kamu yang ingin mengetahui lebih jauh dan mendalam tentang peraturan perundang-undangan produk Indonesia tentang hak yang dapat menerbitkan kewajiban warga negara, kamu dapat mengunjungi tautan berikut.

Pindai Aku!



https://buku.kemdikbud.go.id/s/tap_mpr_xvii_1998



https://buku.kemdikbud.go.id/s/uu_39_1999



https://buku.kemdikbud.go.id/s/uu_26_2000



https://buku.kemdikbud.go.id/s/uu_23_2022



https://buku.kemdikbud.go.id/s/uu_23_2004

- Bagi kamu yang mampu membuat projek dengan baik dan memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, kamu dapat mendalami cara lain dalam menciptakan miniatur pariwisata lainnya. Caranya melalui investigasi untuk menemukan latar belakang terbentuknya karya dan bagaimana cara melakukan penghormatan terhadap karya tersebut.
- Bagi kamu yang ingin memperkaya materi tentang alur berpikir saintifik dalam menghadapi isu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kamu dapat melakukan kegiatan seperti eksperimen sosial sederhana, yakni mengamati reaksi seseorang atau kelompok manakala dihadapkan pada isu sosial. Contohnya: membuat skenario tentang warga negara yang terkena perundungan, adakah yang akan menolong? Kemudian, lakukan wawancara untuk mengetahui apa yang dirasakan oleh orang tersebut berkaitan dengan reaksi yang dilakukannya.

H"Hak asasi dimaknai sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia"

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2023

Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII

Penulis: Ida Rohayani, Hatim Gazali, Dwi Astuti Setiawan

ISBN 978-623-194-624-9 (jil.3 PDF)

Bab 4

Generasi Solutif Mengatasi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban





Tujuan Pembelajaran

Setelah pembelajaran ini, kamu dilatih agar mampu merancang gagasan solutif untuk mengatasi permasalahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.



Kata Kunci

Gagasan Solutif, Mengatasi Permasalahan, Pelanggaran Hak, Pengingkaran Kewajiban, Warga Negara



Peta Konsep

Generasi Solutif?

Merancang Gagasan Solutif Permasalahan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

Warga Negara Muda Merancang Model Rancang, Bangun, dan Menerapkan (Ranumkan)

Hai, warga negara muda yang keren! Bertemu kembali dalam lanjutan pembelajaran tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara. Kamu akan diajak merancang gagasan yang bersifat solutif untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang akan dihadapi. Tentunya, kamu masih ingat dengan alur ASIK yang dilakukan pada Bab 3. Itulah awal dari bagaimana sebuah antisipasi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang kamu hadapi.

Tahukah kamu bahwa sebuah karya berawal dari gagasan yang terkadang tidak semua orang akan menerimanya dengan baik? Atau, gagasan itu mungkin dianggap sesuatu yang aneh dan tidak biasa? Pada pembelajaran kita kali ini, kamu akan diajak menelusuri minat dan empatimu dalam memberikan solusi masalah melalui kegiatan saintifik sederhana.

Namun sebelumnya, ikuti terlebih dahulu asesmen awal berikut agar siap mengikuti pembelajaran kali ini.



Asesmen Awal, Siap Belajar

1. Apakah kamu pernah memberikan gagasan sederhana dan ternyata dilaksanakan oleh orang lain?
2. Bagaimana cara kamu menggali gagasan tersebut?
3. Ceritakan kepada teman-teman sekelasmu pengalaman tersebut.

Kita mulai pembelajaran dengan menelusur diri pada materi dan kegiatan berikut.

A. Merancang Gagasan Solutif atas Permasalahan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

Nah, pada aktivitas kali ini, kamu akan diajak merancang sebuah gagasan saintifik sederhana yang boleh jadi sebetulnya sering kamu lakukan, tetapi terkadang tidak menyadari prosesnya. Mari, kita mengingat kembali apa yang sering kita lakukan.

Pernahkah kamu menyesali sebuah kejadian yang menimpa diri atau lingkungan sekitar dengan menanyakan, mengapa aku tidak berbuat begini, dan begitu, atau lain sebagainya? Atau, kamu mengamati sebuah kejadian dan berpikir, “Seandainya aku yang ada pada posisi itu, aku akan . . .”

Pada aktivitas kali ini, kita akan mengumpulkan gagasan itu melalui sebuah proses saintifik sederhana untuk mengidentifikasi permasalahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Namun sebelumnya, kita akan bahas terlebih dahulu, suasana kebatinan apa yang memotivasi warga negara muda untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Untuk bahan pengayaan, kamu dapat membaca artikel tentang eksistensi solidaritas putra Solo di Kota Medan berikut ini. Kamu juga akan menemukan alasan mengapa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban membutuhkan gagasan solutif terutama dikaitkan dengan cita negara hukum Pancasila.

Berikut ini alasan mengapa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban membutuhkan gagasan solutif terutama dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila.

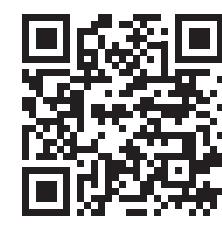


Gambar 4.1 Solidaritas, salah satu cara untuk menghormati hak asasi manusia.

Sumber: Andrew Moca.unsplash.com (2021)



Tahukah Kamu?



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/tjidvd>

1. Warga Negara Muda Berkomitmen Menegakkan Hukum dan HAM

Pada pembahasan sebelumnya, kamu mendapatkan penjelasan tentang siapa warga negara dan penduduk. Jika ada istilah *warga negara muda*, itu merupakan panggilan untuk kamu sebagai warga negara harapan bangsa. Setiap generasi memiliki tantangan sesuai zamannya masing-masing. Tantangan yang dihadapi oleh kamu sama beratnya dengan generasi sebelumnya ketika memperjuangkan hak dan melaksanakan kewajiban.

Sebelum kita membahas tantangan apa yang dihadapi oleh warga negara muda, mari, kita lakukan aktivitas Siap Mengingat Kembali 4.1 berikut. Aktivitas ini agar kamu memahami bahwa banyak hal yang harus kita waspadai.



Siap Mengingat Kembali

Aktivitas 4.1

1. Carilah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Boleh kasus dari pemberitaan media cetak, elektronik, atau radio dan televisi. Kemudian, ceritakan ulang kasus tersebut melalui lisan maupun tulisan.
2. Analisislah peraturan apa yang dilanggar dan diingkari.
3. Berempatilah terhadap peristiwa tersebut dengan berandai-andai: jika kamu berada pada posisi tersebut, apa yang akan dilakukan?
4. Buatlah sebuah komitmen bagaimana cara memperbaiki kasus tersebut. Jelaskan dalam bentuk tulisan, gambar, lagu, atau apa pun sesuai kegemaranmu.
5. Aktivitasmu akan dinilai berdasarkan kriteria pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rambu-Rambu Asesmen Karya

Kriteria	Skor	Nilai Akhir (NA)
Menceritakan kembali kasus.	10-25	
Mencantumkan peraturan yang dilanggar atau diingkari.	10-25	Skor 1 + skor 2 + skor 3 + skor 4 = NA
Solusi untuk kasus tersebut.	10-25	
Menyatakan komitmen.	10-25	

Ceritakan pengalamamu saat melaksanakan aktivitas tersebut! Perasaan apakah yang muncul kemudian menjadi komitmen untuk menegakkan kebenaran?

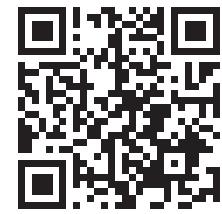
Sekarang, kita akan membahas mengapa kamu menjalani aktivitas tersebut. Tiada lain untuk memupuk jiwamu bahwa dalam kondisi apa pun, seorang warga negara yang baik harus memiliki jiwa menjunjung tinggi nilai kebenaran. Tidak mustahil selalu ada tantangan yang dihadapi, baik yang muncul dari motivasi diri maupun lingkungan.

Pada pembahasan berikut, kamu akan diajak untuk mengidentifikasi mengapa pelanggaran dan pengingkaran tersebut terjadi di negara ini. Hal ini menjadi kerisauan lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP, 2019:x). Dalam sambutan peluncuran buku *Pancasila Dialektika dan Masa Depan Bangsa*, Hariyono sebagai Ketua BPIP menyatakan tantangan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan publik di era kekinian di antaranya: (1) menguatnya individualisme; (2) liberalisme pasar; (3) radikalisme-fundamentalisme “agama”; (4) kosmopolitanisme; (5) ideologi transnasional; dan (6) dominasi sistem hukum modern, yang menegaskan makna nasionalisme di era globalisasi. Di samping itu, dia menyebutkan tantangan yang tidak kalah krusialnya: (1) distorsi (pemutarbalikan suatu fakta) pemahaman Pancasila, (2) eksklusi sosial, (3) melemahnya keteladanan Pancasila, (4) melemahnya institusionalisasi Pancasila, dan (5) tantangan keadilan sosial yang telah mencabik kita baik secara individu maupun sosial dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Data menunjukkan bahwa terdapat tiga isu yang saling terkait sebagai tantangan dalam implementasi ideologi Pancasila. Pertama, kemiskinan –eksklusi sosial – *underclass*, di antaranya hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (MPd) yang sedang dilakukan oleh Studi Perdesaan Universitas Gajah Mada (2013) khusus yang menyangkut tingkat perkembangan atau kondisi eksklusi sosial yang tidak sama untuk setiap desa di Indonesia. Kedua, evaluasi kritis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial (2013), khusus yang terkait dengan usaha intervensi yang lebih berlandas pada inovasi pertanian. Dengan demikian, hanya dengan modernisasi ekologik, pengentasan kemiskinan dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Ketiga, evaluasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri,



Tahukah Kamu?



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/o8dkp0>

khusus yang terkait dengan begitu banyaknya investasi di daerah perdesaan yang cenderung merusak lingkungan hidup masyarakat. Akibatnya, sangat boleh, hal itu memperbesar lagi eksklusi sosial dan akhirnya berujung pada pemiskinan (Robert M.Z. Lawang).



Gambar 4.2 Eksklusi sosial merupakan salah satu tantangan di era kekinian.

Sumber: KOMPAS.com/Vanya Karunia Mulia Putri

Menurut Agus Machfud Fauzi dalam buku *Potret PPKM dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia* (2021), eksklusi sosial adalah tindakan masyarakat untuk menyingkirkan individu atau komunitas dari sistem yang berlaku. Akhirnya, menimbulkan ketidakberdayaan seseorang untuk berpartisipasi dalam masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan itu, Indonesia harus berkomitmen kuat dan menempatkan Pancasila sebagai ideologi, pandangan-dunia, dan dasar negara, yang nilai-nilainya niscaya diwujudkan melalui proses pembangunan yang konkret. Pembangunan itu di antaranya bidang: (1) mental-spiritual dan sumber daya manusia; (2) ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; (3) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (4) pertahanan dan keamanan; (5) penegakan hukum dan HAM; (6) produksi; dan (7) perhubungan dan distribusi (BPIP, 2019:x).

Kamu dapat menggarisbawahi bahwa bidang penegakan hukum dan HAM merupakan salah satu komitmen yang dapat menghadang tantangan yang dihadapi bangsa ini, terutama dengan cara mendidik warga negara muda berkomitmen untuk menegakkannya. Bagaimanakah caranya? Salah satu caranya ialah memberikan pendidikan karakter tentang nilai-nilai Pancasila. Mari, kita telusuri sejarah nilai Pancasila terutama tentang perikemanusiaan.

Di hadapan kader-kader Pancasila pada tanggal 5 Juli 1958, Presiden Sukarno memberikan “Kursus Pancasila” dan mengurai secara mendalam topik mengenai “Perikemanusiaan dalam Pancasila”. Pada kesempatan itu, Sukarno menegaskan, “*menschlichkeit*, kemanusiaan itu memang dari dulu ada. Rasa perikemanusiaan ialah hasil daripada pertumbuhan rohani, hasil daripada pertumbuhan kebudayaan, hasil daripada alam tingkat rendah ke taraf yang lebih tinggi. Tertampiknya Tuhan dan realitas spiritual dalam ruang-sadar mereka.”

Maksud dari tulisan di atas bahwa menurut Presiden Sukarno, perikemanusiaan itu pada dasarnya sudah mendekam dalam rohani seseorang dan hanya perlu ditumbuhkan dan dikuatkan. Dalam hal ini, simpati merupakan salah satu wujud dari rasa kemanusiaan itu. Bahkan, diperkuat kembali dengan menyadarkan diri manusia di era modern, yakni membangun imajinasi untuk menumbuhkan rasa empati. Hal ini diungkapkan dalam buku *Pancasila, Dialektika dan Masa Depan* (2019), berikut cuplikannya.

Seorang filsuf dan pemikir, Martha Nussbaum, berpandangan bahwa simpati membuat seseorang mampu memosisikan dirinya seperti dalam situasi orang lain. Simpati membuat seseorang mampu membayangkan dirinya berada di dalam posisi orang lain. Simpati menumbuhkan kesadaran seseorang untuk menganggap dan memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia, dan bukan sekadar objek di sekitar kita. Kita menjadi mampu membayangkan dan merasakan apa yang menimpa orang lain, seperti diperlakukan tidak adil karena identitas gender, pilihan agama, pilihan politik, dan sebagainya.

Dengan memahami arti pentingnya nilai perikemanusiaan dalam aktivitas pembelajaran, semoga kamu bisa menumbuhkan rasa simpati terhadap penderitaan orang lain.



Gambar 4.3 Presiden Sukarno berpidato saat memberi kursus Pancasila pada 5 Juli 1958.

Sumber: Penerbit Mpu Tantular (1960)

2. Mengidentifikasi Permasalahan Pelanggaran Hak di Lingkungan Sekitar

Pada aktivitas berikut ini, kamu akan mengidentifikasi pelanggaran hak warga negara yang dianalisis keadaannya terhadap UUD NRI Tahun 1945. Apakah kamu termasuk peserta didik yang mampu menerapkan nilai martabat kemanusiaan? Mari, kita ikuti kegiatannya.



Siap Mengeksplorasi

Aktivitas 4.2

Pada aktivitas kali ini, kamu diminta untuk mengidentifikasi pelanggaran hak yang mungkin terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Analisislah berdasarkan nilai pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 berikut.

1. Baca bunyi pasal yang tertera.
2. Interpretasi pelaksanaannya seperti apa, kemudian tuliskan pada kolom yang kosong pelanggaran seperti apa yang mungkin terjadi.
3. Jangan lupa bagi kamu yang berminat dalam hal vokasi, kasus dapat disesuaikan dengan bidang pekerjaan yang dihadapi.

Tabel 4.2 Identifikasi Pelanggaran Hak Warga Negara

Pasal	Bunyi	Identifikasi Pelanggaran Hak
27 ayat (2)	Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.	
28A	Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.	<i>Contoh jawaban: seseorang tidak diperkenankan untuk bekerja menghidupi diri dan keluarganya dengan tenang (silakan berikan contoh lainnya)</i>
28C ayat (1)	Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.	

28C ayat (2)	Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
28D ayat (1)	Setiap orang berhak atas panganan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
28D ayat (2)	Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
29 ayat (2)	Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
31 ayat (1)	Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
32 ayat	Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
34	Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Aktivitasmu akan dibahas dalam diskusi kelas bersama teman dan diarahkan oleh guru. Sekarang, kita telusuri mengapa kamu perlu mengidentifikasi pelanggaran hak melalui penegakan aturan dalam UUD NRI Tahun 1945.

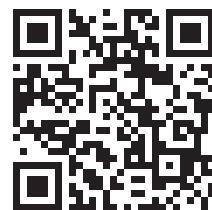
UUD NRI Tahun 1945 merupakan pengejawantahan dari sila-sila Pancasila, termasuk sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila kedua Pancasila meresap di dalam pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang hak dan kewajiban.

Sejatinya, sila kedua Pancasila ini mencerminkan kesadaran bangsa Indonesia sebagai bagian dari kemanusiaan universal. Berada pada posisi strategis, persilangan dua benua dan dua samudra luas, dengan keanekaragaman hayati dan budaya yang dimilikinya, Indonesia menjadi “medan perjumpaan” antarperadaban.

Kebinekaan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Menimbang kebinekaan yang menjadi ciri keunikan Indonesia, bagaimana kita dapat melahirkan kesadaran yang akan membuat masyarakat lebih adil, inklusif, berkeadaban, dan berkepribadian?

Sila kedua Pancasila mengandaikan pentingnya menekankan nilai-nilai dasar manusia, yang diterjemahkan dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia (*human rights*), menjunjung tinggi martabat manusia (*human dignity*), mendorong pencapaian taraf kehidupan yang layak bagi manusia, dan sistem pemerintahan yang demokratis serta adil. Ketika kamu memahami sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sila ini merupakan prinsip untuk memperlakukan semua orang secara manusiawi tanpa terkecuali. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengajarkan kita bahwa setiap orang memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diatur dan dilindungi dalam hukum negara.

Tahukah Kamu?



[https://buku.kemdikbud.go.id/s/
apdwym](https://buku.kemdikbud.go.id/s/apdwym)



Gambar 4.4 Simbol Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

3. Mengidentifikasi Permasalahan Pengingkaran Kewajiban di Lingkungan Sekitar

Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah berlatih mengeksplorasi pelanggaran hak. Setelah kamu mampu mengidentifikasi pelanggaran hak melalui contoh nilai pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 di atas, pada aktivitas kali ini, kamu akan diminta untuk mengidentifikasi isi pasal berikut dikaitkan dengan pengingkaran kewajiban warga negara.



Asesmen Awal, Siap Belajar

1. Pernahkah kamu mengukur seberapa kuat jati diri maupun kemampuan kamu dalam mengatasi konflik dalam diri maupun di masyarakat?
2. Bagaimana kamu memahami kualitas dan minat diri bahwa kamu sanggup menjadi pengambil keputusan?

Pemahaman tersebut dapat kamu pelajari melalui aktivitas pembelajaran berikut ini.

Jawaban yang kamu sampaikan akan dijadikan stimulus untuk mengelaborasi nilai dimensi pada Profil Pelajar Pancasila, yakni Mandiri dengan elemen pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Oleh sebab itu, kamu akan mempelajari dirimu sendiri melalui identifikasi apakah kamu mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi saat terjadi pengingkaran kewajiban.



Siap Profil Pelajar Pancasila

Aktivitas 4.3

Pada aktivitas kali ini, kamu diminta untuk mengidentifikasi pengingkaran kewajiban yang mungkin terjadi dalam kehidupan bermasyarakat pada konteks pembelajaran, sosial, dan pekerjaan yang akan dipilih di masa depan berdasarkan nilai pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 berikut.

1. Baca bunyi pasal yang tertera.
2. Interpretasi pelaksanaannya seperti apa, kemudian tuliskan pada kolom yang kosong pengingkaran kewajiban seperti apa yang mungkin terjadi.
3. Jangan lupa bagi kamu yang berminat dalam hal vokasi, kasus dapat disesuaikan dengan bidang pekerjaan yang dihadapi.

Tabel 4.3 Identifikasi Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Pasal	Bunyi	Identifikasi Pengingkaran Kewajiban Saat Belajar, Hidup Sosial, dan Pekerjaan yang Dipilih
27 ayat (1)	Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.	
27 ayat (3)	Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.	
28	Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.	
29 ayat (1)	Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.	
30 ayat (1)	Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.	

31 ayat (2)	Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.	
32	Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.	
33 ayat (2)	Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.	
33 ayat (3)	Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	
34	Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.	<p><i>Contoh jawaban:</i></p> <p><i>Tidak melakukan hal-hal berikut.</i></p> <p><i>Kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar.</i></p> <p><i>Belajar yang baik sebagai kewajiban dari seorang siswa.</i></p> <p><i>Sosial: ikut menolong menuntaskan kemiskinan.</i></p> <p><i>Pekerjaan: bekerja keras dan berbagi pada sesama.</i></p> <p>..... (silakan berikan contoh lain)</p>

Setelah mampu mengidentifikasi pengingkaran kewajiban, kamu akan diajak untuk menelusuri bagaimana perjuangan para pejuang bangsa ini melawan penjajahan untuk kita teladani dalam melaksanakan kewajiban. Mari, ikuti penjelasan berikut.

Bangsa Indonesia pernah merasakan penjajahan fisik yang tidak sebentar. Seluruh warga masyarakat dibebani dengan kewajiban melaksanakan kehendak penjajah. Berbagai hak tidak terpenuhi, hanya kewajiban yang dilakukan tanpa tahu kapan kewajiban tersebut sudah terpenuhi dan ditunaikan.

Pelaku akan mempertahankan kekuasaannya karena sangat menyenangkan. Seperti yang dinyatakan oleh Lord Shang, “jika ingin mempertahankan kekuasaan, lemahkan rakyatnya”. Atau, Lord Acton yang menyatakan (1) *power tends to corrupt*, dan (2) *absolute power corrupts absolutely*. Mari, kita lihat perbaikan yang sudah dilakukan bangsa ini sejak merdeka.



Gambar 4.5 Ilustrasi perjuangan fisik rakyat Indonesia untuk lepas dari penjajahan.

Sumber: J.P. de Veer/wikimedia.org

Kamu tidak merasakan zaman penjajahan fisik pada masa lampau. Namun, kamu dapat berempati untuk merasakan kepedihan dan penderitaan sebagai bangsa yang terajah selama ratusan tahun. Kita harus terpanggil untuk melawan sisi negatif-destruktif dan pola tindakan internasional yang merendahkan martabat kemanusiaan (*human dignity*).

Sejak awal perjuangan kemerdekaan, revolusi Indonesia dipandang sebagai revolusi kemanusiaan. Sukarno memekikkan, "Satu banjir yang mahasakti, banjir daripada revolusi Indonesia yang sebenarnya ialah sebagian daripada *revolution of mankind*." Di balik gemuruh orasi itu, Sukarno ingin menegaskan satu hal bahwa revolusi sejati tak lain dari revolusi kemanusiaan itu sendiri. Artinya, dari sejak perang kemerdekaan, Bapak Proklamator mengingatkan bangsa ini untuk mengubah cara pandang kita. Mengganti cara berpikir dan bertindak kita dari yang terbiasa dijajah dan mengikuti perintah orang lain tanpa daya, sekarang harus mampu mendayakan diri untuk memahami apa yang seharusnya dilakukan, seperti melaksanakan kewajiban dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Terkait dengan perihal memenuhi sifat adil, Mohammad Hatta (1966) mengingatkan, bahwa yang harus disempurnakan dalam Pancasila ialah kedudukan manusia sebagai hamba Tuhan, yakni satu sama lain harus merasa bersaudara. Hatta mengatakan, "Dasar kemanusiaan itu harus dilaksanakan dalam pergaulan hidup. Dalam segala hubungan manusia satu sama lain, harus berlaku rasa persaudaraan."

Sementara, menyangkut sifat beradab, Ki Hajar Dewantoro dalam *Notonagoro* (1950), mengatakan bahwa, “Pancasila menjelaskan serta menegaskan corak warna atau watak rakyat kita sebagai bangsa yang beradab, berkebudayaan, bangsa yang menginsyafi keluhuran dan kehalusan hidup manusia, serta sanggup menyesuaikan hidup kebangsaannya dengan dasar kemanusiaan yang universal, yang meliputi seluruh alam kemanusiaan seluas-luasnya, begitu pula dalam arti kenegaraan pada khususnya.”

Salah satu imajinasi para pendiri Republik ini, mengukuhkan tekad dalam narasi dasar “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Tekad tersebut mengandaikan sebuah gerak transformasi cara hidup setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian, kita tidak lagi berpikir, merasa, dan bertindak sebatas prinsip-prinsip etnik, budaya, dan agama tertentu, tetapi berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan universal, keadilan, dan keadaban (*civility*).

Itulah mengapa kamu diminta untuk mengidentifikasi diri dan masa depan. Dengan demikian, kamu mampu menempatkan diri sebagai manusia paripurna dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh bangsa untuk masa kini dan akan datang.



Siap Berefleksi

Pada pembelajaran kali ini, refleksikan kekuatan dan tantangan dirimu ketika mengagitas hal solutif dalam mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang menurut kamu harus diperbaiki.

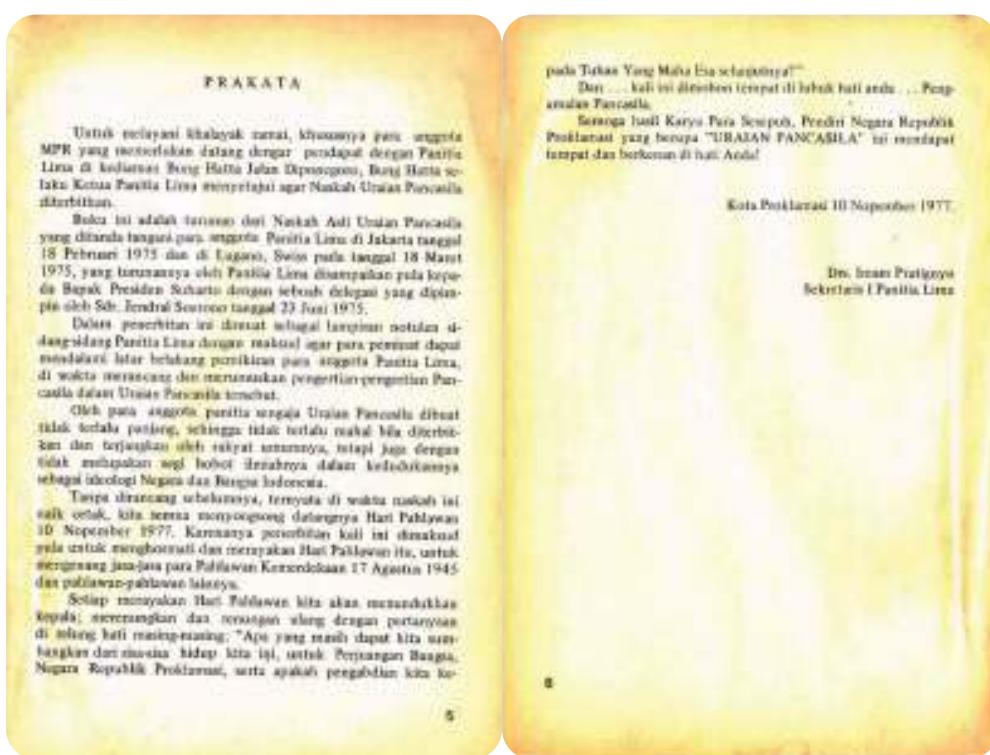
Tabel 4.4 Refleksi Pemahaman Diri dan Situasi yang Dihadapi

Kriteria	Kekuatan	Tantangan-Tantangan
Pembelajaran		
Sosial		
Pekerjaan yang akan dipilih di masa depan		

B. Warga Negara Muda Merancang Model Rancang, Bangun, dan Menerapkan (Ranumkan)

Pada pembelajaran kali ini, kamu akan melakukan aksi nyata mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kamu sudah merasakan langkah saintifik pada pembelajaran sebelumnya, yakni dengan mengamati, mengidentifikasi melalui peraturan, sampai dengan merefleksi diri tentang apa yang harus kamu perbaiki untuk menentukan masa depan.

Dalam aksi nyata ini, kamu akan diminta terlebih dahulu merenungi kalimat berikut yang ditulis oleh Imam Pratignyo (1984) pada Gambar 4.7.



Gambar 4.6 Prakata Buku *Uraian Pancasila* cetakan 2 (1984)

Sumber: Penerbit Mutiara

Dari kalimat-kalimat yang kamu baca, adakah yang menarik perhatianmu? Para negarawan tersebut tetap bertanya tentang "Apa yang masih dapat kita sumbangkan dari sisa-sisa hidup kita ini, untuk perjuangan bangsa Negara Republik Proklamasi, serta apakah pengabdian kita kepada Tuhan Yang Maha Esa selanjutnya?"

Pertanyaan tersebut diucapkan oleh Panitia Lima sebagai penulis buku *Uraian Pancasila* yang terdiri atas Mohammad Hatta, H. Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, Alex Andries Maramis, Mr. Soenario, Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo, dibantu oleh dua sekretaris, yakni Imam Pratignyo dan Surowo Abdulmanap. Jiwa apa yang menjadi penyemangat mereka selain kecintaannya pada negara ini?



Gambar 4.7 Sidang Terakhir Panitia Lima di Kediaman Muhammad Hatta (1975)

Sumber: Penerbit Mutiara, (1984)

Dari uraian tadi, ada sekilas kisah saat mereka ditugasi untuk menjelaskan Pancasila. Kisah itu ialah cara mereka melaksanakan tugas negara agar filosofi harapan mereka dapat tertuang dalam sebuah karya buku yang sangat berharga untuk sejarah negeri ini.

Kamu dapat mengambil hikmah dari perjalanan karya tersebut. Hikmah tersebut ialah tidak akan menjadi sebuah karya tanpa ada rancangannya, dibangun menjadi sebuah tatanan sistematis, dan diterapkan ke dalam sebuah karya. Oleh sebab itu, dalam aktivitas kali ini, kamu akan diajak untuk membuat sebuah karya tentang bagaimana mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban melalui alur pembelajaran Ranumkan (Rancang, Bangun, dan Menerapkan). Apakah kamu siap? Mari, kita mulai!

1. Gagasan untuk Mengatasi Perundungan melalui Rancang, Bangun, dan Menerapkan (Ranumkan)

Pada alur Ranumkan, kamu akan diminta untuk melakukan aksi nyata berupa aktivitas yang betul-betul membuat kamu bergerak dan mengajak yang lainnya bersama-sama mencegah perundungan. Adapun kegiatannya sebagai berikut.



Pada alur pertama ini, kamu akan melakukan kegiatan merancang sebuah gagasan untuk mencegah perundungan secara berkelompok 3-5 orang. Hal yang dapat kalian perhatikan di antaranya seperti berikut.

RANCANG

1. Amatilah di sekitarmu kasus yang termasuk dalam perundungan (lihat kembali penjelasan di Bab 3).
2. Cari cuplikan yang terkategorikan perundungan verbal, perundungan badan (*body shaming*), perundungan fisik, dan lain-lain (silakan temukan hal lainnya jika ada).
3. Pilihlah salah satu dari kasus tersebut dengan jenis kasus yang terjadi. Kemudian, rancang bagaimana kampanye antiperundungannya.

BANGUN

4. Buatlah karya dalam bentuk berikut. Pilihlah satu proyek sesuai kompetensi kelompokmu.
 - a. Projek produksi (poster, video, podcast, jingle, infografis, buletin laporan tertulis, esai, foto, surat-surat, buku panduan, brosur, program radio, atau jadwal perjalanan).
 - b. Projek kinerja (pementasan, presentasi lisan, pertunjukan teater).
 - c. Projek organisasi (pembentukan kelompok diskusi, atau program mitra percakapan).
4. Diskusikan terlebih dahulu di kelas hasil karya yang dibuat untuk diperbaiki jika ada usulan yang menyempurnakan.

MENERAPKAN

5. Sebarkan melalui sosial media atau tempat umum lainnya untuk diketahui oleh khalayak. Amati siapa saja yang tertarik dengan hasil karya kalian selama sepekan (6 hari).
6. Cari tahu melalui wawancara atau pengamatan lanjutan dampak dari ajakanmu untuk mencegah perundungan tersebut.
7. Buatkan dalam bentuk esai singkat laporan pengamatan tersebut.

Jika kamu ingin mengetahui bagaimana penilaian yang akan dilakukan pada karya, kinerja, dan performamu, berikut ini rubriknya.

Tabel 4.5 Rubrik Penilaian Karya Gagasan Antiperundungan

Aspek	Kriteria
Gagasan	Orisinal maupun pengembangan yang sudah ada.
Simbol dan media efektif yang dipilih	Sesuai tujuan dan menarik.
Strategi komunikasi yang digunakan	Bahasa Indonesia atau serapan dari bahasa asing yang baik dan santun.
Solusi masalah perundungan	Dapat mengajak dan memperbaiki perilaku.

Tabel 4.6 Rubrik Penilaian Kinerja dan Performa

Berikan tanda cek (✓) pada kolom Ya/Tidak untuk menilai kinerja dan performa teman kelompokmu melalui rubrik berikut.

Nama Peserta Didik	Kriteria Penilaian Kinerja	Ya	Tidak
	Penilaian Kelompok 1. Bertanggung jawab dan komitmen pada aturan karya. 2. Tepat waktu dalam pengumpulan tugas. 3. Menampilkan budaya industri, yakni menerapkan 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin).		
	Penilaian Individu 1. Menampilkan cara mengusulkan ide/gagasan. 2. Menunjukkan jiwa legawa dalam bekerja sama. 3. Berkomitmen dengan kelompoknya sebagai bukti tanggung jawab.		
	Penyajian: 1. Sesuai tema 2. Menjaga orisinalitas (hasil karya kelompok/bukan milik yang lain)		

Sebagai bahan untuk meyakinkan bahwa apa yang kamu lakukan itu perilaku yang benar, berikut uraian tentang bagaimana dasar hukum HAM dan prinsipnya.

Dalam perlindungan HAM, terdapat hak *nonderogable*, yakni elemen HAM yang tak dapat direnggut dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Hal ini dilindungi oleh Pasal 28I, cek UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak yang terdapat pada UU tersebut berupa:

1. hak untuk hidup
2. hak untuk tidak disiksa
3. hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani
4. hak beragama
5. hak untuk tidak diperbudak
6. hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum
7. hak untuk tak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

Berdasarkan hal tersebut, terdapat hal-hal yang sangat prinsipil dan tidak dapat dicabut. Perundungan merupakan pelanggaran hak yang dapat mengarah pada pelanggaran terhadap kategori hak *nonderogable* karena dapat menyebabkan seseorang tidak dapat hidup layaknya manusia sesuai dengan haknya tersebut.

Itulah sebabnya, pelajar dilarang untuk menjadi pelaku perundungan, karena praktik tidak terpuji itu bukan sekadar merendahkan harkat dan martabat manusia, melainkan juga melanggar hukum dan norma sosial. Mari, kita cegah perundungan di mana kita berada.

Kamu berhak dan wajib mengupayakan masa depan yang gemilang sesuai dengan cita-cita yang kamu mimpi selama ini. Masa depan yang sesuai dengan minat dan bakatmu, seperti pada Gambar 4.8



Gambar 4.8 Tiap warga negara berhak dan wajib mengupayakan masa depan yang gemilang.

2. Gagasan untuk Mengatasi Intoleransi melalui Rancang, Bangun, dan Menerapkan (Ranumkan)

Bagaimana kegiatanmu saat membuat karya mencegah perundungan? Semoga sekecil apa pun upaya yang kamu lakukan, dapat berdampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain.

Pada pembelajaran kali ini, kamu akan diminta mengikuti alur pembelajaran yang sama, tetapi targetnya ialah apakah kamu termasuk peserta didik berprofil pelajar Pancasila yang kreatif? Kamu akan diminta menghasilkan gagasan yang beragam untuk mengekspresikan pikiran dan/atau perasaan, menilai gagasan, serta memikirkan segala risikonya dengan mempertimbangkan banyak perspektif seperti etika dan nilai kemanusiaan ketika gagasan direalisasikan dalam sebuah permainan.

Pada alur aktivitas Ranumkan kali ini, kamu akan melakukan tindakan mengatasi intoleransi. Sebagaimana kamu diberi pemahaman tentang hak *nonderogable* pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban saat melakukan perundungan, kali ini, kamu akan diberi penjelasan terlebih dahulu tentang hak *derogable*. Hak *derogable* ialah hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara. Hak-hak tersebut berupa:

1. hak atas kebebasan berkumpul secara damai;
2. hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh;
3. hak atas kebebasan berpendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apa pun.

Hak yang termasuk *derogable* dimungkinkan untuk dibatasi atau direnggut oleh negara untuk mencegah kesewenang-wenangan yang akan timbul akibat pelaksanaaan hak-hak tersebut.

Apakah intoleransi dapat mengarah pada



Gambar 4.9 Pelajar SMA dan SMK praktik menyatakan pendapat dengan santun.

pelanggaran hak yang *derogable*? Tentu saja, di antaranya jika kamu berkumpul, tetapi tidak tercipta kedamaian. Berarti, ada yang tidak mampu berbuat toleran di sana. Begitu pula ketika berserikat maupun mengeluarkan pendapat, tetapi tidak mengikuti aturan yang berlaku, hal itu pun terjadi karena tidak toleran.

Pada Bab 3, sudah dijelaskan arti dari intoleransi, yakni konflik yang terjadi akibat minimnya pemahaman seseorang terhadap perbedaan yang merupakan anugerah Tuhan dalam hidup bermasyarakat. Itulah sebabnya, untuk menghindari konflik makin membesar, negara dapat mencabut hak-hak tertentu dari warga negaranya melalui aturan yang melindungi hak individu dan kolektif supaya tidak terjadi intoleransi.

Pada pembelajaran kali ini, kamu akan melakukan aktivitas untuk mencegah intoleransi. Berikut kegiatannya.



Siap Profil Pelajar Pancasila

Aktivitas 4.5

Pada alur kedua ini, kamu akan melakukan kegiatan merancang sebuah gagasan untuk mencegah intoleransi secara berkelompok 5-7 orang berupa sebuah permainan. Kamu akan membuat sekaligus melakukan permainan tersebut. Berikut hal yang harus diperhatikan untuk kegiatan ini.

RANCANG

1. Buatlah permainan yang berkaitan dengan kompetisi dan kerja sama, dapat berupa monopoli, ludo, ular tangga, atau permainan tradisional yang berkaitan dengan kompetisi dan kerja sama.
2. Inti dari permainan tersebut, setiap siswa yang mendapatkan giliran bermain harus membacakan peran dan tindakan yang harus dilakukan. Peran hanya terdiri atas 3, yakni orang pemberi kesedihan, orang pemberi kebahagiaan, dan hakim yang akan mengadili.
3. Rancanglah kata-kata yang menyedihkan seperti: menghina, mengejek, merundung, dll. Begitu pula kata-kata kebahagiaan seperti: aku ada untukmu, semangat, kami mendukungmu, dll.

BANGUN

4. Buatlah aturan main seperti berikut.
 - a. Hakim ialah orang yang akan mengocok kartu peran dan tindakan.
 - b. Tiap kali tindakan yang positif, boleh maju 1 sampai 3 langkah, bergantung pada keputusan hakim seperti apa. Namun, jika tindakan yang keluar negatif, mundur 1 sampai 3 langkah.

- c. Peserta diperkenankan untuk menolak peran dan tindakan dari kartu yang didapat. Namun, dia harus memberikan alasan yang tepat ketika tidak akan melakukannya.
 - d. Jika ada yang melakukan aturan c), hakim boleh meminta pendapat peserta lain untuk mengabulkan atau tidak.
5. Permainan yang sudah dibangun ini memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh semua peserta. Sebelum diterapkan, diskusikan terlebih dahulu bersama teman kelompokmu agar permainan ini berkeadilan.
6. Di akhir permainan, kemenangan berupa: apakah berakhir dengan mayoritas bahagia atau bersedih.

MENERAPKAN

- 7. Permainan yang dilakukan oleh tiap kelompok diamati oleh teman lainnya untuk mencermati kata-kata yang digunakan.
- 8. Permainan ini tidak sekadar bersaing dan bekerja sama, tetapi penggunaan kata: maaf, tolong, dan terima kasih harus mewarnainya.
- 9. Setiap peserta mengungkapkan perasaan saat mengikuti dan setelah permainan ini.

Penilaian akan dilakukan oleh guru dan sesama teman. Hal yang dinilai ialah performa dan sikap dengan memberikan tanda cek (✓) pada kolom yang sesuai pada tabel berikut.

Tabel 4.7 Instrumen Penilaian Performa dan Sikap

Nama Peserta Didik	Performa				$NA = (\checkmark) \times 25$
	Santun	Adil	Antusias	Bekerja Sama	

Tahukah kamu alasan mengapa permainan di atas harus diawasi oleh orang lain? Hal itu agar kita waspada terhadap perbuatan sendiri. Kita wajib berperilaku dengan berprinsip pada HAM, berikut penjelasannya.

PRINSIP-PRINSIP HAM



Gambar 4.10 Prinsip HAM

Sumber: PPt Pendampingan Komnas HAM (2015)

Intoleransi berlawanan dengan prinsip HAM, yakni universal dan tidak dapat dipindahkan, kesetaraan, dan nondiskriminasi, serta partisipasi dan inklusi. Pasal 19 Deklarasi Universal HAM menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan, mempunyai dan mengeluarkan pendapat; termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan serta pendapat dengan cara apa pun tanpa memandang batas-batas.”

Begitu pula dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan seperti berikut.

- Ayat (1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
- Ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apa pun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
- Ayat (3) Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus.

Adapun tanggung jawab khusus itu di antaranya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

- a. menghormati hak atau nama baik orang lain;
- b. melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Solusi untuk mengatasi intoleransi ialah:

1. memberikan pengetahuan tentang intoleransi dan dampak buruknya,
2. memberikan pengetahuan tentang hak atas kebebasan berpendapat dan batasannya,
3. menguatkan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang intoleransi, dan
4. membuat kebijakan/aturan terkait intoleransi.

Saatnya para pelajar Indonesia memiliki jiwa toleran, ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui perilaku dan karya yang dapat mencegah intoleransi. Yuk! Kita berbuat.



Gambar 4.11 Bangsa Indonesia yang Rukun dan Toleran



Siap Berefleksi

Pada pembelajaran kali ini, refleksikan gagasan apa yang paling mudah atau sulit dalam mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang menurut kamu harus diperbaiki.

Tabel 4.8 Refleksi Pemahaman Diri dan Situasi yang Dihadapi

Kriteria	Perundungan	Intoleransi
Mudah, alasannya....		
Sulit, alasannya....		



Uji Kompetensi

Soal Pilihan Banyak

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Jaminan HAM di Indonesia di mana bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia secara idil terdapat dalam
 - A. sila ke-1 Pancasila
 - B. sila ke-2 Pancasila
 - C. sila ke-3 Pancasila
 - D. sila ke-4 Pancasila
 - E. sila ke-5 Pancasila

Nomor 2 sampai 5 berdasarkan gambar berikut!



Tidak untuk ditiru!

2. Perhatikan gambar perilaku di atas. Secara kasat mata, perbuatan menyalin dengan/atau tanpa paksaan merupakan perbuatan yang melanggar HAM. Namun, perilaku kasar pada gambar bertentangan dengan pasal ...
 - A. 28G ayat (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

- B. 28H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- C. 28H ayat (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- D. 28H ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- E. 28H ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
3. Jika dianalisis berdasarkan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berisi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Peristiwa pada gambar di atas mengindikasikan bahwa
- A. pelaku penyontekan telah memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi dari yang dinyonteki sebagai hak asasinya
- B. pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar pelaku penyontekan telah tercapai karena terbantu dari sonekannya
- C. korban penyontekan mendapat pendidikan dari pengembangan diri melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologinya
- D. atas persetujuan orang yang dinyonteki, pelaku penyontekan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya
- E. korban penyontekan tidak mendapatkan hak mengembangkan diri demi meningkatkan kualitas hidupnya atas manfaat dari ilmunya
4. Jika merasa dirugikan atas peristiwa penyontekan, siswa dapat mengadukan pelanggaran hukum atas haknya untuk dilindungi sebagai warga negara yang sama di hadapan hukum, sesuai yang termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal ...
- A. 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- B. 28D ayat (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

- C. 28D ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
 - D. 28D ayat (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
 - E. 28E ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
5. Pada gambar di atas, terdapat unsur paksaan agar memberikan sotekan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) yang berisi ...
- A. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - B. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
 - C. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
 - D. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
 - E. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Soal 6 dan 7 berdasarkan gambar berikut!



Sumber: serangtimur.co.id (2019)

6. Dalam Pasal 28J ayat (1) yang berisi “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Gambar di atas mengindikasikan sebuah peringatan pada perilaku masyarakat Indonesia yang berkenaan dengan HAM, yaitu
 - A. dilarang menggunakan kendaraan yang mengeluarkan suara
 - B. kendaraan yang laik jalan dapat memenuhi HAM untuk hidup tertib
 - C. setiap yang memiliki kendaraan harus menggunakan kendaraan yang memiliki knalpot
 - D. adanya larangan bagi yang memiliki kendaraan untuk memodif kendaraannya
 - E. masyarakat yang tidak hidup tertib dilarang menggunakan kendaraan yang bising
7. Peraturan Lalu Lintas yang dilansir dalam gambar di atas memberikan pendidikan ketaatan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi yang termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yakni ...
 - A. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
 - B. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
 - C. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
 - D. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - E. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
8. Perokok pasif merasa dilanggar hak hidupnya untuk sehat dan jaminan pelayanan kesehatan. Padahal, dalam UUD NRI Tahun 1945, terdapat jaminan terhadap hal tersebut, yakni terdapat dalam pasal
 - A. 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- B. 28G ayat (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
 - C. 28H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
 - D. 28H ayat (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
 - E. 28H ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
9. Berikut ini perilaku yang ditampilkan seorang siswa yang memahami kasus pelanggaran HAM apabila terdapat penegakan disiplin di sekolah, yakni
- A. meyakini bahwa kedisiplinan ialah bagian dari pembelajaran
 - B. melaporkan tiap kegiatan mendisiplinkan sebagai pelanggaran HAM
 - C. bersikap paham terhadap aturan kedisiplinan
 - D. memercayai kedisiplinan bagian dari proses kebaikan
 - E. bertindak sesuai aturan dan komitmen yang berlaku
10. Jika terjadi pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dalam bidang pendidikan, perbaikan yang akan saya lakukan selayaknya seorang pelajar ialah
- A. membuat kebijakan kurikulum yang lebih baik
 - B. membuat keputusan dalam musyawarah OSIS
 - C. memenuhi kewajiban pada orang tua
 - D. belajar dengan sungguh-sungguh untuk masa depan
 - E. mencari alternatif pendidikan yang lebih baik

Esai

1. Setelah pembelajaran tentang bagaimana membuat gagasan dalam mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, jelaskan hal yang akan dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang beradab!
2. Jelaskan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang harus ditegakkan dan paling sesuai dengan kondisi masyarakat sekitarmu. Jelaskan peristiwanya, pasal apa yang dilanggar, dan bagaimana solusinya!

3. Mengapa warga negara muda harus mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban?
4. Jika kamu adalah para negarawan pendiri bangsa, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara?
5. Buatlah sebuah kutipan yang menyatakan komitmen untuk bangsa dan negara ini agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara!



Pengayaan

1. Bagi kamu yang ingin memahami materi tentang identifikasi bagaimana seorang warga negara menghadapi masalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kamu dapat mempelajari artikel yang berjudul: Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945, melalui link di samping.
2. Bagi kamu yang ingin memahami bagaimana membuat gagasan untuk mengampanyekan maupun melakukannya di kehidupan sehari-hari tentang antiperundungan dan intoleransi, jika berkehendak melanjutkan pembelajaran lebih mendalam, dapat menyusun skenario cara berkampanye maupun membuat permainan antiperbuatan buruk lainnya yang dirasa meresahkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat.



Tahukah Kamu?



[https://buku.kemdikbud.
go.id/s/4lg0rs](https://buku.kemdikbud.go.id/s/4lg0rs)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2023

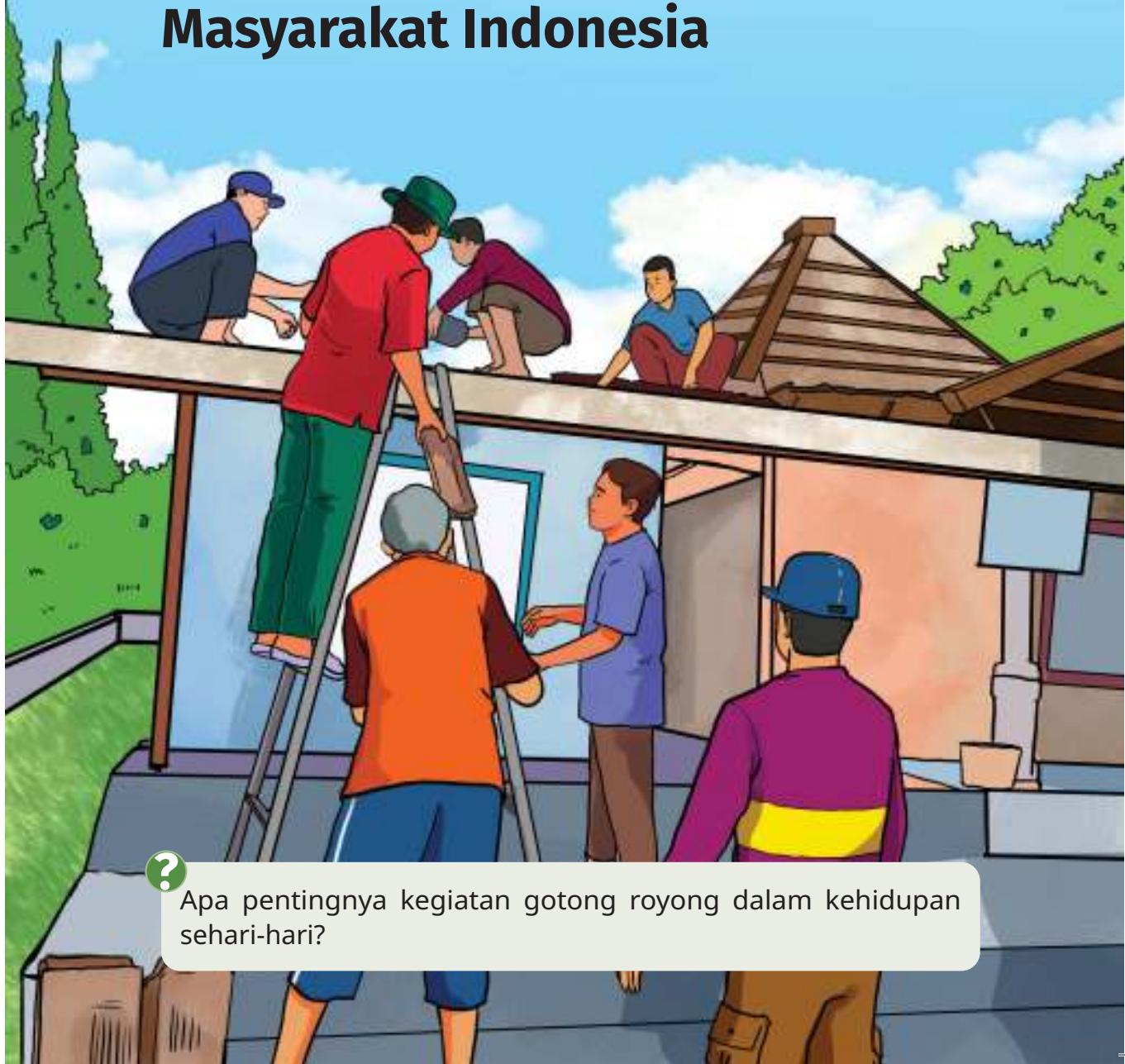
Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII

Penulis: Ida Rohayani, Hatim Gazali, Dwi Astuti Setiawan

ISBN 978-623-194-624-9 (jil.3 PDF)

Bab 5

Praktik Gotong Royong dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia



Apa pentingnya kegiatan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari?



Tujuan Pembelajaran

Setelah melalui pembelajaran ini, kamu diharapkan mampu merancang kegiatan bersama sebagai wujud praktik gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.



Kata Kunci

Gotong royong, Bekerja sama, Praktik



Peta Konsep



Perhatikan Gambar 5.2 dan cuplikan isi pidato Ir. Sukarno dalam Risalah Sidang BPUPK berikut ini.



Gambar 5.1 Ir Sukarno Sedang Berpidato

Sumber: ANRI

"Gotong Royong" adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari "kekeluargaan", Saudara-Saudara! Kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota

yang terhormat Soekardjo satu karya, satu gawe. Marilah, kita menyelesaikan karya-gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama!

Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua Ho-lopis kuntul-baris, buat kepentingan bersama! Itulah gotong royong!

Berdasarkan cuplikan pidato tersebut, kita sadar bahwa keberadaan gotong royong merupakan suatu usaha bersama yang dinamis untuk mewujudkan kepentingan bersama. Gotong royong juga menjadi kepribadian bangsa Indonesia yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Artinya, hampir di setiap daerah di Indonesia, menanamkan nilai gotong royong sebagai budaya yang sudah berakar kuat.

Kesadaran akan pentingnya gotong royong harus dicerminkan pada seluruh masyarakat Indonesia. Kebersamaan, keberagaman, keselarasan, dan kepentingan bersama menjadi kebutuhan bagi seluruh masyarakat yang sudah dikonsepsikan

ke dalam nilai sila ke-3 Pancasila demi menciptakan persatuan Indonesia. Dalam hal ini, gotong royong telah menjadi karakteristik yang mencerminkan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Sejak dahulu, gotong royong telah tertanam dan menjadi wujud perilaku dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan oleh berbagai suku bangsa yang hidup di Nusantara.

Setelah kamu memahami bahan bacaan tersebut, kamu kerjakan latihan berikut ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kamu tentang gotong royong.



Asesmen Awal, Siap Belajar

1. Apa tujuan bergotong royong dalam masyarakat?
2. Apa ciri khas dari gotong royong?
3. Apa saja bentuk gotong royong dalam masyarakat?
4. Sikap apa saja yang harus ditunjukkan dalam kegiatan gotong royong?
5. Bagaimana cara melestarikan kegiatan gotong royong sebagai budaya bangsa?

A. Kerja Sama dalam Bergotong Royong

Dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti tidak asing dengan istilah *kerja sama*. Istilah tersebut dapat kamu jumpai pada suatu kegiatan yang melibatkan beberapa orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kamu dapat melihat berbagai bentuk kegiatan kerja sama dalam kehidupan sehari-hari seperti kerja sama kelompok untuk menyelesaikan pekerjaan di sekolah dengan berdiskusi antarpeserta didik, kerja sama antaranggota keluarga dalam membersihkan rumah atau kerja sama masyarakat melalui kegiatan poskamling. Dari berbagai kegiatan kerja sama tersebut, dapat diartikan bahwa kerja sama secara umum sering dimaknai sebagai bekerja secara bersama-sama dan saling bantu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan.

1. Kategori Kerja Sama

Adapun beberapa kategori kerja sama berdasarkan kepentingannya (urgensi) menurut Rahman M.T (2011) sebagai berikut.

a. Kerja Sama Spontan

Merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu dan tanpa mengharapkan imbalan (pamrih). Contohnya: ketika seorang guru meminta para peserta didik berkelompok dengan teman sebelahnya untuk mengerjakan soal tertentu atau berdiskusi.

b. Kerja Sama Langsung

Merupakan bentuk kerja sama yang telah diarahkan atau diperintahkan sebelumnya oleh atasan, penguasa atau pemimpin. Contohnya: para mahasiswa dalam suatu universitas yang ditugaskan untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di suatu daerah perdesaan sebagai pengabdian kepada masyarakat dan syarat kelulusan.

c. Kerja Sama Kontrak

Merupakan bentuk kerja sama berdasarkan adanya motif tertentu dan biasanya terdapat perjanjian yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Contohnya: seorang pekerja pabrik dapat memperoleh gaji atau upah harus bekerja dengan menaati peraturan dan mampu bekerja sama dengan sesama pekerja atau mandor dengan ketentuan yang sudah diatur melalui kontrak kerja.



Siap Berkinerja

Bagi peserta didik sekolah kejuruan (SMK), bentuk kerja sama antarlembaga sering ditemukan pada saat kegiatan praktik kerja industri (Prakerin) atau Praktik Kerja Lapangan (PKL). Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk pola pikir peserta didik agar terkonstruktif baik serta memberikan pengalaman dalam dunia industri maupun dunia kerja. Menjalankan kerja sama yang baik antara sekolah dan perusahaan terkait, baik dalam dunia usaha maupun dunia industri sebagai langkah awal pengenalan dan pematangan ilmu yang sudah diajarkan. Biasanya, kegiatan ini dilakukan dengan sistem kontrak selama 3-6 bulan.

d. Kerja Sama Tradisional

Kerja sama tradisional merupakan bentuk kerja sama yang tercipta karena adanya sebuah adat atau kebiasaan yang telah turun-temurun dalam masyarakat. Misalnya, kerja sama berupa gotong royong dalam rangka membersihkan selokan. Tujuannya supaya tidak terjadi banjir ketika datang hujan deras. Kerja sama itu atas dasar kerelaan dan tanpa pamrih demi menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bersih.

Perhatikan Gambar 5.2.

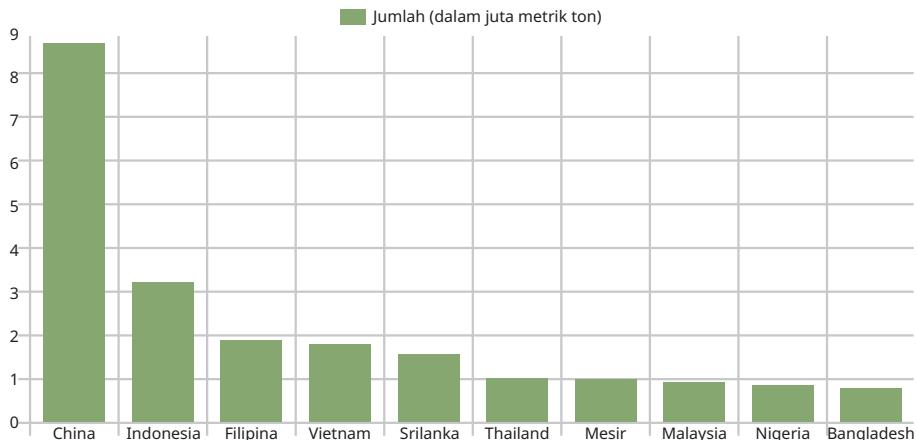


Gambar 5.2 Operasional TPA Terganggu

Sumber: Abdan Syakura/republika.co.id (2021)

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup di Indonesia. Bahkan, menurut hasil penelitian Jenna Jambeck dari University of Georgia (2017), Indonesia tercatat sebagai penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah China. Jika tidak tertangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan banyak masalah, seperti masalah kesehatan, lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Negara Penghasil Sampah Plastik Terbesar



Gambar 5.3 Diagram Penghasil Sampah

Sumber: Jenna Jambeck, University of Georgia (2017)/ www.alinea.id

Sehubungan dengan hal itu, sebagai langkah awal membangun kerja sama antarsesama untuk menumbuhkan rasa cinta dan sikap peduli terhadap lingkungan alam di sekitar kita, mari, kita mengadakan kegiatan/proyek yang penting dan bermanfaat pada Aktivitas 5.1. Tujuan utama dalam proyek ini ialah menjaga lingkungan alam ruang hidup kita agar tidak tercemar oleh sampah. Siap eksplorasi dimulai dari kelas kita bersama!



Siap Eksplorasi

Aktivitas 5.1

Rancangan Proyek

"Alam Lestari, Bagimu Negeri"

Prosedur Proyek

1. Kamu akan dibagi ke dalam 3 kelompok terdiri atas 8-10 orang.
2. Kelompok 1 membuat tong sampah organik (warna hijau), kelompok 2 membuat tong sampah nonorganik (warna kuning), kelompok 3 membuat sampah nonorganik berbahan kertas (warna biru).

Tong
Sampah
Organik

Tong
Sampah
Nonorganik

Tong
Sampah
Nonorganik
Berbahan
Kertas

3. Berkumpullah dengan teman satu kelompokmu dan pilihlah salah satu orang menjadi ketua.
4. Dengarkanlah penjelasan gurumu tentang proyek gotong royong kewarganegaraan bertajuk "Bersahabat dengan Sampah" yang akan dilaksanakan oleh setiap kelompok.
5. Setiap ketua kelompok membagi tugas (*job description*) kepada anggotanya untuk membawa alat dan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek.
6. Setiap kelompok membawa bahan baku pembuatan tong sampah beserta tutupnya dari barang bekas, seperti drum bekas, ember bekas, bambu, kayu, dan barang lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk membuat tong sampah.
7. Setiap kelompok membawa cat sesuai dengan pembagian kelompoknya. Warna hijau untuk sampah organik, warna kuning untuk sampah nonorganik, dan warna biru untuk nonorganik berbahan kertas.
8. Setiap kelompok membawa kuas untuk mewarnai tong sampah dan memberi nama sesuai dengan jenis sampahnya.
9. Setiap kelompok membawa alat yang diperlukan dalam pembuatan tong sampah seperti paku, palu, gunting, dan sebagainya.

Rencana Jadwal Pelaksanaan Proyek

1. Membuat perencanaan: 1 kali pertemuan
2. Mempersiapkan alat dan bahan: 2 kali pertemuan
3. Pelaksanaan proyek: 1 kali pertemuan

Langkah-Langkah Pelaksanaan Proyek

1. Berkumpullah bersama teman sekolompok kamu!
2. Keluarkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tong sampah!
3. Buatlah tong sampah dengan teman-teman sekelompokmu!
4. Jangan lupa membuat tutup untuk menutup tong sampah yang telah dibuat!
5. Warnailah tong sampah dan tutupnya sesuai pembagian kelompoknya!
6. Berilah nama pada tong sampah tersebut!
7. Letakkan tong sampah tersebut di depan ruang kelas!
8. Buanglah sampah sesuai dengan nama-nama tong sampah tersebut!

9. Buatlah poster atau pamflet sederhana sebagai sarana informasi untuk semua warga sekolah terkait tujuan proyek yang sudah kamu kerjakan. Adapun contoh poster atau pamflet sebagai berikut.



Tabel 5.1 Rambu-Rambu Penilaian Aktivitas 5.1

Aspek Penilaian	Bobot
Perencanaan	25%
Langkah-Langkah	25%
Pelaksanaan	25%
Pelaporan	25%

Setelah melakukan proyek Aktivitas 5.1, silakan kamu lakukan penilaian antaranggota kelompok secara mandiri. Gunakan rubrik di bawah ini!



Siap Eksplorasi

Tabel 5.2 Penilaian Antarteman

NO	NAMA	INDIKATOR TIM YANG SOLID					
		Kerja Sama	Disiplin	Komunikasi	Motivasi	Koordinasi	Kepedulian
1.	Peserta Didik A	+	+	+	-	-	-
2.							
3.							
4.							
5.							

Keterangan penilaian:

(+) untuk menilai indikator tim yang solid

(-) untuk menilai indikator tim yang kurang/tidak solid

Berikan hasil penilaian kepada guru.

2. Sikap dan Perilaku dalam Kerja Sama

Setelah kamu melakukan Aktivitas 5.1 tentang kerja sama dalam menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan di sekolah, ada beberapa sikap dan perilaku yang harus ditampilkan dalam kerja sama membangun gotong royong demi mencapai tujuan bersama. Pola sikap perilaku ini merupakan bentuk pemahaman kamu dalam memaknai bhinneka tunggal ika melalui kegiatan gotong royong agar tercipta harmonisasi keberagaman dalam suatu kelompok. Adapun beberapa sikap dan perilaku yang dapat kamu tampilkan sebagai berikut.

a. Kesetaraan

Kesetaraan bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama tanpa memandang latar belakang suku, ras, agama, dan antargolongan. Tingkatan atau kedudukan tersebut bersumber dari pandangan bahwa semua manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama.

Bahkan, jaminan keadilan dan kesetaraan dalam hukum sebagai warga negara Indonesia diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Paham kesetaraan akan menandai cara berpikir dan berperilaku bangsa Indonesia. Apabila setiap orang Indonesia berdiri di atas realitas bangsanya yang plural dan multikultural, prinsip kesetaraan perlu diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia demi mewujudkan tujuan bersama.

b. Saling Pengertian

Pengertian merupakan sebuah realisasi kesadaran akan fakta nyata kehidupan yang tidak selalu sama dan sempurna. Di dalam pengertian, terdapat rasa ketulusan, kesiapan, dan ketegaran untuk menerima kekurangan sekaligus mensyukuri kelebihan diri sendiri maupun orang lain. Saling pengertian ini merupakan tindak lanjut dari rasa menghargai. Dengan menghargai, kita bisa mengerti dan menerima perbedaan dalam berbagai bidang sebagai sebuah warna kehidupan. Ada beberapa perilaku yang bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku tersebut antara lain seperti berikut.

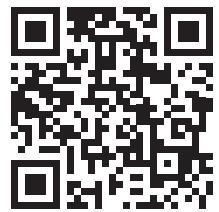
- Bersikap dan berpikir positif dan menghindari prasangka buruk terhadap orang lain.
- Menghindari sikap menonjolkan diri (individualisme) dan merendahkan orang lain.
- Introspeksi diri tanpa menghakimi orang lain.
- Meningkatkan kepekaan diri.
- Meningkatkan rasa sabar, tulus, toleran, dan tegas.

c. Toleransi

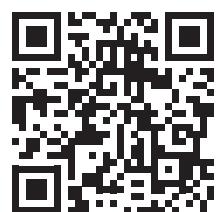
Sikap toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi didasarkan atas sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, keyakinan, serta keikhlasan terhadap perbedaan yang ada. Sikap toleransi menjadi faktor penting dalam membangun kerja sama untuk menuju kemufakatan dan mencapai tujuan bersama. Jika setiap warga negara mengedepankan sikap toleransi antarsesama, harmonisasi keberagaman akan terasa indah dan mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan. Hal ini merupakan perwujudan dari nilai dasar Pancasila sila ke-3, yaitu Persatuan Indonesia.



Tahukah Kamu?



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/irbqzz>



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/znilg2>

Negara Indonesia membangun Tol Laut sebagai upaya peningkatan kerja sama dalam negeri yang digagas oleh Presiden RI ke-7 Ir. Joko Widodo pada tahun 2016. Tol laut terdiri atas enam trayek jalur pelayaran yang bebas hambatan, yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia, yang menghubungkan antarpulau. Tujuannya ialah menghadirkan konsep laut sebagai pemersatu bangsa dalam mengupayakan kerja sama dan pemerataan barang dan jasa di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pembangunan tol laut sebagai upaya negara dalam membangun kepercayaan internasional agar negara-negara sahabat tertarik berinvestasi di dalam negeri untuk mempercepat pemerataan pembangunan nasional.

Untuk informasi lebih lanjut, pindai barcode atau link di samping.



Gambar 5.4 Infografis Trayek Tol Laut

Sumber: kominfo.go.id

B. Nilai Gotong Royong dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia

Gotong royong merupakan salah satu nilai penting yang menggambarkan semangat kebersamaan masyarakat Indonesia. Hal ini berkaitan dengan nilai luhur budaya masyarakat Indonesia. Terbukti bahwa berbagai suku bangsa di Indonesia memiliki istilah untuk menggambarkan perilaku gotong royong. Contoh, Ngayah (Bali), yakni bekerja sama secara sukarela untuk membantu tetangga maupun orang lain seperti membantu tetangga kesulitan, kegiatan ibadah, dan lain-lain. Contoh lain, Masohi (Maluku), yakni sikap tolong-menolong dan saling membantu masyarakat Maluku untuk tujuan tertentu. Gemohing (NTT), yakni gotong royong warga Nusa Tenggara Timur dalam membantu warga tetangga kampung secara sukarela, seperti membantu membangun rumah, memanen, menanam ladang, dan lain-lain. Liliuran (Sukabumi, Jawa Barat), yakni gotong royong saling membantu warga Sukabumi dalam mengelola lahan hingga panen.

Hampir dalam bentuk kegiatan yang sama, di beberapa daerah lain juga memiliki sebutan yang berbeda tentang gotong royong seperti Mapalus (Minahasa), Alang Tulung (Aceh), Ammosi (Sulawesi Tengah), Ngacau Gelamai (Bengkulu), Alak Tau (Dayak Rindang Benua), Marsialapari (Sumatra Utara), Nugal (Kalimantan Barat), Song Osong Lombhung (Madura), Mappalette Bola (Sulawesi Selatan), Nyambungan-Nyambungan (Suku Baduy), Kuriak (Subang), Sabilulungan (Sunda, Jawa Barat), Batobo (Riau), Helem Foi Kenambai Umbai (Papua), dan lain-lain.

Gotong royong juga diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dimiliki oleh setiap manusia untuk menukseskan kehidupan sosial dalam berserikat dan berkumpul. Kesadaran akan keberagaman suatu kelompok untuk mewujudkan kepentingan bersama dapat dicapai dengan menyatukan berbagai macam keberagaman yang ada, termasuk negara. Karakteristik negara Indonesia dengan berbagai macam suku, etnis, budaya, dan keberagaman lainnya menyebabkan diperlukannya sikap persatuan, sikap saling memiliki, serta sikap saling menghormati. Perwujudannya ialah kegiatan gotong royong dalam berbagai hal sebagai semangat kebersamaan antarmasyarakat untuk saling membantu atau tolong-menolong.



Siap Eksplorasi

Aktivitas 5.2

Pada Aktivitas 5.2 ini, kamu dapat bekerja secara mandiri untuk mencari berbagai bentuk kegiatan gotong royong yang ada di lingkungan sosial tempat tinggal. Kamu dapat menggunakan tabel berikut ini sebagai acuan proses pencarian.

Tabel 5.3 Bentuk Kegiatan Gotong Royong

NO	BENTUK KEGIATAN GOTONG ROYONG		
	Keluarga	Sekolah	Masyarakat
1	Setiap anggota keluarga bahu-membahu membersihkan rumah setiap akhir pekan.	Setiap hari Jumat pagi, semua warga sekolah membersihkan lingkungan sekolah untuk menjaga kebersihan dan menciptakan kenyamanan dalam proses belajar-mengajar.	Setiap hari, dilakukan kegiatan bersama antarwarga kampung untuk menjaga keamanan dengan melakukan kegiatan siskamling.
2			
3			
4			
5			

Setelah kamu melakukan Aktivitas 5.2 terkait dengan berbagai macam bentuk gotong royong di lingkungan sosial, kamu akan mendapatkan beberapa informasi yang cukup untuk mengidentifikasi manfaat dari kegiatan gotong royong tersebut. Jadi, apa manfaat kegiatan gotong royong bagi kehidupan masyarakat?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan kamu lakukan Aktivitas 5.3 Profil Pelajar Pancasila berikut ini secara berkelompok!



Siap Profil Pelajar Pancasila

Aktivitas 5.3

Temukan berbagai macam manfaat kegiatan gotong royong bagi pribadi dan kehidupan masyarakat. Kamu dapat menggabungkan hasil temuan dari Aktivitas 5.2 bersama anggota kelompokmu yang terdiri atas 3-5 peserta didik. Kemudian, presentasikan hasil diskusi di kelas.

Tabel 5.4 Rambu-Rambu Penilaian Aktivitas Presentasi

Materi	Kreativitas	Sikap
Kesesuaian Materi	Penyajian Presentasi	Sikap yang ditampilkan pada saat diskusi kelas.

Manfaat gotong royong dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat dirasakan oleh setiap individu yang ada di lingkungannya. Gotong royong mengandung nilai-nilai luhur yang sudah melekat dan menjadi kepribadian masyarakat Indonesia. Ada semangat yang dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan ataupun perilaku secara individu atau dalam suatu kelompok masyarakat. Mereka akan bersatu untuk melakukan sebuah kegiatan secara bersama-sama demi kepentingan bersama tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Berikut ini beberapa nilai yang terkandung dalam kegiatan gotong royong.

1. **Nilai Kebersamaan**

Dalam aktivitas gotong royong, terbentuk semangat kebersamaan. Artinya, individu atau masyarakat tanpa paksaan (sukarela) dan bersama-sama membantu orang lain maupun untuk kepentingan umum (masyarakat) yang dapat dirasakan manfaatnya secara bersama-sama.

2. **Nilai Persatuan**

Kebersamaan yang timbul dari seluruh lapisan masyarakat akan menciptakan rasa persatuan tanpa memandang kepentingan pribadi atau golongan dan latar belakang pada individu dalam lingkungan masyarakat. Adanya semangat persatuan ini mampu melahirkan kekuatan secara emosional dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, segala bentuk permasalahan yang timbul dapat diselesaikan secara adil dengan mengedepankan kepentingan bersama.

3. **Nilai Rela Berkorban**

Kegiatan gotong royong dilandaskan pada nilai dan sikap rela berkorban. Hal ini berkaitan dengan berbagai macam pengorbanan yang dilakukan oleh setiap individu dalam masyarakat. Bentuk pengorbanan dapat berupa waktu, tenaga, pikiran, ide bahkan harta demi terlaksananya kegiatan gotong royong. Semua pengorbanan tersebut murni dilakukan oleh individu atau masyarakat untuk mencapai kepentingan bersama tanpa adanya paksaan dari pihak tertentu.

4. **Nilai Tolong-menolong**

Salah satu tujuan dalam perwujudan kegiatan gotong royong ialah untuk saling membantu antarsesama anggota masyarakat. Dari nilai ini, akan terbentuk kedekatan lebih mendalam dan merasakan manfaatnya bagi orang lain ataupun secara pribadi.



Siap Eksplorasi

Aktivitas 5.4

Bacalah artikel di bawah ini dengan saksama! Kemudian, jawablah pertanyaan di bawahnya.



Gambar 5.5 Rilis Model dan Properti Bertanda Tangan

Sumber: Shuterstock/rawpixel.com

Gotong royong jika diartikan secara sederhana merupakan cara masyarakat melakukan suatu pekerjaan bersama-sama atau saling bahu-membahu agar pekerjaan terasa lebih ringan dan membutuhkan waktu yang lebih singkat. Gotong royong merupakan salah satu ikon budaya bangsa Indonesia yang dikenal hingga ke seluruh penjuru dunia.

Ini berarti bahwa bangsa yang sarat akan kebudayaan ini memiliki jiwa kebersamaan yang kuat untuk tetap bersatu dengan cara bergotong royong. Gotong royong ini dapat menumbuhkan rasa simpati masyarakat dan menggerakkan empati mereka untuk saling menolong satu sama lain.

Namun, ketika kita melihat budaya gotong royong pada zaman sekarang, betapa mirisnya karena budaya tersebut telah memudar tergilas arus globalisasi. Banyak budaya baru yang masuk seperti modernisasi dan lain sebagainya. Masyarakat cenderung lebih individualis, konsumtif, dan kapitalis sehingga rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan senasib sepenanggungan dirasa tidak lagi penting.

Alasan lain yang membuat masyarakat Indonesia sudah mulai melupakan nilai-nilai luhur dari budaya gotong royong ialah sifat-sifat seperti malas yang membuat mereka enggan untuk melakukan kegiatan bersama-sama seperti kerja bakti dan sebagainya. Masyarakat sekarang juga sudah terjangkit virus materialisme yang membuat mereka menuhankan uang,

dan mengangapnya lebih penting dari segalanya. Akibatnya, mereka hanya sibuk dengan pekerjaan yang dirasa bisa memberikan keuntungan berupa uang. Alasan-alasan inilah yang membuat masyarakat melupakan pentingnya sosialisasi dengan masyarakat yang lain.

Ketika hal seperti di atas terus terjadi, hal itu akan memiliki dampak buruk terhadap masyarakat, khususnya generasi muda. Generasi muda yang tumbuh dalam lingkungan budaya seperti ini akan hidup dengan cara yang salah pula.

Oleh sebab itu, perlu kesadaran diri dari berbagai pihak untuk senantiasa menumbuhkan semangat bergotong royong agar terwujud kehidupan bangsa yang lebih terarah pada kerukunan dengan saling bahu-membahu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena persatuan merupakan harga mati yang tak dapat dinilai dengan kepingan nominal dan tak kan luntur meski didera goda dan masa.

Kreator: Yunda Firdausy/*Kompasiana* (dengan penyesuaian)

Setelah membaca artikel tersebut, silakan kerjakan soal berikut ini secara mandiri!

1. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari artikel tersebut?
2. Apa penyebab memudarnya kegiatan gotong royong di era milenial saat ini?
3. Bagaimana cara kamu menyikapi pudarnya kegiatan gotong royong?
4. Langkah apa saja yang dapat kamu lakukan untuk menumbuhkan kembali kegiatan gotong royong?
5. Berikan 3 contoh kegiatan gotong royong yang kamu ikuti di lingkungan masyarakat!

C. Praktik Kegiatan Gotong Royong



Gambar 5.6 Mappalete Bola, Sebuah Tradisi Suku Bugis dalam Memindahkan Rumah Panggung

Sumber: Abriawan Abhe/Antara.com

Perhatikan Gambar 5.6. Apa yang ada di pikiran kamu? Kegiatan pada Gambar 5.6 merupakan sebuah tradisi luhur yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Barugaya, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Sebuah tradisi memindahkan rumah panggung dengan cara diangkat secara gotong royong tersebut dilakukan masyarakat setempat sebagai bentuk perwujudan sikap kebersamaan sesama warga dan juga untuk mempertahankan bentuk rumah tradisional. Kegiatan gotong royong ini dikenal dengan nama Mappalete Bola.

Tradisi Mappalete Bola tidak akan terlaksana apabila setiap individu dalam lingkungan masyarakat Sulawesi Selatan saling mengedepankan kepentingan pribadinya masing-masing. Sebuah tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat dan akan diwariskan secara turun-temurun (Soekanto Soerjono 1990: 13). Tradisi ini merupakan bentuk nyata perwujudan gotong royong sebagai kepribadian bangsa Indonesia.



Tahukah Kamu?

Berbagai macam tradisi gotong royong ada di masyarakat Indonesia. Di Provinsi Aceh, terdapat sebuah tradisi gotong royong bernama *Khanduri*. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat dengan cara masak dan makan bersama sebagai perlambang rasa syukur terhadap nikmat Tuhan YME. Selain itu, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terutama pada lingkungan masyarakat petani, ada sebuah tradisi yang dikenal dengan istilah *Gugur Gunung*. Kegiatan tersebut dilakukan oleh masyarakat secara sukarela dan bersama-sama untuk membantu menyelesaikan pekerjaan tertentu. Misalnya, renovasi rumah, panen raya, pembersihan makam, dan pembuatan jalan umum. Begitu pula di Bali, masyarakat memiliki tradisi gotong royong yang kuat yang dikenal dengan *Subak*. Tradisi Subak lebih dikenal dengan lembaga tradisional yang memiliki fungsi untuk mempersatukan para petani dalam mengurus pengairan sawah dan memanfaatkannya secara bersama-sama.



Siap Eksplorasi

Aktivitas 5.5

Lakukan Aktivitas 5.5 berikut ini secara berkelompok!

Pada kegiatan ini, silakan kamu temukan sebuah tradisi gotong royong di sekitar tempat tinggalmu. Ikuti langkah-langkah berikut ini.

1. Kamu dapat berkonsultasi dengan guru untuk mengidentifikasi dan menentukan bentuk tradisi gotong royong. Ada beberapa contoh tradisi gotong royong dalam lingkungan masyarakat Indonesia secara umum, misalnya seperti berikut.
 - a. Pembersihan tempat ibadah untuk menyongsong kegiatan keagamaan.
 - b. Musyawarah Karang Taruna atau Perkumpulan Muda Mudi untuk menyambut peringatan Hari Kemerdekaan RI.
 - c. Pesta rakyat pada saat musim panen.
 - d. Sinoman/pramusaji dalam pesta pernikahan atau kematian seseorang.
 - e. Upacara adat tertentu baik pernikahan atau kematian seseorang.
6. Setelah kamu menentukan tradisi gotong royong bersama guru atau teman sebaya, segera bentuk kelompok yang terdiri atas 4-6 anggota.
7. Usahakan anggota dalam suatu kelompok terdiri atas laki-laki dan perempuan yang rumahnya saling berdekatan.
8. Kemudian, ikutilah tradisi gotong royong yang sudah kamu tentukan bersama masyarakat.
9. Buatlah sebuah laporan keikutsertaan kelompok dalam kegiatan tradisi gotong royong. Buktikan dengan foto atau sebuah video dengan durasi maksimal 3 menit.
10. Konten dalam video berupa hal-hal berikut.
 - Pengenalan identitas tradisi gotong royong misalnya nama istilahnya, dari daerah mana, dan kapan pelaksanaannya.
 - Bentuk tradisi gotong royong yang dilakukan.
 - Manfaat tradisi gotong royong yang dilakukan.
11. Bagikan momen keikutsertaanmu dalam kegiatan gotong royong melalui sosial media yang kamu miliki.

Tabel 5.5 Rambu-Rambu Penilaian Aktivitas 5.5

Aspek	Kriteria
Gagasan	Oriental dan pengembangan gagasan
Kreativitas	Bentuk penyajian materi atau konten yang dikerjakan

Efektivitas	Kesesuaian materi dan tema yang sudah ditentukan
Sikap	Penampilan sikap dan perilaku dalam konten atau materi yang disajikan
Komunikasi	Pemafaatan bahasa Indonesia yang baik dan santun

Kepribadian bangsa melalui perwujudan tradisi gotong royong merupakan nilai-nilai kebijaksanaan yang sejalan dengan nilai-nilai keutamaan dalam kehidupan sosial masyarakat yang mengarah pada kearifan sosial. Komponen-komponen kearifan sosial di antaranya ialah: kerukunan, kekeluargaan, kebersamaan, toleransi, keadilan, kebijaksanaan, asih-asah, ramah, kasih sayang, santun, amanah, dan religius (Subagyo, 2012).

Tidak hanya itu. Gotong royong yang dijadikan sebuah tradisi merupakan bentuk kecerdasan sosial dalam lingkungan masyarakat. Kemampuan ini murni sebagai cara memahami keterikatan antarsesama manusia melalui interaksi sosial dalam menjalin hubungan. Kesadaran dan kematangan masyarakat dalam menjalankan tradisi tersebut merupakan budi pekerti luhur yang dapat diwariskan sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus kewajiban yang harus diemban. Oleh karena itu, gotong royong merupakan bentuk dari kearifan sosial dan kecerdasan sosial masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan untuk mencapai kesepakatan kepentingan bersama (Subagyo, 2012).

Perhatikan Gambar 5.7.



Gambar 5.7 Ilustrasi Gotong Royong

Apa yang kamu renungkan dari Gambar 5.7? Aktivitas apa yang terjadi? Ya, menjadi masyarakat Indonesia harus tahu kepribadian bangsa, yaitu gotong royong. Untuk itu, mari, kita menginisiasi praktik gotong royong di sekitar sekolah kita! Cermatilah langkah-langkah berikut ini!



Siap Profil Pelajar Pancasila

Aktivitas 5.6

PRAKTIK GOTONG ROYONG, DIMULAI DARI AKU!

Kamu dapat merumuskan berbagai praktik gotong royong di sekolahmu sesuai tema di bawah ini.

1. Gotong Royong untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah
2. Gotong Royong Menciptakan Budaya Literasi demi Mewujudkan Generasi Emas 2045
3. Gotong Royong Membangun Perilaku Jujur melalui Kantin Kejujuran
4. Gotong Royong Menghias Kelas untuk Meningkatkan Kenyamanan dalam Proses Belajar-Mengajar
5. Gotong Royong Membentuk Kedisiplinan melalui Kesepakatan dan Konsensus Bersama Warga Sekolah

Setelah kamu menentukan tema gotong royong, ikutilah tahapan berikut ini untuk memudahkan pelaksanaan praktik gotong royong di sekolahmu.

PERENCANAAN

1. Susun tujuan yang akan kamu capai dalam gotong royong, misalnya:
 - Terciptanya kebersihan ruangan kelas.
 - Terciptanya budaya literasi di kelas XII IPA.
 - Terciptanya ruangan kelas yang nyaman, indah, dan bersih untuk mendukung proses belajar-mengajar.
2. Susun jadwal pelaksanaan dan konsultasikan kepada guru.
3. Untuk memudahkan, proyek ini dapat dikerjakan dalam kelompok besar, misalnya satu kelas terbagi dari 2-3 kelompok.
4. Buatlah daftar keperluan alat dan bahan sesuai dengan tema yang dipilih (jika diperlukan).

PELAKSANAAN

1. Laksanakan kegiatan gotong royong sesuai jadwal yang sudah disepakati bersama.
2. Buatlah dokumentasi progres kegiatan dengan media foto atau video sesuai kemampuan kelompok.

EVALUASI

- Buatlah evaluasi pelaksanaan kegiatan menggunakan rambu rambu berikut ini.

Tabel 5.6 Rambu-Rambu Penilaian Aktivitas Praktik

ASPEK	INDIKATOR		KETERANGAN
	YA	TIDAK	
Ketercapaian Tujuan			
Keaktifan Anggota			
Terbangun Kerja sama			
Terbangun Solidaritas			
Rasa Rela Berkoban			
Tolong-menolog			
Terciptanya Persatuan			



Siap Berkinerja

Khusus bagi peserta didik kejuruan (SMK), kantin kejujuran dapat dijadikan sebagai sarana praktik keilmuan yang diajarkan. Misalnya, peserta didik kejuruan Tata Boga dapat menjual segala macam produk tata boga di kantin kejujuran sebagai sarana awal mengetahui kualitas hasil produknya. Tak hanya itu, peserta didik jurusan Akuntansi dapat melakukan pembukuan pendapatan, penjualan, dan penghitungan laba-rugi untuk mengasah kemampuannya. Atau, jurusan Desain Interior dapat mendesain kantin kejujuran sedemikian rupa sehingga memiliki daya tarik tersendiri sesuai dengan lingkungan sekolahmu.



Siap Berefleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kamu melakukan refleksi terhadap proyek yang telah dilaksanakan. Pelajaran berharga apa yang dapat diambil dari berbagai aktivitas pembelajaran yang telah kamu lakukan?



Uji Kompetensi

Uji Kompetensi BAB V tentang gotong royong kepribadian bangsa dilakukan dengan penilaian sebagai berikut.

- A. Pembuatan Laporan Penelitian Sederhana terhadap Pelaksanaan Kegiatan Praktik Gotong Royong yang sudah kamu lakukan sebagai berikut.
 1. Gotong Royong untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah
 2. Gotong Royong Menciptakan Budaya Literasi demi Mewujudkan Generasi Emas 2045
 3. Gotong Royong Membangun Perilaku Jujur melalui Kantin Kejujuran
 4. Gotong Royong Menghias Kelas untuk Meningkatkan Kenyamanan dalam Proses Belajar-Mengajar
 5. Gotong Royong Membentuk Kedisiplinan melalui Kesepakatan dan Konsensus Bersama Warga Sekolah

Ketentuan

Setiap peserta didik melaksanakan dan membuat laporan penelitian tentang praktik gotong royong sesuai tema yang sudah dipilih dengan sistematika laporan sebagai berikut.

- a. Judul Penelitian
 - b. Bab 1 Pendahuluan
 - Latar Belakang Masalah
 - Tujuan Penelitian
 - c. Bab 2 Isi
 - Laporan Pelaksanaan Kantin Kejujuran
 - Analisis Hasil Laporan Pelaksanaan Kantin Kejujuran
 - d. Bab 3 Penutup
 - Kesimpulan
 - Saran
- B. Melakukan Aksi Semarak Gotong Royong dengan membuat media poster, ilustrasi atau video sebagai bentuk kampanye membangun budaya gotong royong. Media yang dihasilkan dikumpulkan kepada guru dan disebarluaskan melalui akun media sosial setiap peserta didik. Adapun konten yang dapat dikembangkan sebagai berikut.

1. Gotong Royong Membangun Budaya Jujur di Sekolah
2. Katin Kejujuran, Membangun Budaya Bangsa
3. Gotong Royong, Kepribadian Bangsa Indonesia
4. Generasi Milenial, Pelopor Budaya Gotong Royong
5. Indonesia, Negara Berkepribadian Gotong Royong



Pengayaan

Pahami tentang berkarya dengan bergotong royong pada laman youtube Kemen-dikbud RI berikut ini.

Apa yang kamu sadari tentang pentingnya gotong royong? Bagaimana berperilaku berdasarkan keanekaragaman Indonesia bagi generasi milenial? Simak pemaparannya dengan scan barcode, ya!



Gambar 5.8 Tangkapan layar dari laman youtube Kemendikbud RI.

Sumber: <https://buku.kemdikbud.go.id/s/amu6j0>



"Gotong royong telah menjadi karakteristik yang mencerminkan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Sejak dahulu, gotong royong telah tertanam dan menjadi wujud perilaku dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan oleh berbagai suku bangsa yang hidup di Nusantara."

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2023

Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII

Penulis: Ida Rohayani, Hatim Gazali, Dwi Astuti Setiawan

ISBN 978-623-194-624-9 (jil.3 PDF)

Bab 6

Menelusur Lembaga Negara



Apa saja lembaga negara dan bagaimana tugas wewenang setiap lembaga tersebut di Indonesia?



Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini, kamu diharapkan mampu menelaah peran lembaga negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

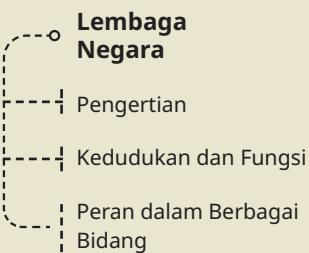


Kata Kunci

Lembaga Negara, Alat Negara, Kedudukan, Peran



Peta Konsep



Gambar 6.1 Istana Bogor

Sumber: Reno Hastukrisnapani Widarto/detikfoto

Siapakah yang berhak bertempat tinggal di Istana Negara? Istana pada Gambar 6.1 merupakan salah satu istana negara yang berada di Bogor, Jawa Barat. Istana Negara tersebut dikenal dengan nama Istana Bogor yang saat ini berfungsi sebagai kediaman Presiden Republik Indonesia. Perlu diketahui bahwa Indonesia saat ini mempunyai 6 istana negara yang memiliki fungsi berbeda-beda. Keenam istana itu ialah Istana Merdeka, Istana Negara, Istana Bogor, Istana Yogyakarta, Istana Cipanas, dan terakhir Istana Tampak Siring yang terletak di Pulau Dewata Bali.

Berdasarkan informasi di atas, kamu dapat mengetahui bahwa Presiden Indonesia memiliki hak yang melekat pada dirinya dari segi fasilitas penunjang kinerja berupa rumah dinas kepresidenan dan kantor presiden yang dikenal dengan istilah istana presiden. Namun, hal yang perlu diperhatikan ialah kekuasaan presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945). Presiden juga memiliki kedudukan untuk menjalankan pemerintahan (*lembaga eksekutif*). Hal tersebut berhubungan dengan pembagian kekuasaan yang dilakukan negara Indonesia dengan sistem pemerintahan yang dikenal dengan istilah *Trias Politica*.

Dalam pengelolaan negara, pasti dibutuhkan lembaga negara sebagai alat perlengkapan negara untuk mencapai tujuan bersama. Hal demikian juga dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Keberadaan lembaga negara membantu menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah. Keterkaitan suatu lembaga

negara dan lembaga negara lainnya akan membentuk sebuah hubungan kesetaraan, yaitu hubungan saling mengontrol (*check and balance*) sehingga terwujud keseimbangan kekuasaan. Hubungan antarlembaga negara tersebut akan membentuk sebuah sistem pemerintahan. Bintan R. Saragih dalam Jimly Asshidiqqie (1994) menyebutkan bahwa sistem pemerintahan adalah keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan antara satu dan yang lainnya baik secara langsung maupun tak langsung menurut rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara. Lalu, apa perbedaan antara lembaga negara dan alat negara? Bagaimana peran lembaga negara di Indonesia?

Sebagai bahan referensi jawaban dari pertanyaan di atas, kamu dapat mengingat kembali pengertian tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan alat kelengkapan negara. Bentuk-bentuk suprastruktur politik di Indonesia terbagi atas tiga kekuasaan yang dikenal sebagai kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Infrastruktur politik adalah segala sesuatu di luar alat kelengkapan negara secara formal yang memiliki pengaruh dan andil terhadap kebijakan pemerintahan. Contoh infrastruktur politik ialah partai politik, kelompok kepentingan, dan media massa.

Selain pemaparan di atas, kamu dapat ingat kembali materi pada Kelas XI yang membahas tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan Indonesia yang berlaku berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Pemahaman kamu pada materi sebelumnya sangat dibutuhkan dalam menelusur lembaga negara pada bab ini sebagai dasar untuk memahami materi dan melakukan aktivitas pembelajaran. Mari, kita mulai menelusur lembaga negara Indonesia.



Asesmen Awal, Siap Belajar

1. Mengapa setiap negara membutuhkan lembaga negara?
2. Bagaimana pembagian kekuasaan yang berlaku di Indonesia?
3. Apa yang kamu ketahui tentang suprastruktur politik?
4. Mengapa kedudukan lembaga negara di tingkat pusat memiliki kedudukan yang setara?
5. Apa saja lembaga negara yang berkedudukan pada tingkat daerah?

A. Pengertian Lembaga Negara

Secara umum, lembaga negara merupakan badan atau organisasi yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar. Namun, secara *terminologi*, lembaga negara memiliki arti yang berbeda-beda. Dalam bahasa Inggris, disebut *political institution*; dalam bahasa Belanda, disebut *staatsorgaan*; dalam bahasa Indonesia, disebut dalam beberapa istilah, yaitu "lembaga negara", "badan negara" atau "organ negara" (Huda, 2020). Semua istilah tersebut dapat memiliki arti yang sama, tetapi bagi negara Indonesia, padanan kata yang tepat ialah lembaga negara.

Keseluruhan pengertian di atas dapat dijadikan dasar pemahaman tentang arti lembaga negara. Kamu bisa menyederhanakan arti lembaga negara sebagai suatu badan, organisasi, dan alat negara yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas-tugas negara yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan merupakan bagian dari sistem pemerintahan.

Sebagai acuan dalam memahami dan menelaah suatu lembaga negara, berikut ini merupakan ciri-ciri yang harus kamu ketahui.

1. Setiap lembaga negara memiliki struktur organisasi yang jelas dalam pemerintahan.
2. Lembaga negara menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan sesuai dengan bidang politik, agama, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
3. Lembaga negara dapat dibentuk oleh konstitusi (hukum dasar), undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara.
4. Keberadaan lembaga negara terdapat di pusat pemerintahan (ibu kota) ataupun di daerah teritorial kewenangan pemerintahan.

Lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga-lembaga negara Indonesia tersebut memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menjalankan tugasnya. Lembaga legislatif bertugas untuk membuat undang-undang. Lembaga eksekutif bertugas untuk menjalankan dan mengimplementasikan undang-undang tersebut. Lembaga yudikatif bertugas menegakkan hukum dan keadilan secara independen.

Dalam menjalankan tugasnya, setiap lembaga negara harus mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta berpegang pada nilai-nilai keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Setiap lembaga negara juga harus memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (*good governance*).

Selain itu, lembaga negara Indonesia juga harus memastikan bahwa kepentingan publik diutamakan dalam setiap kebijakan yang dibuat dan pelaksanaan tugas-tugas negara. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, lembaga negara Indonesia memiliki peran penting dalam menjalankan tugas-tugas negara untuk mewujudkan tujuan negara yang telah ditetapkan, yakni terciptanya kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan kemajuan bangsa.



Siap Eksplorasi

Aktivitas 6.1

Bentuklah kelompok terdiri atas 3-5 orang. Cari dan temukan contoh lembaga negara yang kalian ketahui! Kemudian, tampilkan jawaban kalian pada saat diskusi kelas!

Berikut ini hal yang harus diperhatikan dalam diskusi kelas.

1. Tampilkan jawaban hasil diskusi kelompok secara tegas dan lugas.
2. Setiap anggota kelompok mencatat semua hasil diskusi dari kelompok lain.
3. Catatan hasil diskusi akan dipergunakan sebagai modal untuk aktivitas pembelajaran selanjutnya.

Tabel 6.1 Rambu-Rambu Penilaian Aktivitas Presentasi

Kesesuaian	Presentasi	Sikap	Komunikasi
Kesesuaian jawaban dengan materi.	Kreativitas dalam pembuatan media atau penyampaian.	Perilaku yang ditampilkan dalam penyampaian pendapat.	Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan santun.

Setelah melakukan Aktivitas 6.1, kamu mengetahui bahwa lembaga negara dan alat negara memiliki perbedaan. Hal mendasar dari lembaga negara ialah lembaga ini dapat melakukan tindakan secara langsung untuk dan atas nama negara, atau hanya menjalankan fungsi administratif atau penunjang fungsi sebagai kelengkapan negara. Adapun alat negara ialah kelengkapan negara yang memiliki tugas lebih spesifik untuk memelihara pertahanan negara maupun menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara

Pada subbab ini, kita akan menelusur lebih lanjut tentang kedudukan dan fungsi lembaga negara. Jika diperhatikan ketentuan dan penjabaran dalam UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan lembaga-lembaga negara Indonesia, terdapat perubahan kedudukannya. Pada UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen, MPR memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi (*superior*) pemegang kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Hal ini mengakibatkan pembagian kedudukan lembaga negara menjadi 2, yaitu lembaga "*tertinggi*" negara dan lembaga "*tinggi*" negara (TAP MPR III/ MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antara Lembaga Tinggi Negara).

Perubahan terjadi setelah adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945. Kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga negara yang sama kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Setelah amandemen, sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa lembaga negara di Indonesia saat ini memiliki kedudukan yang sama sesuai dengan pembagian kekuasaan pemerintahan.

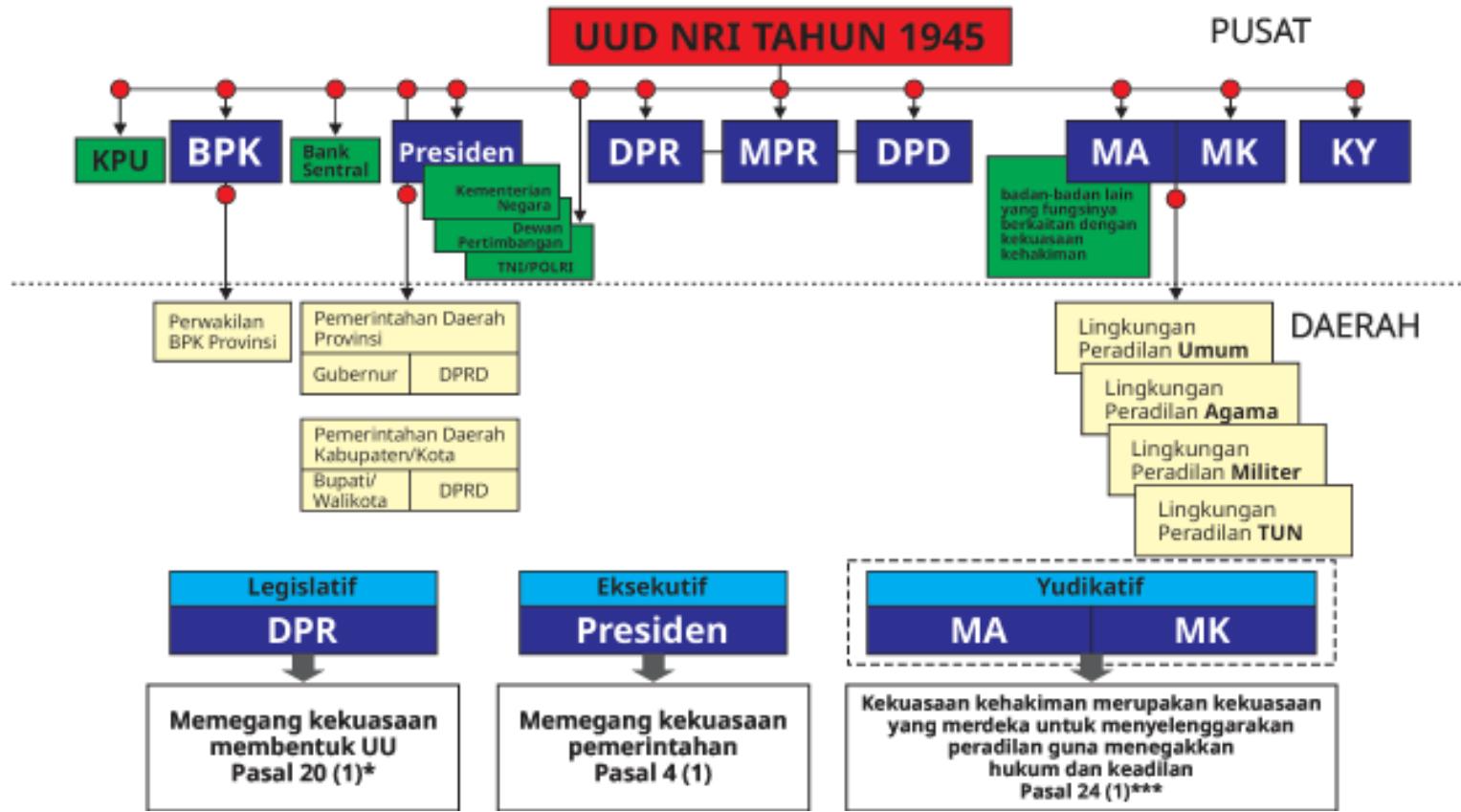


Siap Mengingat Kembali

Sistem pembagian kekuasaan Negara Republik Indonesia yang digunakan sampai saat ini terbagi atas tiga hal, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Aturan hubungan kelembagaan diatur dengan ketentuan yang tertuang dalam konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) untuk mewujudkan *check and balances* dalam menjalankan pemerintahan. Sistem pembagian kekuasaan tersebut dikenal dengan nama "Trias Politica" yang di gagas oleh Montesquieu.

Lalu, bagaimana dengan fungsi lembaga negara? Apakah setiap lembaga memiliki fungsi yang sama pada pembagian kekuasaan di negara Indonesia? Untuk menjawab persoalan di atas, mari, kita lakukan penelusuran pada Aktivitas 6.2. Sebelumnya, perhatikanlah Gambar 6.2 berikut ini.

PENATAAN KEKUASAAN/LEMBAGA NEGARA



Gambar 6.2 Struktur Kelembagaan Republik Indonesia

Sumber: Bahan Sosialisasi MPR RI 31-8-2020

Gambar 6.2 merupakan bagan macam-macam lembaga negara yang berada di Indonesia. Jika diperhatikan, ada titik-titik yang memisahkan antara alat kelengkapan negara yang berkedudukan di pusat dan daerah.



Siap Eksplorasi

Aktivitas 6.2

Buatlah sebuah tim kecil yang terdiri atas 2-3 orang. Kemudian, cari dan temukan informasi terkait Gambar 6.2 sebagai berikut.

1. Carilah informasi terkait lembaga negara yang ada pada Gambar 6.2.
2. Hal yang perlu diketahui ialah:
 - a. nama lengkap lembaga negara,
 - b. kedudukan lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, dan
 - c. fungsi lembaga negara.
4. Cari informasi lembaga negara pada tingkat daerah yang ada di sekitarmu.
5. Gunakan literatur seperti buku, jurnal atau artikel, baik *online* atau *offline*. Kamu juga dapat berkunjung ke perpustakaan untuk menambah literasi dalam proses pencarian.

Pada Aktivitas 6.2, hal yang perlu diperhatikan ialah fungsi lembaga negara. Adapun beberapa fungsi lembaga negara menurut Bagir Manan dalam Isharyanto (2015) bahwa lembaga negara dikategorikan dalam 3 jenis berdasarkan fungsinya, yaitu seperti berikut.

1. Lembaga negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara.
2. Lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif. Di Indonesia, contohnya ialah Lembaga Administrasi Negara (LAN). Jika kamu ingin mengetahuinya, kamu dapat mengunjungi laman di samping.

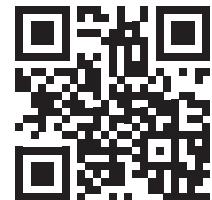
Pindai Aku!



<https://lan.go.id/>

3. Lembaga negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai *auxiliary organ/agency*. Contohnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK dalam struktur lembaga negara sifatnya sebagai pelengkap (*auxiliary*) dari fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah, khususnya pengawasan di bidang keuangan. Kunjungi laman berikut ini jika kamu ingin mengetahui lebih lanjut.

Pindai Aku!



<https://www.bpk.go.id/>

Selanjutnya, untuk meningkatkan kesadaran diri sebagai warga negara yang memegang teguh nilai-nilai Pancasila, mari, kita lakukan Aktivitas 6.3 sebagai penguatan Profil Pelajar Pancasila untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis. Sebelumnya, silakan baca dan cermati artikel di bawah ini.



Siap Profil Pelajar Pancasila

Aktivitas 6.3

Menyelamatkan Institusi Polri

Kasus kematian Brigadir Nofryansah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J mulai menemukan titik terang. Kini, menjadi tugas Polri untuk menjadikan perkara itu benar-benar benderang. Profesionalitas Polri pun disorot tajam akibat ketidakprofesionalan sebagian anggotanya.

Bau busuk penyebab kematian Brigadir J menguat ke mana-mana. Begitu banyak kejanggalan disampaikan Polri di awal-awal penanganan kasus itu. Publik bertanya-tanya, kenapa Polri baru membeberkan perkara itu tiga hari setelah kejadian? Publik berkasak-kusuk kenapa CCTV di rumah jenderal polisi rusak, mati, tetapi di hari ke-9 hidup lagi?

Pernyataan awal Polri sebatas katanya, meski katanya didasarkan pada hasil penyelidikan. Katanya, Bharada E baku tembak dengan Brigadir J setelah mendengar teriakan istri Sambo, Putri Candrawathi. Katanya, Putri dilecehkan Brigadir J sehingga berteriak. Masih banyak lagi katanya, tetapi masyarakat tak percaya begitu saja.

Sulit disangkal, kasus tersebut berdampak serius, sangat serius, bagi citra polisi di mata masyarakat. Banyak sekali penilaian miring sebab perkara itu dinilai sangat mudah diusut, tetapi faktanya teramat sulit untuk diselesaikan. Yang mudah dibuat rumit, yang cepat dibikin lambat.

Pada konteks itu, Kapolri blak-blakan pula bahwa ada ketidakprofesionalan anggotanya sehingga pengusutan berjalan sesat. Kapolri juga tegas bersikap dengan menonaktifkan Irjen Sambo. Jenderal polisi bintang dua itu kemudian

bahkan dicopot dan ditempatkan di Rutan Mako Brimob karena diduga melanggar kode etik. Dia kini diselidiki atas kemungkinan terlibat dalam tindak pidana kematian Brigadir J.

Timsus bentukan Kapolri pun sudah menetapkan dua tersangka, yakni Bharada E dan Brigadir Ricky Rizal. Brigadir Ricky yang ajudan istri Irjen Sambo diperlakukan berpasal pembunuhan berencana. Meski lambat, gerak Kapolri dan jajarannya bolehlah diapresiasi. Namun, apa yang mereka tunjukkan masih jauh dari cukup. Jelas, sangat jelas, indikasinya ada pelaku lain dalam pembunuhan Brigadir J.

Jika salah satu pelaku sudah membuat pengakuan, tak ada lagi alasan bagi kepolisian untuk kembali berlama-lama menuntaskan perkara. Penyelesaian kasus ini tidak boleh berhenti di Bharada Eliezer dan Brigadir Ricky. Pedang hukum harus pula menebas pelaku-pelaku lain, siapa pun dia, termasuk otak di balik kematian Brigadir J, setinggi apa pun pangkatnya.

Presiden Jokowi sudah beberapa kali meminta agar kasus itu diungkap dengan sejujur-jujurnya. Kiranya Presiden tak perlu mengulangi permintaan itu lagi. Masyarakat pun sudah lelah, muak, dengan gerak lambat dan aksi tipu-tipu untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Saatnya kasus kematian Brigadir J diselesaikan demi keadilan, juga demi menyelamatkan kredibilitas institusi Polri.

Sumber: mediaindonesia.com (2022)

Kamu dapat membaca secara utuh artikel dengan scan barcode di samping ini.

Pindai Aku!



[https://buku.kemdikbud.
go.id/s/1a1wj](https://buku.kemdikbud.go.id/s/1a1wj)

Kerjakan secara mandiri ketentuan berikut ini.

1. Setelah membaca artikel tersebut, buatlah gagasan atau ide baru terkait persoalan institusi Polri.
2. Berikan beberapa solusi konkret sebagai upaya untuk memperbaiki citra institusi negara!
3. Berikan pendapat pribadi terkait sikap dan perilaku yang wajib dimiliki oleh aparatur negara!
4. Tampilkan hasil jawabanmu di depan kelas.

Untuk menilai Aktivitas 6.3, kamu dapat menggunakan rambu-rambu penilaian pada Tabel 5.5.

C. Peran Lembaga Negara dalam Berbagai Bidang

Perhatikan Gambar 6.3. Apakah kamu tahu kegiatan apa yang digambarkan dalam Gambar 6.3? Kamu dapat mencermati bahwa kegiatan tersebut merupakan usaha sekumpulan orang untuk membangun sebuah rumah. Setiap individu melakukan tugas masing-masing sesuai dengan perannya. Sama halnya dengan lembaga negara yang ada di Indonesia. Keberadaannya memiliki peran masing-masing sesuai tugas dan fungsinya yang secara tegas diatur dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan di bawahnya. Bahkan, lembaga negara dapat menjalankan perannya sesuai dengan keputusan pemimpin atau kepala negara.



Gambar 6.3 Ilustrasi Sekumpulan Individu Menjalankan Perannya dalam Pembangunan Rumah

Sumber: Agustina Sapitri/idea.grid.id

Umumnya, peran lembaga negara ialah membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan untuk membangun negara. Selain itu, lembaga negara berperan sebagai penjamin hak-hak dasar masyarakat dengan memberi fasilitas yang layak demi mewujudkan rakyat lebih sejahtera.



Tahukah Kamu?

UUD NRI Tahun 1945 hanya mengenal pemisahan kekuasaan secara formal. Oleh karena itu, pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankan secara prinsipil. Dengan kata lain, UUD NRI Tahun 1945 hanya mengenal pembagian kekuasaan (*devision of power*) bukanlah pemisahan kekuasaan (*separation of power*).

(Geri Ismanto, 2013:86)



Siap Mengingat Kembali

Ingatlah kembali tentang sistem pemerintahan Indonesia yang sudah dibahas pada pembelajaran sebelumnya. Jika kamu ingat, pasti tidak asing dengan istilah *Presidensiil*. Sistem presidensiil ialah sistem pemerintahan dimana lembaga eksekutif tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang menjalankan kekuasaan eksekutif berdasarkan Undang-Undang Dasar.



Siap Eksplorasi

Aktivitas 6.4

Kerjakan Aktivitas 6.4 berikut ini bersama kelompok belajarmu!

Bukalah UUD NRI Tahun 1945 dan temukan hal-hal berikut ini.

1. Cari dan tuliskan lembaga negara yang secara tegas tersurat dalam UUD NRI Tahun 1945.
2. Cari dan tuliskan alat negara yang secara tegas tersurat dalam UUD NRI Tahun 1945.
3. Temukan tugas atau kewenangan setiap lembaga negara atau alat negara yang sudah kamu temukan.

Tabel 6.3 Rambu-Rambu Penilaian Aktivitas 6.4

Aspek Penilaian	Bobot
Kesesuaian terhadap Materi	25%
Penyajian Informasi	25%
Penggunaan Bahasa Indonesia yang Tepat dan Baik	25%
Pelaporan	25%

Hubungan antarlembaga negara yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia bahwa lembaga negara memiliki tugas dan kewenangan masing-masing untuk saling kontrol dan bekerja sama. Sama halnya pada Gambar 6.3, kerja sama sangat dibutuhkan bagi negara Indonesia agar sebuah bangunan negara mampu berdiri kokoh sebagai tempat perlindungan bagi rakyatnya. Kekuatan luhur dengan saling bekerja sama harus senantiasa dipertahankan dalam kelembagaan sebagai bentuk perwujudan

perwakilan amanat rakyat. Perlu internalisasi dalam kehidupan manusia sebagai sosial masyarakat sekaligus warga negara demi terwujudnya tujuan negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD NRI Tahun 1945.

1. Peran Lembaga Negara dalam Bidang Politik

Perhatikan Gambar 6.4. Gedung yang menyerupai tempurung kura-kura tersebut merupakan Gedung DPR/MPR RI yang berada di Jakarta. Di gedung inilah, anggota DPR/MPR bersidang. Tugas DPR RI meliputi pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). DPR ialah salah satu lembaga negara dalam bidang politik.



Gambar 6.4 Gedung DPR/MPR

Sumber: Tri Aljumanto/detik.com (2022)

Peran lembaga negara dalam bidang politik dapat dikategorikan sebagai berikut.

- a. Membentuk norma-norma kenegaraan yang berupa undang-undang atau produk hukum di bawah dasar negara.
- b. Melaksanakan norma atau ketentuan yang telah disepakati bersama.
- c. Menjalankan fungsi pengawasan.
- d. Menumbuhkan kesiapan dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.
- e. Menjalin kerja sama baik dalam negeri atau luar negeri.

2. Peran Lembaga Negara dalam Bidang Ekonomi

Pernahkah kamu mengunjungi sebuah bank di Indonesia? Jika sudah, apa pengalaman yang dapat kamu bagikan? Bank Indonesia merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi utama berkomitmen untuk senantiasa mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan bidang Moneter, Sistem Pembayaran, dan Stabilitas Sistem Keuangan. Keberadaannya mampu menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri dengan mengatur dan memelihara nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Lalu, apa saja peranan penting lembaga negara di bidang ekonomi?



Gambar 6.5 Gambar Gedung Bank Indonesia

Sumber: bi.go.id

Peran penting lembaga negara dalam bidang ekonomi dapat dikategorikan sebagai berikut.

- a. Menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan negara dalam bidang ekonomi.
- b. Mengatur permasalahan yang berkaitan dengan pelaku ekonomi serta meningkatkan produktivitas perekonomian dengan skala kecil, menengah, dan nasional.
- c. Mengatur distribusi serta konsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat demi menciptakan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia.

- d. Mengatur ekonomi suatu negara dalam rangka menciptakan stabilitas dan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyatnya. Dalam konteks ini, lembaga negara berperan sebagai regulator dan pengawas kebijakan ekonomi yang diambil untuk memastikan kebijakan tersebut berada dalam kerangka hukum yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku secara global dan nasional.
- e. Bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan ekonomi yang diambil dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak, termasuk melindungi kepentingan konsumen dan produsen dari praktik bisnis yang tidak fair.

Beberapa lembaga negara Indonesia yang memiliki peran penting di bidang ekonomi antara lain Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara (Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945) dalam menyusun kebijakan moneter; Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga untuk menyusun perencanaan dan pengkajian penanaman modal nasional.

Lembaga-lembaga negara tersebut harus bekerja sama secara sinergis dan memastikan terciptanya koordinasi yang efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga negara harus bekerja secara profesional dan transparan untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang mengatur bidang ekonomi. Hal ini sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Negara Indonesia juga memiliki lembaga negara yang mengoordinir beberapa lembaga perekonomian yang ditugaskan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Secara khusus, tugas dan kewenangannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai berikut.

- a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian.
- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian.

- c. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang perekonomian.
- d. Pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dan Sidang Kabinet.
- e. Penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar-Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud.
- f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- g. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- h. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

3. Peran Lembaga Negara dalam Bidang Sosial

Perhatikan bunyi Pasal 34 ayat (1-3) UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 34 ayat (1) :"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."

Pasal 34 ayat (2) :"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

Pasal 34 ayat (3) :"Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."

Dari pasal-pasal di atas, tergambar bahwa lembaga negara memainkan peran penting dalam mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan dan membutuhkan perlindungan dari negara seperti anak-anak, perempuan, orang dengan disabilitas, dan lansia. Untuk itu, peran lembaga negara dalam bidang sosial dapat dirumuskan sebagai bentuk kehadiran negara dalam upaya penjaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang meliputi jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin tanpa membedakan suku, ras, agama dan antargolongan.



Gambar 6.6 Pelayanan BPJS Kesehatan

Sumber: Makna Zaezar/Antarafoto.com

Beberapa lembaga negara Indonesia yang bertanggung jawab dalam bidang sosial antara lain sebagai berikut. Kementerian Sosial sebagai pembantu Presiden dalam mengupayakan amanat UUD NRI Tahun 1945 dalam bidang sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai badan hukum publik yang menyelenggarakan serta mengakomodir jaminan sosial, Dinas Sosial di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai fasilitator dan pemberdayaan bagi masyarakat.

Lembaga-lembaga tersebut bertugas untuk menyediakan layanan sosial, memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, dan melakukan penanganan terhadap masalah-masalah sosial yang muncul di masyarakat. Melalui kegiatan sosial dan program-program yang diselenggarakan, lembaga negara di bidang sosial berperan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan melindungi hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat.

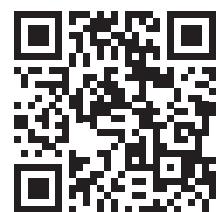


Tahukah Kamu?



Gambar 6.7 Kartu Indonesia Pintar Kuliah

Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) merupakan salah satu upaya untuk membantu para siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi, tetapi berprestasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Kamu dapat daftar sesuai persyaratan melalui barcode berikut ini.



https://buku.kemdikbud.go.id/s/dafar_KIP

**Kerjakan secara mandiri!**

1. Identifikasi lembaga negara berikut ini sesuai dengan bidang kewenangannya!

No	Nama Lembaga	Fungsi Pokok	Kewenangan
1	Badan Pemeriksa Keuangan		
2	Majelis Permusyawaratan Rakyat		
3	Komisi Pemilihan Umum		
4	Kementerian Keuangan		
5	Kementerian Sosial		
6	Kementerian Dalam Negeri		
7	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN		
8	Kementerian Badan Usaha Milik Negara		
9	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		
10	Kementerian Komunikasi dan Informatika		

2. Pada dasarnya, organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Jelaskan apa yang dimaksud partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media komunikasi politik.
3. Sesungguhnya, kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial sangat kuat. Namun, dalam Pasal 7B [1] UUD NRI Tahun 1945, telah dijelaskan tentang proses pemberhentian presiden. Uraikan proses pemberhentian presiden menurut pasal tersebut.

4. Peran Lembaga Negara dalam Bidang Budaya

Budaya bangsa Indonesia yang sudah ditemukan dan dikonsepsikan oleh negara ialah "gotong royong". Hal ini terungkap pada fakta sejarah proses pendirian negara Indonesia yang digagas oleh Presiden Pertama RI.

Kebudayaan sendiri merupakan suatu atau semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Dalam arti bahwa karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmania (*material culture*) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat (Tjahyadi, 2019). Artinya, bahwa setiap kebudayaan akan menghasilkan warisan budaya yang memiliki sifat tak tentu dan akan hilang seiring waktu sesuai dengan perkembangan zaman.

Lembaga negara memegang peran penting dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan di Indonesia. Hal itu sebagai bentuk dukungan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan budaya yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, serta sebagai pengatur dan pemberi arahan dalam pembentukan kebijakan budaya. Lembaga negara yang berperan dalam bidang budaya seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Kesenian Jakarta, Badan Pengembangan dan Pelestarian Bahasa.



Siap Eksplorasi

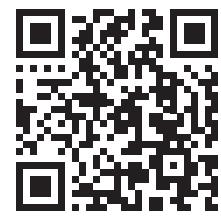
Aktivitas 6.5

Pada bagian ini, silakan kamu buka tautan di samping.

Carilah informasi bersama dengan 3-4 temanmu dalam satu kelas dan jawablah pertanyaan berikut.

1. Apa nama lembaga negara Indonesia yang memiliki fungsi dan berfokus pada kebudayaan?
2. Cari 5 kategori entitas kebudayaan yang dilindungi oleh lembaga negara Indonesia!
3. Temukan 2 entitas budaya yang ada di daerahmu dan cocokkan dengan pusat data pada tautan yang sudah kamu scan!

Pindai Aku!



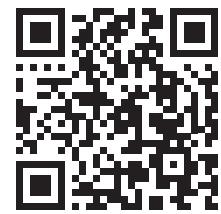
<https://dapobud.kemdikbud.go.id/>



Siap Profil Pelajar Pancasila

Jika Kamu menemukan entitas kebudayaan yang belum terdaftar pada pusat data, mari, SIAP AKSI NYATA sebagai pelajar Pancasila untuk Urun Daya. Urun Daya adalah kegiatan pengumpulan data di wilayah kabupaten/kota yang dilakukan oleh masyarakat baik kelompok maupun individu secara mandiri melalui aplikasi DAPOBUD. Kelompok atau individu pengumpul data kebudayaan merupakan salah satu potensi untuk menjaring data kebudayaan lebih banyak dan komprehensif sehingga dapat memperkaya data kebudayaan yang ada di daerah. Kamu bisa pelajari caranya melalui link di samping.

Pindai Aku!



<https://dapobud.kemdikbud.go.id/>



Siap Berkinerja

Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki sebuah badan independen untuk melakukan otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. Badan independen tersebut ialah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004. BNSP sendiri akan melekat pada sistem pendidikan nasional terutama bagi peserta didik yang mengambil sekolah kejuruan (SMK). Tujuan negara mendirikan BNSP adalah sebagai bentuk upaya menciptakan tenaga kerja yang profesional, memiliki integritas dan etos kerja tinggi serta memiliki daya saing baik di dalam maupun luar negeri.



Gambar 6.8 Gedung BNSP

Sumber: IST/setkab.go.id (2019)

5. Peran Lembaga Negara dalam Bidang Pertahanan



Gambar 6.9 Latihan Komando Pasukan Kopassus TNI

Sumber: Sigid Kurniawan/antaranews.com (2019)

Adakah dari kamu yang memiliki cita-cita menjadi prajurit negara? Kita wajib bangga memiliki komponen utama pertahanan negara Indonesia yang dikenal dengan nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) seperti terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 30 ayat (3). TNI terdiri atas TNI AD, TNI AU, TNI AL. TNI merupakan bentuk keseriusan negara dalam usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara." Artinya, usaha dalam pertahanan dan keamanan menjadi hak dan kewajiban bagi warga negara sesuai dengan kemampuan, latar belakang, dan profesi yang melekat. Bidang pertahanan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan khusus yang stabil. Menurut UU No. 3 Tahun 2002, pertahanan adalah usaha negara untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa. Artinya, negara wajib menjamin keselamatan rakyatnya, wilayahnya, dan kedaulatannya.

Peran lembaga negara dalam bidang pertahanan diberikan kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan). Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kemhan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, dan;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.



Tahukah Kamu?



Gambar 6.10 Kantor Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Sumber: <https://bpip.go.id/>

Di Indonesia, ada sebuah lembaga di bawah Presiden untuk membantu mempertahankan dan menanamkan ideologi Pancasila. Lembaga tersebut dinamakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Lembaga negara ini memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Dikutip dari <https://bpip.go.id/profil.php>

6. Peran Lembaga Negara dalam Bidang Keamanan

Peran lembaga negara pada bidang keamanan lebih berfokus pada ketertiban untuk menjamin keamanan masyarakat. Peran ini tidak lepas dari kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia untuk memperoleh tempat tinggal pada suatu wilayah dengan damai dan sejahtera. Selain itu, usaha negara dalam menciptakan sistem ketertiban masyarakat diperlukan alat negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang tersebut.



Gambar 6.11 Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia

Sumber: Oke Atmaja/Suara.com

Salah satu di antara alat negara Indonesia dijelaskan pada Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum." Polri memiliki tugas pokok untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.



Siap Eksplorasi

Aktivitas 6.6

Untuk melengkapi peran lembaga dalam bidang keamanan, kamu dapat mempelajari berbagai situs yang memberikan informasi tentang lembaga negara tersebut. Buatlah tabel hasil penelusuran minimal 5 lembaga negara atau alat negara yang berfungsi sebagai usaha untuk menjaga keamanan di Indonesia!



Siap Berefleksi

Setelah menelusur lembaga negara melalui berbagai aktivitas di bab ini, apa saja hal terkait lembaga negara yang sudah kamu pahami? Sikap apa yang harus kamu implementasikan? Keterampilan apa yang dapat kamu lakukan? Apakah ada materi yang belum kamu pahami? Apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?



Uji Kompetensi

Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang benar dan tepat pada opsi jawaban A,B,C,D atau E!

1. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri ini diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian, pemerintahan Indonesia menganut sistem
 - A. Parlementer
 - B. Monarki
 - C. Presidensial
 - D. Trias Politica
 - E. Koasi Parlementer
2. UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya sebagai kepala negara tidak terlepas dari persetujuan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, di antaranya dalam hal
 - A. membuat perjanjian bilateral dengan negara lain
 - B. mengangkat dan memberhentikan menteri
 - C. menyusun dan mengusulkan rancangan undang-undang
 - D. menguji secara materil peraturan perundang-undangan di bawah UU
 - E. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi
3. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa DPR merupakan pemegang kekuasaan legislasi. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, DPR juga harus bekerja sama dengan eksekutif, terutama di dalam hal
 - A. menentukan anggaran militer
 - B. menentukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
 - C. menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang
 - D. melakukan *impeachment*
 - E. menjalin kerja sama dengan negara lain

4. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya di bidang tertentu, Presiden masih harus mendapat persetujuan DPR. Kondisi seperti itu ditujukan untuk
 - A. mendapatkan pertimbangan dan arahan dari legislatif
 - B. terjadinya *check and balance* dalam menjalankan kekuasaan
 - C. terjadinya kerja sama antara eksekutif dan legislatif
 - D. menjadikan terwujudnya kesamaan kedudukan DPR dan Presiden
 - E. memperoleh kepercayaan terhadap warga negara dalam menentukan arah kebijakan
5. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ialah
 - A. pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
 - B. pemerintahan daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki wewenang dalam membuat peraturan daerah
 - C. bupati/walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur/Presiden
 - D. pemerintahan daerah merupakan perwakilan pemerintahan pusat
 - E. pelaksana teknis di tingkat daerah untuk menyokong berjalannya pemerintahan
6. Mengapa perselisihan hasil pemilihan umum diselesaikan oleh MK bukan oleh KPU dan Panwaslu, padahal dalam praktiknya pernah terjadi kasus penyalahgunaan wewenang tersebut oleh Ketua MK?
 - A. KPU dan Panwaslu tidak mampu menyelesaiannya.
 - B. Untuk menegakkan keadilan, harus ada lembaga yang independen dalam penyelesaiannya.
 - C. Sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945.
 - D. Untuk mencegah terjadinya kerusuhan antarkontestan peserta pemilu.
 - E. Pemilihan umum merupakan mekanisme yang memerlukan kepastian hukum yang mengikat.
7. Dalam UU No. 23 Tahun 2004, disebutkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh

- A. Badan Intelejen Negara
 - B. Kejaksaan Agung
 - C. Lembaga Ketahanan Nasional
 - D. Badan Narkotika Nasional
 - E. Aparat Kepolisian
8. Rumusan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan menyatakan bahwa “NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota” Ungkapan dibagi atas (*bukan terdiri atas*) bermakna bahwa
- A. kabupaten dan kota tunduk di bawah provinsi
 - B. otonomi daerah berada di kabupaten dan kota
 - C. kedaulatan negara berada di tangan kabupaten/kota
 - D. kedaulatan negara berada di tangan pusat
 - E. kabupaten dan kota memiliki kewenangan tersendiri di luar pemerintahan pusat
9. Perhatikan data berikut!
- 1) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar
 - 2) Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara
 - 3) Memilih Presiden dan Wakil Presiden
 - 4) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan atau Perubahan UUD
 - 5) Melantik Presiden dan Wakil Presiden
 - 6) Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden sebelum masa jabatannya
- Berdasarkan data di atas, yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI 1945 ditandai oleh nomor
- A. 1, 2, dan 3
 - B. 2, 4, dan 6
 - C. 3, 4, dan 5
 - D. 3, 4, dan 6
 - E. 4, 5, dan 6
10. Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Setelah reformasi, terjadi peristiwa

amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945. Lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara Indonesia ialah

- A. Dewan Pertimbangan Agung
 - B. Mahkamah Agung
 - C. Dewan Perwakilan Rakyat
 - D. Badan Pengawas Keuangan
 - E. Dewan Perwakilan Daerah
11. Era milenial saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cederung mengalami peningkatan. Faktor penyebabnya ialah sebagai berikut, *kecuali*
- A. tingkat kesadaran masyarakat rendah
 - B. banyaknya media yang menayangkan informasi tindakan pidana
 - C. kurang tegasnya aparat penegak hukum
 - D. kurangnya figur tokoh keteladanan dari pemimpin
 - E. tingkat disiplin masyarakat yang rendah
12. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, diketahui bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Walaupun demikian, Presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut. Salah satu bentuk kerja sama antara Presiden dan DPR ialah
- A. penentuan kondisi kritis ekonomi
 - B. penentuan keadaan darurat negara
 - C. penentuan anggaran belanja negara
 - D. penentuan kerja sama multilateral negara
 - E. penentuan perumusan perpu
13. Ketentuan prinsipil dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam memberikan kewenangan terhadap lembaga negara memperhatikan hubungan kelembagaan yang bersifat
- A. pemisahan kekuasaan
 - B. pembagian kekuasaan
 - C. pelimpahan wewenang
 - D. pembagian kesetaraan
 - E. pemerataan kekuasaan

14. Keterampilan kerja, etos kerja, dan profesionalisme tenaga kerja Indonesia harus memiliki daya saing yang tinggi sesuai standar profesi. Hal tersebut sedang diusahakan oleh negara Indonesia melalui lembaga
- A. BPK
 - B. OJK
 - C. BNSP
 - D. BPIP
 - E. Bappenas
15. Upaya yang dapat dilakukan seorang pelajar dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga di lingkungan sekolah ialah
- A. membangun hubungan baik antarteman untuk meningkatkan prestasi
 - B. memberikan pembelajaran sebaya demi proses belajar yang baik
 - C. mematuhi segala bentuk aturan ataupun tata tertib yang telah disepakati bersama
 - D. selalu berkunjung ke perpustakaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan
 - E. membangun kedekatan emosional dengan guru baik dalam kelas maupun di luar kelas

Soal Esai

Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Mengapa dalam sistem pemerintahan di Indonesia diperlukan suprastruktur dan infrastruktur politik?
2. Perhatikan infografis berikut ini!



Industri pariwisata, destinasi pariwisata, kelembagaan pariwisata, dan pemasaran pariwisata nasional merupakan bagian dari Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARNAS). Apa tujuan pengembangan terhadap keempat hal tersebut? Berikan alasanmu!

3. Bagaimana mekanisme *check and balance* dalam kelembagaan yang di Indonesia?
4. Berikan penjelasan tentang tugas dan kewenangan lembaga negara yang bersifat *auxiliary*!
5. Mengapa Presiden membentuk unit kerja untuk membantu menguatkan ideologi Pancasila?



Pengayaan

Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan program besar negara Indonesia dalam upaya pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Penajem Paser Utara Kalimantan Timur. Berdasarkan keterangan Pers Presiden ke-7 RI pada kanal youtube Sekretariat Kabinet yang dapat kamu akses di <https://buku.kemdikbud.go.id/s/k05d0b>

diketahui bahwa rencana pemindahan ibu kota negara sudah digagas sejak era Presiden Pertama Ir. Sukarno. Diketahui bahwa alasan mengapa Ibu Kota Negara Indonesia harus pindah dari Jakarta ke Pulau Kalimantan sebagai berikut.

1. Beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa terlalu berat.
2. Beban Pulau Jawa makin berat dengan jumlah penduduk 54% dari total jumlah penduduk Indonesia.

Menurut kamu, apakah rencana pemindahan ibu kota negara ini menjadi penting bagi terciptanya sistem pemerintahan yang baik? Apakah diperlukan tim khusus atau badan pengawas untuk mengawasi jalannya proses pemindahan ibu kota negara? Bagaimana proses mekanisme pemindahan lembaga-lembaga negara ke IKN?



Gambar 6.12 Keterangan Pers Presiden Joko Widodo tentang Perpindahan Ibu Kota

Sumber : Sekretariat Kabinet/Youtube

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2023

Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII

Penulis: Ida Rohayani, Hatim Gazali, Dwi Astuti Setiawan

ISBN 978-623-194-624-9 (jil.3 PDF)

Bab 7

Menjadi Pelopor Pemilih Pemula dalam Demokrasi Indonesia



Apa pentingnya seorang warga negara menggunakan hak pilih dalam pemilu?



Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini, kamu diharapkan mampu menyimulasikan praktik demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kecakapanmu sebagai warga negara Indonesia sekaligus peserta didik kelas XII jenjang SMA/MA/SMK/MAK yang memiliki hak untuk menentukan pilihan.

Pelaksanaan pemilu merupakan cara bagi bangsa Indonesia untuk menjamin kedaulatan rakyat. Hal ini terlihat pada Gambar 7.1 bahwa setiap orang memiliki hak suara yang sama dalam menentukan pilihan. Jaminan ini berkaitan dengan berbagai hal tentang tujuan demokrasi bangsa dan negara berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.



Kata Kunci

Demokrasi, Pemilihan Umum, Pemilih Pemula

Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) mempunyai konsekuensi logis mengedepankan norma hukum yang berlaku (*supremasi hukum*). Dengan kata lain, setiap tindakan atau kegiatan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku dan memberikan kepastian hukum. Begitu pula dengan pemilu dan sistem demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan berlandaskan hukum demi mewujudkan kedaulatan rakyat dan mencapai tujuan nasional.



Peta Konsep

**Menjadi Pelopor
Pemilih Pemula
dalam Demokrasi
Indonesia**

Demokrasi
Pemilihan
Umum
Pemilih
Pemula

Demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan memiliki arti bahwa pemerintahan yang sah adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bentuk konkret dari proses demokrasi tersebut ialah kegiatan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan mengedepankan prinsip

perwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemilu dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Landasan konstitusional terkait pelaksanaan pemilu adalah Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.



Gambar 7.1 Gambar Seorang perwira memasukkan surat suaranya di TPS Khusus untuk anggota Angkatan Perang di Balai Prajurit Nusantara.

Sumber: ANRI/historia.id



Tahukah Kamu?

Pemilihan umum pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955. Pada era tersebut, terbangun kepercayaan di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk sebuah badan yang saat itu disebut sebagai Badan Konstituante. Pelaksanaan pemilu tersebut dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis dan ideal walaupun pada masa tersebut, Indonesia masih mengalami pertentangan ideologi yang cukup ketat. Minimnya kecurangan pada masa tersebut menjadi indikator demokrasi yang baik. Walaupun ada gesekan yang terjadi, tetapi di luar pelaksanaan pemilu dan merupakan konsekuensi logis terhadap pertarungan ideologis.



Asesmen Awal, Siap Belajar

NO	PERTANYAAN
1	Apa yang kamu ketahui tentang pemilu di Indonesia?
2	Bagaimana tahapan pelaksanaan pemilu di Indonesia?
3	Apa tujuan dari pelaksanaan pemilu di Indonesia?
4	Syarat apa saja yang harus kamu miliki untuk menggunakan hak pilih?
5	Bagaimana kaitan pemilu dan demokrasi?

Perlu untuk kamu ketahui bahwa pelaksanaan pemilu harus dilakukan tanpa adanya intervensi dari pemegang kekuasaan. Untuk itulah, negara membentuk sebuah lembaga independen berupa komisi penyelenggara pemilu yang dikenal dengan nama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebagai generasi muda masa kini, sudah siapkah kamu menjadi pelopor pemilih pemula di era milenial ini? Mari, kita sama-sama pelajari dalam bab ini.

A. Demokrasi

Masih ingatkah kamu dengan lambang di samping ini? Tentunya kamu tidak asing lagi. Ya, kepala banteng merupakan lambang dari sila ke-4 dasar negara Pancasila. Simbol banteng sendiri memiliki arti permusyawaratan. Landasan filosofinya ialah banteng merupakan hewan sosial yang gemar berkumpul dalam suatu koloni di alam dan lingkungannya. Dengan demikian, banteng diibaratkan sebagai bentuk kegiatan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk mewujudkan kemufakatan.

Lalu, bagaimana proses demokrasi dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia? Hal ini dapat kita lihat dalam nilai instrumental Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea ke-4 yang berbunyi seperti berikut.

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan merupakan sebuah konsep kedaulatan rakyat yang menunjukkan pentingnya suara rakyat dalam pemerintahan. Konsep kedaulatan rakyat juga bermakna adanya kekuasaan rakyat untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik (Sumali, 2002).



Gambar 7.2 Lambang Sila ke-4 Pancasila

Sumber: Gunawan Kartapranata/wikipedia.org

Penegasan kembali terhadap pentingnya kedaulatan rakyat dapat dibaca dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan bunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dengan demikian, konsekuensi atas pasal tersebut ialah negara memberikan jaminan hukum bagi setiap warga negara dalam ikut serta melaksanakan kedaulatan rakyat. Akibatnya, negara Indonesia memiliki sebuah sistem kelembagaan yang menjadi representasi dari kedaulatan rakyat, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

 **Siap Mengingat kembali**



Gambar 7.3 Gedung MPR/DPR/DPD RI
Sumber: Okezone.com

Dulu, sebelum terjadi Amandemen UUD NRI Tahun 1945, terdapat lembaga negara Indonesia yang memiliki kedudukan tertinggi sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Saat ini, kedudukan MPR RI berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 amandemen ke IV, tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, *melainkan lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya*. Keberadaan lembaga tertinggi negara sudah dihapuskan dan tidak ada lagi sebutan *lembaga tinggi negara* dan *lembaga tertinggi negara*.



Siap Profil Pelajar Pancasila

Aktivitas 7.1

Pada Aktivitas 7.1, kamu akan diarahkan untuk mewujudkan Pelajar Profil Pancasila dengan dimensi Gotong Royong. Ikutilah alur pada Aktivitas 7.1 ini untuk mewujudkan sebuah kesepakatan bersama dalam kelasmu dengan judul "Konsensus Kelas". Langkah pelaksanaannya sebagai berikut.

1. Usulkan kepada guru PP atau wali kelasmu untuk membentuk sebuah konsensus bersama dalam kelas.
2. Tunjukkan struktur pengurus kelas seperti ketua kelas, bendahara kelas, dan sekretaris kelas sebagai pimpinan sidang konsensus kelas.
3. Buatlah sebuah kesepakatan bersama yang bersumber dari aspirasi setiap anggota kelas dalam menentukan kesepakatan di bawah ini.
 - a. Peraturan penggunaan *handphone* saat pembelajaran.
 - b. Peraturan masuk dan keluar kelas.
 - c. Peraturan pembelajaran setiap mata pelajaran.
 - d. Peraturan petugas piket terhadap administrasi kelas.
4. Susunlah sebuah sanksi konkret apabila anggota kelas melanggar kesepakatan dalam konsensus.
5. Berikan skema penghargaan (*reward*) kepada anggota kelas yang melaksanakan konsensus dengan baik.
6. Berikan legalisasi berupa materai 10.000 sebagai bentuk keseriusan dalam pelaksanaan konsensus.
7. Tempelkan hasil konsensus kelas di mading kelas dan berikan salinan hasil konsensus kepada wali kelas atau guru bimbingan konseling.

Setelah kamu melakukan Aktivitas 7.1 dengan saksama, konsensus kelas tersebut menjadi kesepakatan semua anggota kelas. Hal ini berkaitan dengan tujuan utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dalam lingkup kelas. Tujuan kedaulatan rakyat sendiri ialah untuk menjunjung tinggi hak dan kewajiban seluruh warga negara untuk mencapai tujuan bersama.



Siap Eksplorasi

Aktivitas 7.2

Lakukan Aktivitas 7.2 berikut secara mandiri!

Temukanlah bentuk-bentuk musyawarah mufakat dalam lingkungan keluarga. Kamu dapat gunakan tabel berikut sebagai acuan dalam proses pencarian!

Indikator	Bentuk
Pengambilan keputusan keluarga dalam menentukan tempat rekreasi.	
Pemberian uang saku kepada anak dalam anggota keluarga.	
Penyelesaian masalah yang terjadi dalam lingkungan keluarga.	
Pembagian tugas semua anggota keluarga.	
Pemberian sanksi kepada semua anggota keluarga.	
Kamu dapat menambah indikator sesuai dengan kondisi keluargamu.	

Prinsip kedaulatan rakyat dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini diwujudkan melalui pemilu untuk membentuk pemerintahan yang demokratis.

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu ialah *dari, oleh, dan untuk* rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif, demokrasi bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan *dari, oleh, untuk, dan bersama* rakyat. (Indriawan, 2018). Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat. Oleh karena itu, rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi kehidupan kenegaraan.

Demokrasi di Indonesia merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Ciri khas demokrasi Indonesia tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara yang membawakan nilai-nilai demokrasi, pluralisme, kebinaaan, dan toleransi sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia dikenal sebagai “*Demokrasi Pancasila*”, yang menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, partisipasi politik yang aktif dan inklusif menjadi salah satu prioritas dalam demokrasi Indonesia. Hal itu sebagai upaya untuk menciptakan proses pengambilan keputusan yang demokratis dan adil bagi seluruh lapis masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan kelompok rentan.



Suara Demokrasi

Kajilah sebuah artikel tentang demokrasi di Indonesia secara berkelompok 2-3 temanmu. Kemudian, lakukan hal berikut ini.

1. Buatlah sebuah resume atau ringkasan dari artikel yang kamu pilih.
2. Buatlah sebuah gagasan baru terkait permasalahan demokrasi di Indonesia berdasarkan paparan artikel.
3. Buatlah sebuah flayer/poster tulisan dengan menggunakan kertas A3 dan paparkan di depan kelas. Adapun contoh pembuatan flayer/poster seperti berikut.



Gambar 7.4 Poster Gunakan Hak Pilihmu

Gambar 7.5 Poster Ayo Memilih

Tabel 7.1 Rambu-Rambu Penilaian Aktivitas

ASPEK	Skor
Ide gagasan	0-100
Orisinalitas	0-100
Presentasi	0-100
Kreativitas	0-100
Sikap	0-100
Komunikasi	0-100

Penilaian Akhir:

$$\text{Nilai} = \underline{\text{Total Perolehan Skor}}$$

B. Pemilihan Umum



Gambar 7.6 Gedung Komisi Pemilihan Umum

Sumber: Andhika Prasetya/detik.com

Perhatikan Gambar 7.6 dengan saksama. Apakah kamu pernah dengar tentang Komisi Pemilihan Umum? Lalu, bagaimana peranan lembaga tersebut dalam melaksanakan demokrasi di Indonesia? Mari, kita simak penjelasan berikut ini.

Komisi Pemilihan Umum atau sering kita kenal dengan singkatan KPU merupakan hasil dari tuntutan proses demokrasi yang menjamin kredibilitas pelaksanaan pemilu yang bebas dari pengaruh kekuasaan sejak memasuki era Reformasi. Melalui Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 Amandemen IV, kedudukan KPU secara eksplisit diamanatkan sebagai komisi penyelenggara pemilu yang sah. Hal tersebut dinyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

KPU merupakan suatu lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu di Indonesia. Ruang lingkup KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kewenangan hierarkis, untuk menyelenggarakan pemilu di daerah, dibentuk KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota. Untuk pemungutan suara, pelaksanaannya dijalankan oleh Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS. PPS ialah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota setempat untuk menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas perangkat desa atau masyarakat yang diatur dalam undang-undang.

Dari tugas dan kewenangan KPU, kita dapat menelaah bersama bahwa proses penyelenggaraan pemilu merupakan suatu kegiatan demokrasi yang menjamin keikutsertaan seluruh warga negara Indonesia dalam memberikan hak-hak suara untuk menentukan pilihan pemimpin atau wakilnya ke dalam kelembagaan pemerintah.

Untuk itu, pelaksanaan pemilu sangat penting bagi keberlangsungan pemerintahan dalam menjamin rotasi kekuasaan pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah otonom. Pelaksanaan pemilu ini juga memberikan harapan rakyat dengan lahirnya seorang pemimpin yang mampu menyejahterakan dan membahagiakan rakyat dengan beberapa kebijakan yang dibuatnya. Hasilnya ialah sebuah perubahan ke arah yang lebih baik dapat mewujudkan tujuan negara sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945 pada Pembukaan alenia ke-4. Tujuan negara itu ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam pelaksanaannya, pemilu didasarkan pada asas-asas yang menjadi pedoman demi terciptanya hasil yang demokratis berdasarkan kedaulatan rakyat. Asas-asas dimaksud ialah sebagaimana tampak dalam Gambar 7.7.

Tahukah Kamu?

Pelaksanaan pemilu pada tahun 1955 merupakan pemilu dengan jumlah kontestan terbanyak dalam sejarah pemilu di Indonesia. Pada pelaksanaan pemilu tersebut, jumlah kontestan partai politik sebanyak 172 kontestan.



Gambar 7.7 Menggunakan Hak Suara secara Luber

Sumber: Kominfo/bukupintarpemilu

Selain KPU, ada 2 lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menyelenggarakan pemilu. Mari, kita lakukan eksplorasi pada Aktivitas 7.4 berikut ini.



Siap Eksplorasi

Silakan kamu berdiskusi dengan kelompok dalam satu kelas untuk membahas 2 lembaga penyelenggara pemilu selain KPU. Berikut ini lambang dari kedua lembaga tersebut.

Informasi yang perlu kalian temukan ialah:

1. nama dan sejarah singkat lembaga
2. tugas dan kewenangan lembaga
3. tujuan pembentukan lembaga

Setelah kalian menemukan informasi di atas, presentasikan hasil jawaban dalam diskusi kelas bersama guru.

Aktivitas 7.4



Tabel 7.2 Rambu-Rambu Penilaian Aktivitas Presentasi

No.	Kriteria	SKOR			
		40	70	80	100
1	Kesesuaian dengan konsep				
2	Ketepatan memilih bahan				
3	Kreativitas				
4	Komunikasi				
5	Kerapian hasil				

Keterangan:

100 = sangat baik, 80 = baik, 70 = cukup baik, 40 = kurang baik

Pelaksanaan pemilu menjadi suatu hal yang penting dalam menciptakan sistem pemerintahan. Hal itu terutama untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Untuk itu, upaya pelaksanaan pemilu dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sistematis, mandiri, akuntabel, dan terpercaya demi mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Segala bentuk hasil pemilu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai bentuk dukungan seluruh rakyat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara.

Keikutsertaan rakyat dalam proses demokrasi di negara Indonesia tentu harus dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Berikut ini beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh warga negara agar dapat menggunakan hak pilih dalam kontestasi pemilu. Menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, persyaratan pemilih di antaranya seperti berikut.

1. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el.

- Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam nomor 4, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Setelah kamu memahami tentang persyaratan pemilih dalam kegiatan pemilu, mari, kita lakukan validasi diri sebagai bentuk kesiapan agar dapat ikut serta dalam pemilihan umum di Indonesia. Validasi ini diperlukan melalui Aktivitas 7.5 berikut ini.



Siap Berkinerja

Aktivitas 7.5

Isilah tabel berikut ini secara mandiri dengan memberikan tanda (V) pada kolom tabel.

Tabel 7.3 Validasi Diri

NO	INDIKATOR VALIDASI	YA/ADA	TIDAK
1	Memiliki akta kelahiran.		
2	Memiliki kartu keluarga.		
3	Sudah berusia 17 tahun di tahun ini.		
4	Memiliki kartu tanda penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan dinas kependudukan dan catatan sipil.		
5	Memiliki surat keterangan kependudukan dari kecamatan daerah tempat tinggalmu.		
6	Memiliki surat keterangan domisili dari kecamatan/ kepala desa dari tempat tinggalmu.		
7	Pernah mengalami gangguan kejiwaan atau hilang ingatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas kesehatan atau rumah sakit.		

Pada Aktivitas 7.5 ini, kamu dapat melakukan validasi dengan menunjukkan fotokopi dokumen yang kamu miliki bersama teman atau guru yang ada di sekolah. Perhatikan dengan saksama dokumen akta kelahiran dan kartu keluarga. Jangan sampai ada kesalahan terkait identitas dirimu karena rujukan segala bentuk dokumen sebagai bukti status kewarganegaraan kamu bersumber dari 2 dokumen tersebut.

Siap Mengingat kembali

Ingat kembali materi pada waktu belajar pada jenjang SMP kelas IX tentang kemerdekaan berpendapat. Bentuk-bentuk kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 dan Pasal 28E merupakan jaminan negara Indonesia dalam mewujudkan demokrasi. Adapun bentuk-bentuk kebebasan berpendapat di antaranya:

- demonstrasi
- pawai
- rapat umum
- mimbar bebas
- pemaparan melalui media massa atau media elektronik

Sama halnya dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia bahwa selain proses pemungutan suara melalui tempat pemungutan suara yang sah, kegiatan pemilu diawali dengan adanya kampanye (pawai) melalui media elektronik ataupun media massa. Tidak sampai di situ, proses kampanye juga dilakukan melalui mimbar bebas dengan diadakannya debat antar-calon pemimpin untuk mengukur efektivitas visi-misi yang akan dicapai selama menjabat. Ingat, kamu sudah memasuki usia pemilih yang sah. Untuk itu, lebih cermat dan cerdas dalam menentukan pilihanmu. Jadilah pelopor perubahan dari pilihan versi terbaikmu!

Setelah kamu melakukan Aktivitas 7.5 dan mengingat kembali materi yang sudah kamu pelajari, kamu akan mengetahui sejauh mana kedudukan kamu sebagai warga negara di Indonesia. Peran serta rakyat yang berintegritas sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dapat kamu praktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



Siap Eksplorasi

Aktivitas 7.6

Cermati dengan saksama laman video berikut ini.

<https://buku.kemdikbud.go.id/s/0motmf>

Lakukan diskusi dengan kelompok kecil 2-3 temanmu dalam satu kelas untuk mencari informasi tentang tahapan dan tata cara pelaksanaan pemilu. Kemudian, lakukan presentasi hasil jawaban kamu di dalam diskusi kelas bersama guru.

Penilaian aktivitas ini dapat menggunakan rubrik penilaian pada Tabel 7.2.

Pindai Aku!

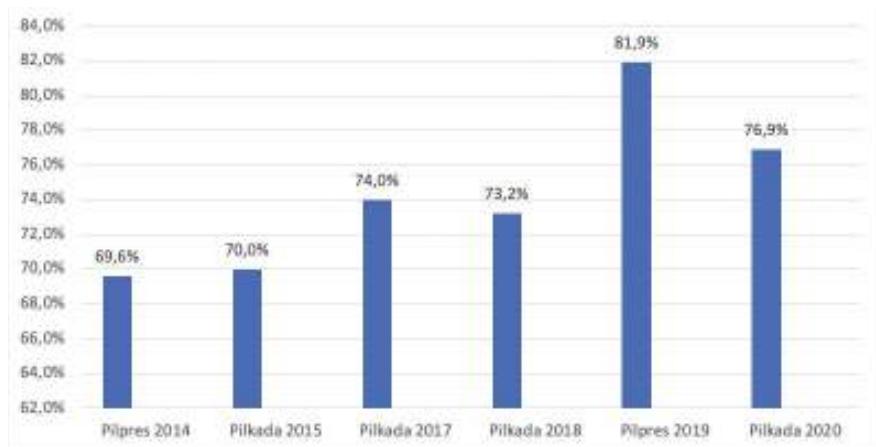




Latihan 7.2 bersifat mandiri. Jawablah pertanyaan berikut ini.

1. Apa yang kamu ketahui tentang makna demokrasi?
2. Apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila?
3. Mengapa pelaksanaan pemilu penting bagi negara Indonesia?
4. Bagaimana peran rakyat sebagai warga negara dalam mewujudkan kedaulatan rakyat?
5. Sebutkan 3 contoh bentuk pemilu untuk memilih pemimpin di daerahmu!

C. Pemilih Pemula dalam Demokrasi



Gambar 7.8 Tingkat Partisipasi Pemilih di 6 Pemilihan Terakhir (2014-2020)

Sumber: Kpu.go.id

Perhatikan grafik Gambar 7.8. Tingginya partisipasi pemilih dapat dibaca sebagai penerimaan masyarakat atas penerapan sistem demokrasi di Indonesia dan harapan bagi terwujudnya kemajuan negara. Sementara, rendahnya partisipasi pemilih dapat menunjukkan bentuk ketidakpercayaan serta perilaku apatis masyarakat terhadap proses politik dan kehidupan bernegara. Lebih jauh lagi, tingkat partisipasi pemilih juga dapat dijadikan barometer untuk mengukur beberapa hal, seperti menilai keberhasilan suatu pemilihan, menilai kesadaran politik rakyat/masyarakat, atau mengukur legitimasi peserta pemilihan yang menang.

Era keterbukaan informasi dari segala aspek kehidupan memberikan pelajaran untuk menambah wawasan pengetahuan, membentuk sikap perilaku, dan membangun norma manusia untuk beradaptasi dengan segala proses berbangsa dan bernegara. Sama halnya dengan proses demokrasi, keterbukaan informasi dan jaminan terhadap kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh hukum atas kuasa negara wajib untuk diperhatikan. Oleh karena itu, bagi warga negara yang sudah memiliki kecakapan secara administratif, harus mengetahui pentingnya pemilih pemula sebagai pelopor perubahan.

Pemilih pemula merupakan calon pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Mereka ialah warga negara yang wajib memenuhi syarat untuk memilih, antara lain (Masduki, 2021):

1. remaja berusia 17 tahun,
2. sudah pernah kawin,
3. pensiunan anggota TNI/Polri.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2018 mencanangkan pemilih merupakan warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.



Gambar 7.9 Grafik Pemilih pada Tahun 2014-2020

Sumber: Ningsiawati/kompas.id

Salah satu kategori yang termasuk pemilih pemula ialah para pelajar yang masih duduk dalam pendidikan di tingkat SMA/SMK/MA sederajat yang telah genap berusia 17 tahun ke atas. Terlihat pada Gambar 7.9, Gen Z yang memiliki rata-rata umur 8-23 tahun di Indonesia berkisar di 27,94%. Hal ini membuktikan bahwa betapa pentingnya kesadaran sejak dini untuk berpartisipasi aktif dalam kontestasi politik di Indonesia bagi pemilih pemula. Pengaruh pemilih pemula dalam perhelatan demokrasi di Indonesia cukup berpengaruh dalam menentukan rotasi pemerintahan melalui pemilu yang dilaksanakan setidaknya dalam 5 tahun sekali.

Pemilih pemula menjadi sasaran strategis dalam kegiatan pemilu karena berbagai faktor (Hakim, 2015). *Pertama*, jumlah pemilih pemula dalam setiap pemilu cukup besar. Hal ini berkaitan dengan jumlah angkatan lulusan SMA/SMK/MA sederajat seluruh Indonesia dengan rentang waktu yang cukup lama. Apalagi, untuk pemilu di Indonesia, saat ini sudah mengalami perubahan dengan diadakannya pemilu serentak.

Kedua, mereka merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang baru pertama kalinya memberikan suara dalam pemilu sehingga perlu diberi arahan yang baik agar memiliki pemahaman yang baik pula terhadap demokrasi. Kemampuan dalam menentukan pilihan dari kontestan pemilu harus benar-benar diasah dengan baik untuk menjaga marwah demokrasi demi mewujudkan tujuan bersama.

Ketiga, mereka merupakan calon pemimpin masa depan sehingga dengan menggali dan mengetahui padangan mereka tentang demokrasi, kita dapat memberikan apa yang mereka butuhkan sebagai bekal di masa depan. Dengan demikian, perlu pemahaman sejak dini sebagai generasi bangsa dengan penuh tanggung jawab yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan bernegara.



Siap Berkinerja

Aktivitas 7.7

Ingin kembali Aktivitas 7.5 dan 7.6 dalam pembelajaran ini. Jika kamu mencermati, kedua aktivitas tersebut merupakan upaya untuk mengidentifikasi diri terkait pengkategorian pemilih pemula dan mekanisme pelaksanaan pemilu di Indonesia. Aktivitas 7.7 merupakan lanjutan kegiatan untuk menuntun kamu dalam mensimulasikan demokrasi di Indonesia melalui pemilihan umum di dalam kelas.

Lakukan Aktivitas 7.7 di dalam sekelasmu!

Judul kegiatan:
SIMULASI PEMILU KETUA KELAS
(PILKELAS)

Langkah Simulasi Pilkelas

1. Bentuk 2 pasangan calon pemimpin kelas yang akan menjadi Ketua Kelas dan Wakil Ketua Kelas.
2. Bentuk lembaga kelas independen yang terdiri atas 3 peran dalam satu kelas, di antaranya:
 - Berperan sebagai KPU 3 orang
 - Berperan sebagai Bawaslu 3 orang
 - Berperan sebagai MPR RI 1 guru PP
3. Berikut tugas dan kewenangan yang diberikan.
 - KPU
Sebagai panitia pelaksanaan Pilkelas yang sudah disesuaikan dengan mekanisme pemilu pada Aktivitas 7.5.
 - Bawaslu
 - Melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu sampai terpilihnya ketua dan wakil ketua kelas.
 - Melakukan tindakan berupa sanksi apabila terjadi kecurangan.
 - MPR RI
 - Melakukan pengesahan dan pengangkatan dengan sumpah janji ketua dan wakil ketua terpilih.

Perlengkapan:

1. Kamu dapat membuat kartu suara sederhana dengan menuliskan nama pasangan calon seperti contoh berikut.

NO URUT 1

NAMA PASLON

NO URUT 2

NAMA PASLON

2. Gunakan kardus bekas untuk pembuatan kotak suara dan bilik suara.
3. Pakailah spidol untuk mencontreng atau paku sebagai alat pencoblosan.

Pelaksanaan:

4. Lakukan prosesi pemilihan calon pemimpin kelas dengan menggunakan prosesi pemilihan umum sesuai dengan tata cara yang berlaku. Petugas pelaksanaan dapat mempelajari terlebih dahulu tentang tata cara pencoblosan pada gambar 7.12.
5. Peserta didik yang tidak mendapatkan tugas dan peran dapat mengikuti prosesi simulasi sebagai daftar pemilih tetap kelas.
6. Setelah melakukan prosesi pemilihan, dapat dilakukan penghitungan suara di dalam kelas yang disaksikan oleh guru dan perangkat TPS kelas.

7. Setelah ditentukan hasil pemungutan suara calon pemimpin kelas, MPR dapat melantik dengan memberikan arahan dan sumpah janji sesuai dengan kesepakatan bersama.
8. Lakukan simulasi tersebut dengan tertib, aman, dan tidak mengganggu kelas lainnya.

Melalui Aktivitas 7.7 dengan menyimulasikan pelaksanaan pemilu, hal yang harus kamu temukan ialah pentingnya partisipasi dalam kegiatan tersebut. Dalam skala kecil kelas, apabila proses pemilihan ketua kelas dilakukan dengan mekanisme demokrasi dan partisipasi aktif semua anggota, akan berdampak pada tujuan bersama. Setiap anggota kelas memiliki hak suara sama dalam menentukan pemimpin.

Sebagai acuan dalam melaksanakan Aktivitas 7.7, berikut ini alur tahapan yang dapat dilakukan dalam proses pemungutan suara yang sah.



Gambar 7.10 Tata Cara Memilih di TPS

Sumber: Pedoman Pemilih KPU

Pentingnya partisipasi dalam demokrasi secara umum ialah keterlibatan pemilih pada keseluruhan periode siklus pemerintahan. Partisipasi dalam demokrasi haruslah didasari dengan peningkatan literasi politik, peningkatan proses idealisme tanpa pamrih, dan berkesinambungan antargenerasi bangsa. Kamu dapat mengupayakan berbagai macam cara atau strategi untuk menjadi warga negara yang berpartisipasi aktif dalam demokrasi melalui hal-hal berikut.

1. Cerdas dalam penggunaan media informasi publik.
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan politik di dalam dunia pendidikan.
3. Mengembangkan diri melalui sosial budaya masyarakat.
4. Membentuk sebuah komunitas.
5. Menjadi relawan dalam kontes demokrasi.
6. Mengikuti keorganisasian pada lembaga KPU dan Bawaslu.

Menjadi warga negara yang memiliki integritas tinggi dalam memahami demokrasi wajib hukumnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya sekadar memahami, melainkan ikut berperan aktif dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai jati diri bangsa dengan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Jadilah pelopor perubahan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Siap Berefleksi

Setelah mempelajari, melaksanakan aktivitas, dan menyimulasikan demokrasi di Indonesia pada bab ini, apa yang kamu rasakan?

Langkah apa saja yang harus kamu lakukan untuk mendukung pelaksanaan demokrasi di Indonesia?

Bagaimana peranmu sebagai pemilih pemula untuk menghadapi pesta demokrasi di Indonesia di masa mendatang?



Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang logis sesuai dengan perintah masing-masing pada kode soal!

A. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih opsi jawaban A, B, C, D dan E yang benar dan tepat.

- Dalam suatu rapat, terjadi perbedaan pendapat yang dipertahankan oleh setiap kelompok. Akibatnya, kemufakatan tidak tercapai karena menemui jalan buntu atas pilihan yang disampaikan oleh setiap kelompok. Pada hal ini, pimpinan rapat mengambil inisiatif kebijakan untuk menunda hasil keputusan dan memanggil perwakilan dari setiap pimpinan anggota kelompok untuk membahas permasalahan dalam rapat kecil.

Dalam hal ini, sikap yang ditunjukkan pemimpin rapat untuk mewujudkan hasil putusan yang demokratis dengan

- A. memberikan kesempatan kepada setiap ketua kelompok untuk mengutarakan pendapatnya
 - B. berperan untuk menurunkan ego setiap kelompok agar segera diperoleh hasil keputusan rapat secara mufakat
 - C. memutuskan hasil rapat secara pribadi tanpa memikirkan pendapat setiap anggota kelompok
 - D. mencari solusi terbaik dari berbagai usulan dan pendapat setiap anggota kelompok untuk disepakati bersama
 - E. memberikan waktu seluas-luasnya kepada semua ketua kelompok untuk memaparkan gagasan masing-masing agar merasa puas
- Negara bagi seluruh rakyat didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.
- Pernyataan tersebut merupakan makna yang terkandung dalam pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu pokok pikiran
- A. kedua
 - B. pertama dan ketiga
 - C. pertama
 - D. keempat
 - E. ketiga

3. Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung , umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, dan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”, membawa konsekuensi penyelenggara pemilihan umum di Indonesia ialah
 - A. Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat
 - B. Komisi Pemilihan Umum di tingkat daerah
 - C. Komisi Pemilihan Umum baik pusat dan daerah
 - D. Komisi pemilihan umum yang namanya belum tentu Komisi Pemilihan Umum
 - E. Komisi Pemilihan Umum yang namanya KPU
4. Para siswa melalui kegiatan OSIS berencana membuat majalah dinding, di antaranya akan dimanfaatkan sebagai media komunikasi dan sarana kritik terhadap berbagai kebijakan sekolah. Akan tetapi, pimpinan sekolah dan para guru tidak memberikan izin terhadap kegiatan tersebut. Sikap pimpinan sekolah dan para guru dapat dikategorikan pengingkaran hak siswa dalam
 - A. memberikan suara
 - B. berekspresi
 - C. mengeluarkan pendapat
 - D. berorganisasi
 - E. berserikat dan berkumpul
5. Sering kita saksikan tindakan demonstran yang merusak fasilitas umum. Hal itu merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab warga negara yang keliru baik secara individual maupun kolektif, yaitu berupa pengingkaran terhadap kewajiban
 - A. menjunjung tinggi hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis
 - B. menjunjung tinggi pemerintah, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas
 - C. menjaga kelangsungan hidup bernegara menjadi kewajiban politis
 - D. menjaga dan membela kemerdekaan serta kehormatan bangsa dan negara
 - E. bela negara sebagai kewajiban warga negara tanpa harus menjadi anggota TNI/Polri
6. Perhatikan ilustrasi berikut ini!
Pelaksanaan demokrasi diatur dan diselenggarakan menurut UUD NRI Tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa

semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Ilustrasi tersebut menjelaskan prinsip demokrasi, yaitu

- A. demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa
 - B. demokrasi yang berkedaulatan rakyat
 - C. demokrasi dengan kecerdasan
 - D. demokrasi dengan kemakmuran
 - E. demokrasi dengan hak asasi manusia
7. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi pemerintah berdasarkan konstitusi. Berikut yang merupakan bentuk partisipasi atau aspirasi rakyat dalam demokrasi ialah
- A. anggota DPR membuat kebijakan atau peraturan bersama anggota DPD
 - B. anggota DPR membuat kebijakan tanpa melibatkan pemerintah
 - C. Presiden melalui para menterinya membuat kebijakan atau peraturan bersama dengan anggota DPR
 - D. Presiden melalui para menterinya membuat kebijakan atau peraturan tanpa melibatkan anggota DPR
 - E. Presiden membuat kebijakan bersama dengan menterinya
- B. *Pilihlah tiga jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda centang pada kolom yang tersedia!*
8. Perwujudan kedaulatan rakyat melalui demokrasi di Indonesia ialah dengan melakukan pemilihan umum. Kegiatan pemilihan umum di Indonesia pada tingkat pusat untuk memilih memilih
- DPD
 - DPRD
 - MPR
 - DPR
 - MA
 - MK
 - PRESIDEN

9. Beberapa unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai potensi unggul untuk dikembangkan dalam upaya mewujudkan tujuan negara ialah
- Wilayah teritorial NKRI
 - Warga negara berperan aktif
 - Sistem pemerintahan yang akuntabel
 - Hubungan dengan negara lain
 - Internalisasi nilai-nilai ideologis Pancasila
 - Proses pemilihan yang demokratis
 - Kepercayaan pemimpin dan warga negara
10. Sikap yang harus ditunjukkan sebagai seorang pemilih pemula dalam ikut peran serta dalam pemilu ialah
- apatis
 - peduli
 - mandiri
 - jujur
 - berintegritas
 - acuh
 - etnosentris
11. Berikut ini yang termasuk dalam asas-asas pemilu ialah
- langsung
 - tidak terikat
 - mandiri
 - jujur
 - demokratis
 - adil
 - umum

- C. *Pilihlah benar atau salah pernyataan berikut ini dan berikan alasan yang tepat!*
12. Kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pandangan hidup yang telah lama dianut dan dijaga kelestariannya serta agar pandangan hidup tersebut ditaati oleh warganya melalui norma yang berlaku berdasarkan kesepakatan bersama.

Benar

Salah

Alasan

13. Perwujudan musyawarah mufakat dalam pelaksanaan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) melalui mekanisme pemilu.

Benar

Salah

Alasan

14. Demokrasi konstitusional menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerja sama yang erat di antara elite yang mewakilinya bagian budaya masyarakat utama.

Benar

Salah

Alasan

15. Secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Benar

Salah

Alasan



Pengayaan

Simak pemaparan dari Menkopolhukam RI melalui tautan berikut ini untuk menambah wawasan tentang mekanisme berdemokrasi melalui pemerintahan berbasis elektronik.

<https://buku.kemdikbud.go.id/s/jg4ctv>

diakses melalui youtube channel menko polhukam RI.

Kamu dapat mengakses tautan tersebut dengan scan barcode berikut.

Pindai Aku!



Glosarium

aktualisasi	konsep psikologis, yang merujuk pada proses mencapai potensi maksimal seseorang dalam segala aspek kehidupan.
amandemen	perubahan resmi dokumen resmi
analisis	penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
ASIK	sebuah akronim tentang prosedur untuk mencegah tergerus dalam isu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara melalui alur Analisis, Sesuaikan, Inisiatif, dan Kembangkan.
bangun	proses membuat bentuk dari rancangan
demokratis	sifat yang timbul dari tindakan atau situasi demokrasi
entitas	satuan yang berwujud; wujud
gagasan solutif	ide atau konsep yang dapat menyelesaikan suatu masalah
harmonisasi	proses atau upaya untuk menuju keselarasan
ho-lopis kuntul-baris	tolong-menolong dan gotong royong
inisiatif	memprakarsai sebuah tindakan dalam mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terkadang dianggap lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
internalisasi	penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku.
kembangkan	mengembangkan inisiatif dari hal yang paling mudah dilakukan sampai dengan sanggup mencegahnya sesuai dengan peran yang dimiliki di masyarakat.
kemufakatan	mufakat/sepakat

kewajiban warga negara	hal yang wajib muncul karena ingin memenuhi hak sebagai anggota suatu negara.
konsekuensi	hasil dari tindakan maupun situasi tertentu
konsensus	kesepakatan kata atau permufakatan bersama
mekanisme	suatu tata cara untuk melakukan suatu hal tertentu
merancang	membuat rangkaian kerja secara berurutan sebelum dibuat menjadi sebuah karya, kinerja, maupun pengorganisasian sesuatu.
milenial	generasi yang lahir pada 1981-1996 (saat ini berusia 24-39 tahun)
model	pola atau tata cara dalam melakukan tindakan agar sesuai dengan tujuannya
Nawacita	istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, nawa (sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan)
otonom	kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri
otoritas	kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya.
pelanggaran hak	perilaku, ucapan, sikap yang menghalangi, merusak, mencabut kehendak orang lain.
pengingkaran kewajiban	perilaku, ucapan, sikap yang tidak sesuai dengan yang seharusnya
permasalahan	peristiwa yang dianggap meresahkan sehingga harus diperhatikan untuk diselesaikan
pluralis	kategori jumlah yang menunjukkan lebih dari satu atau lebih dari dua dalam bahan yang mempunyai dualis
rancang	proses menyusun rencana
ranumkan	akronim untuk alur pembelajaran rancang, bangun, dan menerapkan
regulator	alat pengatur
representasi	perbuatan atau tindakan untuk mewakili sesuatu atau hal
rotasi	gerak perputaran suatu benda pada porosnya seperti halnya roda yang berputar

sesuaikan	klarifikasi dengan cara menyesuaikannya berdasarkan peraturan yang berlaku tentang hak dan kewajiban warga negara.
sinambung	suatu kejadian yang terus-menerus.
spontan	serta merta, tanpa dipikir, atau tanpa direncanakan lebih dulu; melakukan sesuatu karena dorongan hati, tidak karena anjuran
statis	dalam keadaan diam (tidak bergerak, tidak aktif, tidak berubah keadaannya)
terapkan	aksi yang dilakukan atas bentuk yang telah dirancang
tulen	sejati, tulen/tidak tercampur
urgensi	sesuatu hal yang sangat penting

Daftar Pustaka

- Adams, Cindy. *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Alih Bahasa oleh Syamsul Hadi. Yogyakarta: Media Pressindo, 2019.
- Adha, Mohammad Mona dan Susanto, Erwin. "Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Bangsa." *Al Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan* Vol. 15, No. 1 (2020): 121-138.
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/adabiya/article/view/319/273>
- Admin Humas. "Polisi Berhati Mulia, Kaporsek Wonomerto Menolong Pemulung yang Tersesat." *Tribata News*, 21 Januari, 2023.
<https://tribratanews.probolinggokota.jatim.polri.go.id/21/01/2023/polisi-berhati-mulia-kaporsek-wonomerto-menolong-pemulung-yang-tersesat/>
- Admin Portal. "Tingkatkan Pelayanan Angkutan Barang di Laut, Kemenhub Tambah Dua Trayek Tol Laut di Tahun 2022." *Direktorat Jenderal Perhubungan Laut*, 6 Januari, 2022.
<https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/10917/tingkatkan-pelayanan-angkutan-barang-di-laut-kemenhub-tambah-dua-trayek-tol-laut-di-tahun-2022>
- Andriyanto, Dian. "Bom Bali 12 Oktober 2022 Tewaskan 202 Orang." *Tempo.com*, 12 Oktober, 2021.
<https://nasional.tempo.co/read/1516501/bom-bali-12-oktober-2002-tewaskan-202-orang-amrozi-mengaku-sebagai-pelaku>
- Angg007. "Tol Laut, Wujudkan Indonesia Sentris." *Kominfo*, 27 Mei, 2016.
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/7525/tol-laut-wujudkan-indonesia-sentris/0/infografis>
- Arinanto, Satya. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 1994.
- BPIP RI. *Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila*. Jakarta: BPIP, 2022.
- BPIP RI. *Pancasila Dialektika dan Masa Depan Bangsa*. Jakarta: BPIP, 2019.
- Bung Karno. *Pantjasila Dasar Filsafat Negara-Kursus Bung Karno*. Jakarta: Jajasan Empu Tantular, 1960.
- Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI. "Film Pendek Profil Pelajar Pancasila: Langit Tak Selamanya Abu-Abu." *Youtube*, 18 September, 2021.
<https://www.youtube.com/watch?v=NhFZfIh5mZ4>
- Dewi H, Clara Maria Tjandra. "Anak Tukang Becak Miskin Tidak Dilarang Sukses." *Tempo.co*, 12 Juni, 2014.
<https://nasional.tempo.co/read/584324/anak-tukang-becak-miskin-tidak-dilarang-sukses>

- Direktorat Jenderal Pajak. *Pajak itu Gampang Loh*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2009.
- Direktorat SMA. "Film Pendek: Aku Penggerak Mimpi." *Youtube*, 12 Desember, 2020.
<https://www.youtube.com/watch?v=S8Sri0U6qWo>
- Direktorat SMA. "Film Pendek: Aku Penggerak Mimpi 2." *Youtube*, 12 Desember, 2021.
<https://www.youtube.com/watch?v=H4va2PLeWGY>
- Direktorat SMA. "Penilaian Portofolio Kerja." *Youtube*, 12 Agustus, 2021.
<https://www.youtube.com/watch?v=gtBH7LLb2Ms>
- Editorial. "Menyelamatkan Institusi Polri." *Media Indonesia*, 9 Agustus, 2022.
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2730-menyelamatkan-institusi-polri
- Effendi, Masyhur. *Hak Asasi Manusia: Dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Fauzan, Achmad. *Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Prenada Mulia, 2005.
- Fauzi, Agus Machfud. *Potret PPKM Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2021.
- Gatra, Sandro. "Pecalang Ikut Amankan Shalat Id di Denpasar." *Kompas.com*, 6 Juli, 2016.
<https://regional.kompas.com/read/2016/07/06/10043551/pecalang.ikut.amankan.shalat.id.di.denpasar>.
- Hakim, Arif Rahman. *Pedoman Pendidikan Pemilih*. Jakarta: KPU RI, 2015.
- Handoko, Doddy. "Kisah Kesederhanaan Bung Hatta: Tak Mampu Bayar Listrik, Sepatu Bally Tidak Terbeli hingga Akhir Hayat." *INews*, 22 Februari, 2022.
<https://www.inews.id/news/nasional/kisah-kesederhanaan-bung-hatta-tak-mampu-bayar-listrik-sepatu-bally-tidak-terbeli-hingga-akhir-hayat>
- Hatta, Muhammad. *Pancasila Jalan Lurus*. Bandung: Penerbit Angkasa 1966.
- Huda, UU Nurul. *Hukum Lembaga Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Indrawan, Yana. *Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018.
- Isharyanto. *Hukum Kelembagaan Negara: Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.
- Isharyanto. *Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: Penerbit Wr, 2016.
- Ismanto, Geri dkk. *Pendidikan Pancasila*. Pekanbaru: Mulia Indah Kemala, 2012.
- Jambeck, Jenna. "Setiap Orang Harus Kurangi Sampah Plastik." *Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik*, 16 Juni, 2017.
<https://dietkantongplastik.info/jenna-jambeck-setiap-orang-harus-kurangi-sampah-plastik/>
- Juliyanti, Rina dan Azizah, Nur. "Motivasi Pilihan Karier bagi Remaja pada Masa Pandemi Covid-19." *Anterior Jurnal* Volume 20, Issue 2, (April 2021): 119-126.
<https://media.neliti.com/media/publications/365761-none-8e15236e.pdf>

- Kemendikbud RI. "Aku Kamu Dia dan Pancasila Bagian 2: Berkarya dengan Gotong Royong." *Youtube*, 2 Juni, 2020.
<https://www.youtube.com/watch?v=FBBGW-4v7kU>
- Kemenko Polhukam RI. "Press Update Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik." *Youtube*, 23 Desember, 2022.
<https://www.youtube.com/watch?v=PyigHB32bME>
- Kementerian Keuangan RI. *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*. Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, 2012.
- Kementerian Keuangan RI. *Susunan Dalam satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, 2012.
- Ki Hajar Dewantara. *Pantjasila*. Jogja: CV Oesaha Penerbitan Indonesia, 1950.
- KPU RI. "Panduan KPPS Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 (Dalam Negeri)." *Youtube*, 14 April, 2019.
<https://www.youtube.com/watch?v=XOqNTqFkkec>
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- Lasabuda, Ridwan. "Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. "Jurnal Ilmiah Platax Vol. 1, No.2 (Januari 2013): 92-101.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/platax/article/view/1251>
- Maaroef, Muhammad Hilman Anfasa. "Persekusi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Media Iuris* Vol. 4, No. 1 (Februari 2021): 61-72.
<https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/24685/pdf>
- Masduki, Damayanti dkk. *Pengalaman Pemilih Pemula di Belantara Informasi Pilpres 2019*. Sukabumi: Haura Publishing, 2021.
- Moendoeng, Nathania Griseldis Kirsten. "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945." *Lex Et Societatis* Vol. VII, No. 7 (Juli 2019): 43-52.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/26840>
- MPR RI. *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006.
- MPR RI. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006.
- Multimedia DKV Usakti. "5 Menit Video Tutorial-Teknik Presentasi yang Baik dan Benar (Episode 2)." *Youtube*, 6 Juni, 2018.
<https://www.youtube.com/watch?v=Rf7dEbOhDqU>
- Oktafian, Ilham. "Tiko Cerita Awal Mula Rawat Ibu Eny 12 Tahun di Rumah Mewah Tanpa Listrik." *Detiknews*, 5 Januari, 2023.
<https://news.detik.com/berita/d-6499507/tiko-cerita-awal-mula-rawat-ibu-eny-12-tahun-di-rumah-mewah-tanpa-listrik>.

- Paat, Lianthy Nathania. "Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016." *Lex Crimen* Vol. IX, No. 1 (Januari-Maret 2020): 13-23.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28529/27881>
- Panitia Lima. Mohammad Hatta, Ahmad Soebardjo Djojoadisurjo, A. A Maramis, Sunario, A. G. Pringgadigdo. *Uraian Pancasila cetakan ke II*. Jakarta: Mutiara, 1977.
- Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Permana, Dian Ade. "Empati kepada Teman Sebaya, Siswa TK kumpulkan Koin untuk Korban Bencana." *Kompas.com*, 7 Desember, 2022.
<https://regional.kompas.com/read/2022/12/07/120901678/empati-kepada-teman-sebaya-siswa-tk-kumpulkan-koin-untuk-korban-bencana>.
- Rahman, M.T. *Glosari Teori Sosial*, Bandung: Ibnu Sina Press, 2011.
- Rangga. "Kisah Refa Nurtantiawati, Sulung yang Pintar dan Taat Beribadah." *Bumi Serumpun Sebalai babelprov.go.id*, 5 Oktober, 2021.
<https://serumpun.babelprov.go.id/kisah-refa-nurtantiawati-sulung-yang-pintar-dan-taat-beribadah>
- Redaksi. "Amankan Mudik, Pramuka Rela Lebaran di Jalan." *Suaramerdeka.com*, 14 Juni, 2018.
<https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-0454274/amankan-mudik-pramuka-rela-lebaran-di-jalan>
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca-Amandemen IV*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2000.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2000.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2002.
- Riyanto, Astim. *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo, 2000.
- Santoso, Tri Wahyu Aji , Anang Anas Azhar, Fakhrur Rozi. "Eksistensi Solidaritas Putera Solo Di Kota Medan." *Sibatik Jurnal Volume* , No.12 (2022): 2977-2987.
<https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/486/419>
- Sekretariat Kabinet RI. "Keterangan Pers Presiden Joko Widodo tentang Pemindahan Ibu Kota." *Youtube*, 26 Agustus, 2019.
<https://www.youtube.com/watch?v=3-dytQAg4gk>
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 28 Mei -22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.

- Setyawan, Nathanael Bagas dan Arifin, Ridwan. "Analisis Perlindungan Terhadap Toleransi Kebebasan Beragama Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Nurani* Vol 1, No.1 (Juni 2019): 27-34.
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/3100/2245>
- Sidauruk, Elida M. "Makna HAM Sedunia." *Jurnal HAM*. 3, (3), (2014): 1-8.
- Soerjono Soekanto. *Budaya dan Pengetahuan*. Jakarta : Rineka Cipta, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Soekarno. *Tjamkan Pantjasila: Pantjasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1964.
- Subagyo. "Pengembangan Nilai dan Tradisi Gotong Royong dalam Bingkai Konservasi Nilai Budaya." *Indonesian Journal of Conservation* Vol 1, No. 1 (2012): 61-68.
- Sukarno. *Lahirnya Pantja Sila: Boeng Karno Menggembung Dasar-Dasar Negara*. Yogyakarta: Oesaha Penerbitan Goentoer, 1947.
- Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*. Malang: UMM Press, 2002.
- Suradinata, Ermaya. *Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa dalam Kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2019.
- Suriyanto. "Empat Pelanggaran di Tolikara Versi Komisi HAM." *CNN Indonesia*, 10 Agustus, 2015.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150810095735-20-71046/empat-pelanggaran-di-tolikara-versi-komnas-ham>
- Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Jakarta Press, 2000.
- Tjahyadi, Indra dkk. *Kajian Budaya Lokal*. Lamongan: Pagan Press, 2019.
- Umasugi, Ryana Aryadita. "Wagub DKI Sayangkan Perusakan Fasilitas Umum Saat Aksi Tolak UU Cipta Kerja." *Kompas.com*, 10 Oktober, 2020.
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/09/16312001/wagub-dki-sayangkan-perusakan-fasilitas-umum-saat-aksi-tolak-uu-cipta?lgn_method=google
- Wicaksono, Adi Luhur dan Soponyono, Eko. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Diskriminasi Rasial Dengan Perspektif Pancasila." *Jurnal Belo* Vol. 8, No. 1 (Februari 2022): 49-66.
<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/5449/3939>
- Yanto, Dwi. "Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan* Volume 14, No.25 (April 2016): 35-45.
<https://core.ac.uk/download/pdf/327228213.pdf>

Daftar Sumber Gambar

- Gambar 1.1 diunduh dari <https://edukasi.sindonews.com/read/873003/212/15-sma-terbaik-di-malang-berdasarkan-nilai-utbk-2022-adasekolahmu-1662016145> pada 20 Maret 2023 pukul 11.23 WIB
- Gambar 1.2 diunduh dari <https://sidogede.kec-prembun.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/82> pada 23 Mei 2023 pukul 20.12 WIB
- Gambar 1.3 diunduh dari <https://www.kompas.id/baca/opini-publik/2022/06/02/menguatkan-nilai-nilai-pancasila> pada 20 Mei 2023 pukul 21.15 WIB
- Gambar 1.4 diunduh dari *Sumber:* <https://unsplash.com/photos/LopyVUb8QJI> pada 23 Mei 2023 pukul 20.20 WIB
- Gambar 1.5 diunduh dari <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/sekolah-tunas-bangsa-rayakan-natal> pada 7 Mei 2023 pukul 12.34 WIB
- Gambar 1.6 diunduh dari <https://smanegeri1nogosari.sch.id/siswa-sma-negeri-1-nogosari-peduli-lingkungan/> pada 23 Mei 2023 pukul 20.40 WIB
- Gambar 1.7 diunduh dari *Sumber:* <https://smaalhikmah2.sch.id/kerjabakti-sebagai-sarana-membangun-royek-pengutan-pelajar-pancasila-di-sma-al-hikmah-sirampog/> pada 23 Mei 2023 pukul 21.01 WIB
- Gambar 1.8 diunduh dari <https://sman1sumberpucung.sch.id/bulatkan-tekad-satukan-niat-ldk-osis-smaloka-bentuk-siswa-yang-siap-mengemban-amatan/> pada 23 Mei 2023 pukul 21.18 WIB
- Gambar 1.9 diunduh dari <https://sman1ambarawa.sch.id/berita/pembiasaan-karakter-peduli-sesama-melalui-program-berbagi-takjil> pada 23 Mei 2023 pukul 21.30 WIB
- Gambar 1.11 diunduh dari <https://beritabangsa.id/2023/01/13/mengintip-pelajar-lintas-agama-di-jombang-dalam-membatik-toleransi-saat-haul-gus-dur/> pada 23 Mei 2023 pukul 21.35 WIB
- Gambar 1.12 diunduh dari <https://www.brilio.net/duh/kisah-haru-di-balik-7-potret-anak-sma-bantu-dorong-gerobak-pemulung-1805319.html> pada 19 Juni 2023 pukul 09.25 WIB
- Gambar 1.13 diunduh dari <https://www.nawabhakti.sch.id/read/127/kegiatan-bakti-sosial-sebagai-metode-mempuk-rasa-peduli-ke-sesama-bagi-siswa-smk-nawa-bhakti-kebumen> pada 23 Mei 2023 pukul 21.38 WIB
- Gambar 1.14 diunduh dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13206/Jangan-Mudah-Termakan-Hoax-Saring-Sebelum-Sharing.html> pada 23 Mei 2023 pukul 22.08 WIB
- Gambar 2.4 diunduh dari <https://indonesiabaik.id/infografis/siapkah-kamu-jadi-generasi-emas-2045> pada 24 Mei 2023 pukul 14.08 WIB
- Gambar 2.5 diunduh dari <https://katadata.co.id/padjar/infografik/5ff58476a1b65/masyarakat-adat-cermin-kemajemukan-indonesia> pada 24 Mei 2023 pukul 16.30 WIB

- Gambar 2.6 diunduh dari <https://indonesiabaik.id/index.php/infografis/indonesia-punya-biodiversitas-terbesar-di-dunia> pada 24 Mei 2023 pukul 17.08 WIB
- Gambar 2.7 diunduh dari <https://indonesiabaik.id/index.php/infografis/kekuatan-militer-indonesia> pada 24 Mei 2023 pukul 17.30 WIB
- Gambar 2.8 diunduh dari <https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/infografik/5e9a5182bb9a6/pariwisata-indonesia-melesat> pada 15 Maret 2023 pukul 23.05 WIB
- Gambar 2.9 diunduh dari <https://mediaindonesia.com/ekonomi/346203/belanja-sdm-tingkatkan-indeks-modal-manusia> pada 20 Maret 2023 pukul 17.05 WIB
- Gambar 2.10 diunduh dari <https://theprakarsa.org/1-apakah-sdm-indonesia-siap-bersaing-2/> pada 20 Maret 2023 pukul 20.35 WIB
- Gambar 2.11 diunduh dari <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a554f2ea73/pusat-ekonomi-nasional-masih-di-jawa> pada 21 Maret 2023 pukul 04.30 WIB
- Gambar 2.12 diunduh dari <https://www.ajnn.net/news/tren-kerugian-negara-dari-korupsi-meningkat/index.html> pada 21 Maret 2023 pukul 06.25 WIB
- Gambar 2.13 diunduh dari <https://www.liputan6.com/news/read/2627947/laporan-pungli-terbanyak-ada-di-instansi-ini> pada 21 Maret 2023 pukul 13.30 WIB
- Gambar 2.14 diunduh dari <https://kalteng.inews.id/berita/deretan-gempa-bumi-terdahsyat-di-indonesia> pada 21 Maret 2023 pukul 16.04 WIB
- Gambar 2.15 diunduh dari <https://bnpb.go.id/infografis/infografis-bencana-tahun-2022> pada 22 Maret 2023 pukul 13.35 WIB
- Gambar 3.2 diunduh dari <https://www.fokus.co.id/969-2/> pada 20 Maret 2023 pukul 22.20 WIB
- Gambar 3.6 diunduh dari https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soekarno_1959.jpg pada 1 Juni 2020 pukul 17.08 WIB
- Gambar 3.11 digambar dari aslinya yang termuat di voicesofyouth.org
- Gambar 3.12 digambar dari aslinya yang termuat di m.batamtoday.com
- Gambar 3.13 digambar dari aslinya yang termuat di triyasni/liputan6.com
- Gambar 4.1 diunduh dari <https://unsplash.com/photos/yAGNjU4rtss> pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 21.15 WIB
- Gambar 4.2 digambar dari aslinya yang termuat di kompas.com
- Gambar 4.3 hasil pindai dari buku *Pantjasila : dasar filsafat negara / Soekarno (Bung Karno)*, Jakarta: Empu Tantular, 1960.
- Gambar 4.5 diunduh dari <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Naar-beide-zijden-front.jpg> pada 22 Maret 2023 pukul 23.45 WIB
- Gambar 4.6 hasil pindai dari buku *Uraian Pancasila* cetakan ke II, Panitia Lima, Jakarta: Mutiara, 1977.

- Gambar 1 (Uji Kompetensi bab 4) diunduh dari <https://www.serangtimur.co.id/2019/07/kanit-laka-lantas-polda-banten-ipda.html> pada 22 Maret 2023 pukul 20.30 WIB
- Gambar 5.1 Ir Sukarno Sedang Berpidato bersumber dari dokumentasi perpusnas RI yang diunduh pada tanggal 12 Maret 2023 pukul 10.59 wita
- Gambar 5.2 diunduh dari <https://sindikasi.republika.co.id/berita/r26vp6330/operasional-tpa-terganggu-sampah-di-bandung-tak-terangkut> pada tanggal 12 Maret 2023 pukul 16.13 wita
- Gambar 5.3 digambar dari aslinya yang termuat di <https://www.alinea.id/search?q=sampah> pada tanggal 12 maret 2023 pukul 16.18 wita
- Gambar 5.4 diunduh dari <https://m.kominfo.go.id/content/detail/7538/operasikan-6-trayek-tol-laut-negara-siap-hadir-di-nusantara/0/infografis> pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 14.56 wita
- Gambar 5.5 diunduh dari <https://www.shutterstock.com/id/image-photo/people-watching-video-live-streamings-1338120284> pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 15.26 wita
- Gambar 5.6 diunduh dari <https://www.antaranews.com/berita/611778/wali-kota-ingin-adopsi-rumah-panggung-khas-bekasi> pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 17.26 wita
- Gambar 5.8 Tangkapan layar dari laman youtube kemebedikbud RI bersumber dari <https://www.youtube.com/watch?v=FBBGW-4v7kU> ditangkap pada tanggal 7 April 2023 pukul 11.02 wita
- Gambar 6.1 diunduh dari <https://news.detik.com/berita/d-3432828/di-area-istana-bogor-raja-salman-akan-tanam-pohon-bersama-jokowi> pada tanggal 23 februari 2023 pukul 20.30 wita.
- Gambar 6.2 digambar dari aslinya yang termuat pada Materi bahan tayang sosialisasi 4 Pilar MPR RI pada tanggal 31-8-2020
- Gambar 6.3 diunduh dari <https://idea.grid.id/read/09705165/3-material-ini-bisa-bikin-pembangunan-rumah-jadi-lebih-cepat-selesai> pada tanggal 24 februari 2023 pukul 16.00 wita
- Gambar 6.4 diunduh dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6415714/sejarah-gedung-dprmpr-dikira-mirip-kura-kura-tapi-ternyata> pada tanggal 24 februari 2023 pukul 20.21 wita
- Gambar 6.5 diunduh dari <https://www.bi.go.id/id/layanan/default2.aspx> pada tanggal 3 April 2023 pukul 03.09 wita
- Gambar 6.6 diunduh dari <https://www.antarafoto.com/id/view/1180676/pembatalan-kenaikan-iuran-bpjts-kesehatan> pada tanggal 3 April 2023 pukul 03.10 wita
- Gambar 6.8 diunduh dari <https://setkab.go.id/pp-no-83-2019-penyedia-jasa-bidang-perdagangan-jasa-wajib-sediakan-tenaga-teknis-yang-kompeten/> pada tanggal 25 Februari 2023 Pukul 16.00 WITA

- Gambar 6.9 diunduh dari <https://www.antaranews.com/berita/984948/mengenal-koopsus-pasukan-elit-baru-tni> pada tanggal 03 April 2023 pukul 03.13 wita.
- Gambar 6.10 diunduh dari <https://bpip.go.id/> pada tanggal 03 April 2023 pukul 03.15 wita
- Gambar 6.11 diunduh dari <https://www.suara.com/news/2021/04/03/214013/bin-mabes-polri-sudah-tahu-ada-ancaman-teror-sejak-januari-2021> pada tanggal 03 April 2023 pukul 03.16 wita.
- Gambar 1 (Uji Kompetensi Bab 6) diunduh dari <https://m.kominfo.go.id/content/detail/5640/saatnya-kembangkan-potensi-pariwisata-indonesia/0/infografis> pada tanggal 5 April 2023 Pukul 10.10 WITA
- Gambar 6.12 diunduh dari <https://www.youtube.com/watch?v=3-dytQAg4gk> tangkapan layar pada tanggal; 26 februari pukul 04.31 wita
- Gambar 7.1 diunduh dari <https://historia.id/politik/articles/aparat-keamanan-dalam-pemilihan-umum-P0rWD/page/1> pada tanggal 27 februari 2023 pukul 20.16 wita
- Gambar 7.2 diunduh dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:Pancasila_Sila_4_Buffalo's_Head.svg pada tanggal 28 februari 2023 pukul 10.24 wita
- Gambar 7.3 diunduh dari <https://nasional.okezone.com/read/2022/02/02/337/2541419/banyak-yang-terpapar-covid-19-tiga-area-di-dpr-lockdown> pada tanggal 19 Maret 2023 pukul 00.01 wita
- Gambar 7.6 diunduh dari <https://news.detik.com/pemilu/d-6468388/sekjen-kpu-bantah-ancam-kpu-daerah-untuk-ubah-status-verifikasi-parpol> pada tanggal 1 Maret 2023 Pukul 23.29 wita
- Gambar 7.7 diunduh dari <https://indonesiabaik.id/public/uploads/post/3052/Booklet2-Tata-Cara-dan-Sejarah-Pemilu-Indonesiabaik-290319-pages.pdf> pada tanggal 1 Maret 2023 Pukul 21.35 wita
- Gambar 7.8 Gambar Grafik Pemilih pada tahun 2014-2020 bersumber dari <https://kpu.go.id/datapokok> <https://setkab.go.id/tingkat-partisipasi-pemilih-dan-pengambilan-kebijakan-di-indonesia/> diunduh pada tanggal 19 Maret 2023 pukul 16.39 wita
- Gambar 7.9 diunduh dari <https://www.kompasiana.com/mjr/64a3e561e1a1673200399822/generasi-paling-tersesat-di-tahun-politik-2024> pada tanggal 19 Maret 2023 pukul 17.07 wita
- Gambar 7.10 hasil pindai dari buku *Pedoman Pemilih KPU* ditangkap pada tanggal 03 April 2023 pukul 03.46 wita
- Gambar 7.11 diunduh dari <https://www.youtube.com/watch?v=PyigHB32bME> pada tanggal 4 Maret 2023 pukul 14.25 wita

Indeks

- A**
- alat 12-13, 83, 104-105, 145, 158, 164-167, 170-171, 174, 184, 208, 218
 - analisis xii, xiv, 10, 13, 36, 38-39, 48-49, 58, 63, 65-66, 70, 76, 78, 83, 89-92, 94-95, 102, 104, 106, 112, 116, 134, 160, 217
 - analisis swot xiv, 36, 38-39, 48-49, 58, 63, 65
 - ancaman xiv, 27, 38, 48, 56, 58, 63, 95, 98, 105, 135-136, 175, 183, 226
 - asik v-vi, xv, 14, 23, 26, 38, 47, 58, 64, 70, 81, 86-88, 91-92, 94, 100, 103, 110, 113, 128, 134, 136, 151, 158, 166, 184, 192, 201, 207, 209-210, 217, 225
- B**
- badan i, v, xvii, 113, 125, 166, 171, 177, 179-183, 187-188, 190, 193, 219-221, 231
 - bangun x, xv, xvii, 4, 27, 49-51, 53, 55, 68, 79, 84-88, 110, 114-115, 117, 123-125, 128-130, 136, 140, 144, 147-150, 158-161, 173-174, 189-190, 193, 206, 217-218, 221, 223, 225, 230, 233
 - bertentangan x, 3, 16, 36-37, 62, 70-71, 98-99, 105, 133, 135, 183
- D**
- demografi xiv, 36, 43, 65
 - demokrasi xi, 19, 41, 100, 166, 191-194, 197-200, 202, 204-207, 209-210, 212-213, 215-217, 220, 222
- E**
- empati 6, 10-11, 45, 73, 85-86, 110, 112, 115, 121, 153
- F**
- f u n d a m e n t a l i s m e pasar 60-61, 63
 - fungsi xi, 2, 63, 96, 155, 164, 166-168, 170-171, 173, 175-176, 178, 180-181, 183-184, 188-189, 218
- G**
- gagasan x, xii, 3, 20, 37, 60-61, 82-83, 88-89, 110-111, 124-126, 128-129, 132, 137-138, 156, 172, 197-198, 211, 217, 219
 - gotong royong x, xii, xiv, xvi, 4-5, 37, 49, 59, 82-83, 86, 92, 139-141, 143, 145, 147, 150-158, 160-161, 180, 196, 217, 221
- H**
- hak ii, vi, x-xii, xiv-xvii, 5-6, 8-9, 13, 17, 20, 28, 30, 41, 47, 59, 61-63, 65, 69-87, 89-90, 92-93, 96-107, 109-112, 116-120, 122-124, 127-138, 142, 148, 152, 154, 156, 164, 166, 170, 173, 177, 179, 183-184, 189, 191-193, 196-198, 200-202, 206-207, 209, 211-213, 217-220, 222-223
 - hoaks xiv, 18-19, 28-29, 106
 - human capital index 36, 49
- I**
- individualisme 35-36, 59, 63, 65, 113, 148
- J**
- inisiatif 70, 92-93, 211, 217
 - intoleransi xvi, 2, 35-36, 62, 94, 98-99, 104-105, 128-129, 131-132, 138
- K**
- kampanye x, xii, 70, 82-83, 102, 125, 138, 160, 204
 - karya xii, xv, 9, 21, 26, 57, 83-86, 88-89, 107, 110, 112, 124-126, 128, 131-132, 140, 161, 180, 217
 - kasus x, 6, 10-13, 15-16, 52, 63-64, 69-70, 73, 76, 78-79, 89-90, 92-95, 105-106, 109-110, 112, 116, 119, 125, 137-138, 171-172, 186, 188, 220
 - kedaulatan rakyat 41, 168, 192, 194-197, 200, 205, 210, 213, 215, 219-220
 - kekuatan v, ix, xiv, 36-40, 44-45, 47-48, 57-58, 63-68, 122, 152, 174, 180, 202, 212
 - kelemahan ix, xiv, 36, 38, 47-49, 56-58, 63-65, 67
 - kembangkan 8, 37, 40, 49, 70, 85, 92-93, 160, 214, 217
 - keragaman v, 44, 65
 - kesenjangan 51, 63
 - kewajiban vii, x, xii, xv-xvi, 8-9, 17, 20, 69-87, 89-90, 92-93, 100, 106-107, 109-112, 117-124, 128, 131-132, 137-138, 157, 183-184, 196, 211-212, 217-218, 220
 - k o s m o p o l i t a n i s m e xv, 36, 60, 113
- L**
- lembaga xi, xvii, 58, 74, 87, 102, 113, 142, 155, 163-171, 173-184, 186-190, 193, 195, 199-201, 208, 210, 218, 220
- M**
- masyarakat v-vii, ix-x, 1-2, 6-7, 9, 13, 18-25, 27-30, 37, 40, 43, 46, 51, 57-59, 61-63, 65, 73-74, 78-80, 83-85, 90,

- 93, 97, 99-100, 102-106, 113-114, 116-120, 129, 132-133, 136-143, 148, 150-158, 167, 171-173, 175-181, 183-184, 188, 197, 199, 205, 210-211, 214-215, 217-222, 229, 233
mencegah x, 17, 70, 83, 89, 92-93, 122, 124-125, 128-129, 132, 137-138, 186, 217
menerapkan v, x, 25, 39, 48, 66, 88, 94, 110, 116, 123-126, 128, 130, 218, 229
mengatasi x, 3, 37, 41, 48-49, 109-111, 118, 123-124, 128, 132, 138, 178, 184
menginisiasi x, 5, 70, 82, 158
merancang x, 2, 110-111, 123, 125, 129, 140, 217
model x, xvi, 10, 38, 110, 123, 153, 218, 229, 232-233
N
nilai v-vii, x, xii-xiii, xviii-xix, 2-4, 6-10, 14-16, 20-25, 27, 29-33, 36-37, 46-47, 58-63, 66, 68, 72-73, 76-79, 83-89, 91, 94, 98-99, 103-104, 111-116, 118-119, 125-126, 128, 130, 140-141, 146-148, 150, 152-154, 156-157, 159-160, 166-167, 171-172, 174-176, 192, 194, 197-198, 202, 204-205, 207, 210, 214, 217, 220-221, 229, 232-233
P
pelanggaran x, xii, 59, 69-72, 74, 76, 78-79, 82-84, 89-90, 92-93, 99-100, 103-107, 109-113, 116-118, 122-124, 127-129, 132, 134, 137-138, 188, 217-220
peluang ix, xiv, 18, 36-40, 45, 47-48, 57-59, 63-64, 66-67
pemandu ix, 16, 36, 58, 62, 68
pemilih pemula xi, 191-192, 194, 205-207, 210, 214, 221
pengamalan xiv, 2-3, 6-7, 10, 14-21, 26, 28, 30, 33, 63-64
pengingkaran x, xii, 69-72, 74, 76, 78, 82-84, 89-90, 92-93, 100, 106-107, 109-113, 118-120, 122-124, 128, 132, 137-138, 212, 217-218
peran v, xi, xv, xvii, 35-37, 39-40, 58, 61, 64, 87, 93, 98, 100, 121, 129-130, 138, 164-167, 173, 175-184, 188, 193, 199, 204-205, 208, 210-211, 214, 217
perilaku 2-4, 7-8, 10, 14, 22-25, 27, 29, 31-32, 36-37, 56, 70-72, 81, 83, 95, 103-106, 126-127, 130, 132-133, 136-137, 141, 147-148, 150, 152, 157-158, 160-161, 167, 172, 205-206, 217-218
permasalahan x, 70, 92, 98, 110-111, 116, 118, 152, 154, 176, 184, 198, 211, 218
portofolio viii, ix, xiv, 2, 15-16, 23-27, 29-33, 37, 233
praktik vi-vii, x, xiii, xvi, 2-6, 10, 14-21, 23-24, 29, 33, 36, 62, 99, 127-128, 139-140, 142, 148, 155, 158-160, 177, 186, 192, 204, 232
presentasi xii-xiii, 2, 14, 23, 26, 38, 47, 58, 64, 83, 88, 91, 125, 151-152, 167, 195, 198, 201-202, 204, 218
proyek vii, x, xv, 43, 46, 70, 82-83, 125, 144-146, 158-159, 229
pungutan liar xv, 52, 54
R
radikalisme 35-36, 56, 61, 113, 233
rancang ix-x, xiv, 2, 24-26, 110-111, 123-125, 128-129, 140, 144, 185, 217-218
S
sesuaikan vii, xix, 15-16, 70, 92-93, 116, 119, 208, 217-218
solutif x, 3, 37, 109-111, 122, 217
T
tantangan ix, xvi, 28, 35-38, 47-49, 56-59, 62-67, 112-114, 119, 122, 157, 175
tradisi xvi, 3-6, 18, 36, 58, 129, 143, 155-157, 221, 225
U
upaya v, x, xvi, 13-14, 18-20, 38, 50, 70, 81, 89, 103, 119, 127-129, 143, 149, 172, 178-179, 182, 186, 189-190, 197, 202, 207, 210, 214, 217, 229, 232-233
W
warga negara vii, x, xii, xv-xvi, 16, 18-19, 43, 56-57, 61, 63, 65-66, 69-71, 73-87, 89-90, 92-93, 97-98, 100-104, 106-107, 109-114, 116-119, 122-123, 127, 129, 134-135, 137-138, 148, 171, 175, 183, 186, 191-193, 195-196, 200, 202, 204-207, 210, 212, 214, 217-218, 229

Profil Pelaku Perbukuan

Profil Penulis



Dr. Ida Rohayani, M. Pd.

Email : rohayani35@gmail.com
Instansi : SMA Negeri 3 Bandung
Alamat Instansi : Jalan Belitung no. 8 Bandung
Bidang Keahlian : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

■ Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Guru PPKn dan Sosiologi di SMA Negeri 3 Bandung (2008—sekarang)
2. Social and Culture di MBTI International Class Telkom University (2009—2014)
3. Pendidikan Pancasila di Telkom University (2020—sekarang)

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S1- PMPKN, FPIPS, IKIP Bandung (1999)
2. S2- PKn, SPS, UPI Bandung (2009)
3. S3- PKn, SPS, UPI Bandung (2019)

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Bunga rampai: Menerapkan Nilai Kesamaan Derajat Melalui Keterampilan Resolusi Konflik untuk Meningkatkan Taat Hukum Bermasyarakat. CV Aksara Glonal Akademia (2022)
2. eModul: Pembelajaran dan Penilaian Proyek Kolaborasi Antar Mata Pelajaran pada Rumpun IPA dan IPS di SMA. Direktorat PAUD, Dikdas, dan SMA Kemdikbud (2022)
3. Artikel: Mirror On The Wall Model For Civics Education Learning To Foster Conflict Resolution Skills. ICES-Tri Sakti University (2021)
4. Antologi cerita anak: Rio, Namaku Kaulan Syadida, 55 Cerita Islami Terbaik untuk Anak. Jendela Puspita. (2021)
5. Modul Pembelajaran SMA PPKn Kelas X. Kemdikbud-Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS, dan Dikmen, Direktorat SMA (2020)

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Penilaian Otentik melalui Keterampilan Resolusi Konflik dalam Pembelajaran PPKn sebagai Upaya Membentuk Karakter Warga Negara (2019)
2. Implementasi Course MOOC Pembelajaran Resolusi Konflik (2019)
3. Model Resolusi Konflik (2017)



Dwi Astuti Setiawan, S.Pd

Email : dwiasetiawan@gmail.com
Instansi : SMA N 2 LOA JANAN
Alamat Instansi : Jln. Ex Cita, Bakungan, Kutai Kartanegara
Bidang Keahlian : Pancasila dan Kewarganegaraan

■ Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Guru Mata Pelajaran PKn SMP YPK Bontang (2017 – 2019)
2. Guru Mata Pelajaran PKn SMA N 2 Loa Janan Kukar (2020 – sekarang)
3. Peneliti LinkDeham UNY (2013 – sekarang)

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S1- PKnH UNY (2016)

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Jurnal pendidikan dan kebudayaan, "Membangun Kaltim melalui Internalisasi Bahasa Daerah sebagai Mata Pelajaran Muatan Local" tahun 2018
2. Jurnal, "Ekologi Pembangunan Manusia Menyongsong Ibu Kota Nusantara", tahun 2020

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Penelitian Media Pembelajaran Interaktif dalam Pembelajaran PKn 2017
2. Penelitian Pembangunan Manusia Kaltim untuk Menyongsong Ibu Kota Nusantara Tahun 2020



Hatim Gazali

Email : hatim.gazali@sampoernauniversity.ac.id
Instansi : Universitas Sampoerna
Alamat Instansi : Jl. Pasar Minggu Kav 16 Pasar Minggu Jakarta Selatan
Bidang Keahlian : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan & Pendidikan Agama Islam

■ Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sampoerna (2011-sekarang)
2. Pemimpin Redaksi Islamina.id (2019-sekarang)
3. Tenaga Ahli Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan (2019)

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S1 UIN Sunan Kalijaga (2001-2006)
2. S2 Center for Religious and Cross-Cultural Studies, UGM (2008-2010)
3. S3 UIN Syarif Hidayatullah (2021-)

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Penulis, Islam untuk Gen-Z: Mengajarkan Islam & Mendidik Muslim Generasi Z (Wahid Foundation, 2019)
2. Penulis, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 10 (Kemendikbudristek, 2019)
3. Editor Buku, Dimensi Keagamaan Pangestu dan Rekognisi bagi Penganut Kejawen (Litbangdiklat Press Puslitbang Kementerian Agama 2023)

- Editor Buku, Survei Indeks Kesalehan Sosial (Litbangdiklat Press Puslitbang Kementerian Agama 2021)
- Editor Buku, Sertifikasi Halal sebagai Modal Simbolik Usaha Makanan & Minuman Khas Daerah (Litbangdiklat Press Puslitbang Kementerian Agama 2022)

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

- Artikel Jurnal, Perception of Catholic Lesson Among the Eleventh Grade Muslim Students at SMA Santa Theresia Jakarta. Al-Albab, Vol 5. No 1. June. 2016. Penulis Kedua
- Artikel Jurnal, Perempuan dalam Citra Ketidakadilan Gender: Kajian Feminis dan Resepsi Atas Kisah Yusuf dalam Serat Yusuf. Muwazah. Vol. 8 No. 2 Desember, 2016. Penulis Kedua
- Artikel Jurnal, Stereotip Antara Etnis Tionghoa dan Etnis Jawa pada Siswa SMA Santa Theresia. At. Turast. Vol. 3 No. 1. Januari-Juni, 2016. Penulis Kedua
- Artikel Jurnal, Toleransi Remaja Islam kepada Pemeluk yang Berbeda: Studi Ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) SMA di Bekasi, Jawa Barat. At.Tarbawi. Vol. 1 No 1, 2016. Penulis Kedua

Profil Penelaah



Prof. Dr. Kokom Komalasari, M.Pd.

Email : kokom@upi.edu
 Instansi : Universitas Pendidikan Indonesia
 Alamat Instansi : Jl. Dr. Setiabudhi 229 Bandung 40154
 Bidang Keahlian : Pendidikan Kewarganegaraan

■ Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

- Dosen Prodi PPKn FPIPS UPI (2001 s.d. sekarang)
- Anggota Tim Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Universitas Pendidikan Indonesia (2009-2014)
- Anggota Tim Komisi Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (2017 s.d. Sekarang)
- Sekretaris Dewan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (2017 s.d. 2021)
- Asesor Sertifikasi Dosen Kemdikbudristek (2019 s.d. sekarang)
- Sekretaris Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MDGB PTNBH) (2020-2021)
- Ketua Divisi Riset dan Pengembangan Asosiasi Pendidik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3KNI) Pusat (2017-2022 dan 2022-2027)
- Ketua Bidang Pendidikan dan Sumber Daya Insani Asosiasi Profesor Indonesia (AP) (2020-2024)

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

- S1: IKIP Bandung Jurusan PMPKn (1990 s.d. 1995)
- S2: IKIP Bandung Jurusan PLS (1996 s.d. 1999)
- S3: UPI Bandung Jurusan PIPS konsentrasi PKn (2005 s.d. 2009)
- Short Overseas Elementary Education Training Program: Better Education Through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading* (Bermutu) pada Huazhong Normal University, Wuhan, Hubei, Tiongkok (April s.d. Agustus 2010)

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Pendidikan Karakter: Konsep dan Aplikasi Living Values Education (2017)
2. Pengembangan Sumber Daya Insani Perguruan Tinggi (editor) (2019)
3. Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial terhadap Pengembangan Administrasi Pendidikan dalam Teori dan Praktik (Editor) (2018)
4. Ilmu Pendidikan, Pendidikan Bahasa dan seni di Era Revolusi Industri 4.0. (Editor) (2019)
5. Pendidikan Ilmu Sosial dan Ekonomi di Era Revolusi Industri 4.0. (editor), (2019)

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Model Pembelajaran PKn Berbasis *Living Values Education* untuk Pengembangan Karakter Mahasiswa, BOPTN UPI, (2013).
2. Pengembangan *Living Values Education* dalam Pembelajaran, Habitusi, dan Ekstrakurikuler untuk Pembentukan Karakter Peserta Didik", DP2M Dikti Kemendikbud, (2013-2015).
3. Bahan Ajar PKn Berbasis Nilai-Nilai Kehidupan (*Living Values*) untuk Mengembangkan Karakter Mahasiswa, UTU UPI, (2013).
4. Pengembangan Model Buku Teks PPKn SMP Berbasis *Living Values Education* untuk Pembentukan Karakter Peserta Didik, Kemristekdikti, (2016-2018)
5. Pengembangan Nilai-Nilai Multikulturalisme dalam Buku Teks Sejarah SMA, Kemristekdikti, (2015-2016)

**Dr. Sunarto, S.H., M.Si.**

Email : sunarto_pkn@mail.unnes.ac.id

Instansi : Universitas Negeri Semarang

Alamat Instansi : Kampus Unnes, Sekaran Gunungpati Semarang

Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S1- Jur. PPKn IKIP Semarang (Sekarang Unnes) Lulus Tahun 1985
2. S1- Ilmu Hukum Universitas Semarang Lulus Tahun 2011
3. S2- Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia Lulus Tahun 1994
4. S3- Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Lulus Tahun 2018

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Pengantar Hukum Tata Negara (2014)
2. Hukum Administrasi Negara (2015)
3. Sistem Politik Indonesia (2017)
4. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Ketentuan UUD NRI 1945 (2018)
5. Indonesia Sebagai Negara Hukum (2019).

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Inovasi Model Pendidikan Politik Berbasis Animasi sebagai Upaya Pencegahan Money Politics di Kabupaten Wonosobo (2022).

2. Pengembangan Model Inovasi Desa Anti Politik Uang dengan Pelibatan Partisipasi Masyarakat sebagai Upaya Pencegahan Money Politics di Kab. Wonosobo. (2021)
3. Inovasi Pencegahan Kecurangan Pemilu Serentak di Kabupaten Wonosobo (2020).
4. Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Tak Terbarukan (*Non Renewable Resources*) untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan (2019)
5. Preferensi Politik Mahasiswa dalam Kontestasi Politik 2019 (Penelitian di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang) (2019)
6. Pengembangan Instrumen Penilaian Karakter Peduli Sosial pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Semarang (2017)
7. Strategi Organisasi Keagamaan Mahasiswa dalam Menangkal Radikalisme Islam di Kampus UNNES (Anggota Peneliti) (2016).
8. Pengembangan Model Evaluasi Berbasis Portofolio pada Mata Kuliah Umum di UNNES (2014)

Profil Ilustrator



Nana Maulana, S.Sn.

Email : kartunaung@gmail.com
Instansi : -
Alamat Instansi : -
Bidang Keahlian : Menulis, Ilustrasi, Komik, Karikatur.

■ Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Percetakan Citra Kharisma Bunda (2011)
2. Kartunis Penerbit Gerrmedia Komik (2011-2015)
3. Guru Seni dan Budaya SMA BINTARA DEPOK (2015-2018)
4. Owner Bikindong Creative Studio (2017-Sekarang)

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S1 Universitas Indraprasta PGRI (2007-2011)

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Buku Komik Serba 90-an (2014)
2. Komik Siap Komandan (2013)

■ Penghargaan yang pernah diraih:

1. Juara 1 Lomba Komik Pembelajaran SD (2019)
2. Juara 2 Lomba Komik Polisi Nasional (2020)
3. Juara 2 Lomba Komik BCA (2018)
4. Juara 3 Lomba Komik PPATK (2020)
5. Juara 3 Lomba Komik Polisi Nasional (2019)
6. Juara 3 Lomba Komik Bank Indonesia (2021)

Profil Editor



Dr. Christina Tulalessy

Email : nonatula6@gmail.com

Instansi : -

Alamat Instansi : -

Bidang Keahlian : Narasumber Penulisan Buku, Kurikulum,
dan Evaluasi Pendidikan; Editor

■ Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Pusat Perbukuan 1988—2010
2. Pusat Kurikulum 2010--2021
3. Asesor Kompetensi Penulis dan Penyunting BNSP
4. Editor Pusat Perbukuan (1988--sekarang)
5. Editor lepas di beberapa penerbit

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan UNJ 2017
2. S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan UHAMKA 2006
3. S1 Tata Busana IKIP Jakarta 1988

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Penelitian Tindakan Kelas: Apa, Mengapa, Bagaimana: 2020

Profil Editor Visual



M Rizal Abdi

Email : kotakpesandarimu@gmail.com
Instansi : Center for Religious and Cross-cultural Studies,
Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada
Alamat Instansi : -
Bidang Keahlian : Kurikulum, Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Editor

■ Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Desainer. Hocuspocus Rekavasthu (2006-2012)
2. Desainer editorial dan ilustrator beberapa penerbit indie di Yogyakarta, Jakarta, dan California (2015-sekarang)
3. Editor lepas beberapa penerbit indie di Yogyakarta dan Jakarta (2017-sekarang)
4. Staf Pendidikan Publik, Center for Religious and Cross-cultural Studies, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada (2021-sekarang)

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S1 - Ilmu Komunikasi, Fisipol, UGM (2004)
2. S2 - Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS). Sekolah Pascasarjana UGM (2015)

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Indonesian Pluralities: a companion book, 2023 (Boston University)
2. Menjadi Hawa: Antologi Pengalaman Biologis dan Sosial Perempuan, 2022. Editor. (Penerbit Gading)
3. Buddhisme Militan, 2021. Editor. (Penerbit Gading)
4. Gerombolan Kucing Bandel, 2021, Editor. (Penerbit Pocer)
5. Bangga Jadi MD: 40 Tahun Bertumbuh, Berubah, dan Berinovasi. 2020. (Magister dan Doktor Ilmu-Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada)

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Mixed Mecca in Tembayat: Negotiating Sacred Spaces in Indonesian Islam, Asian Research Institute, National University of Singapore, 2022 (ARI-NUS)
2. Meneroka Luar-Dalam Wayang dan Gamelan dalam Aras Global", Jurnal Kawistara, Vol.9 No.1, 2019 (Sekolah Pascasarjana UGM)
3. "Christianity and Ecology: A Critical Study on the Contribution of Seventh Day Adventism Theology toward Ecology", bersama Ferry Goodman Pardamean. Jurnal Kawistara Vol. 8 (3), 2018 (Sekolah Pascasarjana UGM)
4. "Flock With God, Ally With Money: Ziarah Wali As Generator of Local Economy", Nizham Journal IAIN Metro Lampung Vol. 5 No.2, 2017 (Sekolah Pascasarjana IAIN Metro Lampung)
5. "Menera Ulang Sejarah Indonesia lewat Tiga Ranah". Jurnal Kawistara, Vol.7, No.1, 2017 (Sekolah Pascasarjana UGM)

Profil Desainer



Sona Purwana

Email : inisihsona@gmail.com

Instansi : -

Alamat Instansi : -

Bidang Keahlian : Desain Grafis

■ Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Setter, Percetakan Ragam Offset (2010—2022)
2. Freelancer (2022-sekarang)

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S1 Desain Komunikasi Visual, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, tahun lulus 2021